BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Dipindai dengan CamScanner

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPK adalah dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh yang disusun oleh kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman kabupaten dharmasraya yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.

Dipindai dengan CamScanner

5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan
7. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
8. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
9. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
10. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
11. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan setiap orang dalam melaksanakan penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru melalui perencanaan yang sistematis dan terpadu;
b. meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur yang berpedoman pada perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang jelas dan tegas; dan
c. menjamin kepastian hukum perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi:

a terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tidak bertambah; dan

b terlaksananya upaya peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat berkurang.

BAB II

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 5

RP2KPKPK merupakan dokumen yang memberikan arahan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh untuk jangka pendek dan menengah.

Pasal 6

Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun melalui tahapan:

a persiapan;
b survei;
c penyusunan data dan fakta;
d analisis;
e penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh; dan
f penyusunan RP2KPKPK.

Pasal 7

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi :
    a mengikuti kegiatan sosialisasi dan konsilidasi penyusunan RP2KPKPK;
    b melakukan koordinasi dengan pokja perumahan kawasan permukiman kabupaten untuk merumuskan rencana penyelesaian kegiatan;
    c melakukan persiapan dan pemantapan rencana kerja;
    d menyiapkan data profil permukiman kumuh yang terdiri dari garis dasar *(baseline)* data kumuh atau data statistik terkait;
    e melakukan penyiapan *(readiness)* kriteria penyusunan RP2KPKPK;
    f menyusun gambaran umum *(overview)* kebijakan Daerah dan identifikasi kesesuaian permukiman terhadap rencana tata ruang Daerah dan status tanah permukiman;dan
    g melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan masyarakat di tingkat kabupaten.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
   a melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data kumuh baik data primer maupun data sekunder bersama dengan pemangku kepentingan;
   b menyusun desain survei;
   c melaksanakan survei dan mengolah data;dan
   d menyusun daftar permukiman kumuh hasil survey dan pengolahan data kumuh

(3) Penyusunan data dan fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi kegiatan verifikasi dan indikasi justifikasi lokasi serta penyusunan profil Permukiman Kumuh.

(4) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi kegiatan melakukan proses pemutakhiran profil Permukiman Kumuh yang dilaksanakan melalui diskusi kelompok terbatas *(focus group discussion)* untuk verifikasi data.

(5) Penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumaban Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
   a merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan Permukiman Kumuh;
   b mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penanganan permukiman dengan pemangku kepentingan;
   c merumuskan kebutuhan penanganan kawasan Permukiman Kumuh;
   d merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas Permukiman Kumuh; dan
   e melaksanakan diskusi kelompok terbatas *(focus group discussion)* untuk menyepakati konsep dan strategi sesuai dengan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan, dengan adanya nilai tambah *(added value)*.

(6) Penyusunan RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
   a merumuskan skenario pentahapan pencapaian daerah bebas kumuh, desain kawasan dan tindak lanjut pengendalian;
   b merumuskan rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas dan memorandum keterpaduan program untuk skala Daerah, skala kawasan dan skala lingkungan;
   c menentukan skala prioritas penanganan Permukiman Kumuh berdasarkan kriteria kesiapan *(readiness criteria)*, penanganan pembangunan yang berkelanjutan dan pertimbangan lain;
   d merumuskan konsep tematik dan skenario pencegahan serta peningkatan kualitas kawasan prioritas;
   e menyusun rencana penyediaan tanah;
   f menyusun rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas; dan
   g melakukan perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas bersama pemangku kepentingan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

Penyusunan dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, swasta dan masyarakat.

BAB III
LINGKUP WILAYAH DAN MATERI RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 9

(1) RP2KPKPK disusun dalam dokumen dengan sistematika:
   a Bab I memuat pendahuluan;
   b Bab II memuat kajian kebijakan pembangunan permukiman perkotaan;
   c Bab III memuat profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
   d Bab IV memuat permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
   e Bab V memuat konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
   f Bab VI memuat rencana pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
   g Bab VII memuat rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
   h Bab VIII memuat rencana penyediaan tanah;
   i Bab IX memuat rencana investasi dan pembiayaan;
   j Bab X memuat rumusan peran pemangku kepentingan; dan
   k Bab XI memuat penutup.

(2) RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui pola-pola penanganan berupa pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali, pemeliharaan, perbaikan, pembangunan skala lingkungan dan skala kawasan pada deliniasi lokasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati serta pembentukan kelembagaan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 15 Juli 2025

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 15 Juli 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

YEFRINALDI

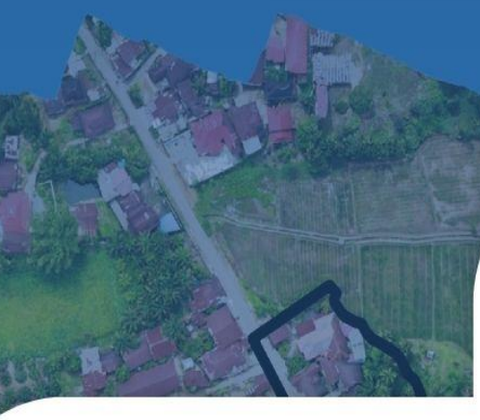
BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025 NOMOR 21

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
SUNGAI KAMBUT, KEC. PULAU PUNJUNG

RP2KPKPK

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH











KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025-2029

TAHUN 2025

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR .. TAHUN 202.. TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
(RP2KPKPK) KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN 2025-2029

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (RP2KPKPK) KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025 - 2029

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Dokumen Kedua Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Dharmasraya. Dokumen ini memuat berbagai informasi penting, meliputi latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan penyusunan, gambaran umum wilayah Kabupaten Dharmasraya, arah kebijakan serta strategi dan program pembangunan daerah, profil kawasan perumahan dan permukiman kumuh, identifikasi permasalahan yang ada, serta konsep pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh.

Diharapkan dokumen ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, khususnya dalam mendukung pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam upaya penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya.

Dharmasraya, Juli 2025

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG 1-1
1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 1-4
1.2.1 Maksud 1-4
1.2.2 Tujuan 1-4
1.2.3 Sasaran 1-5
1.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN 1-5
1.3.1 Ruang Lingkup Substansi 1-5
1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah 1-6
1.4 LANDASAN HUKUM 1-6
1.5 KEDUDUKAN DOKUMEN RP2KPKPK DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN KABUPATEN DHARMASRAYA 1-7
1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN 1-8

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.1 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 2-1
2.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 2-1
2.2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045 2-1
2.2.2.1 Sistem Pusat Permukiman 2-1
2.2.2.1 Sistem Jaringan Transportasi 2-4
2.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya 2-4
2.2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043 2-6
2.3 KEBIJAKAN PENANGANAN PERUMAHAN KUMUH DAN

PERMUKIMAN KUMUH 2-10
2.3.1 Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 - 2028 2-13

BAB III PROFIL PERUMAHAN KUMH DAN PERMUKIMAN KUMUH

3.1 SEBARAN KAWASAN KUMUH 3-1
3.1.1 Kecamatan Sembilan Koto 3-4
3.1.2 Kecamatan Pulau Punjung 3-9
3.1.3 Kecamatan Sitiung 3-48
3.1.4 Kecamatan Timpeh 3-63
3.1.5 Kecamatan Koto Baru 3-72
3.1.6 Kecamatan Koto Salak 3-118
3.1.7 Kecamatan Tiumang 3-124
3.1.8 Kecamatan Padang Laweh 3-134
3.1.9 Kecamatan Sungai Rumbai 3-139
3.1.10 Kecamatan Koto Besar 3-144
3.1.11 Kecamatan Asam Jujuhan 3-169

BAB IV PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

4.1 ISU DAN PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 4-1
4.1.1 Isu dan Permasalahan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Dharmasraya 4-1
4.1.2 Isu Dan Permasalahan Kawasan Kumuh 4-2
4.2 KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN PENENTUAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN 4-25
4.3 PERUMUSAN KEBUTUHAN PENANGANAN BERDASARKAN ISU DAN PERMASALAHAN PERMUKIMAN KUMUH 4-41

BAB V KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

5.1 KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH SAMPAI DENGAN PENCAPAIAN KOTA BEBAS KUMUH DALAM SKALA KOTA 5-1

5.2 KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN 5-20

BAB VI RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH..... 6-1
6.2 RENCANA RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KOTA, SKALA KAWASAN DAN SKALA LINGKUNGAN [RENCANA AKSI MASYARAKAT/CAP]..... 6-98
6.3 MEMORANDUM PROGRAM PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 6-110

BAB VII RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

7.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH..... 7-1
7.2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PRIORITAS..... 7-5
7.3 RENCANA AKSI PROGRAM PENINGKATAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KABUPATEN DAN SKALA KAWASAN 7-14
7.4 MEMORANDUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH..... 7-17
7.5 INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PRIORITAS DAN PENYUSUNAN DED KAWASAN PRIORITAS..... 7-20
7.6 RENCANA AKSI MASYARAKAT COMMUNITY ACTION PLAN (CAP) DAN PRIORITAS KEBUTUHAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH..... 7-22

7.7 RENCANA DETAIL KONSEP DESAIN KAWASAN PRIORITAS (DED DAN RAB) KAWASAN PASAR LAMO PULAU PUNJUNG 7-23
7.7.1 Rencana Jalan Lingkungan..... 7-24
7.7.2 Rencana Drainase Lingkungan 7-26
7.7.3 Rencana Penerangan Jalan..... 7-27
7.7.4 Rencana Lampu PJU 7-30
7.7.5 Rencana Gerbang/Gapura..... 7-31
7.7.6 Rencana Air Bersih 7-33
7.7.7 Rencana Perbaikan Rumah..... 7-35
7.7.8 Rencana Sanitasi/Pengolahan Air Limbah 7-37

BAB VIII RENCANA PENYEDIAAN TANAH

8.1 RUMUSAN RENCANA PENYEDIAAN TANAH 8-1
8.2 POLA PENANGANAN PEREMAJAAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI 8-2

BAB IX RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

9.1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) 9-1
9.2 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI..... 9-2
9.3 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN 9-2
9.4 SUMBER LAINNYA..... 9-3

BAB X RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

10.1 KALABORASI DAN TATA PERAN ORGANISASI 10-1
10.2 MENINGKATKAN PERAN DAN FUNGSI POKJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP) 10-10

BAB XI PENUTUP

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Muatan Penyusunan Dokumen RP2KPKPK	1-5
Tabel 3.1	Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/160/ KPTS-BUPATI/2025 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya	3-2
Tabel 4.1	Isu Permasalahan Kawasan Salago	4-2
Tabel 4.2	Isu Permasalahan Kawasan Pulau Punjung	4-3
Tabel 4.3	Isu Permasalahan Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung	4-3
Tabel 4.4	Isu Permasalahan Kawasan Sikabau	4-4
Tabel 4.5	Isu Permasalahan Kawasan Kubang Panjang	4-5
Tabel 4.6	Isu Permasalahan Kawasan Tarandam Sungai Kambut	4-6
Tabel 4.7	Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Lambau	4-6
Tabel 4.8	Isu Permasalahan Kawasan Sungai Kilangan	4-7
Tabel 4.9	Isu Permasalahan Kawasan Sungai Dareh	4-8
Tabel 4.10	Isu Permasalahan Kawasan Siguntur 1	4-8
Tabel 4.11	Isu Permasalahan Kawasan Siguntur 2	4-9
Tabel 4.12	Isu Permasalahan Kawasan Koto Daulat	4-10
Tabel 4.13	Isu Permasalahan Kawasan Sungai Duo	4-10
Tabel 4.14	Isu Permasalahan Kawasan Marga Makmur	4-11
Tabel 4.15	Isu Permasalahan Kawasan Sungai Bulian	4-12
Tabel 4.16	Isu Permasalahan Kawasan Koto Padang	4-13
Tabel 4.17	Isu Permasalahan Kawasan Koto Baru	4-13
Tabel 4.18	Isu Permasalahan Kawasan Pasar Koto Baru	4-14
Tabel 4.19	Isu Permasalahan Kawasan Lubuk Agam	4-15
Tabel 4.20	Isu Permasalahan Kawasan Ampang Kuranji	4-16
Tabel 4.21	Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Teluk Alai	4-16
Tabel 4.22	Isu Permasalahan Kawasan Pandukuan	4-17
Tabel 4.23	Isu Permasalahan Kawasan Sungai Langkok	4-18
Tabel 4.24	Isu Permasalahan Kawasan Sipangkur	4-18
Tabel 4.25	Isu Permasalahan Kawasan Sopan Jaya	4-19
Tabel 4.26	Isu Permasalahan Kawasan Balai Tangah	4-20
Tabel 4.27	Isu Permasalahan Kawasan Tuo	4-21
Tabel 4.28	Isu Permasalahan Kawasan Bonjol	4-21
Tabel 4.29	Isu Permasalahan Kawasan Ranah	4-22
Tabel 4.30	Isu Permasalahan Kawasan Koto Baru 3	4-23
Tabel 4.31	Isu Permasalahan Kawasan Padang Bungur	4-23
Tabel 4.32	Isu Permasalahan Kawasan Bukit Sembilan	4-24
Tabel 4.33	Isu Permasalahan Kawasan Sungai Limau	4-25

Tabel 4.34 Kriteria dan Indikator Penentuan Urutan Kawasan Prioritas 4-27
Tabel 4.35 Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan 4-36
Tabel 4.36 Analisis Kriteria dan Urutan Kawasan Prioritas Kawasan Kumuh di Kabupaten Dharmasraya 4-39
Tabel 4.37 Rumusan Kebutuhan Penanganan Kawasn Kumuh Skala Kawasan 4-43
Tabel 5.1 Jenis –jenis Pemugaran 5-4
Tabel 5.2 Jenis-jenis Penanganan 5-6
Tabel 5.3 Konsep dan Starategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Sampai dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh dalam Skala Kota 5-11
Tabel 5.4 Konsep dan Strategi Pecegahan Dan Peningkatan Kualitas Kumuh Skala Kawasan 5-21
Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Peningklatan Kualitas Perumhan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala 6-2
Tabel 6.2 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan 6-5
Tabel 6.3 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Silago 6-8
Tabel 6.4 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Pulau Punjung 6-10
Tabel 6.5 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung 6-13
Tabel 6.6 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Kubang Panjang 6-16
Tabel 6.7 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Tarandam Sungai Kambut .. 6-18
Tabel 6.8 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Lambau 6-21
Tabel 6.9 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Sungai Kilangan 6-25

Tabel 6.10 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Sungai Dareh 6-28
Tabel 6.11 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Sikabau 6-30
Tabel 6.12 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Siguntur 1 6-33
Tabel 6.13 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Siguntur 2 6-35
Tabel 6.14 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Koto Daulat 6-37
Tabel 6.15 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Koto..... 6-41
Tabel 6.16 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Marga Makmur 6-44
Tabel 6.17 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Sungai Bulian..... 6-46
Tabel 6.18 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Koto Padang 6-48
Tabel 6.19 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Koto Baru 6-50
Tabel 6.20 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Pasar Koto Baru 6-53
Tabel 6.21 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Koto Baru 3 6-56
Tabel 6.22 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Ampang Kuranji 6-59
Tabel 6.23 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Lubuk Agam 6-61

Tabel 6.24 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Teluk Alai 6-64
Tabel 6.25 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Padukuan..... 6-68
Tabel 6.26 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Sungai Langkok..... 6-71
Tabel 6.27 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Sipangkur..... 6-73
Tabel 6.28 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Sopan Jaya 6-76
Tabel 6.29 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Balai Tengah 6-78
Tabel 6.30 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Tuo..... 6-80
Tabel 6.31 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Bonjol..... 6-83
Tabel 6.32 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Ranah 6-86
Tabel 6.33 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Ranah Baru..... 6-88
Tabel 6.34 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Padang Bungur 6-91
Tabel 6.35 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Bukit Sembilan 6-94
Tabel 6.36 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Sungai Limau 6-96
Tabel 6.37 Rencana Aksi Pencegahan terhadap tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten..... 6-99

Tabel 6.38 Rencana Aksi Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan 6-100
Tabel 6.39 Rencana Aksi Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Lingkungan 6-105
Tabel 6.40 Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten 6-111
Tabel 6.41 Memorandum Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan 6-113
Tabel 7.1 Kebutuhan Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh 7-2
Tabel 7.2 Numerik Kekumuhan Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung 7-6
Tabel 7.3 Program Dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas Pasar Lama Pulau Punjung 7-15
Tabel 7.4 Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 7-18
Tabel 7.5 Indikasi Program Dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas Dan Penyusunan DED Kawasan Prioritas 7-20
Tabel 7.6 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengerjaan Jalan 7-25
Tabel 7.7 Rancangan Anggran Biaya (RAB) Pengerjaan Drainase Lingkungan 7-27
Tabel 7.8 Rencaan Anggaran Biaya (RAB) Pengerjaan Lampu JPU ... 7-31
Tabel 7.9 Rencaan Anggaran Biaya (RAB) Pengerjaan Air Bersih 7-34
Tabel 7.10 Rencaan Anggaran Biaya (RAB) Pengerjaan Rumah RTLH 7-36
Tabel 7.11 Rencaan Anggaran Biaya (RAB) Pengerjaan Sanitasi Limbah 7-39
Tabel 10.1 Peran Para Pelaku dalam Pembangunan yang Berkelanjutan 10-2
Tabel 10.2 Pembagian Urusan Pemerintah Terkait Penanganan Permukiman Kumuh 10-12

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Kedudukan R2KPKPK Terhadap Dokumen Rencana Lainnya	1-7
Gambar 3.1	Peta Sebaran Kawasan Kumuh di Kabupaten Dharmasraya	3-1
Gambar 3.2	Peta Delinasi Kawasan Silago	3-8
Gambar 3.3	Peta Delinasi Kawasan Pulau Punjung	3-13
Gambar 3.4	Peta Delinasi Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung	3-18
Gambar 3.5	Peta Delinasi Kawasan Kubang Panjang	3-23
Gambar 3.6	Peta Delinasi Kawasan Lambau	3-33
Gambar 3.7	Peta Delinasi Kawasan Sungai Kilangan Sungai Dareh	3-37
Gambar 3.8	Peta Kawasan Kumuh Sungai Dareh	3-42
Gambar 3.9	Peta Kawasan Kumuh Sikabau	3-47
Gambar 3.10	Peta Delinasi Kawasan Siguntur I	3-52
Gambar 3.11	Peta Delinasi Kawasan Siguntur II Sitiung	3-56
Gambar 3.12	Peta Delinasi Kawasan Sungai Duo	3-62
Gambar 3.13	Peta Delinasi Kawasan Marga Makmur	3-67
Gambar 3.14	Peta Delinasi Kawasan Sungai Bulian	3-71
Gambar 3.15	Peta Delinasi Kawasan Koto Padang	3-76
Gambar 3.16	Peta Delinasi Kawasan Koto Baru	3-81
Gambar 3.17	Peta Delinasi Kawasan Pasar Koto Baru	3-86
Gambar 3.18	Peta Kawasan Kumuh Koto Baru 3	3-91
Gambar 3.19	Peta Delinasi Kawasan Lubuk Agam	3-100
Gambar 3.20	Peta Delinasi Kawasan Koto Gadang	3-107
Gambar 3.21	Peta Delinasi Kawasan Cangkir Batu	3-112
Gambar 3.22	Peta Delinasi Kawasan Teluk Alai	3-117
Gambar 3.23	Peta Delinasi Kawasan Padukuan	3-123
Gambar 3.24	Peta Delinasi Kawasan Sipangkur	3-128
Gambar 3.25	Peta Delinasi Kawasan Sungai Langkok	3-133
Gambar 3.26	Peta Delinasi Kawasan Sopan Jaya	3-138
Gambar 3.27	Peta Delinasi Kawasan Balai Tangah	3-143
Gambar 3.28	Peta Delinasi Kawasan Tuo	3-149
Gambar 3.29	Peta Delinasi Kawasan Ranah	3-158
Gambar 3.30	Peta Deliniasi Ranah Baru	3-163
Gambar 3.31	Peta Delinasi Kawasan Bungur	3-168
Gambar 3.32	Peta Delinasi Kawasan Alahan Nan Tigo	3-174
Gambar 3.33	Peta Delinasi Kawasan Sungai Limau	3-178

Gambar 5.1 Konsep Dasar Penanganan kawasan Permukiman Kumuh 5-1
Gambar 5.2 Skema Umum Perumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 5-2
Gambar 7 1 Gambaran Kondisi Bangunan Gedung 7-7
Gambar 7 2 Gambaran Kondisi Jalan Lingkungan 7-8
Gambar 7 3 Gambaran Kondisi Air Bersih 7-9
Gambar 7 4 Gambaran Kondisi Jaringan Drainase 7-10
Gambar 7 5 Gambaran Kondisi Limbah 7-11
Gambar 7 6 Gambaran Kondisi Persampahan 7-12
Gambar 7 7 Gambaran Kondisi Bangunan Bangunan Rawan Kebakaran 7-13
Gambar 7 8 Rencana Penampang Jalan Lokasi 2 7-24
Gambar 7 9 Rencana Penampang Jalan Lokasi 1 7-25
Gambar 7 10 Rencana Penampang Drainase Lokasi 1 7-26
Gambar 7 11 Rencana Penampang Drainase Lokasi 2 7-27
Gambar 7 12 Rencana Lampu Jalan 7-28
Gambar 7 13 Rencaan Anggaran Biaya (RAB) Pengerjaan Penerangan Jalan 7-29
Gambar 7 14 Rencana Gambar PJU Jalan 7-30
Gambar 7 15 Rencana Gerbang Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung 7-32
Gambar 7 16 Rencana Jaringan Air Bersih 7-33
Gambar 7 17 Rencana Rumah Tidak Layak Huni 7-36
Gambar 7 18 Rencana Sanitasi 7-38
Gambar 10.1 Peran Antar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 10-3
Gambar 10.2 Hubungan Kerja Sama Antar Berbagai Pihak Yang Terlibat Dalam Pengembangan Dan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman 10-11

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Urbanisasi merupakan suatu fenomena perubahan karakteristik kawasan perkotaan yang ditandai dengan semakin bertambahnya penduduk kota yang dikarenakan oleh tiga hal yaitu: pertambahan penduduk alami di kota, perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan perubahan ciri dari desa menjadi kota. Kota lebih dipahami tidak hanya sebatas administratif kota otonom, tetapi juga meliputi kawasan yang bercirikan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang. Diperkirakan persentase penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2025 adalah 60% dari total penduduk Indonesia (BPS, 2020). Tantangan yang timbul sebagai implikasi urbanisasi ini harus mampu dijawab oleh para pemangku kepentingan untuk dapat mewujudkan permukiman perkotaan menjadi layak huni salah satunya dengan menyediakan infrastruktur permukiman yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan harus mampu diimbangi pula dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas permukiman yang tepat. Ketidakmampuan para pemangku kepentingan dapat memicu terciptanya lingkungan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Perwujudan permukiman perkotaan menjadi layak huni dimulai dengan penanganan permukiman kumuh perkotaan yang komprehensif dan kolaboratif. Penanganan berbagai aspek permukiman kumuh sangat diperlukan untuk menjamin penuntasan permasalahan yang terintegrasi dengan pengembangan mulai dari skala lingkungan atau komunitas, skala kawasan, dan skala kabupaten/kota. Penanganan permukiman kumuh perkotaan merupakan upaya bersama pelaku pembangunan untuk mencapai perkembangan kota yang berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah satunya untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam

konteks penanganan permukiman kumuh, dalam Pasal 94 diamanatkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni. Pencegahan dan peningkatan kualitas dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 121 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 106 Ayat (3) Peraturan Pemerintah ini telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh setelah proses penetapan lokasi. Amanat ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan Setiap Orang dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Lebih lanjut pada pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Peraturan Menteri ini diatur tentang Perencanaan Penanganan, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK). Selain dari amanat peraturan perundang-undangan di atas, penanganan permukiman kumuh dilaksanakan dengan mengikuti berkembangnya isu strategis saat ini, diantaranya:

a. *Sustainable Development Goal's* / SDGs pada tujuan 11 sustainable cities and communities beserta dengan target dan indikatornya. Dalam target dan indikator, terdapat keterkaitan dengan semangat inklusifitas kota. Keterkaitan inilah yang mendorong berkembangnya visi/common vision kota- kota dan permukiman yang berkelanjutan di masa mendatang.
b. *New Urban Agenda*/NUA yang merupakan komitmen global sesuai dengan kesepakatan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (sustainable urbanization). NUA memiliki prinsip pelaksanaan antara lain tidak menelantarkan siapapun (*no one left behind*), pembangunan ekonomi perkotaan

yang inklusif dan berkelanjutan dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Prinsip-prinsip pelaksanaan ini sangat terkait dengan penanganan permukiman kumuh dan selanjutnya dapat diterjemahkan dalam rencana pembangunan masing-masing daerah.

Implikasi dari kedua isu di atas adalah penempatan muatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sebagai suatu visi/common vision dalam penanganan masalah kekumuhan secara berkelanjutan. Pencegahan dilakukan secara berkelanjutan dengan membangun tata kelola pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat melalui perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi yang lebih advokatif. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan menyiapkan perkuatan agenda-agenda ke depan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh (strengthening). Penanganan kumuh telah diamanatkan untuk dilaksanakan Pemerintah melalui penetapan target nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas 10.000 ha permukiman kumuh. Amanat tersebut diterjemahkan dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020 – 2024 yaitu:

a. Pemenuhan akses 90% air minum layak;
b. Pemenuhan akses 80% sanitasi dan persampahan layak; dan
c. Penanganan 10.000 ha permukiman kumuh dan peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh.

Bersambut dengan amanat tersebut diharapkan pemerintah kabupaten/kota juga dapat memilih dan menetapkan lokasi, menyusun perencanaan, menentukan metode pelaksanaan, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Peran pemerintah kabupaten/kota merupakan tanggapan positif dari isu terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang sering dipandang memberikan citra negatif dalam hal ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan dan penghidupan warganya. Termasuk di dalamnya, adalah melakukan keterpaduan infrastruktur permukiman yang memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur permukiman yang terpadu, efisien dan efektif. Pembangunan infrastruktur permukiman ini diharapkan akan memperkuat status berketahanan terhadap ekologi

(perubahan iklim dan bencana), sosial dan ekonomi, serta menjadi pengikat perumahan dan kawasan permukiman menjadi satu kesatuan sistem sesuai hierarkinya.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1 Maksud

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Dharmasraya ini dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen rencana penyelenggaraan penanganan kawasan permukiman perkotaan yang difokuskan pada pola pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang terpadu dan bersinergi yang pada gilirannya dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya secara mandiri dan berkolaborasi dengan pihak lain secara berkelanjutan

1.2.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Dharmasraya ini adalah:

1. Melakukan identifikasi potensi dan akar permasalahan kawasan permukiman dalam penyajian suatu profil kawasan yang mengacu kepada hasil penetapan SK Bupati Dharmasraya terkait kawasan kumuh.
2. Melakukan pendampingan terhadap penyusunan Dokumen Rencana Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan melalui keterpaduan program semua sektor perumahan dan permukiman, sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (stakeholders) yang bersifat menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (*delivery system concept*).
3. Menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) yang memuat strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama bagi seluruh pelaku dalam pengendalian pembangunan bersama selama jangka waktu berjalan

1.2.3 Sasaran

Sasaran disusunnya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) ini antara lain:

a. Tersedianya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (stakeholders) pelaksanaan penyelenggaran penanganan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (*delivery system concept*).
b. Tersedianya strategi penanganan kumuh secara spatial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama bagi seluruh pelaku dalam pengendalian pembangunan bersama selama jangka waktu berjalan.

1.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN

1.3.1 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi kegiatan penyusunan RP2KPKPK dilakukan pada lingkup wilayah Kabupaten Dharmasraya mengacu pada SEDJCK Nomor 30 Tahun 2020 tentang panduan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Muatan Penyusunan Dokumen RP2KPKPK

No	Muatan Penyusunan RP2KPKP
1	Pendahuluan (latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan kabupaten/kota, dan sistematika penyajian);
2	Kajian kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
3	Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
4	Rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
5	Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
6	Rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukimsn kumuh;
7	Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
8	Rumusan perencanaan penyediaan tanah;
9	Rumusan rencana investasi dan pembiayaan
10	Rumusan peran pemangku kepentingan

Sumber : Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020

Muatan di atas merupakan bagian dari dokumen RP2KPKPK sehingga akan lebih mudah untuk proses penyusunan peraturan kepala daerah.

1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah meliputi permukiman kumuh prioritas merupakan permukiman kumuh yang diprioritaskan untuk ditangani, berdasarkan kriteria dan indikator yang merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kawasan prioritas ini merupakan kawasan yang akan ditangani terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan hasil diskusi dan penyepakatan oleh Pokja PKP Kabupaten Dharmasraya. Kawasan kumuh terdapat di Kabupaten Dharmasraya dan yang di prioritaskan yaitu Kawasan Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung Nagari Empat Koto Pulau Punjung.

1.4 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Dharmasraya ini terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi landasan dalam pembuatan dokumen ini antara lain:

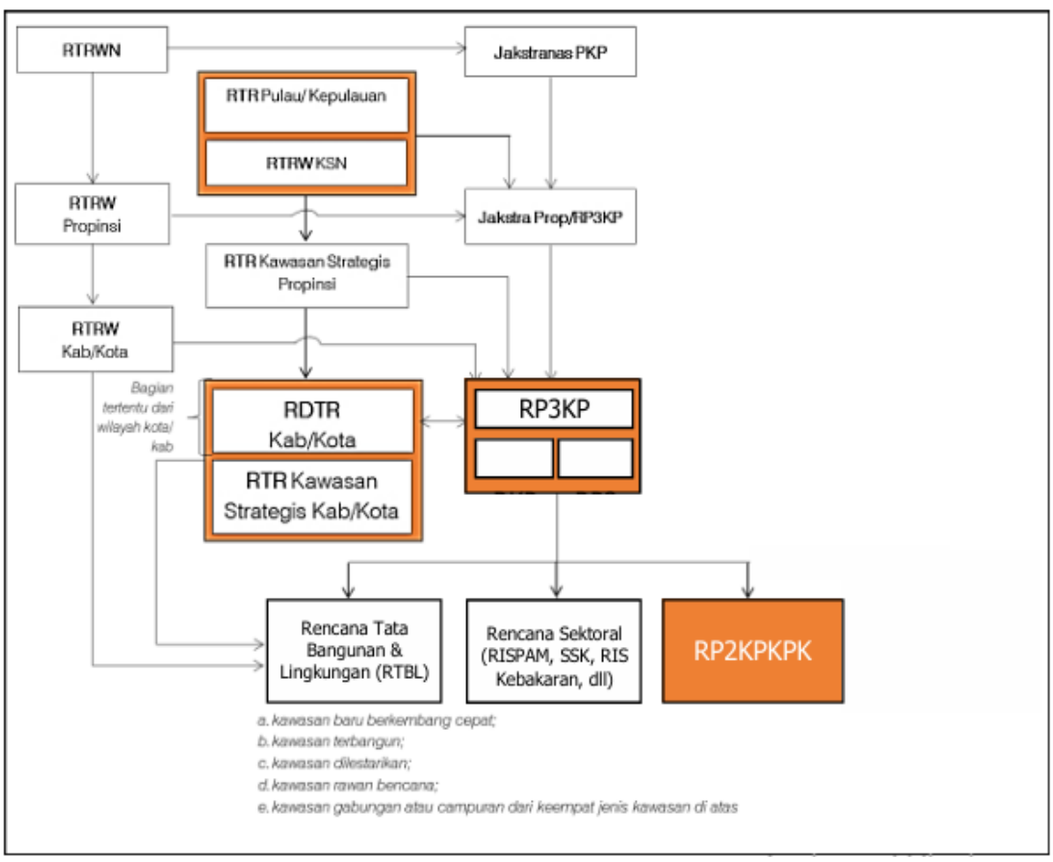
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 106 Ayat (3) telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh setelah proses penetapan lokasi.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 yang menekankan perlu ditetapkan tata cara penyusunan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
4. SE Direktur Jendral Cipta Karya No. 30/SE/DC/2020 tentang Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.5 KEDUDUKAN DOKUMEN RP2KPKPK DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) telah diamanatkan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 Tentang Panduan Penyusunan RP2KPKPK. Dokumen RP2KPKPK merupakan bagian dari perencanaan kawasan perumahan dan permukiman perkotaan yang memuat tentang penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan.

Gambar 1.1
Kedudukan R2KPKPK Terhadap Dokumen Rencana Lainnya



1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, landasan hukum, kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan Kabupaten Dharmasraya serta sistematika penyusunan laporan.

BAB 2 KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

Bab ini berisi isu strategis pembanguna perumahan dan permukiman, kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman. Selain itu terdapat beberapa dokumen kajian seperti SSK Kabupaten Dharmasraya kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya.

BAB 3 PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bab ini berisi sebaran permukiman kumuh, peta delineasi, kawasan kumuh, lokasi beserta luasan. Selain itu berisi kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman. Selain itu juga terdapat profil kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh hasil verifikasi (dilengkapi dengan peta masing masing kawasan dan gambaran kelembagaan lokal). Pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh sesuai cakupan skala kota, skala kawasan dan skala lingkungan.

BAB 4 PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bab ini berisi isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Kriteria dan indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan serta perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isi permasalahan permukiman kumuh.

BAB 5 KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bab ini berisi konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota, konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam skala kawasan.

BAB 6 RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bab ini berisi program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota, skala kawasan, serta memorandum program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB 7 RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bab ini berisi program dan kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, program peningkatan kualitas kawasan prioritas, rencana aksi program peningkatan pemukiman kumuh skala kawasan, memorandum program pembangunan infrastruktur dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh, indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kawasan prioritas dan penyusunan DED kawasan prioritas, Rencana aksi masyarakat dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh, serta rencana detail konsep desain kawasan penanganan prioritas.

BAB 8 RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Bab ini memuat rumusan rencana penyediaan tanah untuk penanganan pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali pada permukiman kumuh kawasan prioritas. Berisi

mengenai status (legalitas), luas, dan lokasi (peta) rencana penyediaan tanah.

BAB 9 RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Bab ini memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB 10 RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Bab ini memuat matriks peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB 11 PENUTUP

Bab ini memuat simpulan.

BAB 2
KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

2.1 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Isu strategis terkait pembangunan permukiman di Kabupaten Dharmasraya yang dirangkum adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya kualitas permukiman pada kawasan kumuh di perkotaan
2. Kurangnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan infrastruktur permukiman
3. Masih kurangnya kualitas dan penyediaan air bersih;
4. Masih kurangnya infrastruktur dasar permukiman sehingga belum sepenuhnya tercipta lingkungan yang sehat;
5. Kurangnya kuantitas dan kualitas pedestrian/ trotoar yang memenuhi syarat;
6. Masih kurangnya luasan ruang terbuka hijau (RTH);
7. Masih kurangnya pengelolaan dan pelayanan sampah;
8. Belum optimalnya penanganan dan penanggulangan bencana;
9. Masih kurangnya pembangunan infrastruktur terutama pada daerah terisolir/perbatasan;
10. Lemahnya keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman, baik dalam skala kota maupun kawasan.

2.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2.2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045

2.2.1.1 Sistem Pusat Permukiman

Rencana pengembangan sistem pusat permukiman di Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat. Pengembangannya dilakukan melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan secara berhirarki sesuai potensi yang dimiliki setiap pusat kegiatan, atau didasarkan pada arah kebijakan pengembangan. Artinya penetapan sesuai potensi didasarkan pada kondisi saat ini (eksisting) baik yang menyangkut sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan; sedang arah kebijakan pengembangan

didasarkan pada tujuan yang akan dicapai melalui pengembangan suatu pusat kegiatan namun pertimbangan pada sumber daya yang ada tidak menjadi pertimbangan utama. Penetapan tersebut selain didasarkan pada kondisi saat ini yang lebih penting adalah rencana pengembangan ke depan dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Untuk rencana pengembangan pusat permukiman di Provinsi Sumatera Barat juga mengacu pada kriteria sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Kriteria untuk masing-masing pusat kegiatan tersebut sebagaimana disampaikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Kriteria Fungsi Kota

No	Fungsi Kota	Kriteria
1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi; dan/atau d. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan.
2	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor - impor yang mendukung PKN; b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau d. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.
3	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau c. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal.

Sumber : PP 13 Tahun 2017

Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan yang telah disampaikan maka rencana sistem pusat permukiman di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut.

1. **Pusat Kegiatan Nasional (PKN)** yaitu Kawasan Perkotaan Padang-Lubuk Alung-Pariaman (Palapa) sebagai pusat perekonomian skala nasional di pantai barat Sumatera yang produktif berbasis perdagangan dan jasa, industri, perikanan, dan pariwisata yang berkelanjutan. Kawasan Perkotaan Palapa meliputi kawasan Kota Padang, Lubuk Alung di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Didalam kawasan perkotaan Metropolitan Palapa terdapat kawasan Teluk Bayur – Bungus sebagai pelabuhan komoditi wilayah dan industri perikanan. Kawasan Lubuk Alung dan Kota Pariaman menjadi kawasan pengembangan untuk fasilitas dan infrastruktur wilayah, industri serta permukiman.

2. **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)** terdiri atas:
   a. Kota Pariaman;
   b. Kota Bukittinggi;
   c. Kota Sawahlunto;
   d. Kota Solok;
   e. Kota Payakumbuh;
   f. Kawasan Perkotaan Muara Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
   g. Kawasan Perkotaan Tua Pejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

3. **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** terdiri atas:
   a. Kawasan Perkotaan Painan di Kabupaten Pesisir Selatan;
   b. Kawasan Perkotaan Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan
   c. Kawasan Perkotaan Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan;
   d. Kawasan Perkotaan Padang Panjang di Kota Padang Panjang;
   e. Kawasan Perkotaan Sarilamak di Kabupaten Lima Puluh Kota;
   f. Kawasan Perkotaan Aro Suka di Kabupaten Solok;
   g. Kawasan Perkotaan Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan;
   h. Kawasan Perkotaan Lubuk Basung di Kabupaten Agam;
   i. Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung di Kabupaten Sijunjung;
   j. Kawasan Perkotaan Parik Malintang di Kabupaten Padang Pariaman;
   k. Kawasan Perkotaan Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya;
   l. Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya
   m. Kawasan Perkotaan Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat;
   n. Kawasan Perkotaan Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman;
   o. Kawasan Perkotaan Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar;

p. Rencana Kawasan Perkotaan Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Untuk Provinsi Sumatera Barat terdapat satu kawasan metropolitan yaitu Kota Padang. Sesuai pengertian dalam PP Nomor 13 tahun 2017 bahwa kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. Dengan demikian dalam penetapan kawasan metropolitan dapat disampaikan kriteria sebagai berikut :

a. Memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa;
b. Terdiri atas satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan disekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan; dan
c. Terdapat keterkaitan fungsi antar kawasan perkotaan dalam satu sistem metropolitan.

2.2.1.2 Sistem Jaringan Transportasi

a. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Dua menjadi Jalan Kolektor Primer Satu meliputi:
   1) Abai Sangir (Solok Selatan) - Sei Dareh (Dharmasraya);
   2) Jalan Manggopoh – Kelok 1 (Agam);
b. rencana jalan tol Dharmasraya – Rengat;
c. Rencana terminal Penumpang Tipe A Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya;
d. rencana terminal Penumpang Tipe B Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya;
e. Angkutan sungai untuk tujuan wisata juga dimungkinkan di Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya

2.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Tahun 2024 serta dengan

mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2025- 2029 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahun sebagai berikut :

Adapun defenisi kalimat Visi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 yaitu :

SEJAHTERA Menggambarkan kondisi masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang mengalami kondisi kesejahteraan ekonomi dan sosial yang lebih baik serta mampu bersaing secara reginal dan nasional

MERATA Kabupaten Dharmasraya diharapan adanya pemerataan pembangunan yang merata yang diukur dari indikator kinerja pembangunan kewilayahan berdasarkan kecamatan ataupun tingkat nagari.

Adapun misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi yang mesti disediakan oleh pemerintah untuk memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan adanya peningkatan infratsrtur yang memadai diharapkan dapat mengurangi berbagai hambatan pembanguanan dan aktivitas ekonomi di masyarakat. Salah satunya berupa infrastruktur terkait konektivitas. Dengan adanya konektivitas yang memadai maka dapat mengurangi biaya ekonomi dalam sektor transportasi sekaligus menjadi pemicu percepatan pembnagunan wilayah. Selanjutnya infrastruktur dasar yang terdiri dari air minum sanitasi serta kebutuhan rumah tinggal yang layak serta didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang layak;
2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien Adapun tujuan dari penyelenggaran pemerintah/ pemerintah daerah adalah guan adanya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesi. Dengan adanya keterbatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah maka aspek efisiensi dan efektifitas merupakan unsur pokok yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan, baikyang bersifat makro, maupun target yang sesuai dengan prioritas daerah;

3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan Pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global yang disepakati dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata pembangunan di bidang sumberdaya manusia;
5. Transformasi ekonomi Guna meningkatkan pembangunan ekonomi, dimana pembangunan ekonomi suatu wilayah diukur dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi ini adalah perkembangan PDRB, dan peningkatan pendapatan masyarakat;
6. Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai palsafah masyarakat minangkabau.

2.2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043 “Mengembangkan Kabupaten Dharmasraya Sebagai Pusat Pengembangan Wilayah Bagian Tenggara Provinsi Sumatera Barat Bertumpu Pada Potensi Sumber Daya Alam dan Budaya yang Berkelanjutan”.

Sistem Pusat Permukiman di Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut:

1. Kawasan Pulau Punjung sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Kawasan perkotaan Pulau Punjung berada sepanjang koridor Pulau Punjung – Sungai Dareh – Sikabau;
2. Kawasan Sungai Rumbai sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam lingkup pelayanan Kabupaten Dharmasraya sekaligus berfungsi sebagai kawasan strategis provinsi di wilayah perbatasan tenggara Provinsi Sumatera Barat;
3. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) yang berfungsi melayani satu atau lebih kecamatan bagian wilayah kabupaten yaitu kawasan : Koto Baru, Sitiung dan Padang Laweh;
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat pelayanan kecamatan meliputi:
    a. Kawasan Perkotaan Silago di Kecamatan Sembilan Koto;
    b. Kawasan Perkotaan Pinang Makmur di Kecamatan Timpeh;
    c. Kawasan Perkotaan Koto Salak di Kecamatan Koto Salak;
    d. Kawasan Perkotaan Tiumang di Kecamatan Tiumang;
    e. Kawasan Perkotaan Sungai Limau di Kecamatan Asam Jujuhan; dan

f. Kawasan Perkotaan Koto Besar di Kecamatan Koto Besar.

Sistem Jaringan Prasarana

a. Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

- Dalam lingkup regional, menghubungkan Kabupaten Dharmasraya dengan kawasan pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera sebagai sentra pengembangan perkebunan dan lumbung energy (Batu Bara). Hal ini sejalan dengan orientasi pemasaran komoditi unggulan Kabupaten Dharmasraya berupa komoditi perkebunan (sawit dan karet) serta hasil tambang batu bara;
- Pengembangan akses permukiman di wilayah Kabupaten Dharmasraya menuju pusat – pusat kegiatan pelayanan yaitu menuju kawasan perkotaan Pulau Punjung dan kawasan perkotaan Sungai Rumbai sebagai PKL, PPK dan PPL;
- Rencana jaringan Jalan Tol berupa jalan Tol Dharmasraya – Rengat;
- Terminal tipe B di kawasan perkotaan Pulau Punjung yang berfungsi sebagai PKL dalam RTRW Provinsi lokasi terminal Tipe B yaitu di kawasan perkotaan Pulau Punjung;
- Terminal tipe A di Kota Sungai Rumbai yang berfungsi sebagai kawasan strategis perbatasan Provinsi Sumatera Barat;
- Pengembangan jembatan gantung melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya;
- Pengembangan jembatan melintas Sungai Batanghari di Batu Rijal menuju Padang Laweh;
- Pembangunan jembatan yang menghubungkan anatar Ampalu Lama dengan Padukuan;
- Pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Pulai dengan Timpeh;
- Pembangunan jembatan Tanjung Alam di Kecamatan Asam Jujuhan;
- Pembangunan jembatan Lubuk Besar di Kecamatan Asam Jujuhan;
- Rencana Pengembangan jaringan rel kereta api berdasarkan RIPNas Tahun 2030 salah satunya adalah pembangunan jaringan jalur kereta api umum yang melayani jaringan jalur kereta api antar kota yang melintasi wilayah Kabupaten Dharmasraya untuk melayani perpindahan orang barang pada jalur Padang Tarok – Lubuk Linggau yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jaringan Kereta Api Trans Sumatera;

- Simpul transportasi berupa lokasi dermaga sungai yang terdapat di sepanjang alur sungai Batanghari yaitu : Bendung Batu Bakawik (tepi barat), Pasar Lama Pulau Punjung (tepi barat), Siluluak (tepi barat), Simaldu (tepi timur) dan dermaga Sitiung;
- Segmen Bendung Batubakawik – Pasar Lama Pulau Punjung – Siguntur berpotensi dikembangkan sebagai wisata air dan sekaligus jalur akses menuju kawasan wisata bersejarah Dharmasraya di Siguntur.
- Sistem transportasi sungai direncanakan berupa system jaringan sungai, danau dan penyeberangan yang terdiri atas:
  - Lintas penyeberangan dalam kabupaten, yang meliputi : Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung;
  - Adapun Pelabuhan Sungai dan Danau berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan, Meliputi : Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Tiumang dan Kecamatan Padang Laweh.

b. Rencana Sistem Jaringan Energi

- Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa PLTMH meliputi Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Kota dan Kecamatan Asam Jujuhan;
- Jaringan energi kelistrikan di Kabupaten Dharmasraya berasal dari gardu induk Sungai Langsek di Kiliran Jao dengan trafo 200 MWA dan 10 MVA dan gardu induk Sungai Rumbai.

c. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telepon yang ada di Kabupaten Dharmasraya dikelola oleh PT. Telkom. Prasarana telekomunikasi di Kabupaten Dharmasraya tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah menara telekomunikasi sebanyak 111 BTS. Selain itu juga terdapat Blank Spot Area yang merupakan area yang direkomendasikan untuk dibangun titik BTS baru sebanyak 16 titk BTS.

d. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Kabupaten Dharmasraya memiliki banyak sumber air baku untuk pengairan dan lahan yang cocok untuk pengembangan pertanian lahan basah, saat ini telah ada jaringan irigasi Nasional (Batanghari) ditambah dengan jaringan irigasi kabupaten. Daerah irigasi Batanghari terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru dan Koto Salak.

Sistem jaringan irigasi berdasarkan fungsi jaringan dan bangunan sumberdaya air di Kabupaten Dharmasraya terdiri atas:

a. Jaringan irigasi primer yang terdapat di Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Besar dan kecamatan Sembilan Koto;
b. Jaringan irigasi sekunder yang merupakan bagian dari system irigasi Batanghari yang terdapat di Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Besar dan Kecamatan Sembilan Koto;
c. Jaringan irigasi air tanah yang terdapat di Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Besar dan Kecamatan Sungai Rumbai;
d. Bangunan pengendalian banjir terdapat di Kecamatan Pulau Punjung;
e. Bangunan sumber daya air berupa bending, embung dan sumber yang terdapat Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto Baru, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Tiumang dan Kecamatan Sungai Rumbai.

e. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

a. Pelayanan air minum oleh BPAM Kabupaten Dharmasraya yaitu unit Koto Baru dan unit Pulau Punjung;
b. Secara umum system pembuangan air limbah penduduk di Kabupaten Dharmasraya masih bercampur dengan system drainase sedangkan system pengelolaan air limbah padat pada umumnya menggunakan system pengolahan air limbah setempat (on-site system) melalui septic tank;
c. System pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terdapat di Kecamatan Sitiung;
d. Sistem Jaringan Persampahan di Kabupaten Dharmasraya belum dikelola sepenuhnya dan pengelolaan masih bersifat lokal. System pengelolaan sampah menurut sumber sampah di Kabupaten Dharmasraya yaitu sampah rumah tangga pada umumnya dikelola sendiri oleh penduduk dengan cara dibakar dan ditimbun pada lahan – lahan kosong di lingkungan rumah masing – masing. Bahkan masih ada penduduk yang banyak membuang sampah langsung ke sungai du lingkungan permukiman, untuk sampah pasar dikelola oleh pengelola masing – masing pasar dan diangkut dengan truk sampah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya. TPA terdapat di Kecamatan

Sitiung dengan luas 6 Ha dan TPS terdapat 12 unit yang terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Koto Besar dan kecamatan Koto Salak;

e. Kabupaten Dharmasraya rawan terhap bencana banjir, jalur evakuasi bencana terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Asam jujuhan dan Kecamatan Koto Besar. Rencana system pengendalian banjir di Kabupaten Dharmasraya meliputi : terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang dan Kecamatan Padang Laweh, selain jaringan pengendali banjir juga terdapat bangunan pengendali banjir terdapat di Kecamatan Pulau Punjung;
f. Rencana pengembangan jaringan drainase di Kabupaten Dharmasraya yaitu pengembangan jaringan drainase primer yang berada pada kawasan permukiman padat di Kecamatan pulau Punjung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Koto Besar. Pengembangan jaringan drainase sekunder yang berada di kawasan permukiman perkotaan kecamatan meliputi, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak dan Kecamatan Koto Besar. Pengembangan jaringan drainase tersier yang berada di kawasan permukiman perkotaan kecamatan meliputi, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Koto Besar.

f. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya seluas 17.247 Ha atau hanya 5,9 % dari luas kabupaten. Walaupun dengan proporsi luas yang kecil akan tetapi kawasan permukiman menjadi lokasi penyediaan sarana prasarana tempat kehidupan penduduk. Kawasan permukiman terbagi atas permukiman perkotaan dengan luas 8.184 Ha dan Kawasan permukiman perdesaan dengan luas 9.063 Ha.

2.3 KEBIJAKAN PENANGANAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman merupakan penjabaran dari misi pembangunan dan

pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya memiliki tujuan yaitu:

1. Menyediakan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni sehingga menjamin kesejahteraan masyarakat;
2. Menyelenggarakan prasarana, sarana dan utilitas pendukung perumahan dan kawasan permukiman secara terpadu;
3. Menyediakan perumahan dan kawasan permukiman yang terjangkau sehingga seluruh masyarakat mampu memiliki hunian yang layak dan mengurangi backlog rumah;
4. Keterpaduan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tujuan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya dicapai melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman baru.
2. Pembangunan dan pengembangan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh;
3. Pembangunan kembali perumahan dan kawasan permukiman;
4. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pendukung perumahan dan kawasan permukiman secara terpadu;
5. Pemberian bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman.

Kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya dijabarkan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman baru diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:
    a. Penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
    b. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang dengan konsep hunian berimbang;
    c. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis.
2. Pembangunan dan pengembangan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:
    a. Pencegahan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh;

b. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh.

3. Pembangunan kembali perumahan dan kawasan permukiman diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:
   a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana;
   b. Penataan perumahan sesuai nilai lokasi dan kebutuhan perumahan;
   c. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.
4. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pendukung perumahan dan kawasan permukiman secara terpadu diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:
   a. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas pendukung perumahan dan kawasan permukiman sesuai kebutuhan di lingkungan permukiman;
   b. Penyediaan akses yang menghubungkan antar kawasan permukiman, antar kawasan permukiman dengan pusat kegiatan.
5. Pemberian bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:
   a. Penyediaan rumah sederhana sehat bagi MBR;
   b. Pembangunan rumah susun bagi MBR;
   c. Pembentukan kerjasama strategis dengan lembaga jasa keuangan untuk pembiayaan perumahan MBR;
   d. Pelibatan lembaga keuangan non bank untuk menjadi instrumen pembiayan rumah jangka panjang seperti perusahaan asuransi, pengelola dana pensiun dengan mekanisme kerja sama pemerintah dan swasta maupun koperasi;
   e. Mengefektifkan sumber pembiayaan pemerintah melalui koordinasi anggaran yang lebih terpadu antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota dalam mendukung program-program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:
   a. Penguatan sistem kelembagaan penyelenggara pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang profesional, produktif dan akuntabel;

b. Penguatan unit-unit kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman berbasis masyarakat;
c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah secara swadaya;
d. Peningkatan keterlibatan sektor swasta (pengembang) dalam pembangunan perumahan.

2.3.1 Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 - 2028

Strategi snitasi Kabupaten (SSK) Dharmasraya tahun 2023-2028 memiliki visi, misis tujuan dan sasaran, dapat dilihat sebagai berikut ini:

Visi :

Menuju Kabupaten Dharmasraya dengan Sanitasi Layak, Aman dan Berkelanjutan

Misi :

Misi Pengelolaan Air Limbah Domestik:

1) Meningkatkan cakupan akses sanitasi layak dan aman;
2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
3) Memperkuat kelembagaan pengelolaan air limbah domestik;
4) Meningkatkan kapasitas pendanaan pengelolaan air limbah lintas sektor.

Misi Pengelolaan Sampah:

1) Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah;
2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
3) Memperkuat kelembagaan pengelolaan persampahan;
4) Meningkatkan kapasitas pendanaan pengelolaan sampah lintas sektor.

Tujuan :

1) Tercapai akses aman 9 % di tahun 2028;
2) Menghilangkan Akses layak khusu perdesaan;
3) Meningkatkan akses belum layak menjadi layak 100 % ditahun 2028;
4) Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestic;
5) Terwujudnya lingkungan bersih dan sehat disekitar IPAL dan IPLT;
6) Terwujudnya penyedotan lumpur tinja terjadwal;
7) Terwujudnya pengelolaan air limbah domestic yang terstruktur dan professional;

8) Terwujudnya pendanaan lintas sector untuk pengelolaan air limbah domestic;
9) Terwujudnya unit pengelolaan air limbah domestic;
10) Adanya aturan yang mengikat tentang pengelolaan air limbah domestic;
11) Tercerahkannya masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

Sasaran :

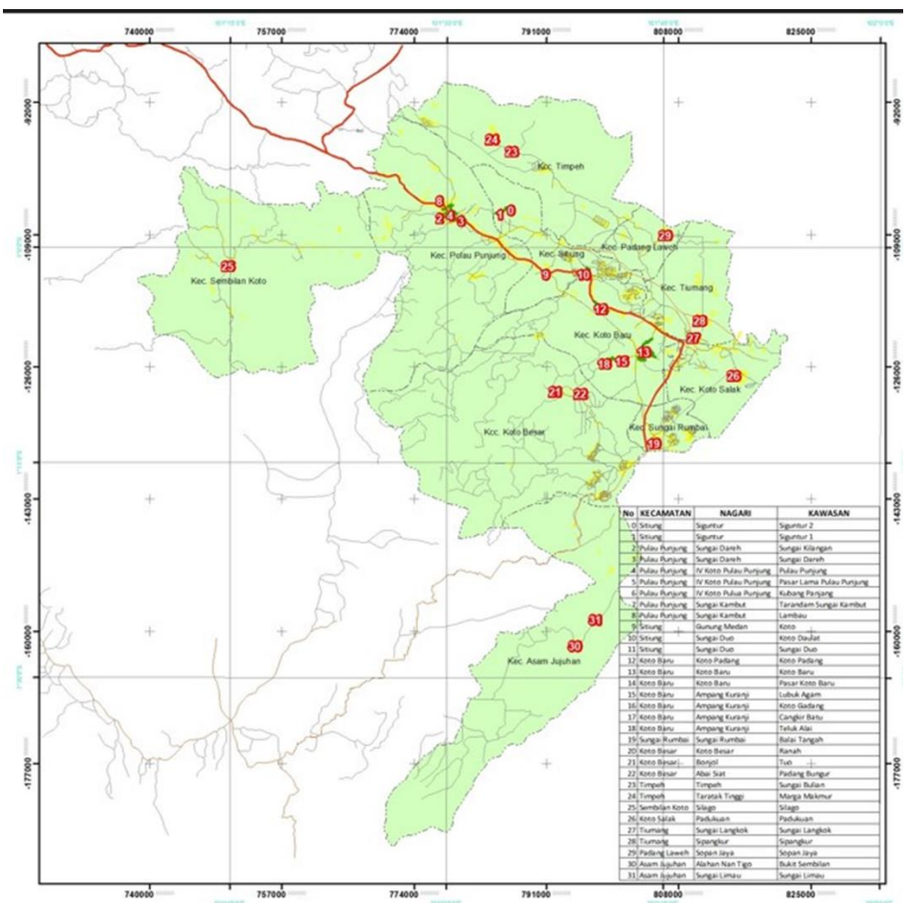
1) Meningkatkan akses aman air limbah domestic;
2) Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait akses sanitasi layak dan aman;
3) Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya sanitasi layak;
4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pengelolaan air limbah;
5) Melaksanakan pemantauan pada efluen IPAL dan IPLT;
6) Melaksanakan penyedotan terjadwal terhadap tanki septic yang layak;
7) Terbentuk lembaga pengelola air limbah domestic kabupaten;
8) Meningkatkan keberfungsiaan IPLT;
9) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelolaan air limbah di IPLT;
10) Meningkatkan keterlibatan sector swasta dalam pengelolaan air limbah domestic;
11) Membentuk unit pengelola teknis dalam pengelolaan air limbah domestic;
12) Menyusun peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestic;
13) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestic;

BAB 3 PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

3.1 SEBARAN KAWASAN KUMUH

Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/160/KPTS-BUP/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/110/KPTS-BUP/2025 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Dharmasraya terdapat 34 titik kawasan kumuh dengan total luas kawasan yaitu 423,87 Ha yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Gambar 3.1 Peta Sebaran Kawasan Kumuh di Kabupaten Dharmasraya



Tabel 3.1
Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/160/KPTS-BUPATI/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/110/KPTS-BUP/2025 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Desa/Nagari	Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		Geografis		Kewenangan
			Nama	Luas (Ha)	BT	LU/LS	
1	Sembilan Koto	1. Silago	Silago	1,68	101⁰14’51.128”E	1⁰1’12.313” S	Kabupaten
2	Pulau Punjung	2. IV Koto Pulau Punjung	Pulau Punjung	17,75	101⁰ 30’27.031”E	0⁰ 57’38.213”S	Pusat
		3. IV Koto Pulau Punjung	Pasar Lama Pulau Punjung	15,40	101⁰ 30’.933”E	0⁰ 57’40.267”S	Pusat
		4. IV Koto Pulau Punjung	Kubang Panjang	13,61	101⁰ 30’11.743”E	0⁰ 57’9.234”S	Provinsi
		5. Sungai Kambut	Tarandam Sungai Kambut	3,59	101⁰ 29’43.643”E	0⁰ 57’21.313”S	Kabupaten
		6. Sungai Kambut	Lambau	3,70	101⁰ 29’32.233”E	0⁰ 56’47.156”S	Kabupaten
		7. Sungai Dareh	Sungai Kilangan	12,70	101⁰ 30’0.820”E	0⁰ 57’53.128”S	Provinsi
		8. Sungai Dareh	Sungai Dareh	13,89	101⁰ 30’52.594”E	0⁰ 58’2.487”S	Provinsi
		9. Sikabau	Sikabau	14,30	101⁰ 30’52.594”E	0⁰ 58’2.487”S	Provinsi
3	Sitiung	10. Siguntur	Siguntur 1	10,55	101⁰ 33’37.469”E	0⁰ 57’34.720”S	Provinsi
		11. Siguntur	Siguntur 2	8,31	101⁰ 34’4.484”E	0⁰ 58’18.168”S	Kabupaten
		12. Sungai Duo	Koto Daulat	15,43	101⁰ 39’25.111”E	1⁰ 1’45.294”S	Pusat
		13. Sungai Duo	Koto / Sungai Duo	14,60	101⁰ 36’50.315”E	1⁰ 1’47.146”S	Kabupaten
4	Timpeh	14. Taratak Tinggi	Marga Makmur	2,13	101⁰ 33’7.985”E	0⁰ 52’18.507”S	Kabupaten
		15. Timpeh	Sungai Bulian	12,55	101⁰ 34’25.972”E	0⁰ 53’13.079”S	Kabupaten
5	Koto Baru	16. Koto Padang	Koto Padang	33,18	101⁰ 4035.907”E	1⁰ 4’9.082”S	Pusat
		17. Koto Baru	Koto Baru	68,98	101⁰ 43’53.507”E	1⁰ 7’7.895”S	Pusat

No	Kecamatan	Desa/Nagari	Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		Geografis		Kewenangan
			Nama	Luas (Ha)	BT	LU/LS	
		18. Koto Baru	Pasar Koto Baru	21,57	101⁰ 4326.686”E	1⁰ 7’46.074”S	Pusat
		19. Koto Baru	Koto Baru 3	10,50	101⁰ 43.16,579”E	1⁰ 7’25.251”S	Provinsi
		20. Ampang Kuranji	Lubuk Agam	3,37	101⁰ 41.885”E	1⁰ 7’48.553”S	Kabupaten
		21. Ampang Kuranji	Teluk Alai	9,53	101⁰ 40’53.611”E	1⁰ 8’0.507”S	Kabupaten
6	Koto Salak	22. Pandukuan	Pandukuan	21,98	101 49’59.825”E	1⁰ 8’48.130”S	Pusat
7	Tiumang	23. Sungai Langkok	Sungai Langkok	3,40	101⁰ 47’5.486”E	1⁰ 6’5.071”S	Kabupaten
		24. Sipangkur	Sipangkur	5,81	101⁰ 47’30.678”E	1⁰ 4’57.885”S	Kabupaten
8	Padang laweh	25. Sopan Jaya	Sopan Jaya	2,04	101⁰ 45’7.285”E	0⁰ 59’1.201”S	Kabupaten
9	Sungai Rumbai	26. Sungai Rumbai	Balai Tangah	6,25	101 44’20.891”E	1⁰ 13’31.736”E	Kabupaten
10	Koto Besar	27. Bonjol	Tuo	4,00	101⁰ 37’32.342”E	1⁰ 9’55.830”S	Kabupaten
		28. Bonjol	Bonjol	12,96	101⁰ 37’38.671”E	1⁰ 10’4,48”S	Provinsi
		29. Koto Besar	Ranah	3,13	101⁰ 391.493”E	1⁰ 9’55.050”S	Kabupaten
		30. Koto Besar	Ranah Baru	14,86	101⁰ 38’41.759”E	1⁰ 9’55.050”S	Provinsi
		31. Abai Siat	Padang Bungur	7,29	101⁰ 3915.149”E	1⁰ 10’4.147”S	Kabupaten
11	Asam Jujuhan	32. Alahan Nan Tigo	Bukit Sembilan /Lubuk Baru	9,75	101⁰ 39’15.138”E	1⁰ 27’39.092”S	Kabupaten
		33. Sungai Limau	Sungai Limau	8,99	101⁰ 40’18.679”E	1⁰ 25’50.548”S	Kabupaten
Total Luas Kawasan				**423,87**	**-**	**-**	

Sumber: SK Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

3.1.1 Kecamatan Sembilan Koto

Kecamatan Sembilan Koto teletak di 0° 54' 20'' - 0° 09' 06'' LS dan 101° 09' 21'' - 0° 26' 50'' BT dengan ketinggian wilayah 153 meter dari permukaan laut. Kecamatan Sembilan Koto memiliki luas wilayah yaitu 500,5 Km^2 dan terdiri dari 4 (empat) nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/160/KPTS-BUP/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor :100.3.3.2/110/KPTS-BUP/2025 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Sembilan Koto terdapat satu kawasan kumuh yaitu Kawasan Silago yang terletak di Nagari Silago, berikut adalah gambaran kawasan kumuh berdasarkan hasil survei ulang, dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1.1 Kawasan Silago, Nagari Silago

Kawasan ini terdapat di Nagari Silago, Kecamatan Sembilan Koto. Luas kawasan kumuh Silago yaitu 1,68 Ha dengan jumlah bangunan 64 unit, jumlah penduduk 219 jiwa dan jumlah KK yaitu 73 KK. Kawasan Silago terletak pada lintang $101^0$14'51"E dan $1^0$1'12"S. Berdasarkan hasil dari verifikasi dan survey ke lapangan untuk melihat kembali kondisi kekumuhan yang ada di kawasan Silago dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Untuk lebih jelasnya kondisi kekumuhan kawasan Silago dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Berdasarkan indikator penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan berdasarkan kondisi bangunan yang ada dengan melihat ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidakteraturan bangunan dengan persyaratan teknis bangunan pada Kawasan Silago memiliki luas deliniasi kawasan ± 1,68 Ha dengan jumlah bangunan sebanyak 64 unit bangunan. Bangunan yang memiliki ketidakteraturan bangunan ± 25 % atau 16 unit dari total bangunan yang dapat dilihat dari pola tata letak bangunan dan garis sempadan bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan masih dalam kategori rendah yaitu dengan persentase ± 25%.

Ditinjau dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, yaitu dari pengendalian dampak

lingkungan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, masih terdapat beberapa bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis sebuah bangunan yang dapat dilihat dari konstruksi bangunan dan pembagian peruntukan ruang yang tidak sesuai dengan fungsinya.

B. Kondisi Jalan Lingkungan



Untuk penilaian kondisi jaringan jalan lingkungan, dilihat dari jangkauan pelayanan jaringan jalan dan kualitas jaringan jalan. Lokasi Kawasan Silago terletak di sepanjang jalan kabupaten. Sebagian besar kawasan telah terlayani jaringan jalan lingkungan. Untuk kondisi jalan di Kawasan Silago dilihat dari kualitas permukian jalan lingkungan, umumnya sudah baik hal ini dilihat dari permukaan jalan yang ada seperti pada jalan utama dan beberapa ruas jalan lingkungan di kawasan ini sudah di aspal.

C. Kondisi Penyedian Air Minum



Penilaian untuk pelayanan penyediaan air minum di Kawasan Kumuh Silago dilihat dari ketersediaan akses aman air minum dan kebutuhan air minum liter/perhari/ per orang. Berdasarkan hasil survey lapangan, pada umumnya masyarakat sudah terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan teridak tercemar) dan penduduk telah terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) yang bersumber dari mata air yang berasal dari air gunung.

D. Kondisi Drainase Lingkungan



Untuk kondisi drainase lingkungan, ditinjau berdasarkan ketidaktersediaan jaringan drainase lingkungan, kemampuan mengalirkan limpasan air hujan dan kualitas konstruksi drainase lingkungan. Untuk kawasan kumuh di Silago ini, ± 25% kawasan yang memiliki/terlayani jaringan drainase lingkungan. Jadi sekitar 75% kawasan tidak terlayani atau belum memiliki jaringan drainase. Untuk sementara jaringan

drainase yang ada masih dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Sementara yang tidak memiliki jaringan drainase langsung diserap oleh tanah dan mengalir mengikuti kontur lahannya. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase yang ada sebagian besar sudah permanen/sudah dalam bentuk semenisasi.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk parameter air limbah yang dilihat dari sistem pengelolaan air yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Maka berdasarkan hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Silago ini untuk sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis ± 50%, hal ini dilihat dari masih adanya masyarakat yang tidak memiliki WC. Dan untuk penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu ± 50 %, hal ini ditinjau dari masih adanya masyarakat yang tidak memiliki septictank, sehingga pembuangan air limbahnya langsung ke sungai.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Penilaian kondisi pengelolaan persampahan dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

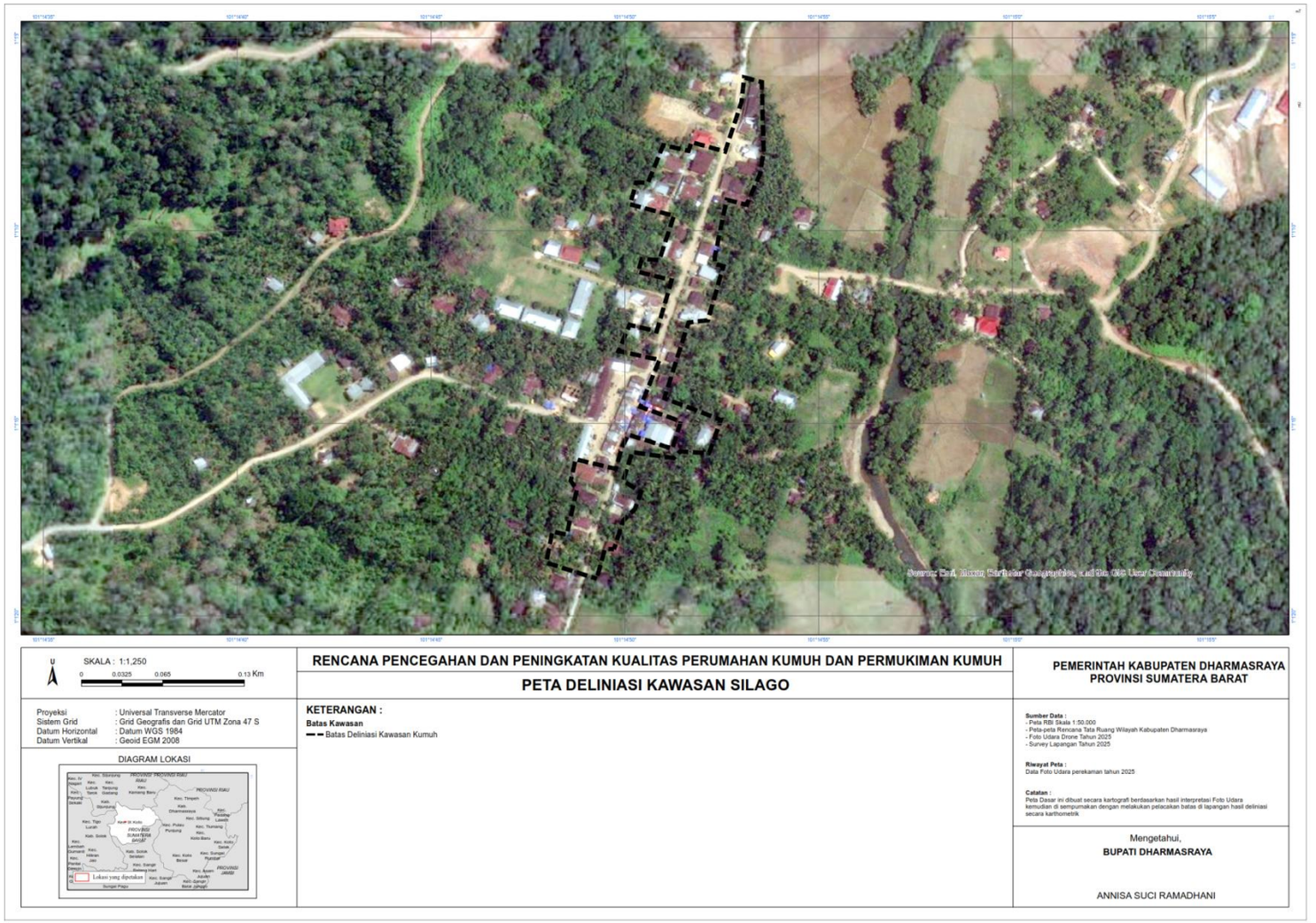
Dari hasil survey lapangan, kondisi pengelolaan persampahan pada kawasan Silago, tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis. Pada kawasan ini untuk pengelolaan sampah di masyarakat masih dengan sistim dibakar di suatu titik atau menumpuk di sekitar rumah, hal ini menunjukan bahwa masyarakat masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Untuk penilaian kondisi proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini

untuk prasarana proteksi kebakaran belum tersedia, namun untuk pendukung sarana proteksi kebakaran ini pada kawasan sudah tersedia jaringan jalan lingkungan yang dapat dilewati oleh kendaraan pemadam kebakaran.

Gambar 3.2 Peta Delinasi Kawasan Silago



3.1.2 Kecamatan Pulau Punjung

Kecamatan Pulau Punjung terletak di 0° 50' 40'' - 1° 10' 04'' LS dan 101°23' 36'' - 101°36' 40'' BT dengan ketinggian wilayah 115-125 meter dari permukaan laut. Kecamatan Pulau Punjung memiliki luas wilayah yaitu 443,16 Km^2 dan terdiri dari 6 (enam) Nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/160/KPTS-BUP/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor :100.3.3.2/110/KPTS-BUP/2025 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Pulau Punjung terdapat 7 kawasan kumuh. Untuk lebih jelasnya gambaran kawasan kumuh yang terdapat di Kecamatan Pulau Punjung berdasarkan hasil survei lapangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.2.1 Kawasan Pulau Punjung

Kawasan ini terdapat di Nagari Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung dengan luasan 17,75 Ha dengan jumlah bangunan 190 unit, jumlah penduduk 620 jiwa dan jumlah KK 155 yaitu. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Pulau Punjung ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Kawasan Pulau Punjung terletak pada lintang 101°30'27"E dan 0°57'38"S. Untuk lebih jelasnya kondisi kawasan kumuh Pulau Punjung dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunann Gedung





Sesuai dengan kriteria indikator kekumuhan untuk aspek bangunan dapat dilihat berdasarkan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan dan kelayakan fisik bangunan. Pada kawasan Pulau Punjung memiliki luas deliniasi kawasan yaitu ± 17,75 Ha dengan bangunan sebanyak 190 unit. Bangunan yang tidak memiliki ketidakteraturan bangunan ±25% atau 48 unit dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tata letak bangunan dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah dimana bangunan menghadap ke jalan dan saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan

pada kawasan ini masih tergolong sedang karena sebagian dari kelompok bangunan yang ada yaitu sekitar 55% memiliki kepadatan yang cukup rapat yang dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.



Untuk kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, dikawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum sesuai dengan persyaratan teknis sebuah bangunan hunian yang layak, yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan, bukaan/ventilasi dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.

B. Kondisi Jalan Lingkungan



Untuk penilaian kondisi jaringan jalan berdasarkan jangkauan jaringan jalan dalam Kawasan dan kondisi kualitas jaringan jalan. Untuk prasarana jalan, kawasan Pulau Punjung pada umumnya sudah tersedia jaringan jalan yang umumnya telah terlayani seluruh kawasan dengan permukaan jalan rata-rata telah pengerasan aspal dan juga berupa cor beton.

C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum yang dilihat dari akses aman air minum dan ketersediaan akan kebutuhan air minum minimal orang/liter/hari, maka dari hasil survey lapangan, penyediaan air penduduk untuk minum dan kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi yang bersumber dari sumur dan sumur bor yang cukup bersih dan jernih.

D. Kondisi Drainase Lingkungan





Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari ketersedian jaringan drainase lingkungan, kemampuan mengalirkan limpasan air hujan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan, maka di kawasan kumuh Pulau Punjung ini, baru 60% kawasan yang memiliki/tersedia jaringan drainase lingkungan dan masih ada sekitar 40% lagi kawasan ini tidak terlayani/tidak memiliki jaringan drainase.



Sampai saat ini di kawasan kumuh Pulau Punjung drainase yang ada masih dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Sementara yang tidak memiliki jaringan drainase langsung diserap oleh tanah dan mengalir mengikuti kontur lahannya. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase yang ada, umumnya darinase tersebut telah permanen/sudah semenisasi dengan kondis baik. Dibeberapa ruas pada jaringan drainase lingkungan ini ada yang telah tertimbun dan ada yang telah mengalami pendangkalan karena sedimentasi.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek pengelolaan air limbah, yang dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Maka di kawasan ini dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Pulau Punjung sistem pengelolaan air limbah umumnya telah memenuhi persyaratan teknis yaitu hampir 95 % penduduk atau rumah yang ada telah memiliki WC sendiri. Sedangkan untuk prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang telah memenuhi persyaratan



teknis seperti telah memiliki septik tank untuk pembuangan akhir limbah padat rumah tangga, di kawasan ini juga sudah hampir 95 % telah memiliki sarana tersebut sendiri di setiap rumah.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan







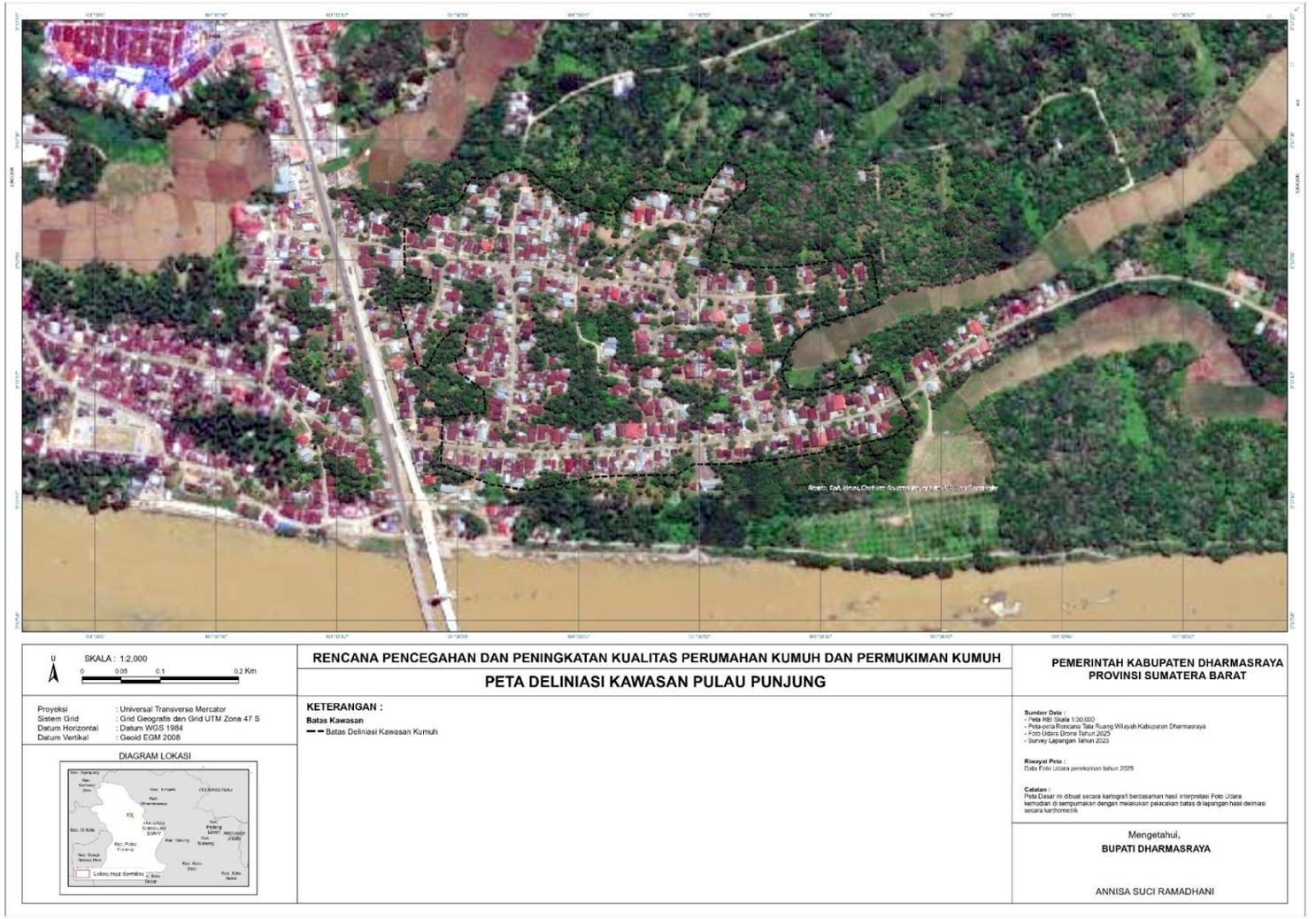
Untuk parameter penilaian pengelolaan persampahan yang dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan yang sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Maka di kawasan Pulau Punjung ini sebagian masyarakat yaitu sekitar 60% tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan persyaratan teknis. Hal ini dapat dilihat dari ketidaktersediaan sarana dan prasarana persampahan seperti tong sampah dan TPS pada sebagian kawasan ini. Dalam pengelolaan persampahan, oleh masyarakat pada umumnya sampah yang ada di tumpuk pada suatu tempat dan ada juga sampah tersebut dibakar.

Bagi sebagian kawasan yang terdapat prasarana dan sarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan sesuai persyaratan teknis (terkelola secara terorganisir), baru sekitar 40%. Dimana pada bagian kawasan ini (perumahan dan rumah yang berada di jalan utama) telah terdapat tong-tong sampah dan pembuangan sampah sudah terlayani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sistem pengangkutan sampahnya setiap hari oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup.

G. Kondisi Proteksi Kebaran

Kondisi Proteksi kebakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

Gambar 3.3 Peta Delinasi Kawasan Pulau Punjung



3.1.2.2 Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung Nagari IV Koto Pulau Punjung

Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung ini terdapat di Nagari IV Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung dengan luasan 15,40 Ha dengan jumlah bangunan 171 unit, jumlah penduduk 574 jiwa dan jumlah KK yaitu 158 KK. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung ini melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung terletak pada lintang 101°30'93"E dan 0°57'40"S. Untuk lebih jelasnya kondisi kawasan kumuh Pasar Lama Pulau Punjung dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung





Untuk kondisi bangunan yang dilihat ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Maka dari hasil survey lapangan, kawasan kumuh Pasar Lama Pulau Punjung memiliki luas ± 15,40 Ha dan bangunan sebanyak 171 unit bangunan. Bangunan yang memiliki ketidakteraturan bangunan ada sekitar 25 % atau 43 unit bangunan dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari pola tata letak yang saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong sedang karena sebagian dari bangunan yang ada (55%) memiliki kepadatan yang cukup rapat yang dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.

B. Kondisi Jalan Lingkungan



Seperti yang telah di jelaskan pada bagian diatas dimana untuk penilaian terhadap jaringan jalan lingkungan adalah seberapa besar jaringan jalan lingkungan telah melayani kawasan permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan. Dari hasil survey lapangan, kawasan Pasar Lama Pulau Punjung, ketersediaan jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, jalan lingkungan yang ada umumnya sudah baik dengan perkerasan aspal dan cor beton.





C. Kondisi Penyedia Air Minum



Berdasarkan penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum yang dapat dilihat dari akses aman air minum dan kebutuhan air minum minimal orang/liter/perhari. Maka dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) umumnya penduduk Kawasan Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur dan mata air yang bersih dan jernih serta sudah adanya PAMSIMAS.



D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka di kawasan kumuh Pasar Lama Pulau Punjung ini baru 40% kawasan yang memiliki/tersedia drainase lingkungan dan 60% kawasan tidak terlayani jaringan drainase atau belum memiliki jaringan drainase lingkungan.

Dilihat dari kondisi jaringan drainase yang ada pada kawasan kumuh Pasar Lama Pulau Punjung ini terdapat drainase lingkungan yang rusak sebanyak 70% sehingga air tidak mampu mengalirkan limpasan

air dan menimbulkan genangan/banjir ketika hujan yang lebih dari 2 jam.



E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan air limbah/sanitasi antara lain lain berdasarkan ketersediaan akses air limbah, persyaratan teknis air limbah dan sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/ kloset yang terhubung dengan tangkiseptik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat. Pada kawasan kumuh Kubang Panjang sistem pengelolaan air limbah hampir 95% telah memenuhi persyaratan teknis yang mana dapat dilihat dari hampir seluruh rumah yang ada telah memiliki WC di rumah masing-masing. Sedangkan untuk prasarana dan sarana pengelolaan air limbah juga sudah hampir 95% rumah-rumah yang ada memiliki tempat pembuangan akhir limbah padat berupa septik tank yang telah memenuhi persyaratan teknis .

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



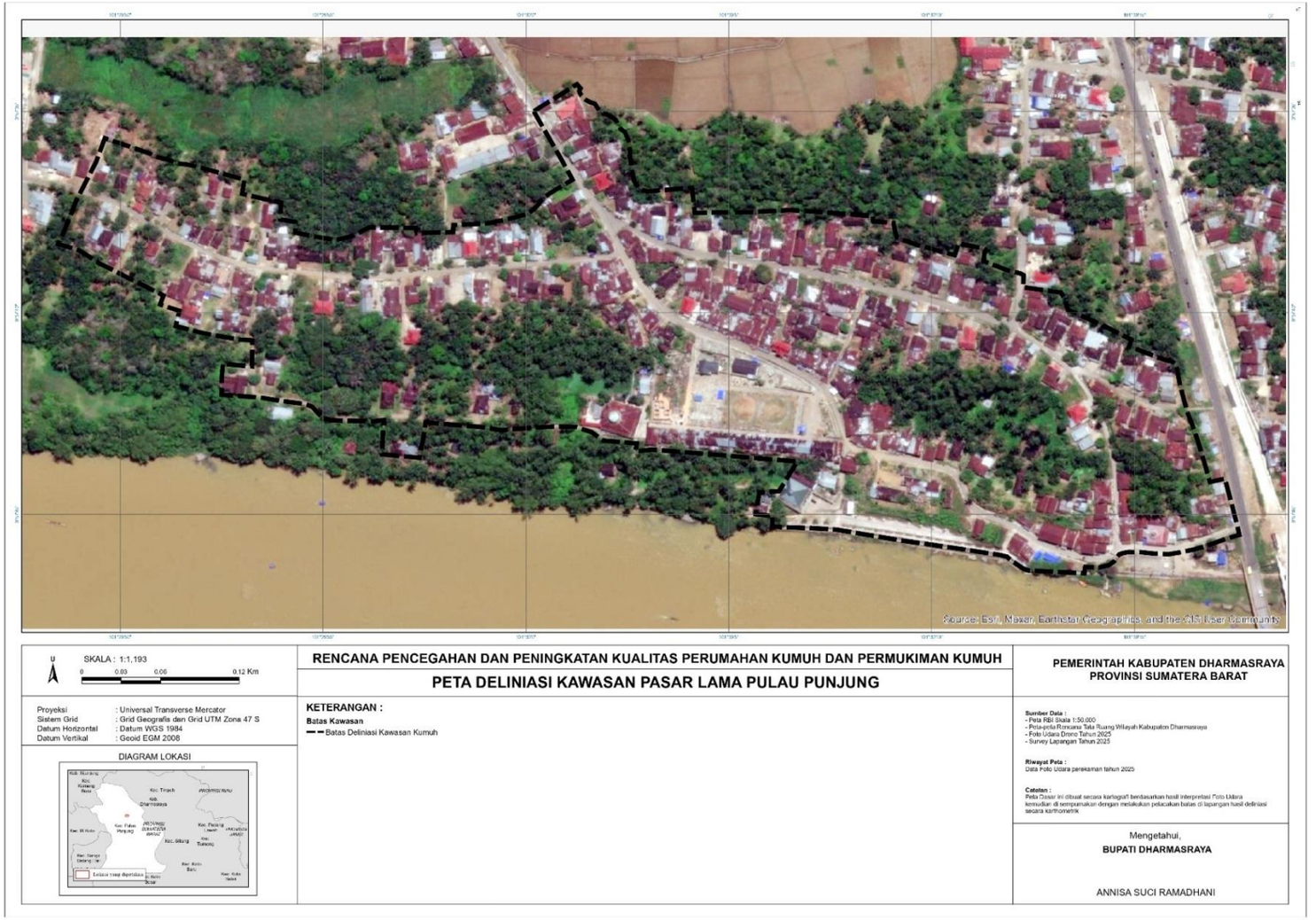
Pada Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung, kondisi pengolalaan persampahan yang dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, terdapat ± 50% di kawasan tersebut tidak tersedia prasarana dan sarana persampahan seperti tidak ada tempat sampah dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis. Bagi masyarakat yang belum/tidak memiliki sarana dan prasarana persampahan mereka masih melakukan pembuangan sampah pada suatu tempat atau dekat dengan pekaranggan mereka. Sedangkan untuk sistem pengelolaan persampahan juga tidak memenuhi persyaratan teknis karena belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir yang dilakukan oleh dinas terkait.

Mereka melakukan pengelolaan sampah masih tradisional yaitu dengan menimbun atau membakar.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Maka pada kawasan ini untuk sarana dan prasarana proteksi kebakaran belum tersedia seperti tidak memiliki posko dan alat berupa APAR. Sedangkan untuk prasarana pendukung salah satunya berupa jaringan jalan, di kawasan ini umumnya jalan lingkungan yang ada dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran yang dapat mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

Gambar 3.4 Peta Delinasi Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung



3.1.2.3 Kawasan Kubang Panjang Nagari IV Koto Pulau Punjung

Kawasan ini terdapat di Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung. Luas kawasan kumuh 13,61 Ha dengan jumlah bangunan 203 unit, jumlah penduduk 1.301 jiwa dan dan jumlah KK yaitu 170 KK. Kawasan Kubang Panjang terletak pada lintang 101°30'27"E dan 0°57'38"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Kubang Panjang ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan Kubang Panjang sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung





Untuk kondisi bangunan yang dilihat dari ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan (konstruksi). Dari hasil survey lapangan, di kawasan Kubang Panjang memiliki luas deliniasi kawasan ± 13,61 Ha dan jumlah bangunan sebanyak 203 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan ada sekitar 51 % atau 104 unit dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari pola tata letak seperti tidak saling berhadapan dan menghadap ke jalan, serta tidak memiliki GSB dan jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong sedang karena sebagian dari bangunan yang ada yaitu ± 60% dari kelompok bangunan yang ada dalam kawasan memiliki kepadatan yang cukup tinggi yang mana dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.

Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.

B. Kondisi Jalan Lingkungan

Dengan melihat parameter penilaian untuk jaringan jalan lingkungan dimana jaringan jalan lingkungan yang ada pada kawasan kumuh Kubang Panjang umumnya telah dapat melayani seluruh kawasan permukiman yang ada. Untuk kondisi jalan yang dilihat dari konstruksi atau kualitas permukaan jalan, umumnya telah berupa perkerasan cor beton dan aspal dengan kondisi sebagian besar baik. Sementara untuk jalan rusak masih terdapat di beberapa ruas jalan yang terbuat daric or beton.




C. Kondisi Penyediaan Air Minum



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum dan kebutuhan air minum minimal. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum penduduk yang terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) umumnya telah terlayani dan penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) umumnya juga penduduk Kawasan Kumuh Kubang Panjang sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur yang bersih dan jernih serta sudah adanya PAMSIMAS.



D. Kondisi Drainase Lingkungan



Untuk kondisi jaringan drainase lingkungan, berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan, dari hasil survey lapangan ditemukan bahwa baru sekitar 70% kawasan memiliki/tersedia jaringan drainase lingkungan dan 30% lagi dalam kawasan belum terlayani jaringan drainase.



Kondisi jaringan drainase lingkungan Pada kawasan kumuh Kubang Panjang ini drainase lingkungan yang tersedia dalam kondisi rusak

yaitu sekitar 80% sehingga air tidak mampu mengalirkan limpasan air dan menimbulkan genangan ketika hujan.

Hal ini juga disebabkan dari jaringan drainase yang ada tidak dapat berfungsi secara efektif sehingga tidak dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan atau banjir. Sementara yang tidak memiliki jaringan drainase langsung diserap oleh tanah dan mengalir mengikuti kontur lahannya. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase yang telah permanen/sudah semenisasi, pada umumnya jaringan drainase yang ada tersebut sudah banyak mengalami kerusakan.

E. Kodisi Penegelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, yang dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Maka dari hasil survei lapangan pada kawasan kumuh Kubang Panjang sistem pengelolaan air limbah dan ketersediaan prasarana dan sarana hampir 95 % telah memenuhi persyaratan teknis. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan WC dan tempat pembuangan akhir (septictank) sendiri pada setiap rumah

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir, maka dari hasil survey lapangan pada kawasan Kubang Panjang Sebagian besar Kawasan tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir).



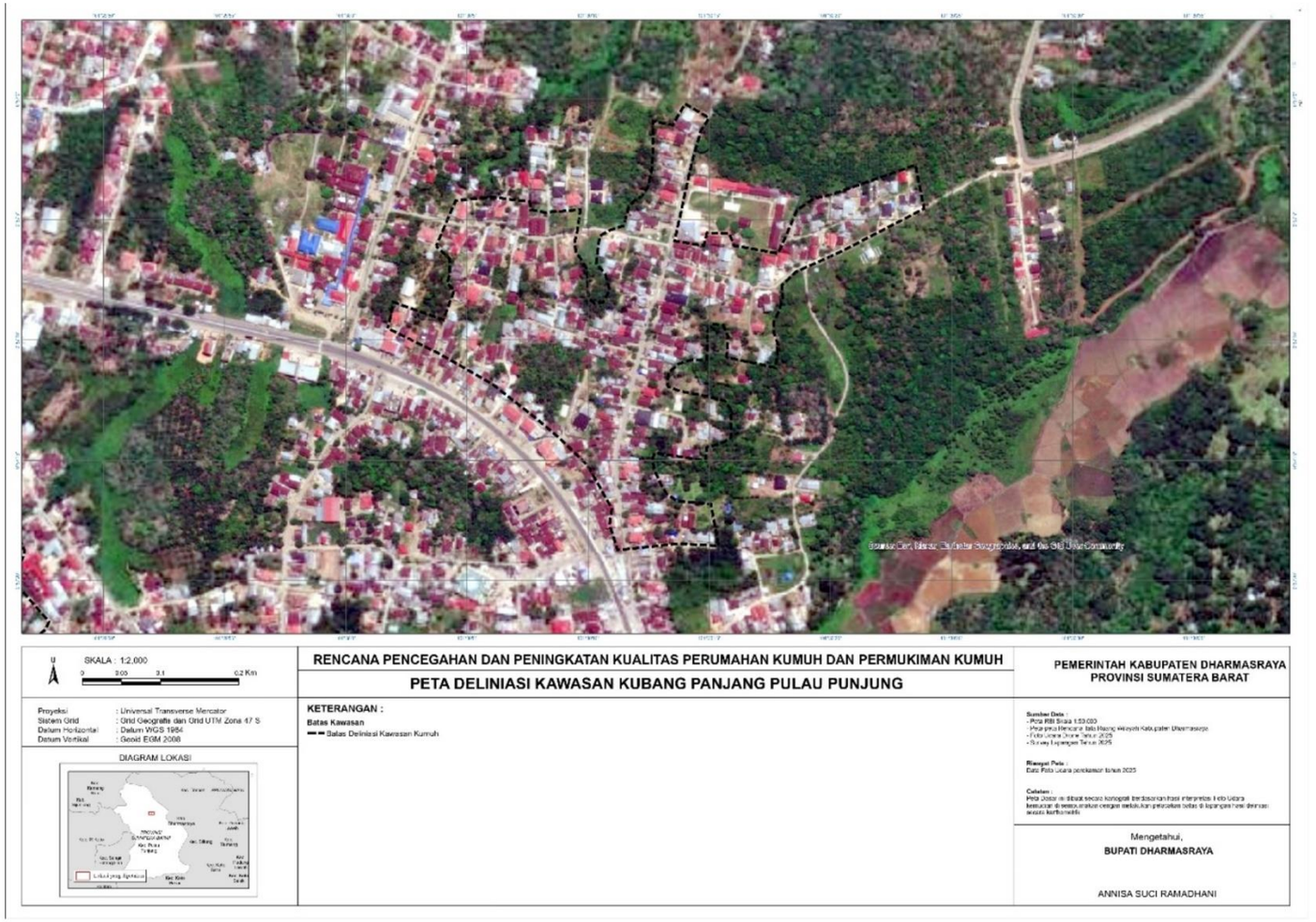
Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat baru sekitar ± 40% yang sudah sesuai dengan sistem

teknis yaitu sudah terlayani oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu pada Kawasan sepanjang jalan utama. Sistem pengangkutan sampah dilakukan setiap hari oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup dan 60% lagi masyarakat masih mengelola persampahannya dalam bentuk membakar disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah, dan masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebaran

Kondisi proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran salah satunya didukung dengan jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran dalam lokasi permukiman walapun masih ada beberapa ruas yang tidak dapat dilalui.

Gambar 3.5 Peta Delinasi Kawasan Kubang Panjang



3.1.2.4 Kawasan Kumuh Tarandam Nagari Sungai Kambut

Kawasan kumuh Tarandam ini terdapat Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung. Luas kawasan kumuh Tarandam Sungai Kambut yaitu 3,59 Ha dengan jumlah bangunan 87 unit, jumlah penduduk 133 jiwa dan jumlah KK yaitu 35 KK. Berdasarkan hasil survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Tarandam Sungai Kambut ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Kawasan Tarandam Sungai Kambut terletak pada lintang 101°29'43"E dan 0°57'21"S. Untuk lebih jelasnya kondisi kawasan kumuh Tarandam dapat dilihat pada uraian berikut ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung







Berdasarkan parameter dan indikator kekumuhan pada aspek kondisi bangunan hunian dapat dilihat berdasarkan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan dan kelayakan fisik bangunan seperti tata bangunan, tata kualitas lingkungan, tata letak, sempadan bangunan, dan tampilan bangunan.

Pada Kawasan Tarandam Sungai Kambut memiliki luas deliniasi kawasan kumuh yaitu ± 3,59 Ha dengan jumlah bangunan sebanyak 87 unit bangunan. Dilihat dari kondisi bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan bisa dikategorikan kecil karena hanya 25 % atau sekitar 22 unit dari total bangunan yang ada, bangunan-bangunan tersebut memiliki tata letak yang tidak sesuai dengan aturan teknis tata bangunan yang dapat dilihat dari orientasi bangunan yang tidak menghadap ke jalan dan antar bangunan yang tidak sejajar atau berhadapan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini juga masih tergolong rendah karena hanya sekitar 25% dari bangunan yang ada memiliki kerapatan yang cukup tinggi yang dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan luas lahan terbangunnya. Sedangkan dilihat dari kondisi konstruksi dan kelayakan secara teknis, pada kawasan ini sebagian sudah permanen namun masih ada juga terdapat beberapa rumah yang konstruksinya kayu yang dapat dikategorikan rumah tidak

layak huni. Dan dilihat dari segi fungsi ruang dan aspek kesehatan dan kenyamanan juga masih ada beberapa rumah yang tidak sesuai dengan standar teknis seperti bukaan/ventilasi yang kurang dan fungsi-fungsi ruang yang belum sesuai dengan fungsinya seperti dapur dan kamar mandi/WC.

B. Kondisi Jalan Lingkungan



Untuk kondisi jaringan jalan lingkungan yang dinilai berdasarkan jangkauan pelayanan jaringan jalan dan persyaratan teknis/kualitas jaringan jalan, di kawasan Tarandam ini berdasarkan hasil survey lapangan jaringan jalan lingkungan hampir seluruhnya telah dapat menjangkau keseluruh kawasan perumahan dan permukimannya dengan kualitas permukaan jalan sudah pengerasan beton dan juga aspal. Dari jaringan jalan yang ada untuk kondisi jalan nya saat ini terdapat pada beberapa ruas, dengan kondisi jalan yang mulai rusak .





C. Kondisi Penyedian Air Minum



Dari penilaian penyediaan air minum yang dilihat berdasarkan akses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar). Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari), untuk kawasan kumuh Tarandam Sungai Kambut untuk penyediaan akses air minum yang berkualitas dapat dikatakan belum terpenuhi, karena masyarakat pada umumnya menggunakan air sumur dan belum diketahui apakah air tersebut sudah dilakukan uji labor untuk dapat layak minum atau tidaknya. Dilihat dari kasat mata air yang ada tersebut cukup jernih. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum secara kuantitas sudah terpenuhi



dengan sumber air minum berasal dari sumur-sumur yang ada di setiap rumah penduduk.

D. Kondisi Drainase Lingkungan





Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari ketersediaan jaringan drainase lingkungan, kemampuan mengalirkan limpasan air hujan dan kualitas konstruksi drainase lingkungan, dari hasil survey lapangan di kawasan Tarandam ini baru sekitar 30% kawasan yang memiliki jaringan drainase lingkungan dan 70% Kawasan belum terlayani atau memiliki jaringan drainase lingkungan. Dengan kondisi tersebut, jaringan drainase yang ada tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dan banjir dengan luas wilayah genangan sekitar 1,6 Ha yang hampir lebih dari 2 jam. Hal ini juga disebabkan oleh kondisi drainase yang ada kurang terawat dan adanya sedimentasi. Untuk kondisi konstruksi darinase yang ada umumnya telah permanen/ semenisasi dengan kondisi cukup baik.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Penilaian terhadap pengelolaan air limbah antara lain dilihat berdasarkan sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan pernyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan kondisi sistem pengelolaan air limbah di kawasan kumuh Tarandam Nagari Sungai Kambut, sebagian besar telah memiliki sistem yang memadai yaitu memiliki jamban atau kloset yang terhubung dengan tangki septik secara individu yaitu sekitar 70%. Namun dari nilai tersebut masih terdapat beberapa rumah yang sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan dengan persyaratan teknis seperti kloset yang ada tidak terhubung dengan tangki septik, hal ini ditandai dengan masih adanya masyarakat yang membuang air limbahnya ke saluran drainase. Jadi untuk penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah di kawasan ini belum sepenuhnya memenuhi persyaratan teknis.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan





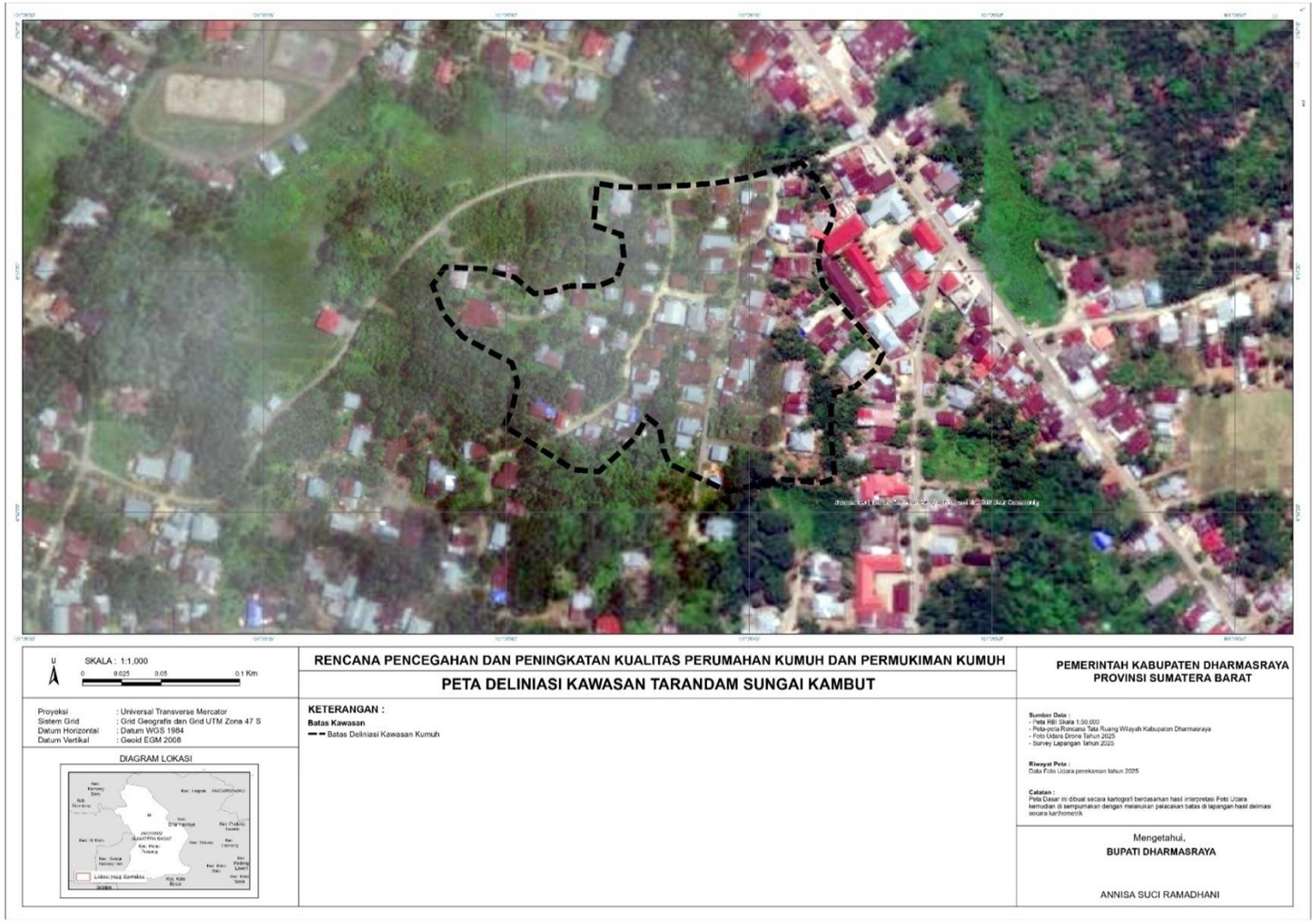
Kondisi prasarana dan sarana persampahan yang ada di kawasan belum sesuai dengan persyaratan teknis, hal ini dapat dilihat dari hasil survey lapangan, pada kawasan permukiman tidak tersedia tempat pengumpulan sampah (TPS), TPS 3R, kendaraan sampah, serta tempat pengelolaan sampah terpadu. Sedangkan sistem pengelolaan sampah yang ada tidak sesuai dengan persyaratan teknis karena belum dikelola secara terorganisir. Dalam pengelolaan persampahan pada kawasan ini masyarakat melakukan dengan cara membakar dan menumpuk sampah disuatu titik disekitar rumah atau pekarangan.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kebakaran dilihat dari ketersediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran yang ada di kawasan permukiman. Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran merupakan kondisi dimana tidak tersedianya pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran), jalan lingkungan, sarana komunikasi dan bangunan pos. Sedangkan ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran adalah tidak ada alat pemadam api (APAR), mobil pompa dan peralatan pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil survey lapangan, kondisi proteksi kabakaran di kawasan kumuh Tarandam Nagari Sungai Kambut dilihat dari ketersediaan sarana/prasarana proteksi kebakaran di kawasan tersebut umumnya belum tersedia. Namun untuk prasarana berupa jaringan jalan lingkungan di kawasan ini sudah tersedia yang dapat mendukung untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

3.5 Peta Delinasi Kawasan Tarandam



3.1.2.5 Kawasan Kumuh Lambau Nagari Sungai Kambut

Kawasan kumuh Lambau ini terdapat di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung. Luas kawasan kumuh Lambau yaitu 3,70 Ha dengan jumlah bangunan 37 unit, jumlah penduduk 148 jiwa dan jumlah KK yaitu 41 KK. Setelah dilakukan survei lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Lambau ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Kawasan Lambau terletak pada lintang 101°29'32"E dan 0°56'47"S. Untuk lebih jelasnya kondisi Kawasan Kumuh Lambau dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Kondisi bangunan hunian yang dilihat atau yang dinilai berdasarkan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan dan kelayakan fisik bangunan seperti tata bangunan, kualitas lingkungan, tata letak, sempadan bangunan dan tampilan bangunan.

Dari hasil survey lapangan pada Kawasan Kumuh Lambau memiliki luas deliniasi kawasan ± 3,70 Ha dengan jumlah bangunan sebanyak 37 unit bangunan. Dari kriteria ketidakteraturan bangunan yang ada di kawasan ini, terdapat sekitar 9 unit bangunan atau ± 25% dari total bangunan yang ada, rumah atau bangunan tersebut tidak tertata dengan baik sesuai dengan pota tata letak yang ada. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih dalam kategori rendah yaitu ± 25%, dimana terdapat beberapa bangunan yang mengelompok dengan jarak yang berdekatan dan padat.



B. Kondisi Jalan Lingkungan

Dilihat dari kondisi jaringan jalan lingkungan yang ada di kawasan ini berdasarkan cakupan/jangkauan jaringan jalan yang sesuai dengan ketentuan teknis dan dari kualitas permukaan jalan. Untuk Kawasan Lambau ini, sebagian besar perumahan dan permukimannya

telah terlayani jaringan jalan lingkungan. Dari kualitas permukaan jalan cukup baik dengan permukaan jalan aspal dan cor beton. Dari kondisi permukaan jalan yang ada masih terdapat di beberapa ruas saja yang permukaan jalannya sudah mulai rusak.



C. Kondisi Penyedian Air Minum

Penyediaan air minum dilihat berdasarkan ketersediaan akses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan keterpenuhan kebutuhan kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada Kawasan Kumuh Lambau untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari sumur, namun secara kualitas belum dilakukan pengujian labor untuk kelayakan minum untuk air tersebut. Sedangkan secara kuantitas pemenuhan kebutuhan air minum sudah terpenuhi.





D. Kondisi Drainase Lingkungan

Kondisi drainase lingkungan dilihat berdasarkan kejadian ada/tidaknya genangan dan persyaratan teknis/kualitas drainase. Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan pada kawasan kumuh Lambau, masih banyak kawasan ini tidak memiliki atau terlayani jaringan drainase lingkungan. Karena di kawasan ini hampir seluruhnya tidak ada saluran drainase. Saluran drainase yang ada masih banyak berupa saluran alami dan limpasan air hujan hanya terserap ke tanah. Apabila terjadi curah hujan yang cukup tingi pada kawasan ini terjadi genangan. Kualitas konstruksi buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.



Dari hasil survey lapangan, pada Kawasan Kumuh Lambau sistem pengelolaan air limbah sekitar 75 % yang telah memenuhi persyaratan teknis, hal ini dilihat dari kepemilikan WC/jamban sendiri. Namun dari segi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang ada masih ada ± 25 % dari rumah tersebut yang tidak memenuhi persyaratan teknis dimana kloset tidak terhubung dengan tangki septik. Bagi rumah yang tidak memiliki tangki septik mereka membuang limbah padat mereka ke saluran drainase yang dibuat secara alami dan membuat kolam pembuangan.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi prasarana dan sarana persampahan yang ada di kawasan belum sesuai dengan persyaratan teknis, hal ini dapat dilihat dari hasil survey lapangan, pada kawasan permukiman tidak tersedia tempat pengumpulan sampah (TPS), TPS 3R, kendaraan sampah, serta tempat pengelolaan sampah terpadu. Sedangkan sistem pengelolaan sampah yang ada tidak sesuai dengan persyaratan teknis karena belum dikelola secara terorganisir. Dalam pengelolaan persampahan pada kawasan ini masyarakat masih melakukan dengan cara membakar dan menumpuk sampah disuatu titik disekitar rumah atau pekarangan.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kebakaran dilihat dari ketersediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran yang ada di kawasan permukiman. Ketidaktersediaan rasarana proteksi kebakaran merupakan kondisi dimana tidak tersedianya pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran), jalan lingkungan, sarana komunikasi dan bangunan pos. Sedangkan ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran adalah tidak tersedianya alat pemadam api (APAR), mobil pompa dan peralatan pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil survey lapangan, kondisi proteksi kabakaran di Kawasan Kumuh Lambau dilihat dari ketersediaan sarana/prasarana

proteksi kebakaran di kawasan tersebut umumnya belum ada. Namun untuk prasarana berupa jaringan jalan lingkungan di kawasan ini dapat mendukung untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

Gambar 3.6 Peta Delinasi Kawasan Lambau



3.1.2.6 Kawasan Sungai Kilangan

Kawasan Sungai Kilangan ini terdapat di Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung. Luas kawasan kumuh Sungai Kilangan yaitu 12,70 Ha dengan jumlah bangunan 124 unit, jumlah penduduk 396 jiwa dan jumlah KK yaitu 99 KK. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Sungai Kilangan ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Kawasan Sungai Kilangan terletak pada lintang 101°30'0"E dan 0°57'53"S. Untuk lebih jelasnya kondisi kawasan kumuh Sungai Kilangan dapat dilihat pada uraian berikut ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Sungai Kilangan memiliki luas deliniasi kawasan yaitu 12,70 Ha dan bangunan sebanyak 124 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 25 % atau 31 unit dari total bangunan yang ada dimana tata letak bangunan ini tidak teratur seperti tidak berorientasi ke jalan, tidak memiliki jarak GSB dan tidak sejajarnya antar rumah yang ada. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sekitar 25% dari kawasan tersebut terdapat beberapa kelompok bangunan yang cukup banyak dan rapat antar satu bangunan dengan bangunan lain dan ini juga dapat dilihat dari lahan terbangunnya.

B. Kondisi Jalan Lingkungan



Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada kawasan kumuh ini, dilihat dari luas area yang belum terlayani prasarana jalan lingkungan seperti jalan lingkungan atau gang umumnya telah terlayani dengan struktur beton, paving dan aspal. Selanjutnya dilihat dari kualitas permukaan jalan lingkungan, sebagian jaringan jalan ini



sudah mulai rusak dengan kondisi jalan buruk terutama pada perkerasan jalan aspal.

C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk melihat penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada Kawasan Kumuh Sungai Kilangan sebagian besar penduduk memiliki sumber air minum yang berasal dari sumur yang ada, sedangkan untuk kebutuhan air sehari-hari sudah terpenuhi dengan sumber air yang berasal dari sumur di masing-masing rumah penduduk.

D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari ketersedian jaringan drainase lingkungan, kemampuan mengalirkan limpasan air hujan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan. Pada kawasan kumuh Sungai Kilangan ini, hampir seluruh kawasan telah memiliki/tersedia jaringan drainase lingkungan yaitu sekitar ± 90% dan ± 10% lagi tidak terlayani/ tidak memiliki jaringan drainase.





Sampai saat ini di kawasan kumuh Sungai Kilangan drainase yang ada masih dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Sementara yang tidak memiliki jaringan drainase langsung diserap oleh tanah dan mengalir mengikuti kontur lahannya. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase yang ada, umumnya darinase tersebut telah permanen/sudah semenisasi dengan kondis baik. Dibeberapa ruas pada jaringan drainase lingkungan ini ada yang telah tertimbun dan ada yang telah mengalami pendangkalan karena sedimentasi.



E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah air limbah dan ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Berdasarkan hasil survey lapangan sistem pengelolaan air limbah pada kawasan ini umumnya telah memenuhi persyaratan teknis yaitu ± 75% penduduk atau rumah yang telah memiliki WC sendiri. Sedangkan untuk prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang telah memenuhi persyaratan teknis seperti telah memiliki septik tank untuk pembuangan akhir limbah padat rumah tangga. Namun dari peninjauan lapangan terlihat juga beberapa rumah tidak memiliki tangki septik, pada umumnya mereka melakukan pembuangan air limbah ke saluran drainase.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

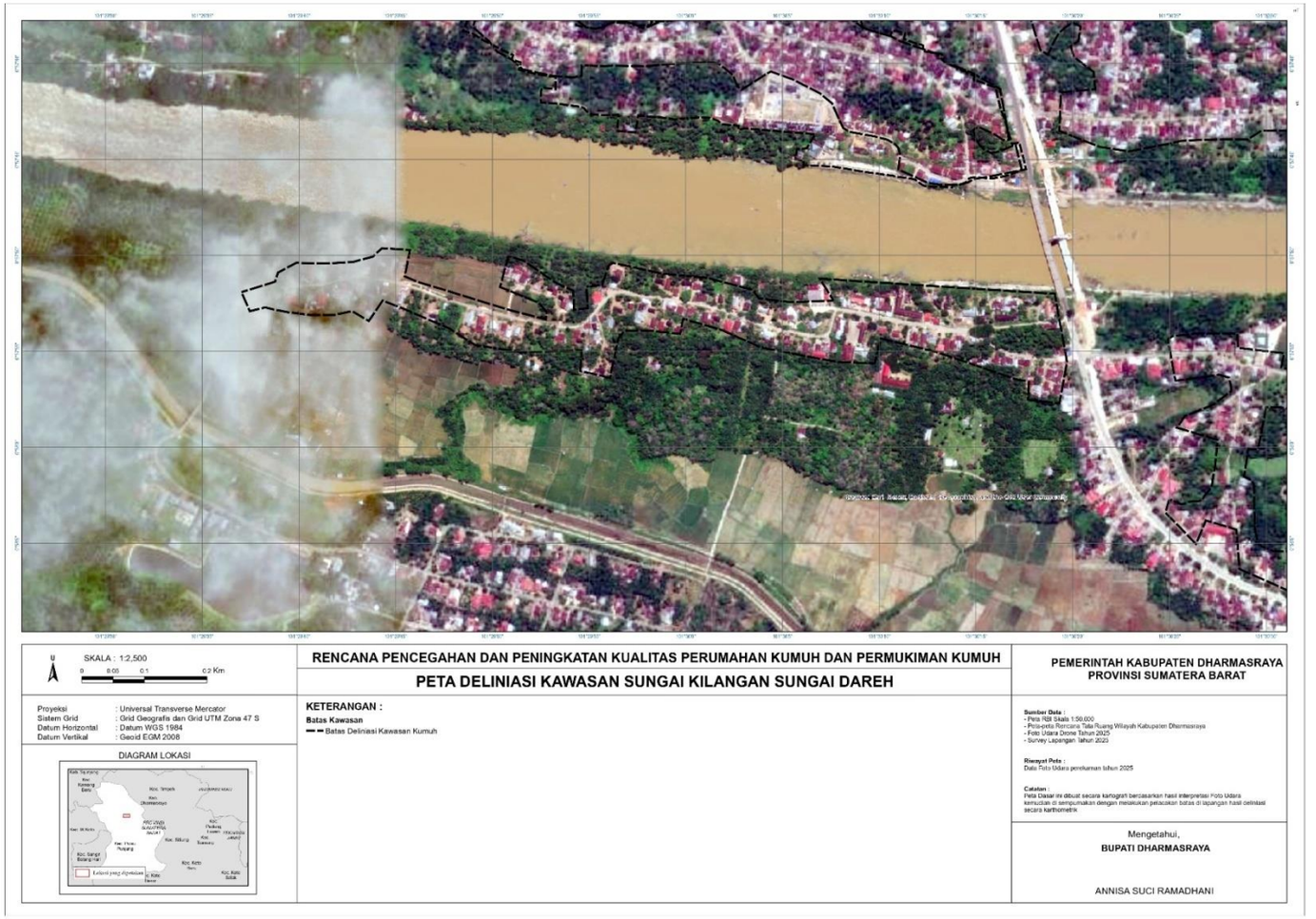


Kondisi pengelola Persampahan antara lain prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Pada Kawasan Sungai Kilangan, dapat dikatakan tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai standar teknis. Pada kawasan ini masyarakat membakar sampah disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kebakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

Gambar 3.7 Peta Delinasi Kawasan Sungai Kilangan Sungai Dareh



3.1.2.7 Kawasan Sungai Dareh

Kawasan Sungai Dareh ini terdapat di Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung yang terletak pada lintang 101°30'52"E dan 0°58'2"S. Luas kawasan kumuh Sungai Dareh yaitu kurang lebih 13,89 Ha dengan jumlah bangunan 560 unit, jumlah penduduk 1.024 jiwa dan jumlah KK sebanyak 256 KK. Setelah dilakukan survei lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di kawasan Sungai Dareh ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka kondisi kekumuhan di kawasan Sungai Dareh dapat dilihat pada uraian berikut ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Kondisi Bangunan hunian dapat dilihat berdasarkan keteraturan bangunan, kepadatan bangunan hunian dan kelayakan fisik bangunan seperti tata bangunan, tata kualitas lingkungan, tata letak, sempadan bangunan, dan tampilan Bangunan.



Pada Kawasan Sungai Dareh yang memiliki luas deliniasi kawasan yaitu ± 13,89 Ha dengan bangunan sebanyak 560 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak ±25 % atau sekitar 140 bangunan dari total bangunan yang ada. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih dapat dikategorikan sedang, hanya beberapa kelompok bangunan yaitu sekitar ± 25% kawasan ini memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi dimana dapat dilihat dari kerapatan bangunan dan jarak antar bangunan yang kurang dari 1 meter. Untuk kondisi fisik bangunan di kawasan ini sudah banyak terdapat bangunan permanen, namun masih ada beberapa bangunan yang merupakan bangunan temporer/kayu yang tidak layak huni dan tidak sesuai dengan standar teknis baik dari segi keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

B. Kondisi Jalan Lingkungan

Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada kawasan kumuh dilihat dari luas area yang belum terlayani prasarana jalan lingkungan seperti jalan lingkungan atau gang dengan struktur beton, paving dan aspal dan dari kondisi kualitas pemukaan jalannya. Untuk kawasan ini dilihat dari akses jaringan jalan lingkungan, hampir seluruh kawasan

telah terakses jalan lingkungan. Dilihat dari kualitas permukaan jalan lingkungan pada kawasan kumuh Sungai Dareh ini cukup baik dengan jenis perkerasan rata-rata sudah jalan aspal.





C. Kondisi Penyedian Air Minum

Untuk melihat penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Untuk penyediaan air bersih di Kawasan Kumuh Sungai Dareh ini untuk sumber air penduduk banyak berasal dari sumur yang kondisi nya cukup baik. Sedangkan untuk kebutuhan air minum sehari-hari sudah terpenuhi dengan sumber air yang berasal dari sumur pada masing-masing rumah penduduk.





D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari ketersedian jaringan drainase lingkungan, kemampuan mengalirkan limpasan air hujan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan, maka di kawasan kumuh Sungai Daerah ini, hampir semua kawasan telah memiliki jaringan drainase lingkungan yaitu sekitar 80 %, dan masih terdapat sekitar 20% yang tidak terlayani/tidak memiliki jaringan drainase.





Sampai saat ini di kawasan Sungai Dareh, drainase yang ada masih dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan

genangan. Sementara yang tidak memiliki jaringan drainase langsung diserap oleh tanah dan mengalir mengikuti kontur lahannya. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase yang ada, umumnya darinase tersebut telah permanen/semenisasi dengan kondis baik. Namun dilihat dari kondisi drainase dibeberapa ruas menunjukan kondisi yang buruk dimana drainase yang ada tersebut telah mengalami pendangkalan karena sedimentasi.



E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek pengelolaan air limbah, yang dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan di Kawasan Kumuh Sungai Daerah, sistem pengelolaan air limbah yang ada sebagian besar telah memenuhi persyaratan teknis yaitu ± 75 %, hal ini dilihat dari penduduk atau rumah yang telah memiliki WC/jamban sendiri. Untuk ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang telah memenuhi persyaratan teknis seperti telah memiliki septik tank untuk pembuangan akhir limbah padat rumah tangga, di kawasan ini sebanyak ± 70%. Namun bagi penduduk yang belum memiliki tempat pembuangan akhir berupa septiktank masyarakat membuangnya ke kolam yang dibuat sendiri atau ke saluran drainase yang ada. Kondisi septiktank ini banyak yang tidak dirawat dengan baik.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi pengelola Persampahan antara lain prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Pada Kawasan Sungai Dareh, sama sekali belum terdapat prasarana dan sarana

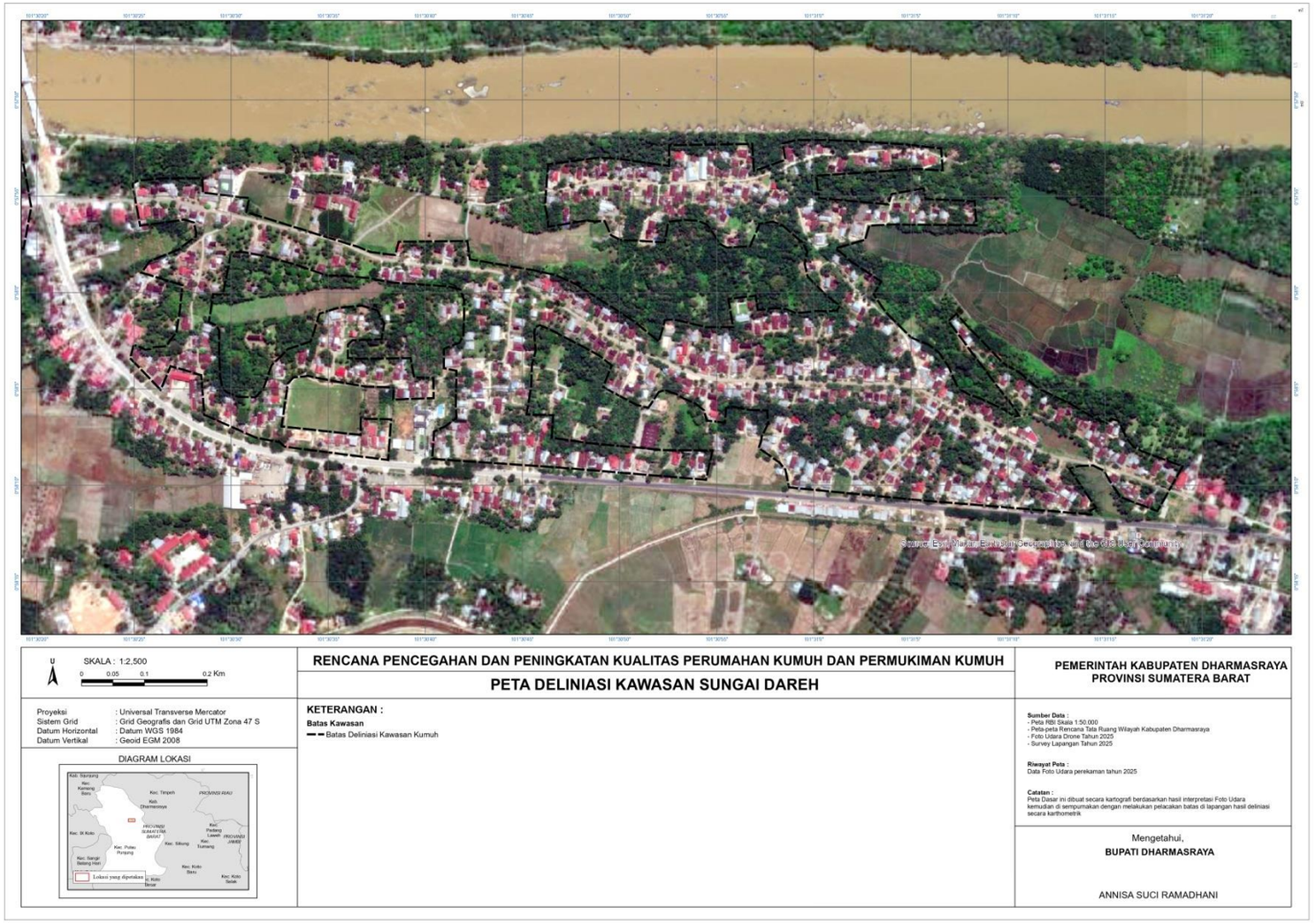
persampahan seperti adanya tong sampah atau TPS tempat pembuangan sementara mereka. Untuk sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis juga belum ada. Pada kawasan ini masyarakat membakar sampah disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis (pengelolaan secara terorganisir).

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Pengamanan kebakaran adalah berdasarkan jenis prasarana/sarana proteksi kebakaran yang ada di kawasan permukiman. Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran merupakan kondisi dimana tidak tersedianya pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran). Ketersediaan prasarana seperti jalan lingkungan juga sangat penting untuk memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran, termasuk sirkulasi saat pemadaman kebakaran di lokasi.

Kondisi proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran, pada kawasan ini tidak memiliki sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR) dan tidak punya posko kebakaran. Hanya salah satu untuk penunjang prasarana proteksi kebakaran yang terdapat di kawasan ini yaitu sudah tersedia jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

Gambar 3.8 Peta Kawasan Kumuh Sungai Dareh



3.1.2.8 Kawasan Kumuh Sikabau

Kawasan Kumuh Sikabau ini terdapat di Nagari Sikabau, Kecamatan Sitiung. Kawasan Sikabau terletak pada lintang 101° 33' 1,948" E dan 0º57'34"S dengan luas kawasan kumuh Sikabau 14,3 Ha. Jumlah bangunan yang terdapat dalam kawasan ini sekitar 203 unit dengan jumlah penduduk 725 jiwa dan jumlah KK sebanyak 198 KK. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Sikabau ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat dijelasnya kondisi kawasan kumuh Sikabau sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Untuk kondisi bangunan dilihat berdasarkan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, maka pada Kawasan Sikabau yang memiliki luas deliniasi kawasan sekitar 14,3 Ha dan bangunan sebanyak 35 unit bangunan, dengan bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan adalah sebanyak ± 15 % atau 34 unit dari total bangunan yang ada yang dapat dilihat dari tata bangunan yang tidak sejajar atau tidak saling berhadapan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini dapat dikategorikan masih tergolong kepadatan rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang memiliki kepadatan yang cukup tinggi yaitu ±25% yang terletak di persimpangan dalam kawasan ini. Untuk kondisi bangunan pada umumnya telah permanen, namun masih ada beberapa rumah yang belum sesuia dengan standar teknis seperti dari tingkat kesehatan dan kenyamanan suatu rumah hunian.

B. Kondisi Jalan Lingkungan

Kondisi jaringan jalan lingkungan dilihat dari seberapa besar kawasan telah terlayani jaringan jalan lingkungan atau sebaliknya serta melihat kualitas permukaan jalan lingkungan

yang buruk. Untuk Kawasan Kumuh Sikabau ini melihat aksesibilitas lingkungan sebagian besar jalan lingkungan yang ada telah dapat melayani semua kawasan permukiman. Dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan perkerasan aspal.



C. Kondisi Penyedian Air Minum

Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum yang dilihat dari akses aman air minum dan ketersediaan akan kebutuhan air minum minimal orang 60 /liter/hari. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air penduduk untuk minum dan kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi yang bersumber dari sumur galian dan PAMSIMAS



D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari ketidaktersediaan jaringan drainase lingkungan, kemampuan drainase mengalirkan limpasan air hujan, serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Pada Kawasan kumuh Sikabau, baru 40% kawasan ini yang tersedia/memiliki drainase lingkungan dan 60% nya tidak/belum terlayani jaringan drainase.





Dari drainase yang ada untuk limpasan air hujan tidak dapat mengalirkan limpasan air hujan karena masih sedikitnya jaringan drainase yang ada dalam kawasan dan tidak terkoneksinya jaringan drainase tersebut, sehingga tidak dapat menampung dan mengalirkan air hujan dengan baik

sehingga menimbulkan genangan. Genagan yang terjadi rata-rata lebih dari 2 jam.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan air limbah/sanitasi antara lain berdasarkan ketersediaan akses air limbah dan persyaratan teknis air limbah. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/ kloset yang terhubung dengan tangkiseptik baik secara individual/ domestik, komunal maupun terpusat.

Pada kawasan kumuh Sikabau sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu ± 25 % rumah yang tidak memiliki WC. Masih adanya rumah yang membuat WC dengan kondisi darurat dan masyarakat masih menggunakan sungai untuk kegiatan MCK mereka. Sementara dari rumah yang memiliki WC tersebut terdapat sekitar 45 % yang tidak memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang memenuhi persyaratan teknis seperti WC terhubung dengan septiktank karena masih ada yang membuang limbah ke kolam atau aliran drainase yang ada.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengolalaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Sikabau, belum terdapat prasarana dan sarana persampahan seperti tong sampah, TPS untuk tempat pembuangan sementara. Sistem pengelolaan persampahan juga belum sesuai secara teknis seperti telah di kelola secara terorganisir oleh dinas terkait belum tersedia. Pada kawasan ini masyarakat melakukan pengelolaan sampah dengan cara membakar sampah di suatu titik atau menumpuk disekitar

rumah, dan masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kebakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum tersedia sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

Gambar 3.9 Peta Kawasan Kumuh Sikabau



3.1.3 Kecamatan Sitiung

Kecamatan Sitiung teletak di 0°55'01" - 1°55'43" Lintang Selatan dan 101°31'59" - 101°43'30" Bujur Timur dengan ketinggian wilayah 105 -125 meter dari permukaan laut. Kecamatan Sitiung memiliki luas wilayah yaitu 124,57 Km^2 dan terdiri dari 4 (empat) nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/160/KPTS-BUP/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor :100.3.3.2/110/KPTS-BUP/2025 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Sitiung terdapat empat kawasan kumuh berikut adalah gambaran kawasan kumuh berdasarkan hasil survei lapangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.3.1 Kawasan Kumuh Siguntur I

Kawasan Kumuh Siguntur I ini terdapat di Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung. Kawasan Siguntur I terletak pada lintang $101^0$33'37"E dan $0^0$57'34"S dengan luas kawasan kumuh Siguntur I ± 10,55 Ha. Jumlah bangunan yang terdapat dalam kawasan ini sekitar 161 unit dengan jumlah penduduk 461 jiwa dan jumlah KK sebanyak 172 KK. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Siguntur I ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat dijelasnya kondisi kawasan kumuh Siguntur I sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Untuk kondisi bangunan dilihat berdasarkan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, maka pada Kawasan Siguntur I yang memiliki luas deliniasi kawasan sekitar 10,55 Ha dan bangunan sebanyak 161 unit bangunan, dengan bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan adalah sebanyak ± 25 % atau 40 unit dari total bangunan yang ada yang dapat dilihat dari tata bangunan yang tidak sejajar atau tidak saling berhadapan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini dapat dikategorikan masih tergolong kepadatan rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang memiliki kepadatan yang cukup tinggi yaitu ±25% yang terletak di persimpangan dalam kawasan ini. Untuk kondisi bangunan pada umumnya telah permanen, namun masih ada beberapa rumah yang belum sesuia dengan standar teknis seperti dari tingkat kesehatan dan kenyamanan suatu rumah hunian.

B. Kondisi Jalan Lingkungan

Kondisi jaringan jalan lingkungan dilihat dari seberapa besar kawasan telah terlayani jaringan jalan lingkungan atau sebaliknya serta melihat kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Untuk Kawasan Kumuh Siguntur I ini melihat aksesibilitas lingkungan sebagian besar jalan lingkungan yang ada telah dapat melayani semua kawasan permukiman. Dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan perkerasan aspal.





C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum yang dilihat dari akses aman air minum dan ketersediaan akan kebutuhan air minum minimal orang/liter/hari. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air penduduk untuk minum dan kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi yang bersumber dari sumur galian dan PAMSIMAS

D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari ketidaktersediaan jaringan drainase lingkungan, kemampuan drainase mengalirkan limpasan air hujan, serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Pada Kawasan kumuh Siguntur I, baru 30% kawasan ini yang tersedia/memiliki drainase lingkungan dan 70% nya tidak/belum terlayani jaringan drainase.

Dari drainase yang ada untuk limpasan air hujan tidak dapat mengalirkan limpasan air hujan karena masih sedikitnya jaringan drainase yang ada dalam kawasan dan tidak terkoneksinya jaringan drainase tersebut, sehingga tidak dapat menampung dan mengalirkan

air hujan dengan baik sehingga menimbulkan genangan. Genagan yang terjadi rata-rata lebih dari 2 jam.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan air limbah/sanitasi antara lain berdasarkan ketersediaan akses air limbah dan persyaratan teknis air limbah. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/ kloset yang terhubung dengan tangkiseptik baik secara individual/ domestik, komunal maupun terpusat.

Pada kawasan kumuh Siguntur I sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis masih cukup banyak yaitu ± 50 % rumah yang tidak memiliki WC. Masih adanya rumah yang membuat WC dengan kondisi darurat dan masyarakat masih menggunakan sungai untuk kegiatan MCK mereka. Sementara dari rumah yang memiliki WC tersebut terdapat sekitar 30 % yang tidak memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang memenuhi persyaratan teknis seperti WC terhubung dengan septiktank karena masih ada yang membuang limbah ke kolam atau aliran drainase yang ada.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengolalaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

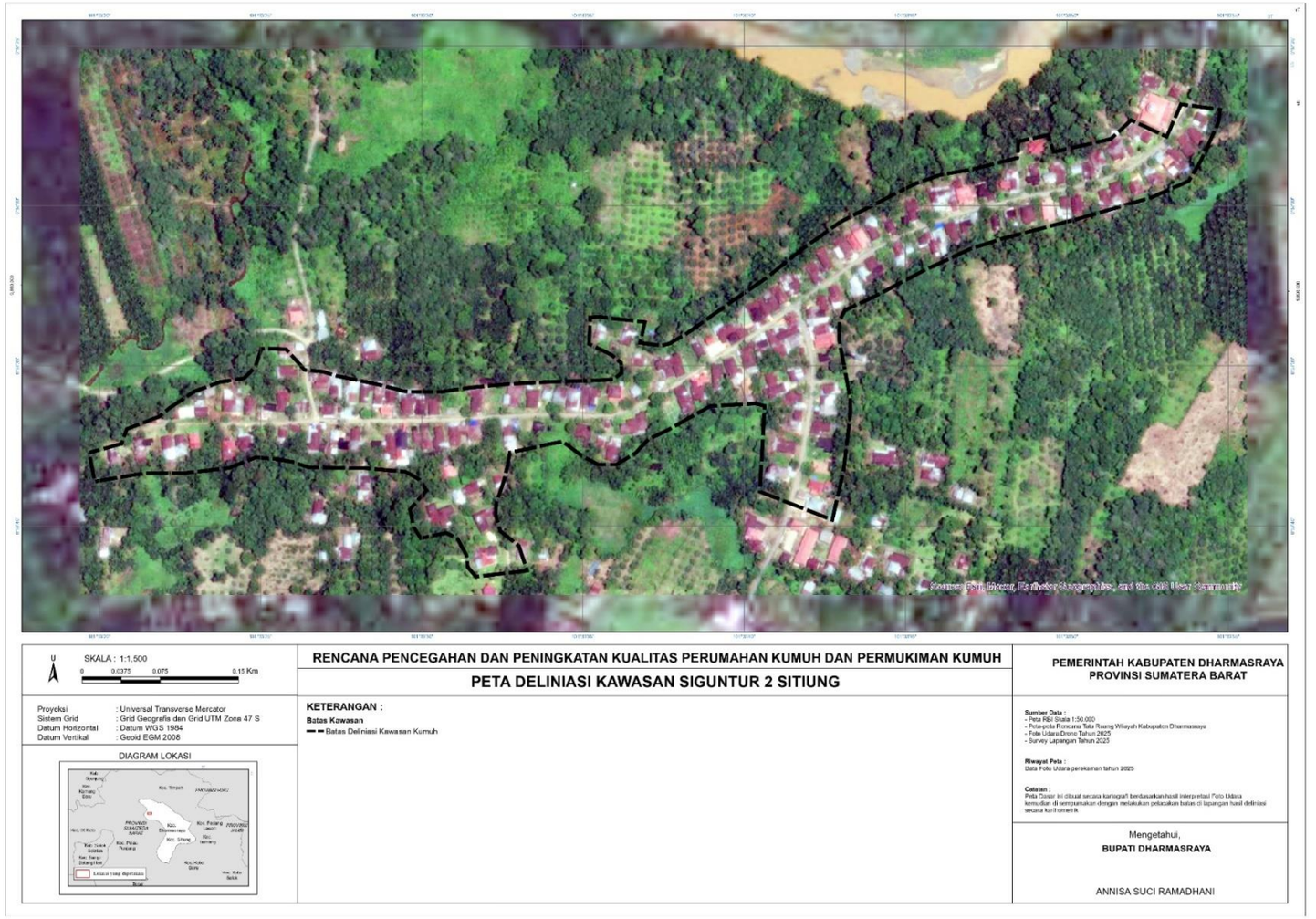
Pada Kawasan Siguntur I, belum terdapat prasarana dan sarana persampahan seperti tong sampah, TPS untuk tempat pembuangan sementara. Sistem pengelolaan persampahan juga belum sesuai secara teknis seperti telah di kelola secara terorganisir oleh dinas terkait belum tersedia. Pada kawasan ini masyarakat melakukan pengelolaan sampah dengan cara membakar sampah di suatu titik atau menumpuk disekitar rumah, dan masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kebakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum

tersedia sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

Gambar 3.10 Peta Delinasi Kawasan Siguntur I



3.1.3.2 Kawasan Kumuh Siguntur II

Kawasan Kumuh Siguntur II ini terdapat di Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung. Luas kawasan kumuh Siguntur II yaitu 8,31 Ha dengan jumlah bangunan 105 unit, jumlah penduduk 387 jiwa dan jumlah KK yaitu 129 KK. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Siguntur II ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Kawasan Siguntur II terletak pada lintang $101^0$34'4"E dan $0^0$58'18"S. Untuk lebih jelasnya kondisi kawasan kumuh pada kawasan ini dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung

Berdasarkan indikator penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan berdasarkan kondisi bangunan gedung yang ada dengan melihat ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, maka di kawasan Siguntur II yang memiliki luas kawasan deliniasi sekitar 8,31 Ha dengan jumlah bangunan sebanyak 105 unit bangunan, didapat bangunan yang tidak memiliki keteraturan adalah sebanyak 55 % atau 57 unit dari total bangunan yang ada. Terlihat di sini bahwa kawasan ini rata-rata bangunannya belum teratur dari segi pola tata letaknya dan sempadan bangunan terhadap jalan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini cukup padat dan dapat dikategorikan sedang yaitu sekitar 55%. Kondisi bangunan yang ada rata-rata sudah permanen walaupun masih ada beberapa bangunan kayu. Dari segi kesehatan dan keselamatan dari bangunan yang ada rata-rata sudah sesuai dengan standar teknis walaupun masih juga ada beberapa rumah yang juga belum sesuai dengan standar teknis tersebut.





B. Kondisi Jalan Lingkungan

Kondisi aksesibilitas lingkungan adalah berdasarkan jangkauan jaringan jalan lingkungan terhadap kawasan dan persyaratan teknis/kualitas jalan. Pada Kawasan kumuh Siguntur II, sebagian

kawasan masih ada yang belum terlayani jaringan jalan lingkungan dan sesuai dengan standar teknis yang ada yaitu ± 30%. Kondisi perkerasan jalan yang ada umumnya dengan perkerasan cor beton yang kondisi permukaan jalannya sudah banyak yang rusak.





C. Kondisi Penyedian Air Minum



Penilaian untuk pelayanan penyediaan air minum di Kawasan Kumuh Siguntur II dilihat dari ketersediaan akses aman air minum dan kebutuhan air minum minimal orang/liter/hari yang tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil survey lapangan, pada kawasan kumuh Siguntur II untuk kualitas air minum rata-rata sudah cukup baik dan kebutuhan air minum orang/perhari juga sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari sumur galian dan PAMSIMAS.

D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan ditinjau berdasarkan ketidaktersediaan jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Pada kawasan kumuh Siguntur II, baru 20% kawasan yang tersedia/memiliki jaringan drainase lingkungan dan 80% tidak terlayani jaringan drainase. Jaringan drainase yang tersedia mengikuti jalan dan kondisinya masih terputus-putus dan tidak terkoneksi dengan baik sehingga ini menimbulkan genangan pada kawasan. Pada Kawasan Kumuh Siguntur II ini terdapat beberapa titik permukiman penduduk yang terletak di tepi sungai, dan kawasan ini sering terjadi banjir yang disebabkan oleh luapan air sungai. Sewaktu terjadi banjir, permukiman yang ada akan terdampak pada kawasan kumuh

Siguntur II . Drainase yang ada tidak dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek pengelolaan air limbah, yang dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Pada Kawasan Kumuh Siguntur II berada di disepanjang aliran sungai batang hari. Untuk kegiatan cuci mandi dan kakus masyarakat dilakukan di sungai sekitar 65 %. Sedangkan untuk prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu 65 %, karena pada umumnya masyarakat tidak memiliki septictank

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

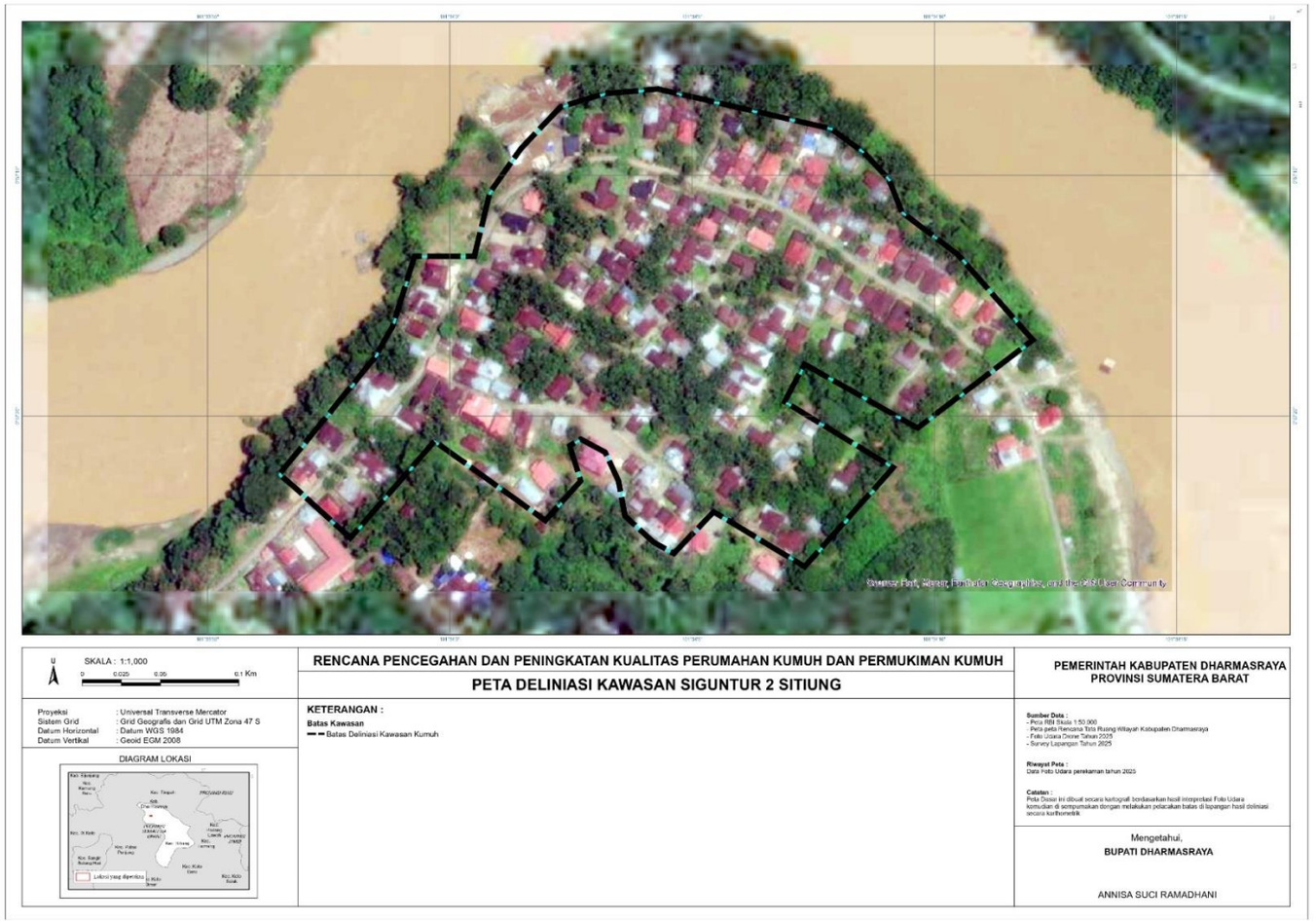
Kondisi pengelola persampahan antara lain prasarana dan sarana persampahan sebagian sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Pada kawasan ini sama sekali tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan serta pengelolaan persampahan sesuai dengan persyaratan teknis. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana persampahan seperti tong sampah dan TPS tidak tersedia pada kawasan ini. Masyarakat dalam pengelolaan persampahan di kawasan ini dilakukan dengan cara membakar sampah disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah, hal ini menunjukan bahwa pengelolaan sampah masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis karena belum di kelola secara terorganisir.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

Kondisi Proteksi kabakaran di kawasan kumuh Siguntur II ini tidak tersedia sarana proteksi kebakaran. Namun untuk prasarana proteksi kebakaran salah satunya sudah tersedia jalan lingkungan yang mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

Gambar 3.11 Peta Delinasi Kawasan Siguntur II Sitiung



3.1.3.3 Kawasan Kumuh Koto Daulat

Kawasan Kumuh Koto Daulat ini terdapat di Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung. Kawasan Koto Daulat terletak pada lintang $101^0$39'25"E dan $1^0$1'45"S. Luas kawasan kumuh Koto Daulat kurang lebih 15,43 Ha dengan jumlah bangunan 105 unit, jumlah penduduk 246 jiwa dan jumlah KK yaitu 82 KK. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Koto Daulat ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka untuk lebih jelasnya kondisi kawasan kumuh pada kawasan ini dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung

Untuk kondisi bangunan dilihat berdasarkan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan.



Pada Kawasan Koto Daulat memiliki luas kawasan deliniasi sekitar 15,43 Ha dengan bangunan sebanyak 74 unit bangunan. Bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan hanya sebanyak 10 % atau 7 unit dari total bangunan. Sehingga dapat dikatakan kawasan ini cukup teratur tata letak dan pola peletakan bangunannya. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini juga termasuk kategori rendah karena hanya sekitar 5 % dari bangunan yang ada memiliki kerapatan cukup tinggi yang dapat dilihat jarak antar bangunannya. Dari segi konstruksi bangunan kawasan ini telah banyak terdiri dari bangunan permanen dan semi permanen. Untuk bangunan rumah kayu terdapat pada bangunan rumah adat yang kondisinya sebagian telah banyak rusak.

B. Kondisi Jalan Lingkungan

Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk



Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada kawasan kumuh Koto Daulat ini dari luas area yang belum terlayani prasarana jalan lingkungan umumnya sudah terlayani jaringan jalan lingkungan.

Dilihat dari kualitas permukaan jalan lingkungan yang ada, di kawasan kumuh Koto Daulat, jalan lingkungan sudah banyak yang dilakukan perkerasan berupa cor beton. Kondisi cor beton tersebut sebagian pada ruas yang ada sudah mulai ada yang rusak.

C. Kondisi Penyedian Air Minum

Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, Pada Kawasan Kumuh Koto Daulat untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari sumur galian dan PAMSIMAS.

D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, dari hasil survey lapangan untuk kondisi drainase di kawasan kumuh Koto Daulat yaitu 70% kawasan sudah tersedia drainase lingkungan dan 30% tidak terlayani jaringan drainase. Pada kawasan kumuh Koto Daulat drainase yang ada sudah memiliki kontruksi yang baik dan sudah dapat mengalirkan limpasan air hujan. Kondisi konstruksi dari jaringan drainase lingkungan yang ada masih cukup baik.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek pengelolaan air limbah, yang dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Berdasarkan hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Koto Daulat sistem pengelolaan air limbah umumnya telah memenuhi persyaratan teknis yaitu hampir 95 % penduduk atau rumah yang ada telah memiliki WC sendiri. Sedangkan untuk prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang telah memenuhi persyaratan teknis seperti telah memiliki septik tank untuk pembuangan akhir limbah padat rumah tangga, di kawasan ini juga sudah hampir 90 % telah memiliki sarana tersebut sendiri di setiap rumah.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengolalaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem

pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya system pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Koto Daulat, belum terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis. Pada kawasan ini masyarakat masih membakar sampah disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kebakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum tersedia sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah telah tersedianya jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

3.1.3.4 Kawasan Kumuh Koto Nagari Sungai Duo

Kawasan Kumuh Koto ini terdapat di Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung. Luas Kawasan Kumuh Koto yaitu 7,32 Ha dengan jumlah bangunan 86 unit, jumlah penduduk 225 jiwa dan jumlah KK yaitu 75 KK. Survey lapangan dilakukan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Koto Daulat ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Kawasan Koto terletak pada lintang $101^0$36’50”E dan $1^0$1’47”S. Untuk lebih jelasnya kondisi kawasan kumuh pada kawasan ini dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung

Kondisi bangunan hunian dapat dilihat berdasarkan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan dan kelayakan fisik bangunan seperti tata bangunan, tata kualitas lingkungan, tata letak, sempadan bangunan, dan tampilan bangunan.



Pada Kawasan Koto memiliki luas deliniasi kawasan ± 7,32 Ha dan bangunan sebanyak 68 unit bangunan, bangunan pada kawasan ini pada umumnya sudah teratur dan tingkat kepadatan bangunan termasuk rendah, hanya beberapa rumah saja yang tidak memiliki jarak yang sesuai

dengan standar teknis. Untuk konstruksi bangunan umumnya sudah permanen.

B. Kondisi Jalan Lingkungan



Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada kawasan kumuh dilihat dari luas area yang belum terlayani prasarana jalan lingkungan dan kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. Berdasarkan hasil survey lapangan didapat bahwa di Kawasan Kumuh Koto telah tersedia jaringan jalan lingkungan yang telah dapat mengakses semua kawasan lingkungan permukiman yang ada dengan permukaan jalan perkerasan aspal dan kondisi baik.

C. Kondisi Penyedian Air Minum

Untuk melihat penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada Kawasan Kumuh Koto untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari sumur galian dan PAMSIMAS.

D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang ada dilihat dari ketersediaan jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Kondisi drainase pada Kawasan Kumuh Koto tidak tersedia drainase lingkungan. Kawasan ini umumnya belum tersedia jaringan drainase hal ini dapat dilihat dari sepanjang ruas jalan dan lingkungan perumahan dan permukiman di kawasan tersebut tidak ada drainase. Kawasan ini pada hari hujan mengalami genangan karena tidak adanya tempat limpasan air hujan.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Sistem pengelolaan air limbah di Kawasan Kumuh Koto sudah memenuhi standar teknis, dimana pada umumnya masyarakat telah memiliki MCK/WC sendiri. Dan pada umumnya masyarakat telah memiliki septictank di masing-masing rumah .

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

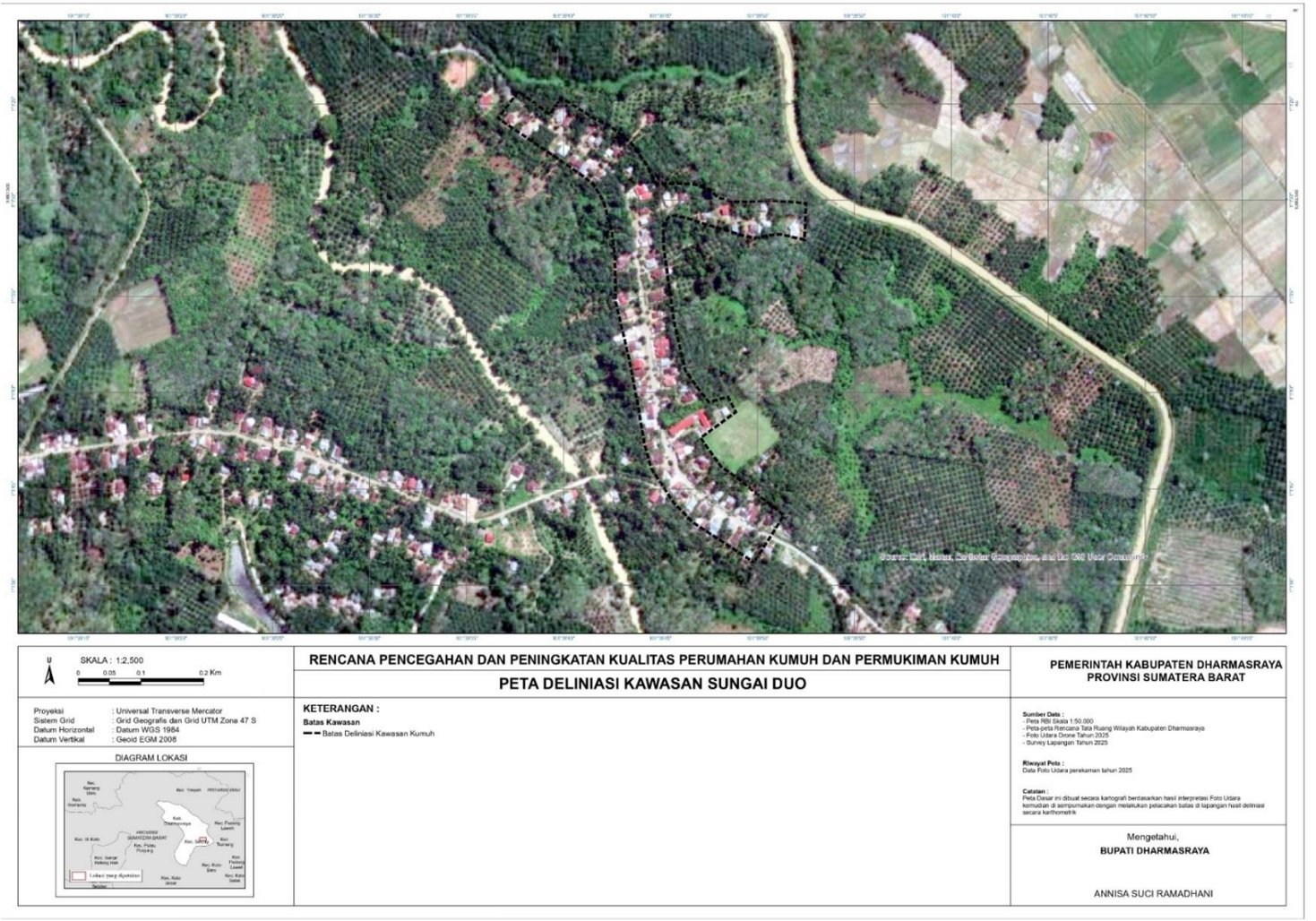
Kondisi prasarana dan sarana persampahan yang ada di kawasan belum sesuai dengan persyaratan teknis, dimana pada kawasan/lingkungan permukiman tidak tersedia tempat pengumpulan sampah (TPS), kendaraan sampah, serta tempat pengelolaan sampah terpadu. Sedangkan sistem pengelolaan sampah yang ada tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

Dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana persampahan di kawasan ini tidak terdapat prasarana dan sarana, pengelolaan persampahan sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak adanya tong sampah dan TPS. Sistem pengelolaan sampah masyarakat dengan cara membakar sampah disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah serta masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Pada kawasan ini belum tersedia sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah telah tersedianya jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

Gambar 3.12 Peta Delinasi Kawasan Sungai Duo



3.1.4 Kecamatan Timpeh

Kecamatan Timpeh teletak di 101^{0}34'25"E dan 101o 0^{0}53'13"S dengan ketinggian wilayah 133 meter dari permukaan laut. Kecamatan Timpeh memiliki luas wilayah yaitu 323,01 Km^2 dan terdiri dari 5 (lima) nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/160/KPTS-BUP/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor :100.3.3.2/110/KPTS-BUP/2025 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Timpeh terdapat satu kawasan kumuh yaitu Kawasan Marga Makmur yang terletak di Nagari Timpeh dan Kawasan Marga Makmur di Nagari Taratak Tinggi, berikut adalah gambaran gambaran kawasan kumuh berdasarkan hasil survei ulang, dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.4.1 Kawasan Marga Makmur, Nagari Taratak Tinggi

Kawasan Mega Makmur ini terdapat di Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh. Luas kawasan kumuh Marga Makmur yaitu 2,13 Ha dengan jumlah bangunan 33 unit, jumlah penduduk 117 jiwa dan jumlah KK yaitu 39 KK. Survey lapangan yang telah dilakukan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Marga Makmur ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Kawasan Marga Makmur terletak pada lintang 101^{0}33'7"E dan 0^{0}52'18"S. Untuk lebih jelasnya kondisi kawasan kumuh Marga Makmur dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung

Kondisi Bangunan hunian dapat dilihat berdasarkan keteraturan bangunan, kepadatan bangunan hunian dan kelayakan fisik bangunan seperti tata bangunan, tata kualitas lingkungan, tata letak, sempadan bangunan, dan tampilan Bangunan. Pada Kawasan Marga Makmur yang memiliki luas deliniasi kawasan sekitar 2,13 Ha dengan jumlah bangunan sebanyak 39 unit, dapat dikatakan bangunan yang ada sudah keteraturan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini juga termasuk rendah karena hanya 5% terdapat kelompok bangunan yang cukup rapat. Konstruksi bangunan disini juga sudah banyak yang permanen.



B. Kondisi Jalan Lingkungan

Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada kawasan kumuh dilihat dari luas area yang belum



terlayani prasarana jalan lingkungan seperti jalan lingkungan dengan struktur beton, paving dan aspal. Pada Kawasan kumuh Marga Makmur, jaringan jalan lingkungan yang ada sudah dapat mengakses seluruh kawasan perumahan dan permukiman disana dan kondisi jalan sudah baik dengan pengerasan cor beton.

C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk melihat penyediaan air minum dilihat dari Penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada Kawasan Kumuh Marga Makmur untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari PAMSIMAS dan sumur yang berada di masing-masing rumah penduduk

D. Kondisi Drainase Lingkungan





Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari ketersedian jaringan drainase lingkungan, kemampuan mengalirkan limpasan air hujan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan, maka di kawasan kumuh Marga Makmur ini baru 70% kawasan yang memiliki/tersedia jaringan drainase lingkungan dan masih terdapat ± 30% lagi kawasan ini yang tidak terlayani/tidak memiliki jaringan drainase.

Sampai saat ini di kawasan kumuh Marga Makmur drainase yang ada masih dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Sementara yang tidak memiliki jaringan drainase langsung diserap oleh tanah dan mengalir mengikuti kontur lahannya. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase yang ada, umumnya darinase tersebut telah permanen/sudah semenisasi dengan kondisi baik. Namun dibeberapa ruas pada jaringan drainase lingkungan ini ada yang telah tertimbun dan ada yang telah mengalami pendangkalan karena sedimentasi.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek pengelolaan air limbah, yang dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Pada kawasan kumuh Marga Makmur sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis berdasarkan hasil survey lapangan untuk sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis hanya sekitar 15 %, artinya kawasan ini umumnya telah memiliki sistem pengelolaan air limbah cukup baik, yang dilihat dari kepemilikan WC dimasing-masing rumah, namun untuk prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang memenuhi persyaratan teknis masih kurang sekali karena masih banyak rumah yang memiliki WC atau kloset yang tidak terhubung dengan septiktank.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

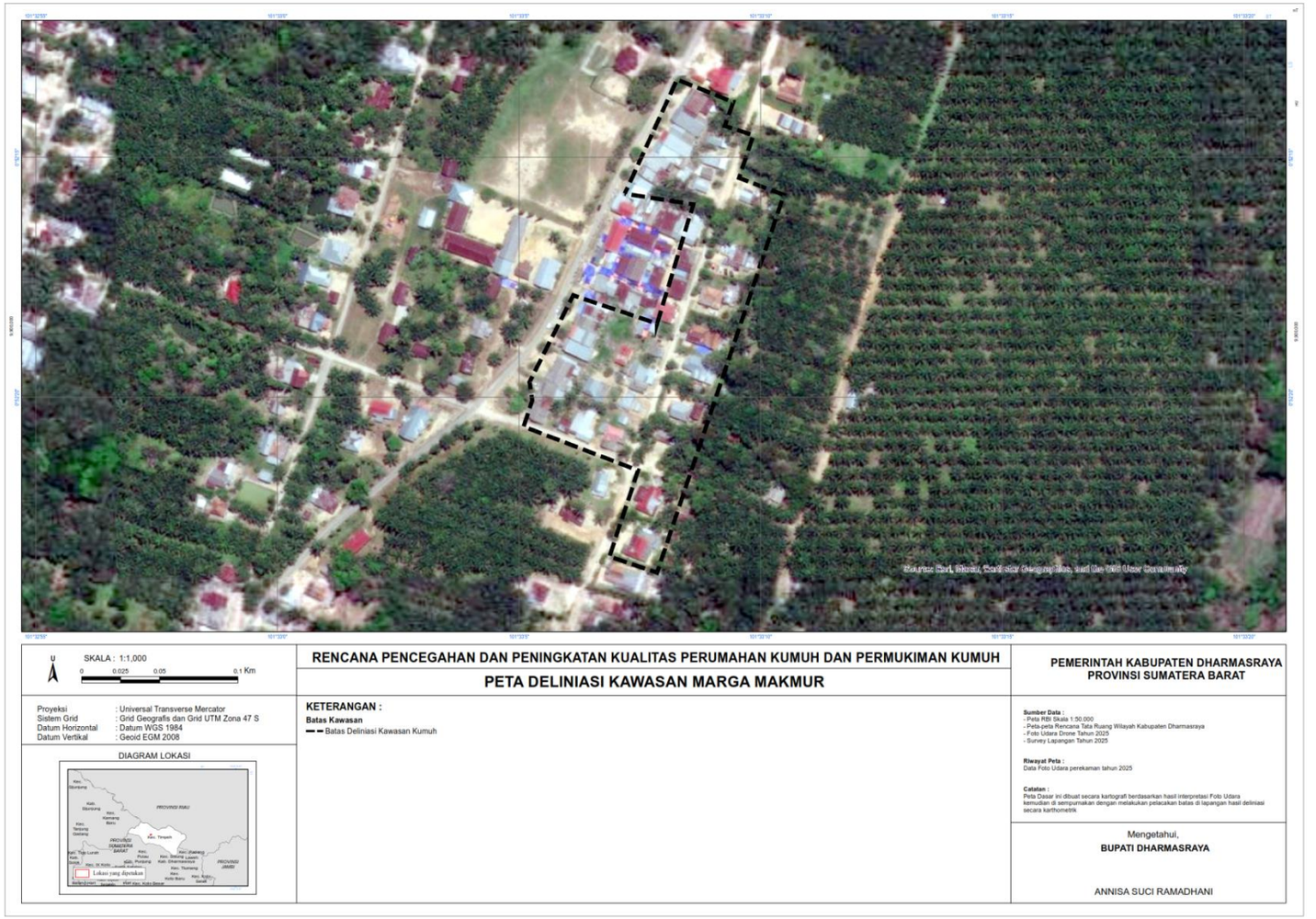


Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya system pengelolaan persampahan yang terorganisir. Pada kawasan Marga Makmur, sama sekali tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah oleh masyarakat masih dengan cara membakar disuatu titik atau menumpukkan sampah pada suatu tempat atau disekitar rumah.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kebakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

Gambar 3.13 Peta Delinasi Kawasan Marga Makmur



3.1.4.2 Kawasan Sungai Bulian, Nagari Timpeh

Kawasan ini terdapat Nagari Timpeh, Kecamatan Timpeh. Luas Kawasan Kumuh Sungai Bulian yaitu 8,82 Ha dengan jumlah bangunan 90 unit, jumlah penduduk 288 jiwa dan jumlah KK yaitu 96 KK. Survey lapangan dilakukan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Sungai Bulian ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Kawasan Sungai Bulian terletak pada lintang $101^0$34'25"E dan $0^0$53'13"S. Untuk lebih jelasnya kondisi kawasan kumuh pada kawasan ini dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Kondisi Bangunan hunian dapat dilihat berdasarkan keteraturan bangunan, kepadatan bangunan hunian dan kelayakan fisik bangunan seperti tata bangunan, tata kualitas lingkungan, tata letak, sempadan bangunan, dan tampilan Bangunan. Pada Kawasan Sungai Bulian memiliki luas kawasan deliniasi yaitu 8,82 Ha dan bangunan sebanyak 90 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 15 % atau 14 unit dari total bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini yaitu 25%. Berikut merupakan kondisi bangunan hunian pada Kawasan Sungai Bulian.

B. Kondisi Jalan Lingkungan



Untuk penilaian kondisi jaringan jalan berdasarkan jangkauan jaringan jalan dalam Kawasan dan kondisi kualitas jaringan jalan. Untuk prasarana jalan, kawasan Sungai Bulian pada umumnya sudah tersedia jaringan jalan yang umumnya telah terlayani seluruh kawasan dengan permukaan jalan rata-rata telah pengerasan aspal dan juga berupa cor beton dengan kondisi baik.

C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk melihat penyediaan air minum dilihat dari Penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi

kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada Kawasan Kumuh Sungai Bulian untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari PAMSIMAS.

D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan pada Kawasan Kumuh Sungai Bulian, baru sekitar 40% kawasan yang baru memiliki/tersedia drainase lingkungan dan 60% lagi kawasan tidak terlayani jaringan drainase lingkungan. Dengan kondisi jaringan drainase yang belum ada di kawasan ini, maka drainase yang ada tidak dapat atau mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan. Sedangkan kondisi konstruksi drainase yang ada umumnya sudah permanen atau sudah dalam bentuk semenisasi namun kondisinya banyak yang buruk, hal ini dapat dilihat dari banyaknya konstruksi tersebut yang rusak dan tertimbun tanah sehingga menyebabkan sedimentasi yang cukup tinggi.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek pengelolaan air limbah, yang dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Hasil survey lapangan, pada kawasan Sungai Bulian ini sistem pengelolaan air limbah umumnya telah memenuhi persyaratan teknis yaitu hampir 80 % penduduk atau rumah yang ada telah memiliki WC sendiri. Sedangkan untuk prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang telah memenuhi persyaratan teknis seperti telah memiliki septik tank untuk pembuangan akhir limbah padat rumah tangga, di kawasan ini hanya baru mencapai 30 %. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya WC yang dimiliki oleh penduduk masih kurang layak sesuai dengan standar teknis dan pembuangannya masih banyak yang belum menggunakan septiktank.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



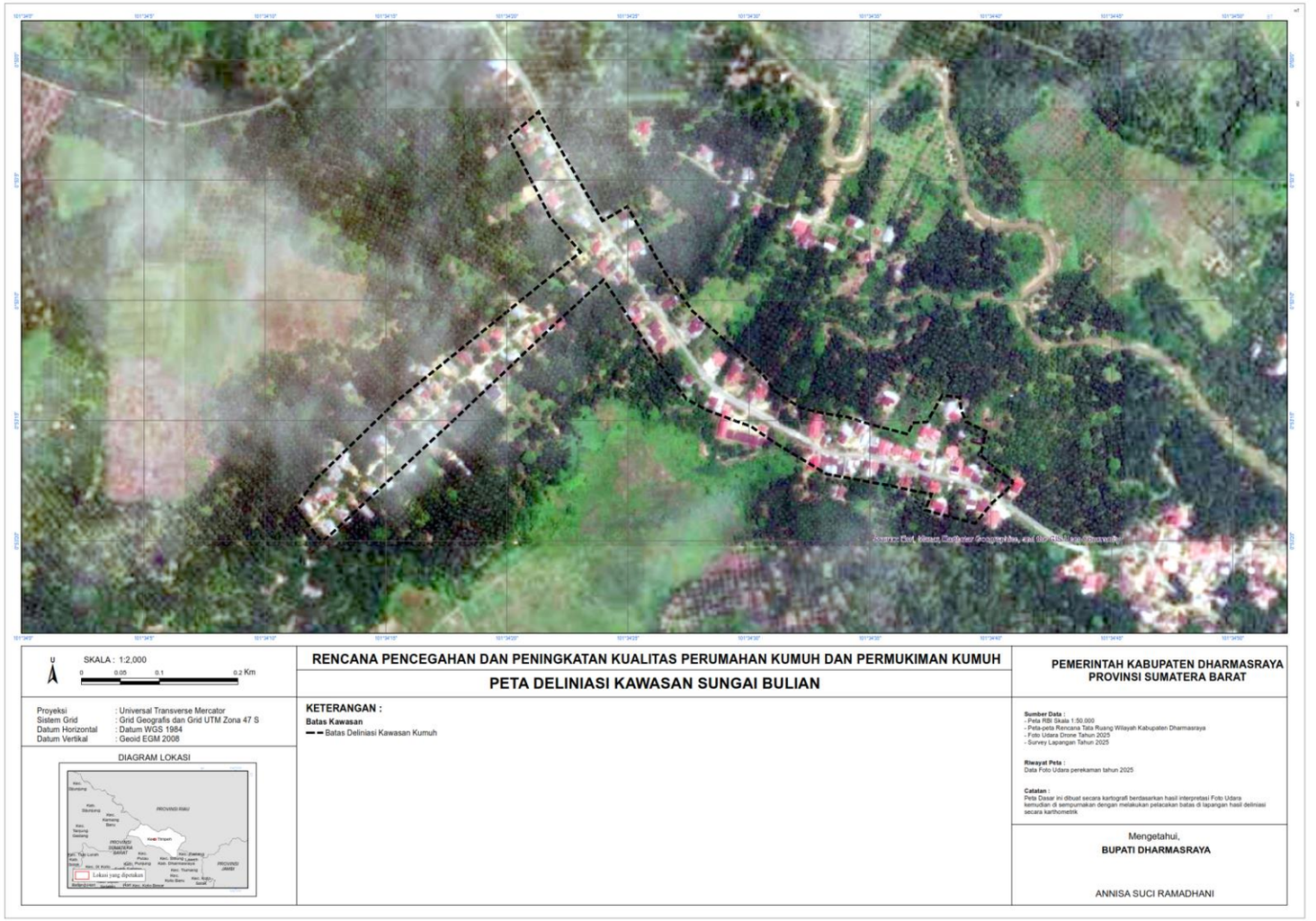
Kondisi pengelola persampahan antara lain prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak

memenuhi persyaratan teknis. Pada Kawasan Sungai Bulian, belum terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis, hal ini dapat dilihat dari tidak tersedianya tong sampah dan TPS. Sedangkan dalam pengelolaannya masyarakat melakukan pembakaran sampah disuatu titik atau menumpuk di sekitar rumah, jadi masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis (terorganisir).

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kebakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

Gambar 3.14 Peta Delinasi Kawasan Sungai Bulian



3.1.5 Kecamatan Koto Baru

Kecamatan Koto Baru terletak di 1° 02' 58'' - 1° 11' 42'' LS dan 101°35' 10'' - 101°46' 35'' BT dengan ketinggian wilayah 91 meter dari permukaan laut. Kecamatan Koto Baru memiliki luas wilayah yaitu 221,2 Km^2 dan terdiri dari 4 (empat) nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/160/KPTS-BUP/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor :100.3.3.2/110/KPTS-BUP/2025 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Koto Baru terdapat 7 kawasan kumuh. gambaran kawasan kumuh berdasarkan hasil survei lapangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.5.1 Kawasan Koto Padang Nagari Koto Padang

Kawasan Koto Padang ini terdapat di Nagari Koto Padang , Kecamatan Koto Baru. Kawasan Koto Padang terletak pada lintang 101°40"E dan 0°57'21"S. Luas kawasan kumuh Koto Padang ± 33,18 Ha dengan jumlah bangunan 194 unit. Jumlah penduduk pada kawasan ini sebanyak 630 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 210 KK. Setelah dilakukan survey lapangan, untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Koto Padang ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka kondisi kawasan kumuh Koto Padang dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung





Kondisi Bangunan hunian dapat dilihat berdasarkan keteraturan bangunan, kepadatan bangunan hunian dan kelayakan fisik bangunan seperti tata bangunan, tata kualitas lingkungan, tata letak, sempadan bangunan, dan tampilan bangunan. Pada Kawasan Koto Padang memiliki luas deliniasi kawasan sekitar 33,14 Ha dan bangunan sebanyak 194 unit bangunan. Bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sekitar 25 % atau sebanyak 12 unit dari total bangunan yang ada dan ini masih dikategorikan rendah. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan juga termasuk kategori rendah karena hanya berkisar 25% saja beberapa kelompok bangunannya padat yang dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan lahan terbangunnya. Untuk kondisi konstruksi bangunan di kawasan ini

juga sudah banyak permenen, walaupun masih ada beberapa bangunan yang semi permanen serta rumah kayu yang tidak sesuai dengan standar teknis bangunan hunian yang dilihat dari segi kesehatan, kenyamanan dan keselamatan.

B. Kondisi Jalan Lingkungan





Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada kawasan kumuh dilihat dari luas area yang belum terlayani prasarana jalan lingkungan seperti jalan lingkungan atau gang dengan struktur beton, paving dan aspal. Selanjutnya dilihat dari kualitas permukaan jalan lingkungan. Pada Kawasan Kumuh Koto Padang umumnya jaringan jalan lingkungan yang ada telah dapat melayani kawasan perumahan dan permukiman kawasan. Kondisi jalan sudah baik dengan pengerasan cor beton dan aspal.

C. Kondisi Penyedian Air Minum

Untuk melihat penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada Kawasan Kumuh Koto Padang untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur dan PAMSIMAS.





D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan pada kawasan kumuh Koto Padang yang dilihat dari ketersediaan jaringan drinase lingkungan yang ada, baru sekitar 45% kawasan tersedia jaringan drainase lingkungan dan 55% lagi belum/tidak terlayani jaringan drainase. Namun dengan kondisi jaringan drainase yang hanya 45 %, Kawasan Kumuh Koto



Padang tidak mengalami genangan karena drainase yang ada masih dapat mengalirkan limpasan air hujan sedangkan bagi yang tidak atau belum memiliki jaringan drainase air hujan tersebut terserap ke dalam tanah. Kondisi drainase yang ada masih banyak yang terputus karena belum terkoneksi dengan baik dan kondisi konstruksi drainase tersebut tekah permanen.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek pengelolaan air limbah, yang dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Berdasarkan hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Koto Padang sistem pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis hanya 25 %, yang artinya di kawasan ini sistem pengelolaan air limbah sudah banyak yang telah memenuhi persyaratan teknis seperti memiliki kloset dan terhubung dengan tangki septik. Bagi masyarakat yang tidak memiliki WC, untuk pembuangan limbah padatnya mereka membuat WC darurat di sekitar rumah mereka dengan sistem pembuangan akhir tidak layak/tidak memiliki tangki septik.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



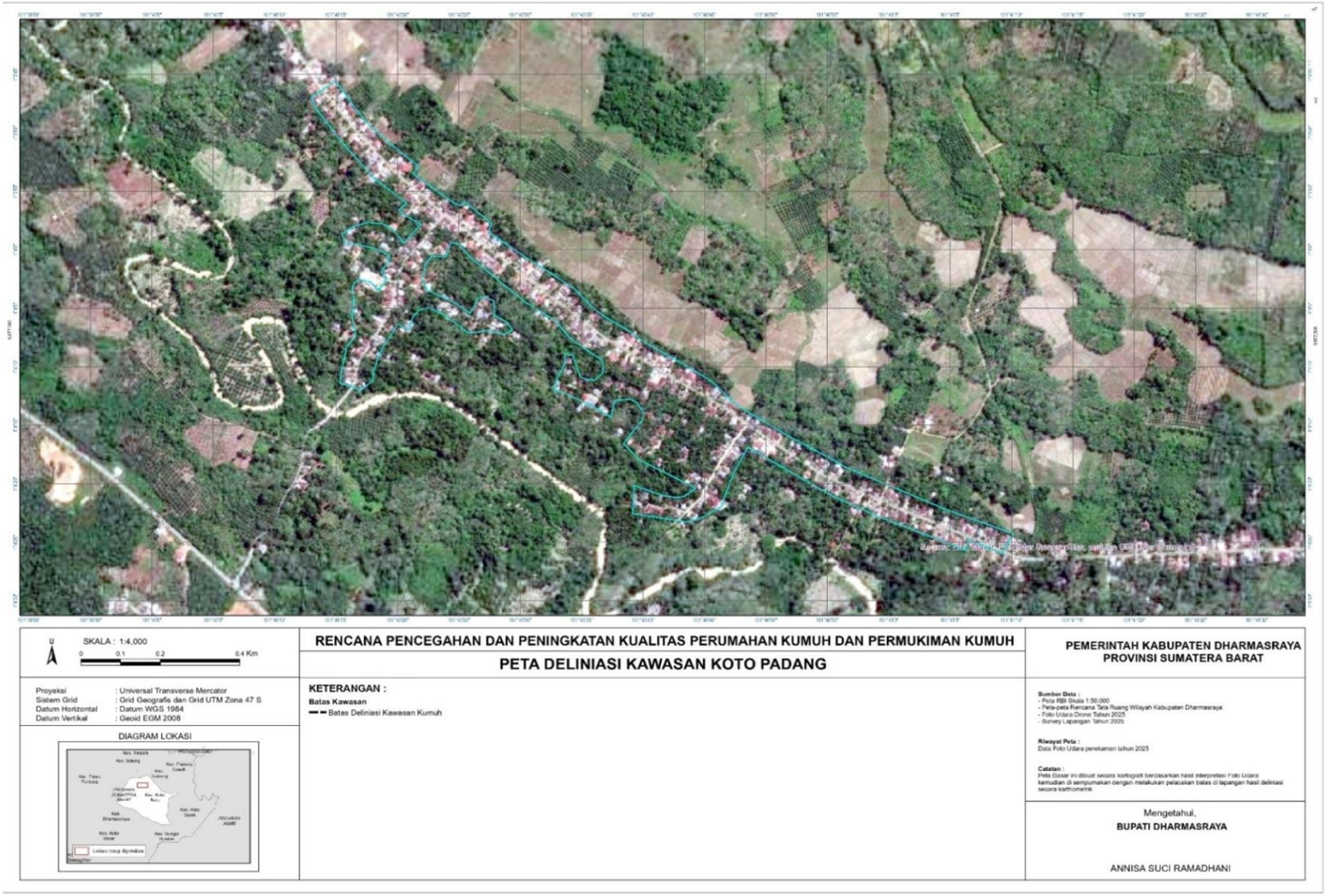
Kondisi pengelola persampahan antara lain prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Kawasan Koto Padang, belum atau tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan pengelolaan persampahan yang tidak sesuai teknis (terorganisir). Pada kawasan ini masyarakat melakukan pengelolaan sampah dengan membakar sampah disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kebakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang

dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

Gambar 3.15 Peta Delinasi Kawasan Koto Padang



3.1.5.2 Kawasan Koto Baru Nagari Koto Baru

Kawasan Koto Baru ini terdapat di Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru. Luas Kawasan Kumuh Koto Baru yaitu 68,96 Ha dengan jumlah bangunan 630 unit, jumlah penduduk 1.965 jiwa dan jumlah KK sebanyak 655 KK. Kawasan Koto Baru terletak pada lintang 101°43'53"E dan 0°56'47"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Koto Baru ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung





Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Kawasan Koto Baru memiliki luas kawasan deliniasi kurang lebih 68,96 Ha dan bangunan sebanyak 630 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan ada sekitar 25 % atau 156 unit dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada ± 25% memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.





Dihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan

bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.

B. Kondisi Jalan Lingkungan





Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Pada Kawasan kumuh Koto Baru, kondisi jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan beton dan aspal. Sementara untuk jalan rusak masih terdapat di beberapa ruas jalan beton dan di kawasan ini juga masih terdapat jalan tanah.

C. Kondisi Penyedian Air Minum

Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) umumnya penduduk Kawasan Kumuh Koto Baru untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur yang bersih dan jernih serta sudah adanya PAMSIMAS.





D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan

buruk, maka di kawasan kumuh Koto Baru ini, baru 10% kawasan yang memiliki/tersedia drainase lingkungan yang bersifat permanen (hanya pada jalan utama kawasan) jadi sekitar 90% kawasan tidak terlayani jaringan drainase. Pada Kawasan Kumuh Koto Baru drainase yang ada pada bagian jalan utama dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan.




Sementara yang tidak memiliki jaringan drainase langsung diserap oleh tanah dan mengalir mengikuti kontur lahannya kearah bagian belakang kawasan permukiman yang berupa lahan rawa yang menjadi tempat pembuangan akhir aliran air yang ada di sekitar kawasan tersebut. Kawasan ini termasuk dalam kawasan rawan banjir pada bagian belakang kawasan permukiman yang disebabkan oleh aliran air rawa yang tidak jalan. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase sebagian dalam kondisi buruk, karena mengalami kerusakan.





E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Koto Baru sistem pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis hanya sekitar 25 %, dan yang memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis juga sekitar 25 %. Hal ini dapat dilihat



dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir berupa septik tank sendiri, namun dari data dan survey lapangan yang di dapat masih ada sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam /lubang yang dibuat sendiri).

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



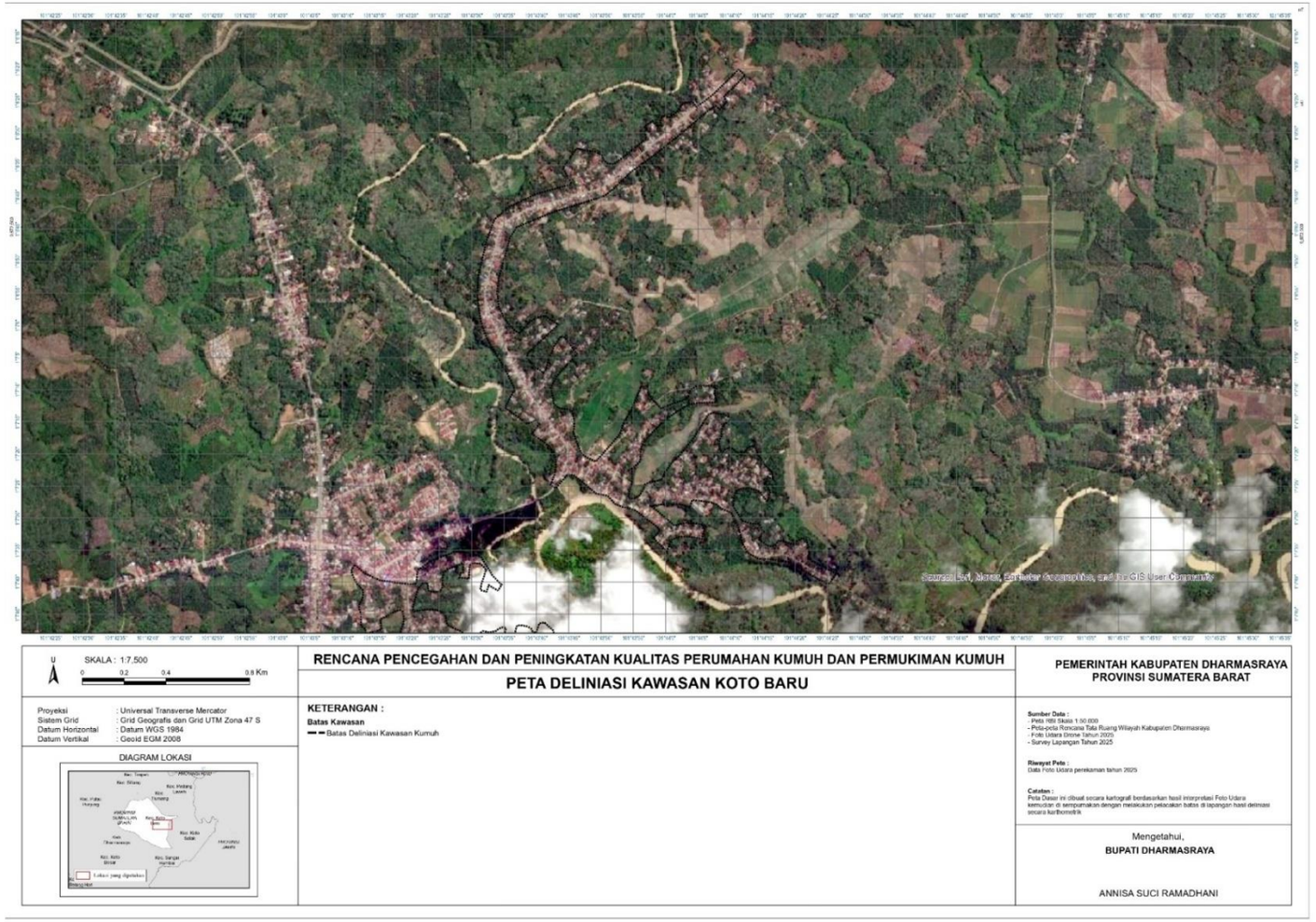
Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Koto Baru tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat masih dalam bentuk dibakar disuatu titik atau menumpuk di sekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum tersedia sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah adanya memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran karena kawasan umumnya terletak pada jaringan jalan utama yang berpola linier.

Gambar 3.16 Peta Delinasi Kawasan Koto Baru



3.1.5.3 Kawasan Pasar Koto Baru Nagari Koto Baru

Kawasan Pasar ini terdapat di Nagari Koto Baru , Kecamatan Koto Baru. Luas kawasan kumuh Koto Baru yaitu 21,57 Ha dengan jumlah bangunan 195 unit, jumlah penduduk 602 jiwa dan jumlah KK yaitu 199 KK. Kawasan Pasar Koto Baru terletak pada lintang 101°43’26"E dan 0°57'53"S. Survey lapangan yang telah dilakukan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Pasar Koto Baru ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Pasar Koto Baru memiliki luas kawasan deliniasi yaitu 21,57 Ha dan bangunan sebanyak 195 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 25 % atau 49 unit dari total bangunan. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan, Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada (25%) memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha. Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, dikawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.







B. Kondisi Jalan Lingkungan



Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Untuk melihat aksesibilitas jalan lingkungan pada kawasan kumuh ini, kondisi jalan lingkungan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan beton dan aspal. Sementara untuk jalan rusak masih ada terdapat di beberapa ruas jalan beton.







C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar). Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) di Kawasan Kumuh Pasar Koto Baru ini hanya sedikit karena umumnya untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi yang bersumber dari sumur bor yang kualitas air nya cukup baik, namun g kondisi sumur bor tersebut tidak terpelihara dengan baik.

D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Pada Kawasan Kumuh Pasar Koto Baru ini, untuk ketersediaan jaringan drainase umumnya sudah terlayani jaringan drainase

lingkungnan yaitu sekitar 75% dan sekitar 25% yang belum terlayani jaringan drainase. Pada kawasan ini, dari jaringan drainase yang ada terdapat jaringan drainase yang tidak dapat mengalirkan limpasan air hujan dengan baik karena adanya penyumbatan seperti adanya sedimentasi dalam saluaran drainase sehingga menimbulkan genangan. Untuk kondisi konstruksi drainase sebagian besar dalam kondisi baik.





E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Pasar Koto Baru sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis hanya sekitar 25 %, dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis juga hanya 25 %. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri. Hanya sebagian kecil masyarakat yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada).

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



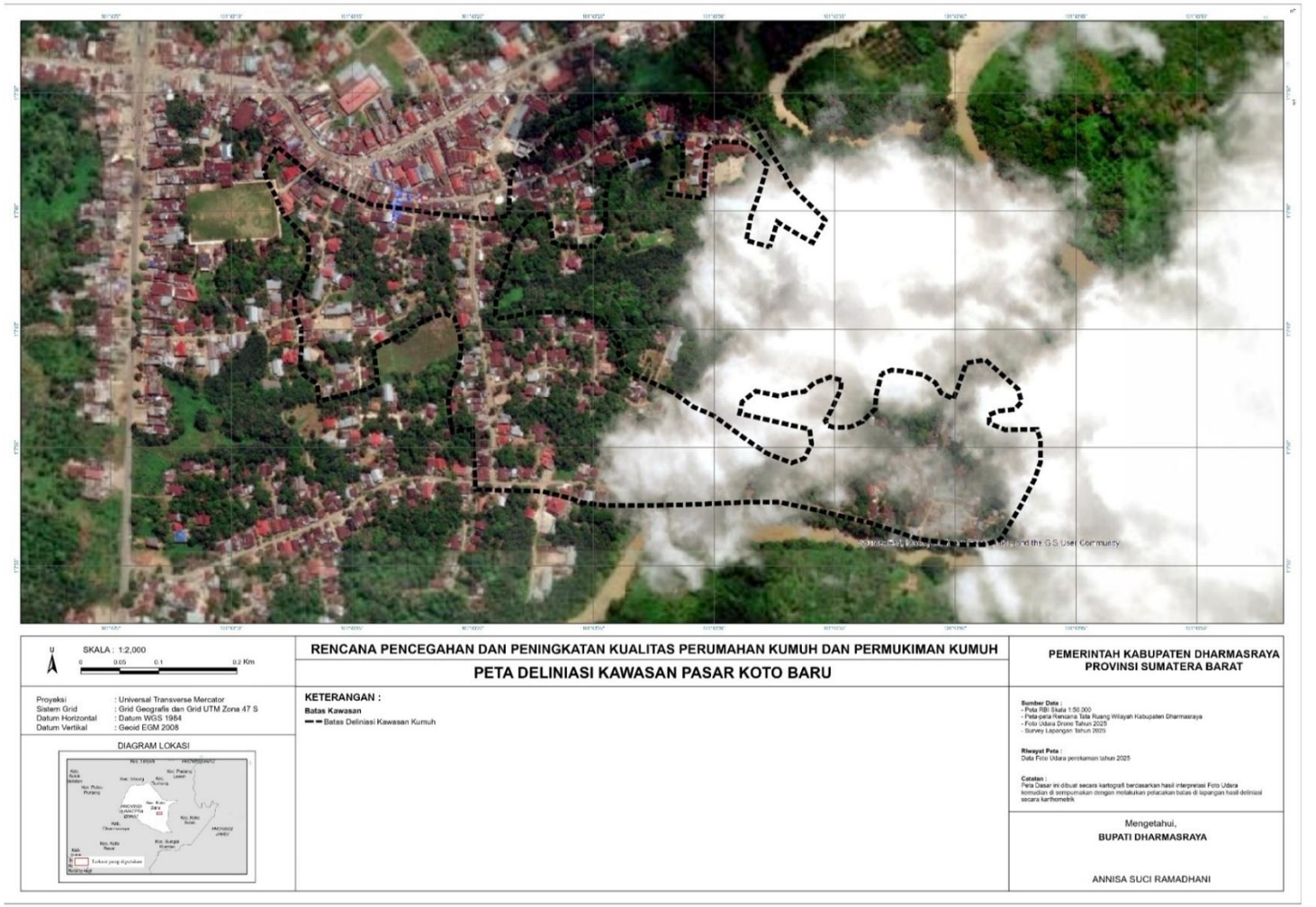
Kondisi pengelola persampahan antara lain prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Pada Kawasan Pasar Koto Baru, tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis

(terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat masih dalam bentuk membakar disuatu titik atau menumpuk di sekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki pasokan air yang dekat dengan sungai dan jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

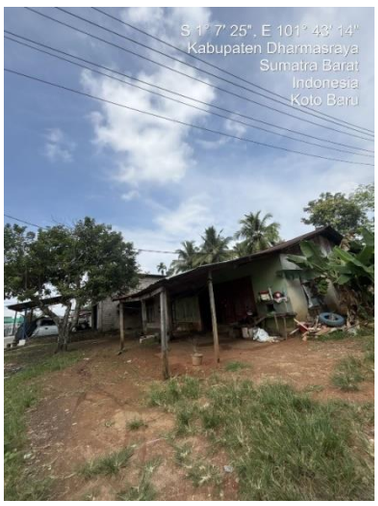
Gambar 3.17 Peta Delinasi Kawasan Pasar Koto Baru



3.1.5.4 Kawasan Koto Baru 3

Kawasan Kawasan Koto Baru 3 ini terdapat di Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru. Luas Kawasan Kumuh Kawasan Koto Baru 3yaitu 10,50 Ha dengan jumlah bangunan 302 unit, jumlah penduduk 1001 jiwa dan jumlah KK sebanyak 215 KK. Kawasan Kawasan Koto Baru 3 terletak pada lintang 101° 43' 16,570" E dan 1° 7' 25,251" S . Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Kawasan Koto Baru 3 ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Kawasan Kawasan Koto Baru 3memiliki luas kawasan deliniasi kurang lebih 10,50 Ha dan bangunan sebanyak 302 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan ada sekitar 25 % atau 120 unit dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada ± 25% memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.

Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.

B. Kondisi Jalan Lingkungan



Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Pada Kawasan kumuh Koto Baru, kondisi jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan beton dan aspal. Sementara untuk jalan rusak masih terdapat di beberapa ruas jalan beton dan di kawasan ini juga masih terdapat jalan tanah.

C. Kondisi Penyedian Air Minum





Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) umumnya penduduk Kawasan Kumuh Kawasan Koto Baru 3untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur yang bersih dan jernih serta sudah adanya PAMSIMAS.

D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka di kawasan kumuh Kawasan Koto Baru 3 ini, baru 45% kawasan yang memiliki/tersedia drainase lingkungan yang bersifat permanen (hanya pada jalan utama kawasan) jadi sekitar 55% kawasan tidak terlayani jaringan drainase. Pada Kawasan Kumuh

Kawasan Koto Baru 3drainase yang ada pada bagian jalan utama dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan.

Sementara yang tidak memiliki jaringan drainase langsung diserap oleh tanah dan mengalir mengikuti kontur lahannya kearah bagian belakang kawasan permukiman yang berupa lahan rawa yang menjadi tempat pembuangan akhir aliran air yang ada di sekitar kawasan tersebut. Kawasan ini termasuk dalam kawasan rawan banjir pada bagian belakang kawasan permukiman yang disebabkan oleh aliran air rawa yang tidak jalan. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase sebagian dalam kondisi buruk, karena mengalami kerusakan.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Kawasan Koto Baru 3 sistem pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis hanya sekitar 35 %, dan yang memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis juga sekitar 25 %. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir berupa septik tank sendiri, namun dari data dan survey lapangan yang di dapat masih ada sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam /lubang yang dibuat sendiri).



F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat

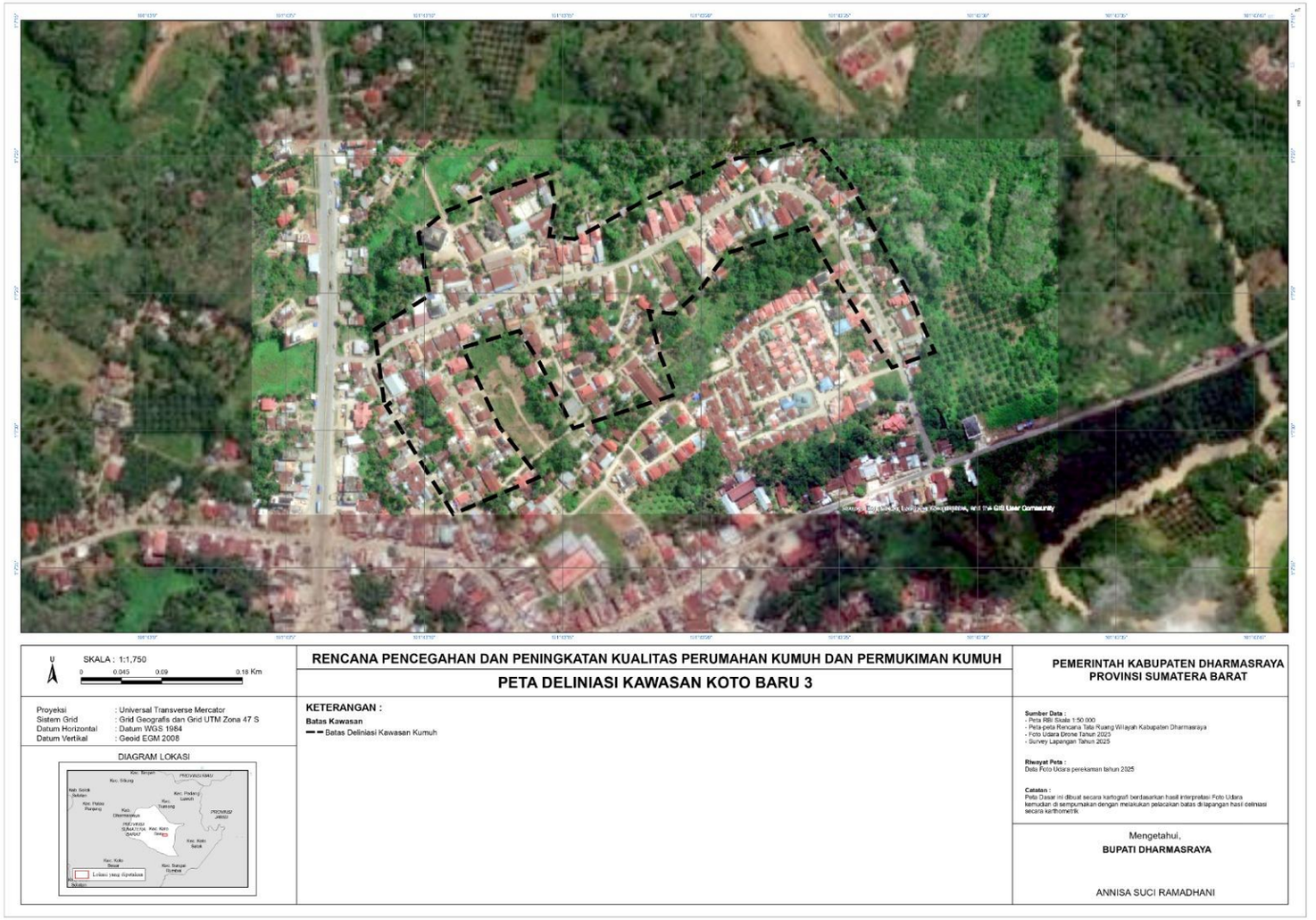
sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Kawasan Koto Baru 3 tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat masih dalam bentuk dibakar disuatu titik atau menumpuk di sekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum tersedia sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah adanya memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran karena kawasan umumnya terletak pada jaringan jalan utama yang berpola linier.

Gambar 3.18 Peta Kawasan Kumuh Koto Baru 3



3.1.5.5 Kawasan Kumuh Lubuk Agam

Kawasan Lubuk Agam ini terdapat di Nagari Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru. Luas kawasan kumuh Lubuk Agam yaitu 3,37 Ha dengan jumlah bangunan 47 unit, jumlah penduduk 195 jiwa dan jumlah KK yaitu 65 KK. Kawasan Lubuk Agam terletak pada lintang 101°41"E dan 0°58'2 "S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Lubuk Agam ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut

A. Kondisi Bangunan Gedung



Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Lubuk Agam memiliki luas deliniasi kawasan yaitu 3,37 Ha dan bangunan sebanyak 47 unit bangunan. Untuk bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan ada sekitar 25 % atau 12 unit dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada (sekitar 25%) memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.



Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, dikawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.

B. Kondisi Jalan Lingkungan



Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Pada Kawasan kumuh Lubuk Agam, kondisi jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas poermukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan beton dan aspal. Sementara untuk jalan rusak masih terdapat di beberapa ruas jalan beton dan kawasan ini juga masih terdapat jalan tanah.









C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari), umumnya penduduk di kawasan Kumuh Lubuk Agam ini untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur.

D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan

buruk, maka di kawasan kumuh Lubuk Agam, baru sekitar 30% kawasan terlayani/ada jaringan drainase lingkungan dan sekitar 70% lagi kawasan ini tidak atau belum terlayani jaringan drainase. Pada Kawasan kumuh Lubuk Agam drainase yang ada tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan. Untuk kondisi konstruksi drainase yang telah permanen/sudah semenisasi, sebagian drainase tersebut sudah banyak mengalami kerusakan dan sedimentasi serta konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis.







E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Lubuk Agam sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis hanya sekitar 25 %, dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu 25 %. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri, namun masih ada yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada).





F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Lubuk Agam tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat masih dalam bentuk membakar disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

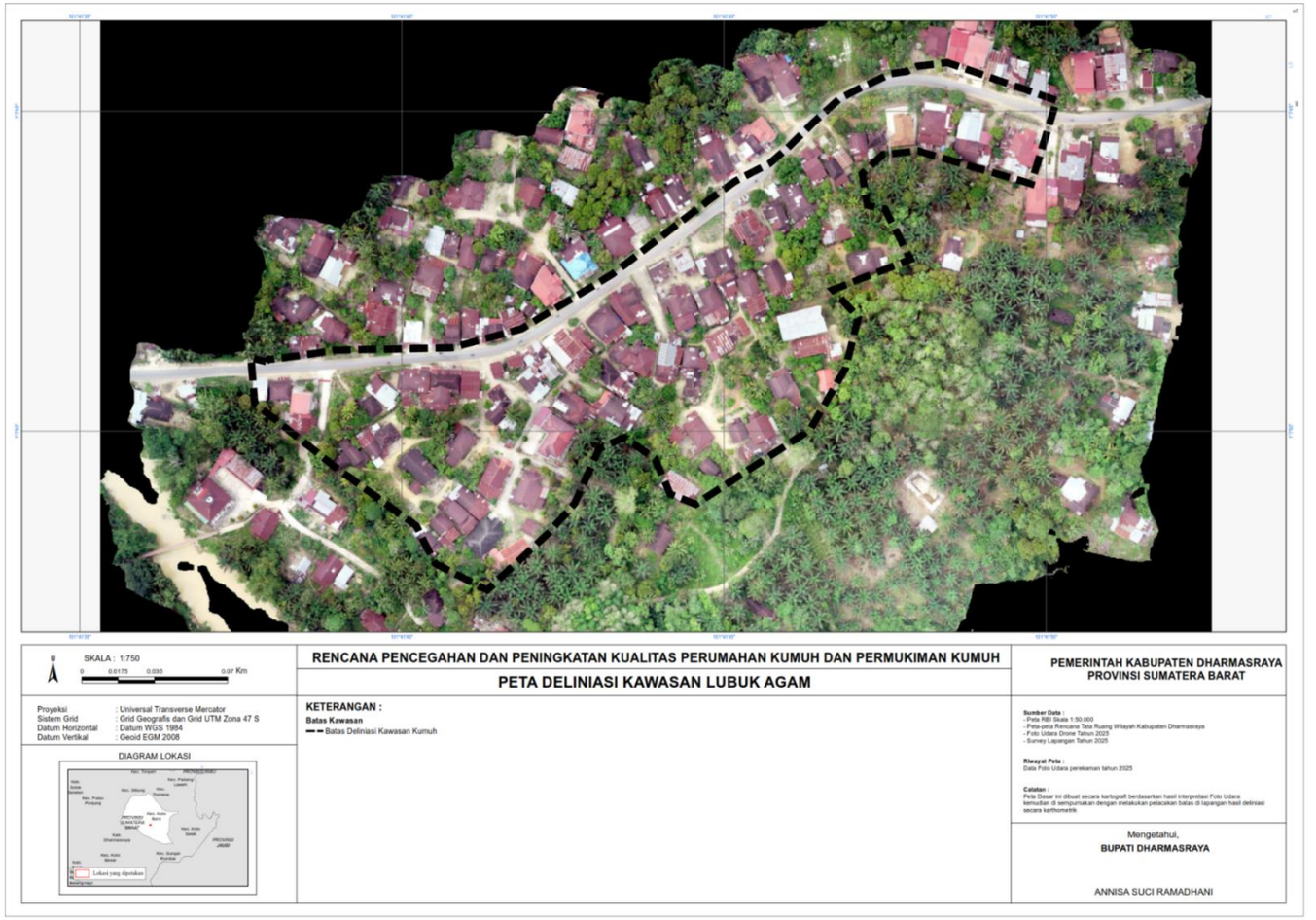




G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

Gambar 3.19 Peta Delinasi Kawasan Lubuk Agam



3.1.5.6 Kawasan Ampang Kuranji

Kawasan Kumuh Ampang Kuranji ini terdapat di Nagari Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru. Dengan luas 5,24 Ha dengan jumlah bangunan 63 unit, jumlah penduduk 216 jiwa dan jumlah KK yaitu 72 KK. Kawasan Koto Gadang terletak pada lintang 101°41'27"E dan 1°7'45"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Ampang Kuranji ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung







Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Ampang Kuranji memiliki luas kawasan deliniasi yaitu 5,24 Ha dan bangunan sebanyak 63 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 25 % atau 16 unit dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan, Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada (sekitar 25%) memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.

B. Kondisi Jalan Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada kawasan kumuh dilihat dari luas

kawasan hampir semua kawasan permukiman telah terlayani jaringan jalan lingkungan dengan struktur cor beton, paving dan aspal. Selanjutnya dilihat dari kualitas permukaan jalan lingkungan sebagian dalam kondisi buruk dimana telah banyak jalan yang sudah dilakukan perkerasan dengan cor beton mengalami keusakan dan masih ada ruas yang kembali terlihat jalan tanah.



Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada Kawasan kumuh ini, sebagian besar kawasan sudah terlayani dengan jaringan jalan lingkungannya dengan jalan aspal dan cor beton, sedangkan kalau dilihat dari kondisi konstruksi jalan yang ada saat ini kondisi jalan sudah baik dengan adanya pengerasan. Namun dibeberapa ruas jalan tersebut konstruksinya sudah mulai rusak dan terlihat jalan tanah.









C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar). Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) rata-rata semuanya telah di Kawasan Kumuh Ampang Kuranji untuk kebutuhan

air minum sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari Sumur, namun kondisinya tidak terpelihara dengan baik.



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada Kawasan Ampang Kuranji untuk kebutuhan air minum umumnya masyarakat terlah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari Sumur. Namun dilihat dari kesehatan lingkungannya, lokasi sumber air ini masih banyak yang tidak dirawat dengan baik.

D. Kondisi Drainase Lingkungan









Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka di kawasan kumuh Koto Gadang, baru sekitar 30% kawasan terlayani/ada jaringan drainase lingkungan dan sekitar 70% lagi kawasan ini tidak atau belum terlayani jaringan drainase. Namun pada kawasan ini drainase yang ada masih mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Untuk kondisi konstruksi drainase yang telah permanen/sudah semenisasi, sebagian drainase tersebut sudah banyak mengalami kerusakan dan sedimentasi dan sampah serta konstruksi drainase buruk karena masih ada berupa galian tanah tanpa material pelapis.

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka di kawasan kumuh Ampang Kuranji, hampir semua kawasan memiliki jaringan drainase ± 75% dan hanya sekitar 25% saja kawasan permukiman ini belum/tidak terlayani jaringan drainase. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bagian di kawasan permukiman ini jaringan drainase ada yang terputus dan ada yang hanya satu sisi saja yang memiliki drainase. Pada Kawasan kumuh Ampang Kuranji drainase yang ada masih mampu mengalirkan limpasan air hujan dengan lancar walapun di beberapa titik jaringan drainase ini terputus dan terdapat sedimentasi .



Dilihat dari kualitas konstruksi drainase yang ada, sebagian dari jaringan drainase tersebut mengalami kerusakan karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan.







E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Koto Gadang sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis hanya sekitar 25 %,





dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu 25 %. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri hanya sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada).

Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan Ampang Kuranji sistem pengelolaan air limbah sudah memenuhi persyaratan teknis sekitar 75 %, dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu sekitar 25%. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri hanya sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada)

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.





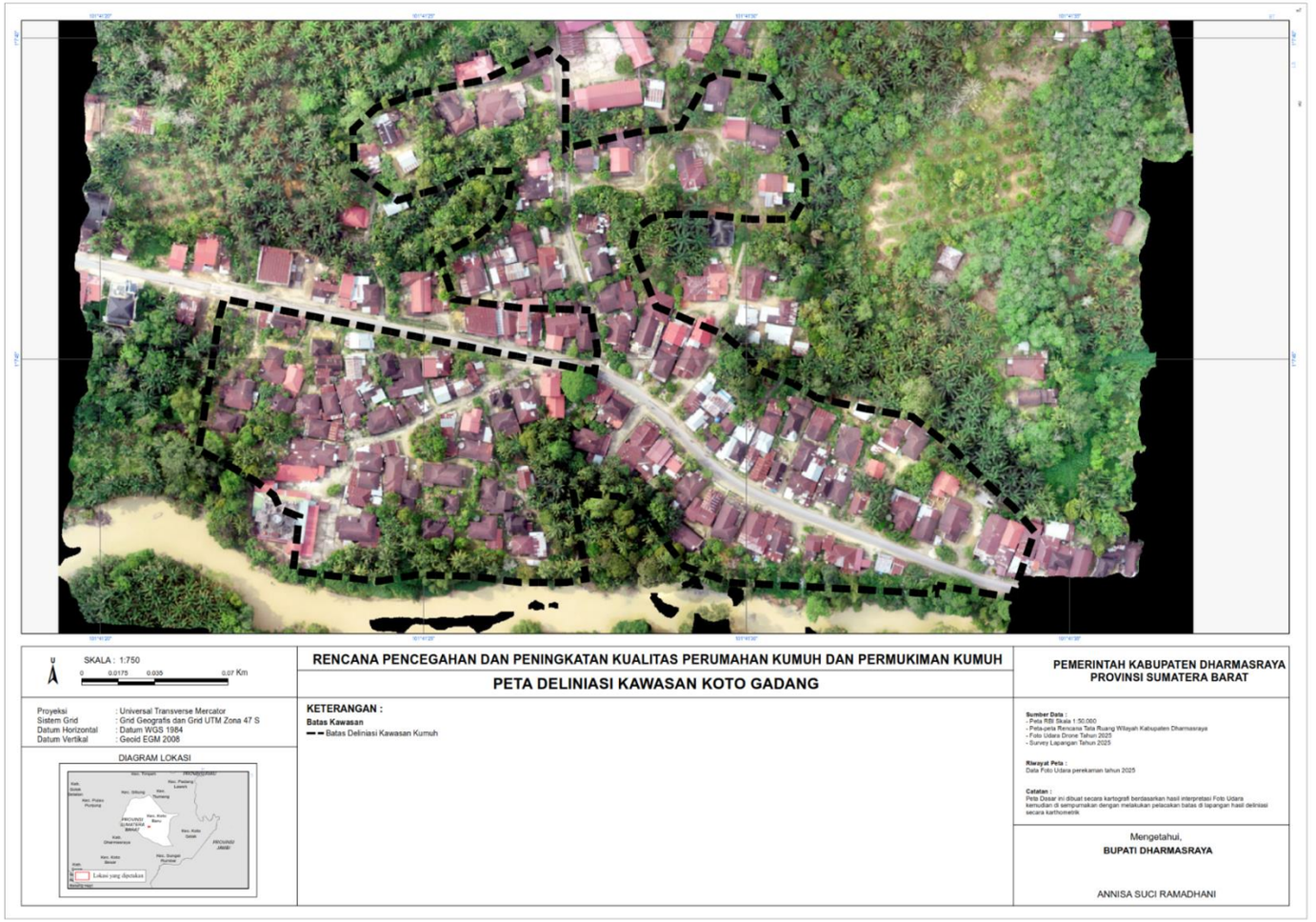
Pada Kawasan Ampang Kuranji ini tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini masyarakat masih membakar sampah disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah dan dibuang kesaluran air (masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis).

Pada kawasan ini Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran. Namun pada beberapa ruas jalan lingkungan yang ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

Gambar 3.20 Peta Delinasi Kawasan Koto Gadang



3.1.5.7 Kawasan Kumuh Cangkir Batu

Kawasan kumuh Cangkir Batu ini terdapat di Nagari Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru. Luas kawasan kumuh Cangkir Batu yaitu 3,63 Ha dengan jumlah bangunan 51 unit, jumlah penduduk 198 jiwa dan jumlah KK yaitu 66 KK. Kawasan Cangkir Batu terletak pada lintang 101°41'11"E dan 1°7'47"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Cangkir Batu ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung





Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Cangkir Batu memiliki luas deliniasi kawasan yaitu 3,63 Ha dan bangunan sebanyak 51 unit bangunan. Bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 25 % atau 13 unit dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada ± 25% memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.

Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.





B. Kondisi Jalan Lingkungan



Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada Kawasan kumuh Cangkir Batu ini, sebagian besar kawasan sudah terlayani dengan jaringan jalan lingkungannya dengan jalan aspal dan cor beton, sedangkan kalau dilihat dari kondisi konstruksi jalan yang ada saat ini kondisi jalan sudah baik dengan adanya pengerasan. Namun dibeberapa ruas jalan tersebut konstruksinya sudah mulai rusak dan terlihat jalan tanah.





C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada Kawasan Kumuh Cangkir Batu untuk kebutuhan air minum umumnya masyarakat terlah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari Sumur. Namun dilihat dari kesehatan

lingkungannya, lokasi sumber air ini masih banyak yang tidak dirawat dengan baik.

D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka di kawasan kumuh Cangkir Batu, hampir semua kawasan memiliki jaringan drainase ± 75% dan hanya sekitar 25% saja kawasan permukiman ini belum/tidak terlayani jaringan drainase. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bagian di kawasan permukiman ini jaringan drainase ada yang terputus dan ada yang hanya satu sisi saja yang memiliki drainase. Pada Kawasan kumuh Cangkir Batu drainase yang ada masih mampu mengalirkan limpasan air hujan dengan lancar walapun di beberapa titik jaringan drainase ini terputus dan terdapat sedimentasi . Dilihat dari kualitas konstruksi drainase yang ada, sebagian dari jaringan drainase tersebut mengalami kerusakan karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan.







E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan Cangkir Batu sistem pengelolaan air limbah sudah memenuhi persyaratan teknis sekitar 75 %, dan

prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu sekitar 25%. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri hanya sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada)

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seseperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.



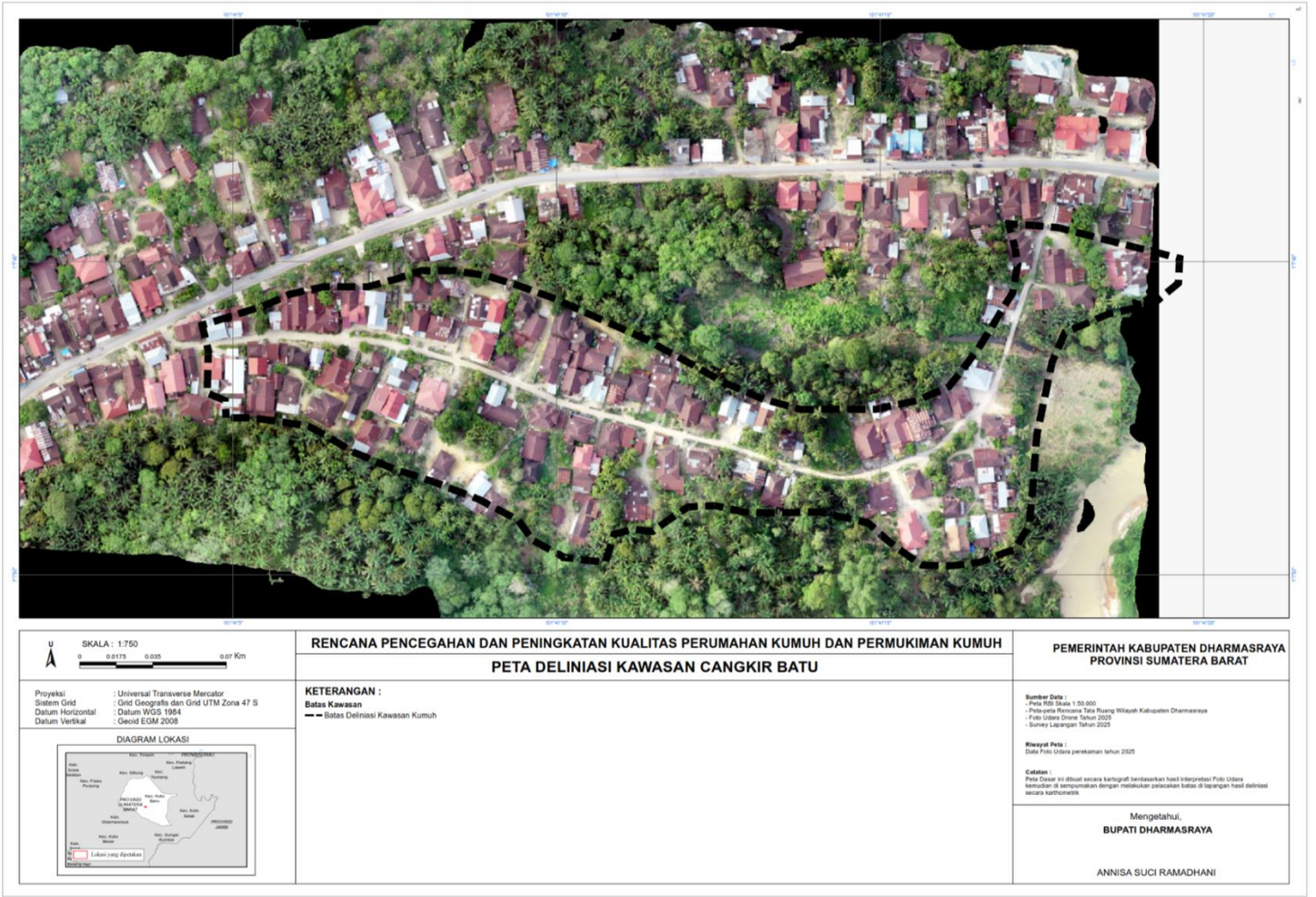


Pada kawasan ini Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah adanya memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran, tetapi pada beberapa ruas jalan lingkungan yang ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

Gambar 3.21 Peta Delinasi Kawasan Cangkir Batu



3.1.5.8 Kawasan Kumuh Teluk Alai

Kawasan Kumuh Teluk Alai ini terdapat di Nagari Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru. Luas kawasan kumuh Teluk Alai yaitu 9,53 Ha dengan jumlah bangunan 160 unit, jumlah penduduk 366 jiwa dan jumlah KK yaitu 122 KK. Kawasan Teluk Alai terletak pada lintang 101°40'53"E dan 1°8'0"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Teluk Alai ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung

Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan Kawasan Teluk Alai memiliki luas kawasan deliniasi yaitu 9,53 Ha dan bangunan sebanyak 160 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 25 % atau 27 unit dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada ±25% memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.





Diliihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih terdapat beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.




B. Kondisi Jalan Lingkungan



Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Pada Kawasan Teluk Alai, kondisi jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan aspal dan beton. Sementara untuk jalan rusak masih terdapat di beberapa ruas jalan beton dan di kawasan ini juga masih terdapat jalan tanah.





C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal secara kuantitas (60 liter/hari) tidak terpenuhi.



Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum hanya sedikit yaitu ± 25% yang belum memiliki akses air

minum. Rata-rata di kawasan Teluk Alai untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari sumur dan sumur bor.

D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka di kawasan Teluk Alai ini masih banyak kawasan yang belum tersedia jaringan drainase lingkungan yaitu sekitar 90% tidak terlayani jaringan drainase sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase sebagian sudah terlihat buruk, karena dibeberapa ruas yang ada mengalami kerusakan.





E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah




Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan Teluk Alai ini sistem pengelolaan air limbah dan ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis ± 25 %. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri hanya sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada).

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



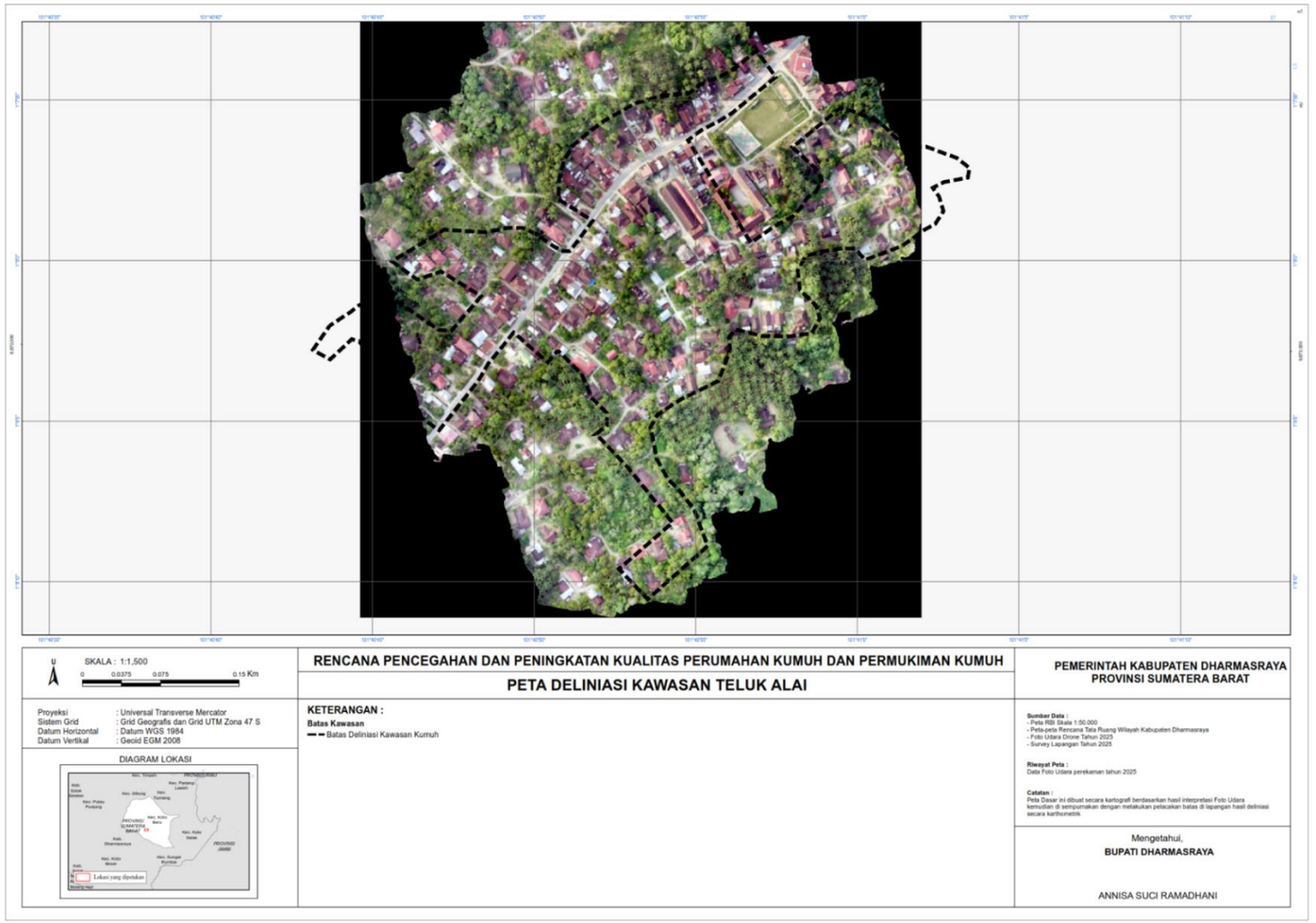
Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Teluk Alai, tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan sesuai persyaratan teknis. Pada kawasan ini masyarakat membakar sampah disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah adanya memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran. Namun pada beberapa ruas jalan lingkungan yang ada masih ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

Gambar 3.22 Peta Delinasi Kawasan Teluk Alai



3.1.6 Kecamatan Koto Salak

Kecamatan Koto Salak teletak di 1° 05' 32'' - 1° 13' 16'' LS dan 101° 44' 40''-101° 54' 27'' BT dengan ketinggian wilayah 112 meter dari permukaan laut. Kecamatan Koto Salak memiliki luas wilayah yaitu 121,45 Km^2 dan terdiri dari 5 (lima) nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/160/KPTS-BUP/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor :100.3.3.2/110/KPTS-BUP/2025 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Koto Salak terdapat 1 kawasan kumuh yaitu Kawasan Padukuan berikut adalah gambaran kawasan kumuh berdasarkan hasil survei lapangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.6.1 Kawasan Padukuan

Kawasan ini terdapat Nagari Padukuan, Kecamatan Koto Salak. Luas kawasan kumuh Padukuan yaitu 21,98 Ha dengan jumlah bangunan 134 unit, jumlah penduduk 584 jiwa dan jumlah KK yaitu 146 KK. Kawasan Padukuan terletak pada lintang 101°49'59"E dan 1°8'48 "S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Padukuan ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Untuk lebih jelasnya kondisi kawasan kumuh pada kawasan ini dapat dilihat pada uraian dan tabel dibawah ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung





Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah Ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Padukuan memiliki luas kawasan deliniasi yaitu 21,98 Ha dan bangunan sebanyak 134 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 25 % atau 34 unit dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan, Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada (25%) memiliki kepadatan yang cukup rapat

yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.




Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.






B. Kondisi Jalan Lingkungan



Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Pada Kawasan Padukuan, kondisi jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah

baik dengan pengerasan beton dan aspal. Sementara untuk jalan rusak masih terdapat di beberapa ruas jalan beton dan di kawasan ini juga masih terdapat jalan tanah.






C. Kondisi Penyedian Air Minum

Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) hanya sedikit yaitu ± 25 %. Umumnya penduduk di kawasan Padukuan untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur yang cukup bersih dan jernih (namun dari aspek kesehatan lingkungan kurang terawat serta bersumber dari sudah adanya PAMSIMAS.





D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan pada Kawasan kumuh Padukuan, ± 65% dan kawasan ini telah tersedia dan terlayani



jaringan drainase lingkungan dan sekitar 35% tidak atau belum terlayani jaringan drainase. Pada kawasan Padukuan drainase yang ada masih belum terkoneksi dengan baik dengan jaringan diatasnya, namun demikian untuk saat ini kondisi jaringan drainase tersebut masih dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan.

Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase sebagian buruk, karena mengalami kerusakan dan tidak terpelihara dengan baik.





.




E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan Padukuan sistem pengelolaan air limbah dan ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis hanya sekitar 30 %. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri hanya sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, kondisi yang sudah tidak layak dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada).





F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



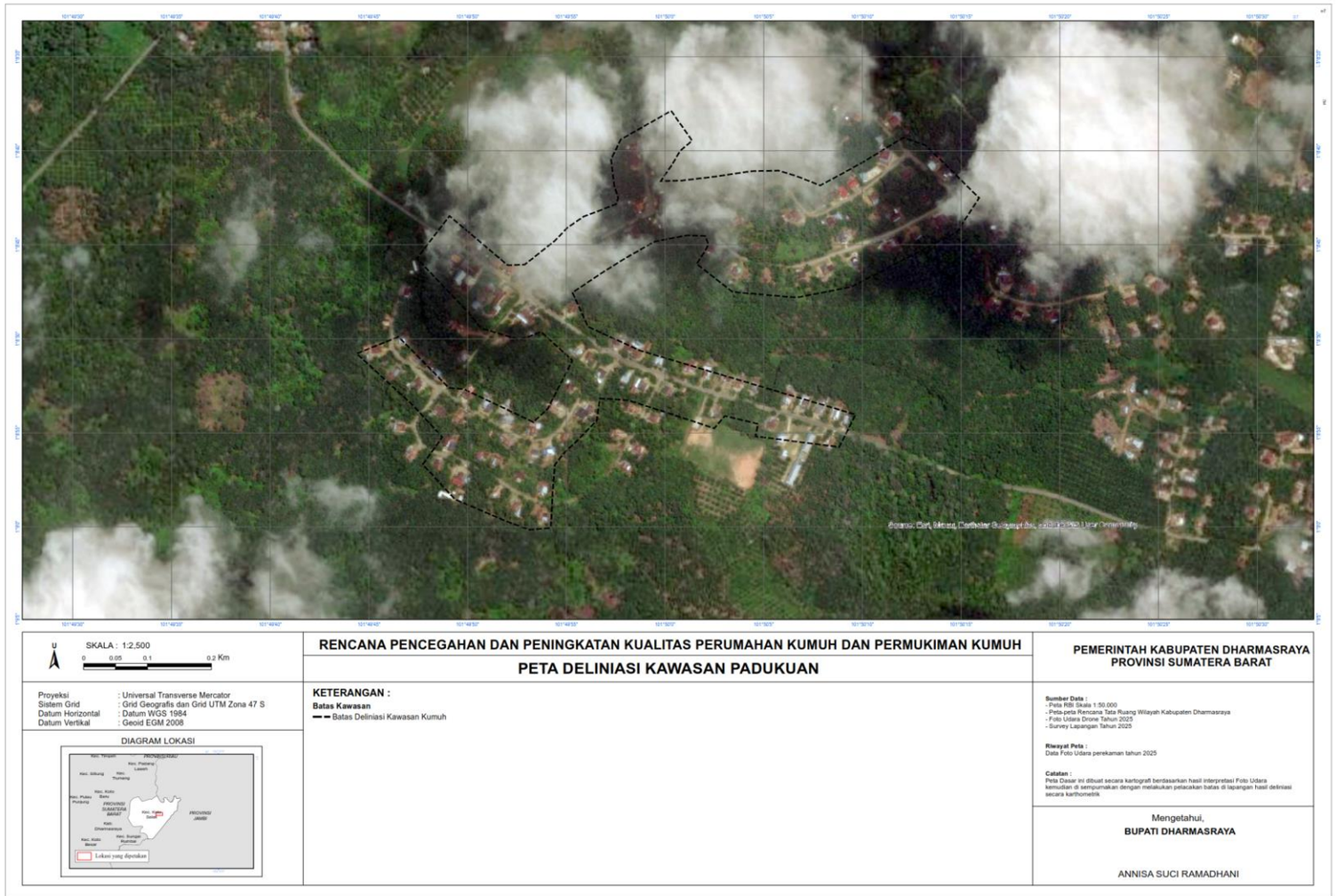
Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada kawasan ini tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Masyarakat melakukan pengelolaan sampah dengan cara membakar dan mengumpulkan pada disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah dan buang kesungai kawasan (masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis).

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan. Namun pada beberapa ruas jalan lingkungan yang ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

Gambar 3.23 Peta Delinasi Kawasan Padukuan



3.1.7 Kecamatan Tiumang

Kecamatan Pulau Punjung terletak di 101⁰ 42' 12" - 101⁰ 47' BT dan 100⁰ 50' 12" - 105⁰ 33' LS dengan ketinggian wilayah 90 Meter dari permukaan laut. Kecamatan Tiumang memiliki luas wilayah yaitu 134,43 Km2 dan terdiri dari 4 (empat) nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/160/KPTS-BUP/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor :100.3.3.2/110/KPTS-BUP/2025 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Tiumang. Gambaran kawasan kumuh berdasarkan hasil survei lapangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.7.1 Kawasan Kumuh Sipangkur

Kawasan kumuh Sipangkur ini terdapat Nagari Sipangkur, dengan luas kawasan 5,81 Ha dan jumlah bangunan 72 unit, jumlah penduduk 178 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 45 KK. Kawasan Sipangkur terletak pada lintang 101°47'30"E dan 1°4'57"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Sipangkur ini melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. maka dapat diuraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunann Gedung



Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah adalah ketidakteraturan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Kawasan Sipangkur memiliki luas deliniasi kawasan ± 5,81 Ha dan bangunan sebanyak 72 unit bangunan. Untuk bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan terdapat ± 25 % atau 18 unit dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada yaitu 25% memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.

Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, dikawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.





B. Kondisi Jalan Lingkungan

Untuk Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk.




Pada Kawasan kumuh Sipangkur, kondisi jalan telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas poermukaan jalan, permukaan jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan perkerasan aspal.

C. Kondisi Penyediaan Air Minum

Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada umumnya penduduk di kawasan Kumuh Sipangkur untuk

kebutuhan air minum sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari air sumur.




D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka untuk di kawasan kumuh Sipangkur ini, baru 10% kawasan yang memiliki/tersedia drainase lingkungan jadi sekitar 90% kawasan tidak terlayani jaringan drainase. Dan dilihat dari konstruksi saluran drainase pada kawasan kumuh Sipangkur kontruksi drainase yang ada sudah buruk yaitu masih banyak dari lapisan tanah.




E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan Sipangkur sistem pengelolaan air limbah hampir semua rumah penduduk telah memenuhi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sesuai dengan persyaratan teknis. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan WC sendiri setiap rumah dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri setiap rumah .



F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya system pengelolaan persampahan yang terorganisir.



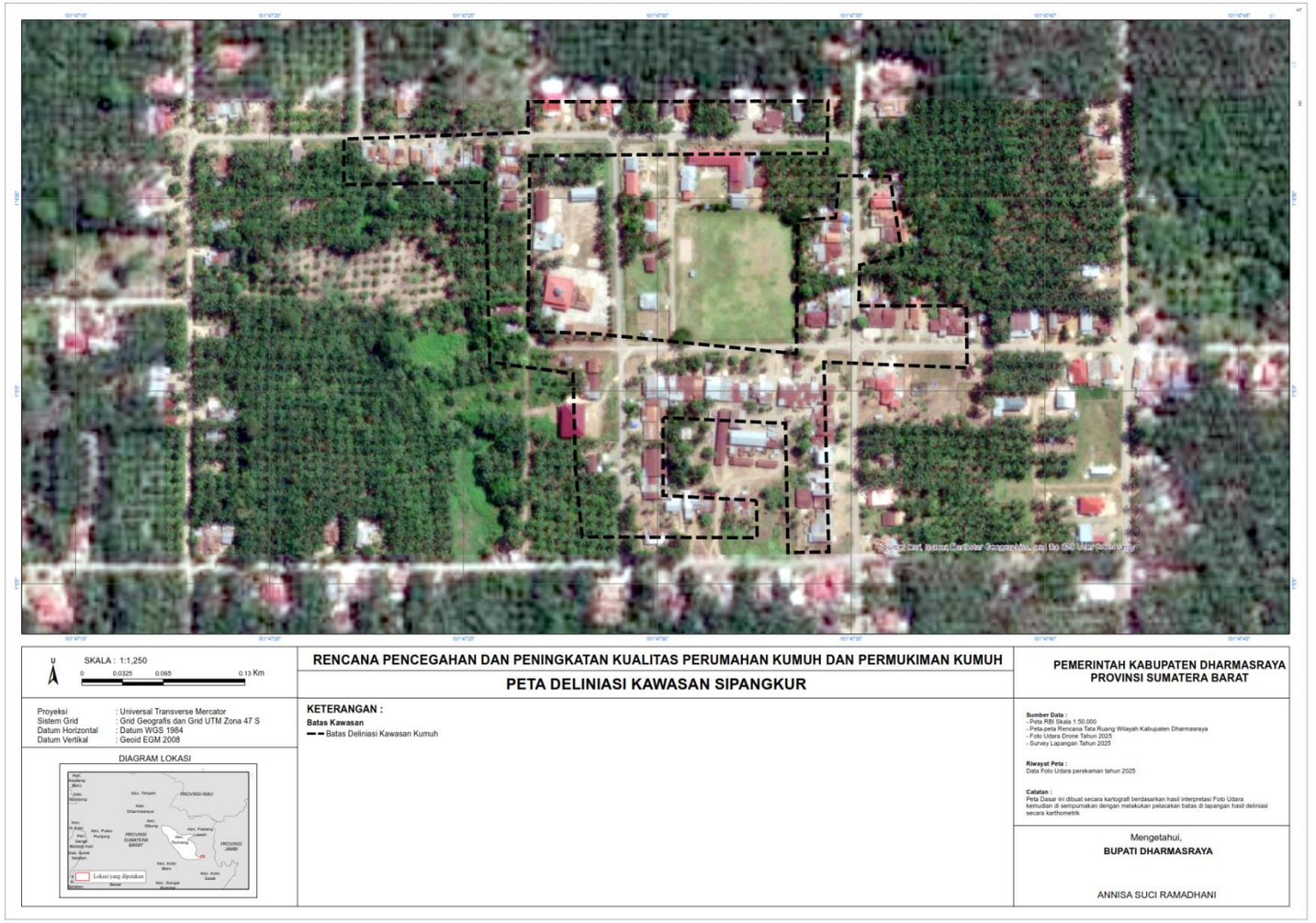
Pada Kawasan Sipangkur tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat masih dalam bentuk membakar disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.



G. Kondisi Proteksi Kebaran

Kondisi proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

Gambar 3.24 Peta Delinasi Kawasan Sipangkur



3.1.7.2 Kawasan Sungai Langkok Nagari Sungai Langkok

Kawasan Kumuh Sungai Langkok ini terdapat di Nagari Sungai Langkok, Kecamatan Tiumang. Luas Kawasan yaitu 3,40 Ha dengan jumlah bangunan 42 unit, jumlah penduduk 398 jiwa dan jumlah KK sebanyak 100 KK. Kawasan Sungai Langkok terletak pada lintang 101°47'5"E dan 1°6'5"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Sungai Langkok ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung







Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Kawasan Sungai Langkok memiliki luas deliniasi kawasan ± 3,40 Ha dan bangunan sebanyak 42 unit bangunan. Bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan terdapat ± 25 % atau 11 unit dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada 25% memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.

Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, dikawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi

bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.

B. Kondisi Jalan Lingkungan

Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Pada Kawasan kumuh Sungai Langkok, kondisi jalan telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, permukaan jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan perkerasan aspal.





C. Penyediaan Air Minum



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) umumnya penduduk Kawasan Kumuh Sungai Langkok untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur yang bersih dan jernih serta sudah adanya PAMSIMAS.

D. Kodisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka di kawasan kumuh Sungai Langkok ini, baru 70% kawasan yang memiliki/tersedia drainase lingkungan jadi sekitar 30% kawasan tidak terlayani jaringan drainase.

Pada Kawasan kumuh Sungai Langkok drainase yang ada dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Sementara yang tidak memiliki jaringan drainase langsung diserap oleh tanah dan mengalir mengikuti kontur lahannya. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase yang telah permanen/sudah semenisasi, pada umumnya.





E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Sungai Langkok sistem pengelolaan air limbah umumnya telah memenuhi persyaratan teknis hampir 90 %, dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah juga telah memenuhi persyaratan teknis sekitar 90 %. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan WC sendiri setiap rumah dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri setiap rumah .



F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya system pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Kondisi pengelola Persampahan antara lain prasarana dan sarana persampahan sudah terlayani oleh sistem persampahan. Pengangkutan sistem persampahan di Nagari Sungai Langkok yaitu satu (1) kali dalam seminggu ke TPA Gunung Medan. Setiap Rumah

mempunyai tempat sampah masing-masing. Sistem pengangkutan sampah ini dikelola oleh Nagari Sungai Langkok sendiri.

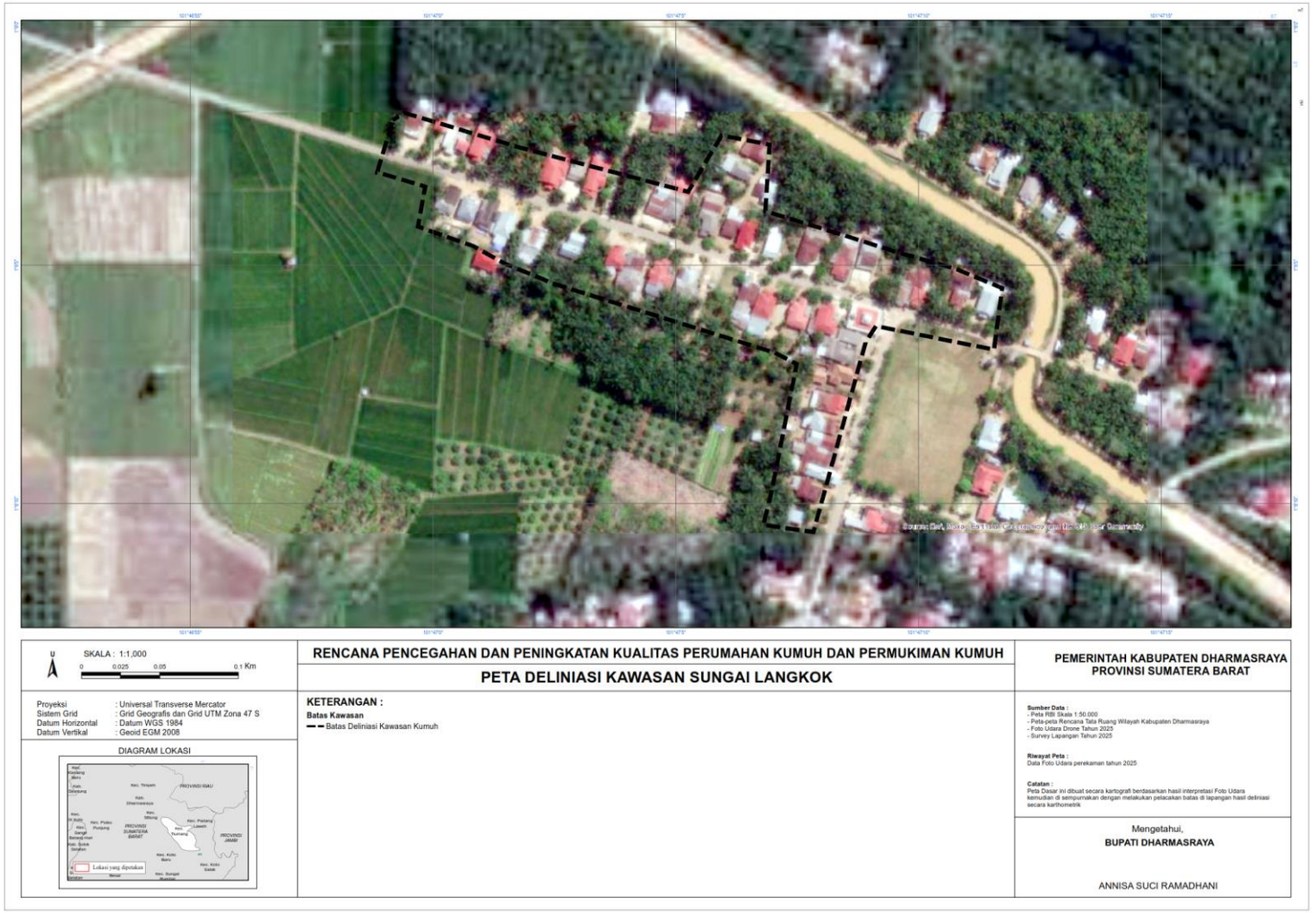




G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

Gambar 3.25 Peta Delinasi Kawasan Sungai Langkok



3.1.8 Kecamatan Padang Laweh

Kecamatan Padang Laweh terletak di 101° 43' 04"BT - 101° 49' 55" BT dan 0° 57' 37"LS - 1° 06' 35" LS. Kecamatan Padang Laweh memiliki luas wilayah 60,62 km2 dan terdiri dari 4 (empat) nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/160/KPTS-BUP/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor :100.3.3.2/110/KPTS-BUP/2025 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Sopan Jaya terdapat 1 kawasan kumuh. Gambaran kawasan kumuh berdasarkan hasil survey lapangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.8.1 Kawasan Kumuh Sopan Jaya

Kawasan ini terdapat di Nagari Sopan Jaya, Kecamatan Padang Laweh. Luas kawasan kumuh Sopan Jaya yaitu 2,04 Ha dengan jumlah bangunan 34 unit, jumlah penduduk 153 jiwa dan jumlah KK yaitu 38 KK. Kawasan Sopan Jaya terletak pada lintang 101°45'7"E dan 0°59'1"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Sopan Jaya ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Kawasan Sopan Jaya memiliki luas deliniasi kawasan ± 2,04 Ha dan bangunan sebanyak 34 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan ada sekitar 25 % atau 9 unit dari total bangunan yang ada. Ketidakteraturan bangunan ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada 25%± memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.

Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, dikawasan ini umumnya bangunan

sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.




B. Kondisi Jalan Lingkungan

Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Pada Kawasan kumuh Sopan Jaya, kondisi jalan telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan aspal, permukaan jalan lingkungan yang ada sebagian rusak.





C. Kondisi Penyediaan Air Minum

Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) umumnya penduduk Kawasan Kumuh Sopan Jaya




untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur yang bersih dan jernih serta sudah adanya PAMSIMAS.

D. Kondisi Draianse Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka di kawasan kumuh Sopan Jaya ini, baru 75% kawasan yang memiliki/tersedia drainase lingkungan jadi sekitar 25% kawasan tidak terlayani jaringan drainase. Pada Kawasan kumuh Sopan Jaya drainase yang ada dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Sementara yang tidak memiliki jaringan drainase langsung diserap oleh tanah dan mengalir mengikuti kontur lahannya. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase yang telah permanen/sudah semenisasi, pada umumnya baik, namun masih ada beberapa yang kondisinya sudah mulai rusak.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah





Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Sopan Jaya sistem pengelolaan air limbah sebagian besar telah memenuhi persyaratan teknis dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sebagian juga telah memenuhi persyaratan teknis yaitu sekitar 70 %. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan WC sendiri pada setiap rumah walaupun tempatnya masih belum memadai secara keseluruhan dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri pada setiap rumah.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



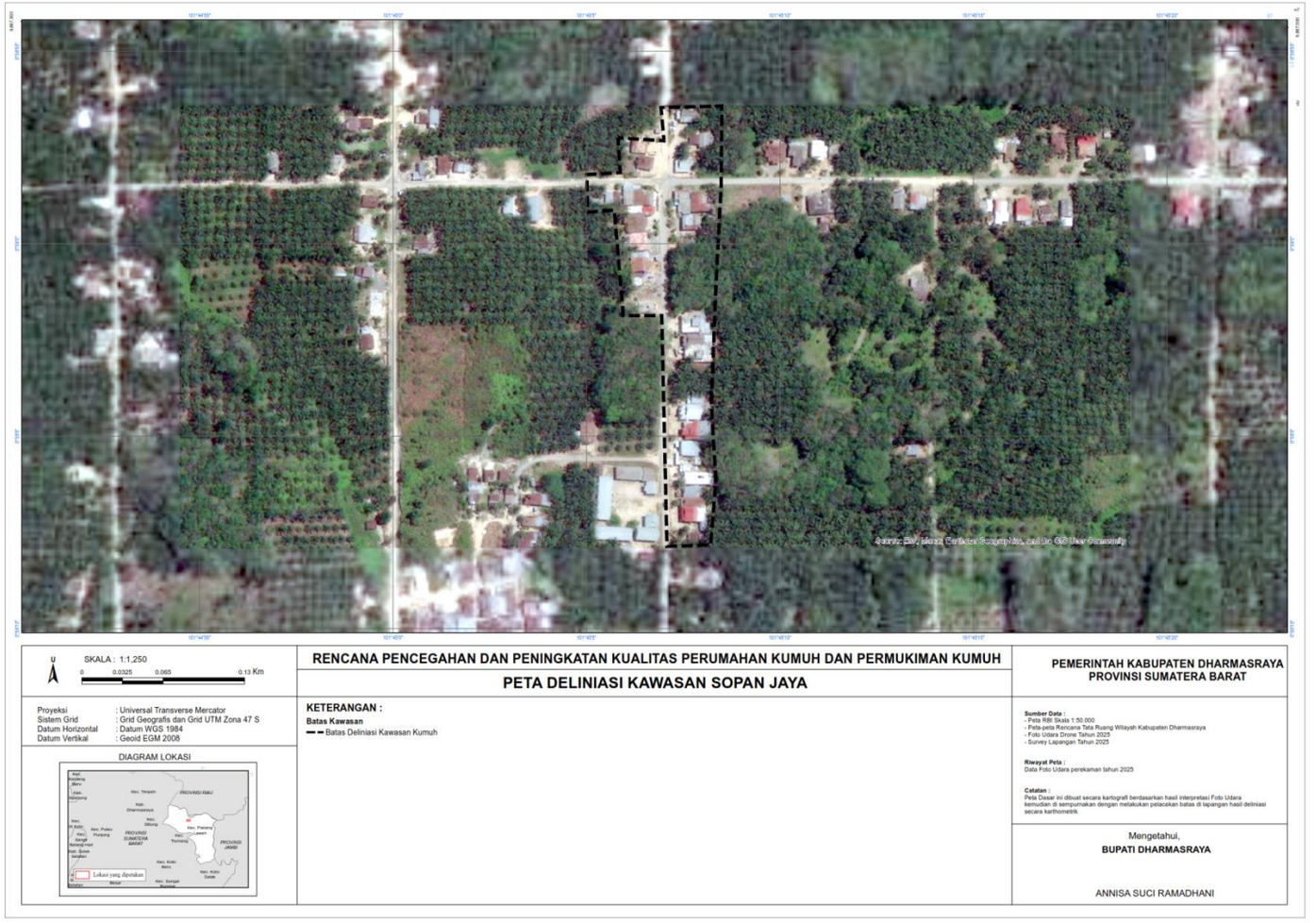
Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya system pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Kumuh Sopan Jaya tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat masih dalam bentuk membakar disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

Gambar 3.26 Peta Delinasi Kawasan Sopan Jaya



3.1.9 Kecamatan Sungai Rumbai

Kecamatan Sungai Rumbai teletak di 101°42'23" - 101°47'38" BT dan 1°10'40" - 1°15'48" LS dengan ketinggian wilayah 121 meter dari permukaan laut. Kecamatan Sungai Rumbai memiliki luas wilayah yaitu 51,06 Km^2 dan terdiri dari 4 (empat) nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/160/KPTS-BUP/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor :100.3.3.2/110/KPTS-BUP/2025 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Sungai Rumbai terdapat satu kawasan kumuh yaitu Kawasan Balai Tangah yang terletak di Nagari Sungai Rumbai, berikut adalah gambaran gambaran kawasan kumuh berdasarkan hasil survei ulang, dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.9.1 Kawasan Balai Tangah, Nagari Sungai Rumbai

Kawasan Kumuh Balai Tangah ini terdapat di Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai. Luas kawasan kumuh Balai Tangah yaitu 6,25 Ha dengan jumlah bangunan 177 unit, jumlah penduduk 555 jiwa dan jumlah KK yaitu 185 KK. Kawasan Balai Tangah terletak pada lintang $101^0$44'20"E dan $1^0$13'31"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Balai Tangah ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung

Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Balai Tangah memiliki luas kawasan ± 6,25 Ha dan bangunan sebanyak 177 unit bangunan. Bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 45 % dari total bangunan. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong sedang karena sebagian dari bangunan yang ada memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu sekitar 60% yang dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.




Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.

B. Kondisi Jalan Lingkungan

Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Pada Kawasan kumuh Balai Tangah, secara keseluruhan kawasan ini telah terlayani oleh jaringan jalan lingkungan. Untuk kondisi jalan sudah baik dengan pengerasan beton.




C. Kondisi Penyedian Air Minum

Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) umumnya penduduk pada kawasan kumuh Balai Tangah untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari PAMSIMAS dan sumur galian.




D. Kondisi Drainase Lingkungan




Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan pada Kawasan kumuh Balai Tangah, 60% kawasan tersedia drainase lingkungan dan 40% tidak terlayani jaringan drainase. Pada Kawasan kumuh Balai Tangah jaringan drainase tidak terkoneksi dengan baik sehingga drainase yang ada tidak dapat mengalirkan limpasan air hujan dengan baik sehingga menimbulkan genangan.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Balai Tangah sistem pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis masih ada sekitar 15 %, dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis juga masih ada sekitar 15 %.




F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



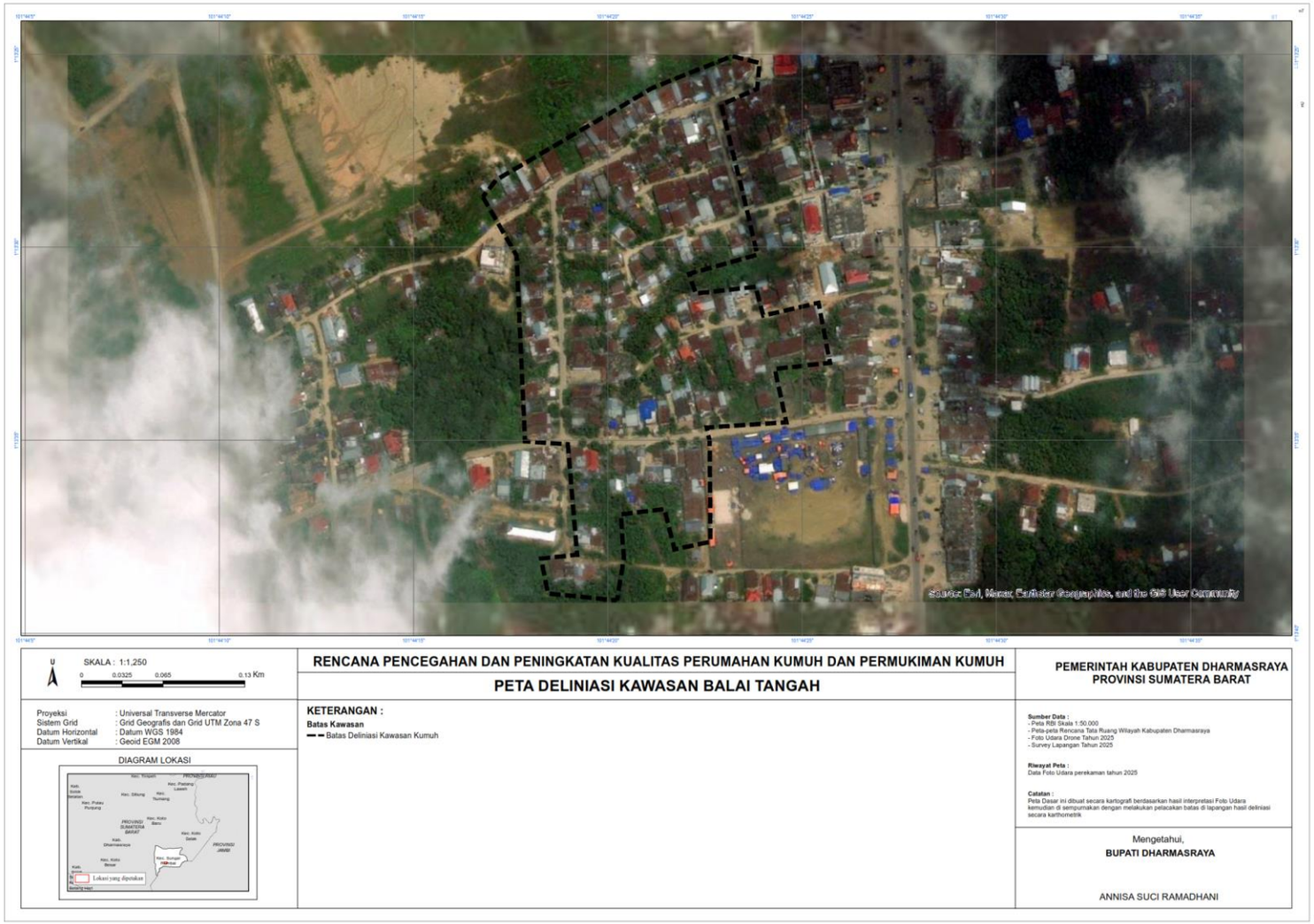
Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Balai Tanggah ini belum/sebagian tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada Kawasan Balai Tangah, 60% sampah rumah tangga di ambil oleh petugas sampah nagari dan 40% lainnya dibakar. Jadi sistem pengelolaan persampahan di kawasan ini sebagian besar belum sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan nya juga belum sepenuhnya memenuhi persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum tersedia sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah adanya memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran. Namun pada beberapa ruas jalan lingkungan yang ada masih ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

Gambar 3.27 Peta Delinasi Kawasan Balai Tangah



3.1.10 Kecamatan Koto Besar

Kecamatan Koto Besar teletak di 1° 05' 03'' - 1° 21' 30'' LS dan 101o 23' 57'' - 101o 42' 20'' BT dengan ketinggian wilayah 113 meter dari permukaan laut. Kecamatan Koto Besar memiliki luas wilayah yaitu 560,57 Km^2 dan terdiri dari 7 (tujuh) nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/160/KPTS-BUP/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor :100.3.3.2/110/KPTS-BUP/2025 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Koto Besar terdapat 3 kawasan kumuh yaitu Kawasan Tuo, Kawasan Ranah dan Kawasan Padang Bungur, berikut adalah gambaran kawasan kumuh berdasarkan hasil survei ulang, dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.10.1 Kawasan Tuo, Nagari Bonjol

Kawasan ini terdapat Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar. Luas kawasan kumuh Tuo yaitu 4 Ha dengan jumlah bangunan 47 unit, jumlah penduduk 235 jiwa dan jumlah KK yaitu 58 KK. Kawasan Tuo terletak pada lintang 101°37'32"E dan 1°9'55"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Tuo ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung







Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah Ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Tuo memiliki luas kawasan deliniasi yaitu 4 Ha dan bangunan sebanyak 47 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 25 % atau 12 unit dari total bangunan. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan, Untuk tingkat



kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada (30%) memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.



Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.

B. Kondisi Jalan Lingkungan



Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. Pada Kawasan kumuh Tuo, kondisi jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan cor beton. Sementara untuk jalan rusak masih terdapat di beberapa ruas jalan beton dan di kawasan ini juga masih terdapat jalan tanah.







C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air

minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) umumnya penduduk. Pada Kawasan Kumuh Tuo belum terpenuhi secara persyaratan teknis karena sumber air minum berasal dari sumur yang airnya berwarna kuning dan berbau.





D. Kondisi Drainase Lingkungan





Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka di kawasan kumuh Tuo, masih banyak kawasan yang belum terlayani jaringan drainase yaitu sekitar 80% dan hanya baru 20% kawasan tersebut ada tersedia jaringan drainase lingkungan.

Dilihat dari konektifitas saluran, saluran yang ada tidak terkoneksi dengan baik dan banyak sedimentasi serta sampah yang terkesan jaringan drainase yang ada tidak terawat dengan baik, namun pada drainase yang ada dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase sebagian buruk, karena mengalami kerusakan dan karena berupa galian tanah tanpa material pelapis.





E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Tuo sistem pengelolaan air limbah dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sekitar 30 %. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri hanya sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada) serta kondisi yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Tuo, tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan sesuai persyaratan teknis. Pada kawasan ini masyarakat membakar sampah disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah yang membuat lingkungan tersebut menjadi tidak bersih, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

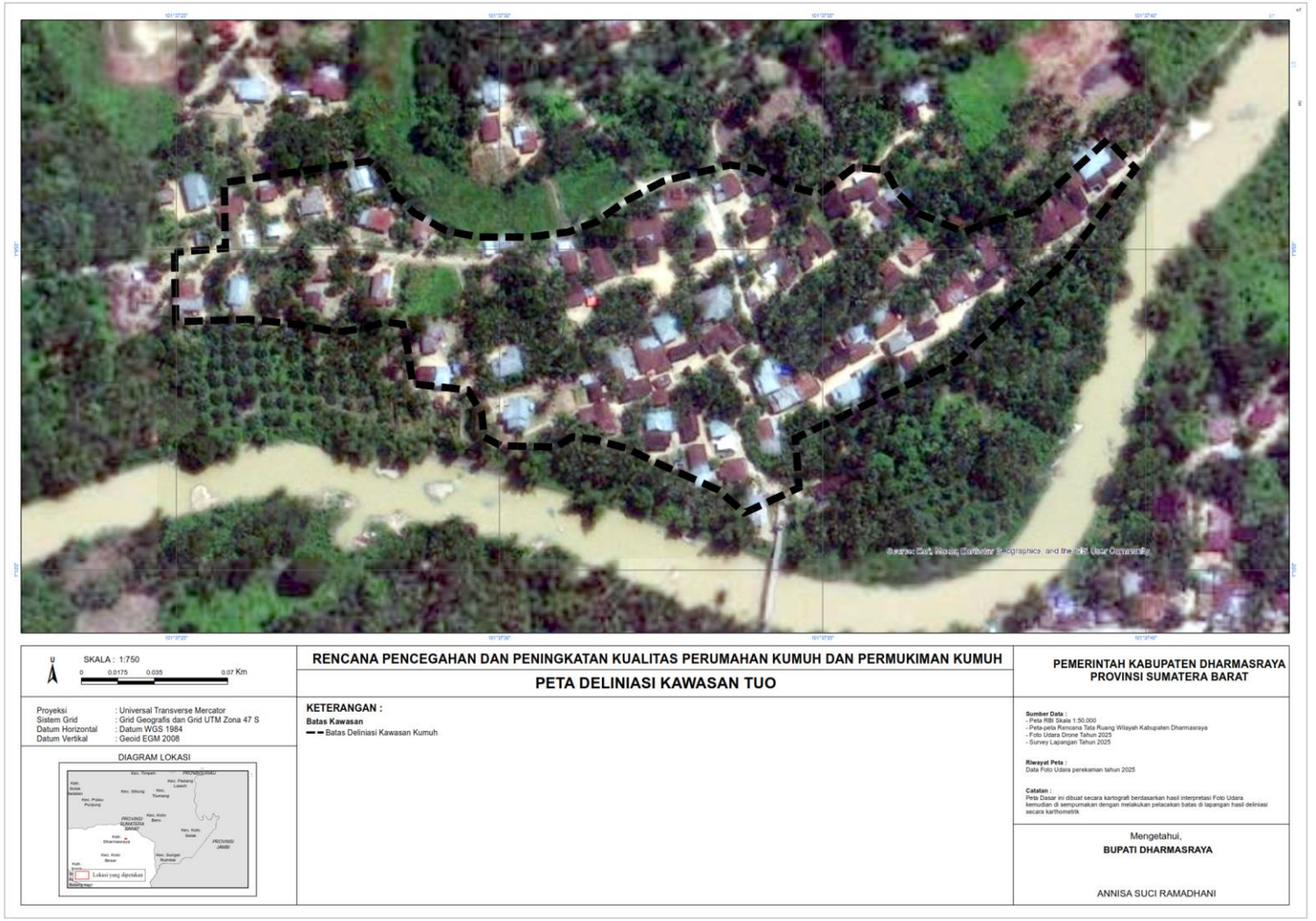




G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah adanya memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran. Namun pada beberapa ruas jalan lingkungan yang ada masih ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

Gambar 3.28 Peta Delinasi Kawasan Tuo



3.1.10.2 Kawasan Kumuh Bonjol

Kawasan ini terdapat Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar. Luas kawasan Kumuh Bonjol yaitu 12,96 Ha dengan jumlah bangunan 310 unit, jumlah penduduk 1238 jiwa dan jumlah KK yaitu 310 KK. Kawasan Bonjol terletak pada lintang 101° 37' 38,671" E dan 1° 10' 4,448" S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Bonjol ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung





Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Bonjol memiliki luas kawasan deliniasi yaitu 12,96 Ha dan bangunan sebanyak 310 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 45% atau 140 unit dari total bangunan. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan, Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong sedang karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada (30%) memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha. Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.

B. Kondisi Jalan Lingkungan





Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. Pada Kawasan Kumuh Bonjol, kondisi jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan cor beton. Sementara untuk jalan rusak masih terdapat di beberapa ruas jalan beton dan di kawasan ini juga masih terdapat jalan tanah.

C. Kondisi Penyedian Air Minum





Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) umumnya penduduk. Pada Kawasan Kumuh Bonjol belum terpenuhi secara persyaratan teknis karena sumber air minum berasal dari sumur yang airnya berwarna kuning dan berbau.

D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka di kawasan Kumuh Bonjol, masih banyak kawasan yang belum terlayani jaringan drainase yaitu sekitar 80% dan hanya baru 20% kawasan tersebut ada tersedia jaringan drainase lingkungan.



Dilihat dari konektifitas saluran, saluran yang ada tidak terkoneksi dengan baik dan banyak sedimentasi serta sampah yang terkesan jaringan drainase yang ada tidak terawat dengan baik, namun pada drainase yang ada dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase sebagian buruk, karena mengalami kerusakan dan karena berupa galian tanah tanpa material pelapis.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan Kumuh Bonjol sistem pengelolaan air limbah dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sekitar 40 %. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri hanya sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada) serta kondisi yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.



F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.





Pada Kawasan Bonjol, tidak terdapat

prasarana dan sarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan sesuai persyaratan teknis. Pada kawasan ini masyarakat membakar sampah disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah yang membuat lingkungan tersebut menjadi tidak bersih, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah adanya memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran. Namun pada beberapa ruas jalan lingkungan yang ada masih ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

3.1.10.3 Kawasan Kumuh Ranah

Kawasan kumuh Ranah ini terdapat di Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar. Luas kawasan kumuh Ranah yaitu 3,13 Ha dengan jumlah bangunan 45 unit, jumlah penduduk 188 jiwa dan jumlah KK yaitu 48 KK. Kawasan Ranah terletak pada lintang 101°39"E dan 1°9'55"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Ranah ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. , maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung

Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah Ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Ranah memiliki luas kawasan deliniasi yaitu 3,13 Ha dan bangunan sebanyak 45 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 25 % atau 11 unit dari total bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada ± 25% memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.

Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan

bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.





B. Kondisi Jalan Lingkungan

Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. Pada Kawasan kumuh Ranah, kondisi jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan beton dan aspal. Sementara untuk jalan rusak masih terdapat di beberapa ruas jalan beton dan di kawasan ini juga masih terdapat jalan tanah.








C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada umumnya penduduk Kawasan Kumuh Ranah untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur bor/sumur galian sementara penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air bersihnya ada sekitar 25 % dari penduduk atau ruamg tangga tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan air minum yang layak sesuai dengan persyaratan teknis.

D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan pada Kawasan kumuh Ranah, 20% kawasan tersedia drainase lingkungan dan 80% tidak terlayani jaringan drainase. Pada Kawasan kumuh Ranah drainase yang ada dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan.

Dilihat dari konektifitas saluran, saluran yang ada tidak terkoneksi dengan baik dan banyak sedimentasi serta sampah yang terkesan jaringan drainase yang ada tidak terawat dengan baik, namun pada drainase yang ada dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase sebagian buruk, karena mengalami kerusakan dan tidak terawatt.







E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah





Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Ranah sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis hanya sekitar 25 %, dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu 25 %. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri hanya sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada).

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Ranah ini tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat masih dalam bentuk membakar disuatu titik atau menumpuk di sekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.



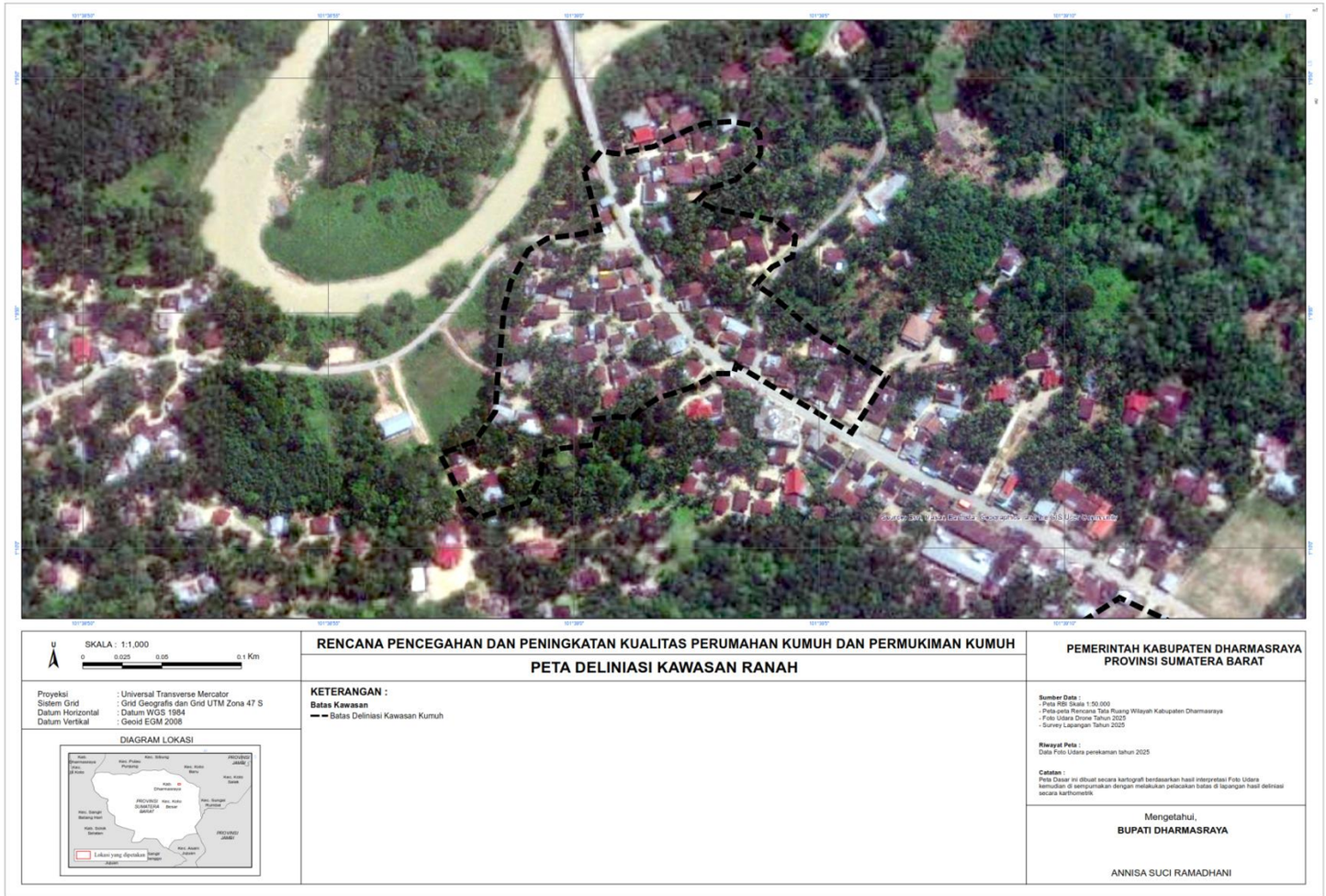




G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah adanya memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran. Namun pada beberapa ruas jalan lingkungan yang ada masih ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

Gambar 3.29 Peta Delinasi Kawasan Ranah



3.1.10.4 Kawasan Ranah Baru

Kawasan kumuh Ranah Baru Baru ini terdapat di Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar. Luas kawasan kumuh Ranah Baru yaitu 14,86 Ha dengan jumlah bangunan 102 unit, jumlah penduduk 280 jiwa dan jumlah KK yaitu 65 KK. Kawasan Ranah Baru terletak pada lintang 101° 38' 41,759" E dan 1° 9' 56,612" S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Ranah Baru ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. , maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Ranah Baru memiliki luas kawasan deliniasi yaitu 14,86 Ha dan bangunan sebanyak 148 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 15 % dari total bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada ± 25% memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.

Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.

B. Kondisi Jalan Lingkungan



Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan

yang baik. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. Pada Kawasan kumuh Ranah Baru, kondisi jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan beton dan aspal. Sementara untuk jalan rusak masih terdapat di beberapa ruas jalan beton dan di kawasan ini juga masih terdapat jalan tanah.

C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada umumnya penduduk Kawasan Kumuh Ranah Baru untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur bor/sumur galian sementara penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air bersihnya ada sekitar 25 % dari penduduk atau ruamg tangga tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan air minum yang layak sesuai dengan persyaratan teknis.

D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan pada Kawasan kumuh Ranah Baru, 25% kawasan tersedia drainase lingkungan dan 75% tidak terlayani jaringan drainase. Pada Kawasan kumuh Ranah Baru drainase yang ada dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan.

Dilihat dari konektifitas saluran, saluran yang ada tidak terkoneksi dengan baik dan banyak sedimentasi serta sampah yang terkesan jaringan drainase yang ada tidak terawat dengan baik, namun pada drainase yang ada dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase sebagian buruk, karena mengalami kerusakan dan tidak terawatt.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah





Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Ranah Baru sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis hanya sekitar 25 %, dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu 25 %. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri hanya sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada).

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

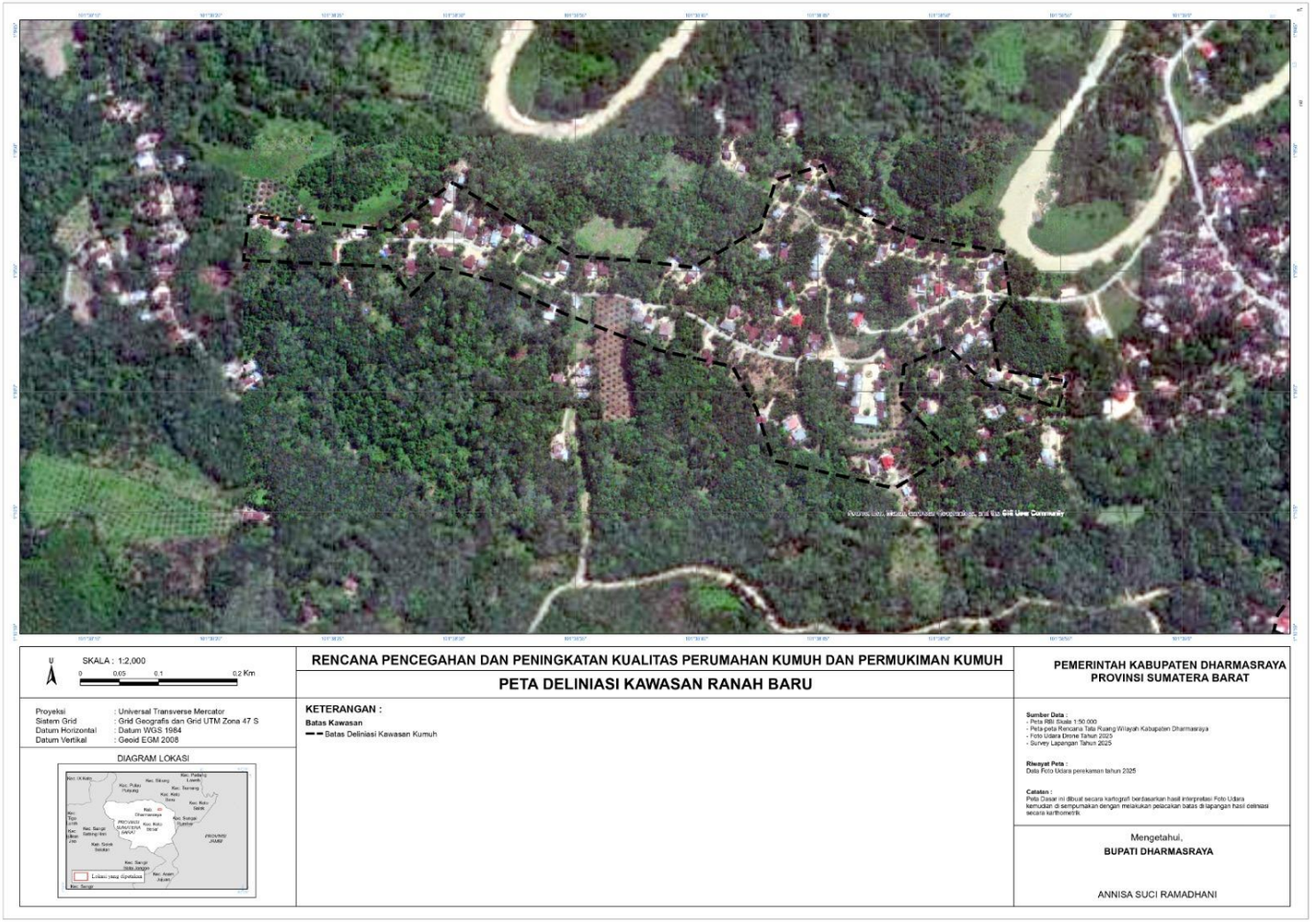
Pada Kawasan Ranah Baru ini tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat masih dalam bentuk membakar disuatu titik atau menumpuk di sekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat

menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah adanya memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran. Namun pada beberapa ruas jalan lingkungan yang ada masih ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

Gambar 3.30 Peta Deliniasi Ranah Baru



3.1.10.5 Kawasan Padang Bangur

Kawasan kumuh Padang Bungur ini terdapat di Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar. Luas kawasan kumuh Padang Bangur yaitu 7,29 Ha dengan jumlah bangunan 87 unit, jumlah penduduk 443 jiwa dan jumlah KK yaitu 105 KK. Kawasan Padang Bangur terletak pada lintang 101°39"E dan 1°10'4"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Padang Bangur ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut

A. Kondisi Bangunan Gedung





Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Padang Bangur memiliki luas deliniasi kawasan yaitu 7,29 Ha dan bangunan sebanyak 87 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 25 % atau 22 unit dari total bangunan. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada ±25% memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.

Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.





B. Kondisi Jalan Lingkungan




Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada kawasan kumuh Padang Bangur, kondisi jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan beton dan aspal. Sementara untuk jalan rusak masih terdapat di beberapa ruas jalan beton dan di kawasan ini juga masih terdapat jalan tanah yang menghubungkan beberapa antar rumah.





C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) sedikit karena rata- rata penduduk memiliki sumber air minum berasal dari sumur bor/sumur galian. Namun untuk pemenuhan kebutuhan air minum secara

kuantitas (60 liter/hari) ini masih sangat kurang sekali, hampir 80% penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhan air minum mereka sesuai dengan standar teknis yang ada, apalagi dengan melihat kondisi air sumur yang ada di beberapa rumah penduduk tidak layak untuk di minum.

D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan pada Kawasan kumuh Padang Bangur, 75% pada kawasan telah tersedia jaringan drainase lingkungan dan 25% yang tidak/belum terlayani jaringan drainase. Dilihat dari kondisi drainase yang ada tersebut sebagian jaringan drainase tersebut tidak terkoneksi dengan jaringan drainase lainnya dan beberapa dari ruas jaringan drainase tersebut tidak berfungsi dengan baik karena terjadi sedimentasi. Untuk kondisi konstruksi drainase sebagian masih bagus dan sebagian buruk, karena mengalami kerusakan d an ada juga yang masih tanah.









E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Padang Bangur sistem pengelolaan air limbah dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis hanya sekitar 25 %. Hal ini dapat dilihat dari sudah

banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri hanya sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada).





F. Kondisi Pengelolaan Persampahan





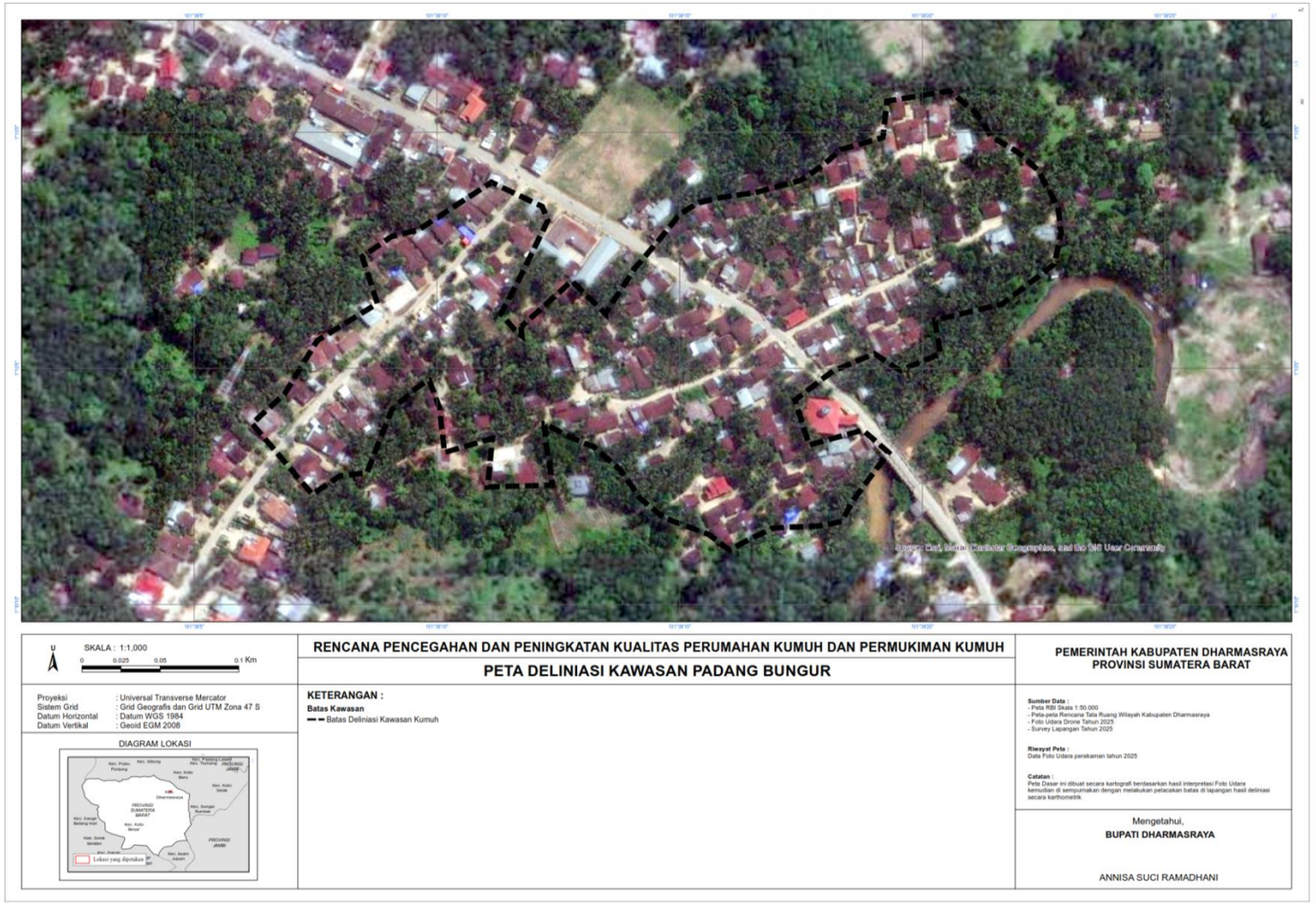
Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Padang Bangur ini tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat masih dalam bentuk membakar disuatu titik atau menumpuk di sekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah adanya memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran. Namun pada beberapa ruas jalan lingkungan yang ada masih ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

Gambar 3.31 Peta Delinasi Kawasan Bungur



3.1.11 Kecamatan Asam Jujuhan

Kecamatan Asam Jujuhan teletak di 101°25'35" - 101°43'00" BT dan 101°25'35" - 101°43'00" BT dengan ketinggian wilayah 135 meter dari permukaan laut. Kecamatan Asam Jujuhan memiliki luas wilayah yaitu 485,41 Km^2 dan terdiri dari 4 (empat) nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/160/KPTS-BUP/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor :100.3.3.2/110/KPTS-BUP/2025 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Asam Jujuhan terdapat dua (2) kawasan kumuh yaitu Kawasan Kumuh Lubuk Lubuk Baru di Nagari Alahan Nan Tigo dan kawan Kumuh Sungai Limai di Nagari Sungai Limau, berikut adalah gambaran gambaran kawasan kumuh berdasarkan hasil survei ulang, dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.11.1 Kawasan Bukik Sembilan (Lubuak Baru), Nagari Alahan Nan Tigo

Kawasan kumuh Bukik Sembilan (Labuh Baru) ini terdapat Nagari Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan. Luas kawasan kumuh Lubuak Baru yaitu 9,75 Ha dengan jumlah bangunan 215 unit, jumlah penduduk 950 jiwa dan jumlah KK yaitu 223 KK. Kawasan Lubuak Baru terletak pada lintang 101°39'15"E dan 1°27'39"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Lubuak Baru ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung

Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan.



Pada Kawasan Bukik Sembilan (Lubuak Baru) memiliki luas deliniasi kawasan yaitu 9,75 Ha dan bangunan sebanyak 47 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 25 % atau 12 unit dari total bangunan. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan



seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan, Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada (25%) memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.

Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.





B. Kondisi Jalan Lingkungan



Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada kawasan ini kondisi jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan beton dan aspal. Sementara untuk jalan rusak masih terdapat di beberapa ruas jalan beton dan di kawasan ini juga masih terdapat jalan tanah





C. Kondisi Penyedian Air Minum





Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, pada kawasan Kumuh Bukik Sembilan (Lubuak Baru) untuk dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa penduduk disini rata-rata tidak kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan air minum serta untuk kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur dan mata air gunung yang memiliki kualitas air cukup bagus.

D. Kondisi Drainase Lingkungan







Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Pada kawasan Bukik Sembilan (Lubuk Baru) berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan pada Kawasan ini, baru 45% kawasan tersedia jaringan drainase lingkungan dan masih banyak dalam kawasan ini yang belum terlayani jaringan drainase yaitu sekitar 55%. Dari jaringan drainase yang ada tersebut kondisinya juga tidak terkoneksi dengan jaringan di atasnya atau di sekitarnya dan drainase tersebut juga mengalami sedimentasi dan tidak terawatt dengan baik. Dilihat dari kondisi konstruksi drainase sebagian buruk, karena mengalami kerusakan.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Bukik Sembilan (Lubuk Baru) sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis hanya sekitar 25 %, dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu 30 %. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri hanya sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada).

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

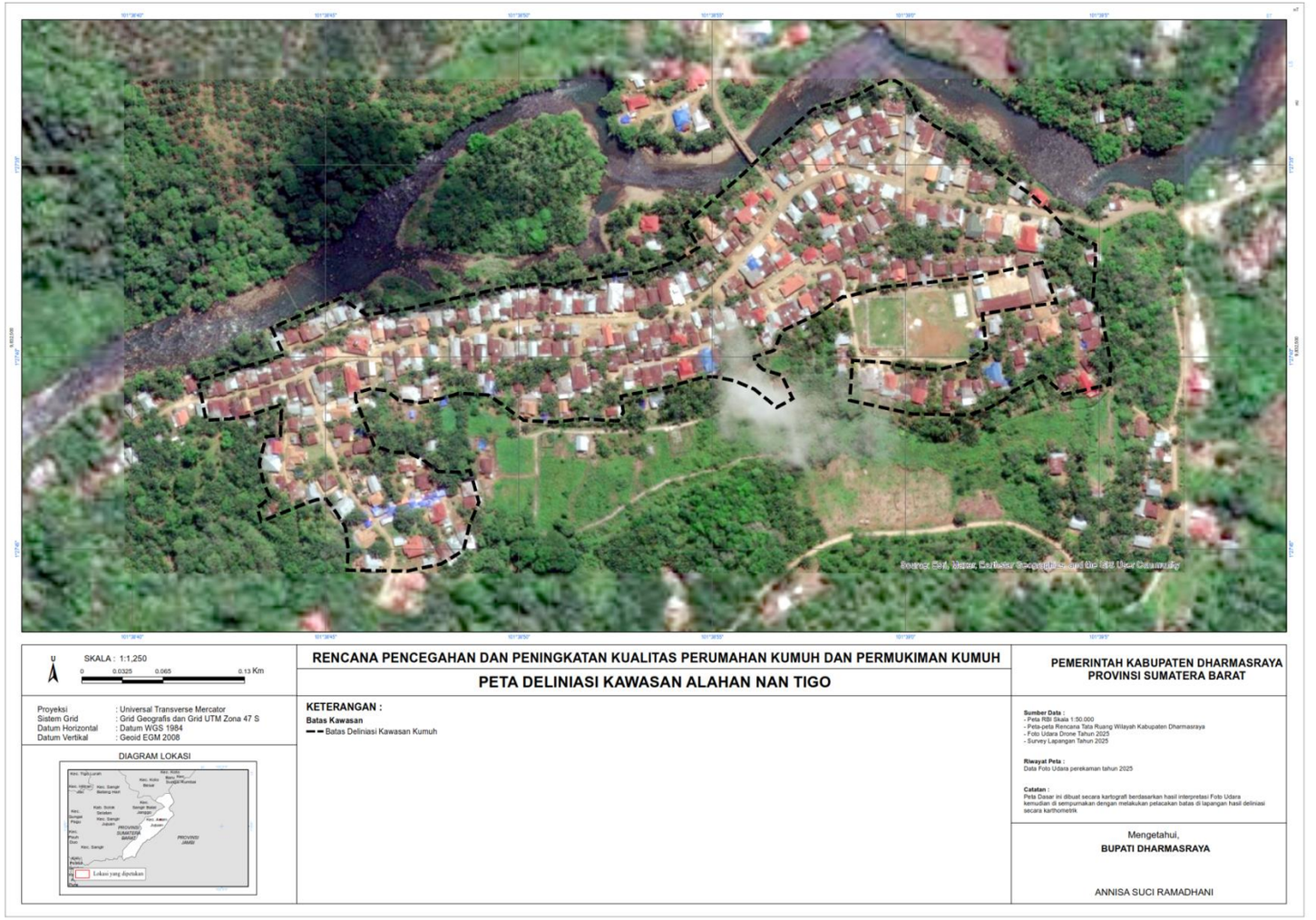
Pada Kawasan Bukik Sembilan (Lubuk Baru) tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat masih dalam bentuk membakar disuatu titik atau menumpuk di sekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang

dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah adanya memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran. Namun pada beberapa ruas jalan lingkungan yang ada masih ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

Gambar 3.32 Peta Delinasi Kawasan Alahan Nan Tigo



3.1.11.2 Kawasan Kumuh Sungai Limau, Nagari Sungai Limau

Kawasan Kumuh Sungai Limau ini terdapat di Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Luas kawasan kumuh yaitu 8,99 Ha dengan jumlah bangunan 138 unit, jumlah penduduk 429 jiwa dan jumlah KK yaitu 143 KK. Kawasan Sungai Limau terletak pada lintang $101^0$40'18"E dan $1^0$25'50"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Sungai Limau ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung





Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Sungai Limau memiliki luas deliniasi kawasan yaitu 8,99 Ha dan bangunan sebanyak 138 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan cukup banyak di kawasan ini yaitu sekitar 60% atau 80 unit dari total bangunan. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini tergolong padat yaitu sekitar 75% dari luas kawasan tersebut memiliki kepadatan yang cukup tinggi dimana dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.

Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini masih banyak bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sekitar 75%, seperti dalam bentuk pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.

B. Kondisi Jalan Lingkungan



Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada kawasan ini, kondisi jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan beton dan aspal. Sementara untuk jalan rusak dapat dikatan sedikit yang terdapat di beberapa ruas jalan beton.

C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk melihat penyediaan air minum dilihat dari Penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada Kawasan Kumuh Sungai Limau untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari mata air atau air gunung.

D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka di kawasan kumuh Sungai Limau ini, sudah hampir 75 % kawasan ini telah terlayani/memiliki drainase lingkungan yang bersifat permanen. Sementara yang tidak memiliki jaringan drainase sekitar 25% lagi langsung diserap oleh tanah. Dari jaringan drainase yang ada tersebut kondisinya juga tidak terkoneksi dengan jaringan di atasnya atau di sekitarnya dan drainase tersebut juga ada yang mengalami sedimentasi dan tidak terawat dengan baik. Dilihat dari kondisi konstruksi drainase sebagian sudah ada yang buruk, karena mengalami kerusakan.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Pada kawasan kumuh Sungai Limau sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sekitar 55 %, dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu 60 % karena kawasan kumuh Sungai Limau berada di tepi sungai sehingga masyarakat masih banyak melakukan cuci mandi dan kakus ke sungai.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



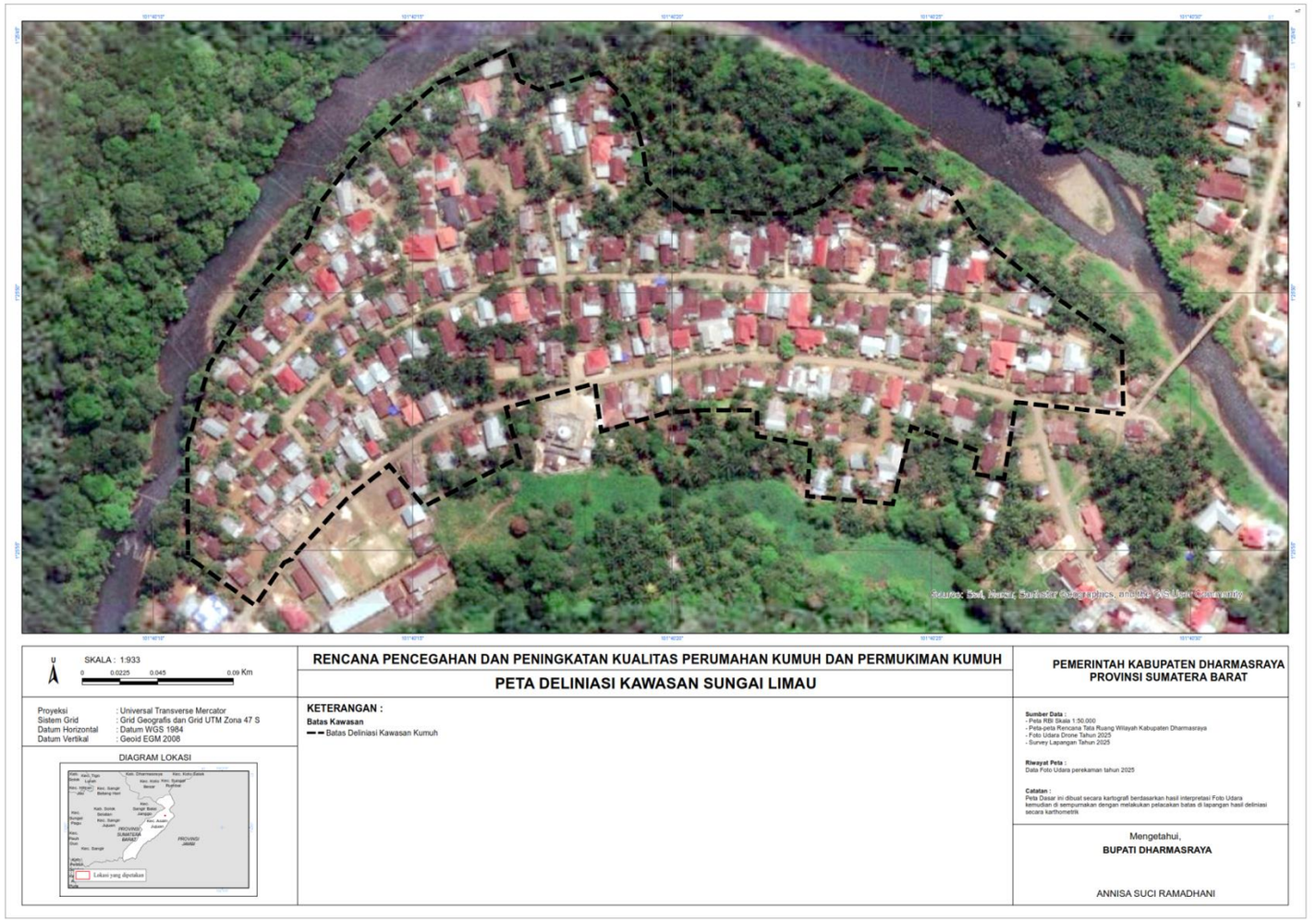
Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Sungai Limau ini juga tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat masih dalam bentuk membakar disuatu titik atau menumpuk di sekitar rumah dan juga ada yang dibuang ke sungai, jadi penduduk masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah adanya memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran. Namun pada beberapa ruas jalan lingkungan yang ada masih ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

Gambar 3.33 Peta Delinasi Kawasan Sungai Limau



BAB 4
PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

4.1 ISU DAN PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

4.1.1 Isu dan Permasalahan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Dharmasraya

Isu dan permasalahan perumahan dan permukiman di Kabupaten Dharmasraya merupakan tantangan yang perlu segera ditangani untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan. Permasalahan tersebut mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, serta pengelolaan kawasan permukiman yang belum optimal. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021–2026 dimana isu strategis perumahan permukiman yaitu Belum tercapainya target peningkatan Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Sedangkan isu dan permasalahan di dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, isu-isu utama yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya kemampuan keterlibatan aktif para pelaku dalam penyediaan hunian
2. layak huni dan terjangkau
3. Masih banyak perumahan dan kawasan permukiman yang belum dilengkapi PSU
4. yang memadai
5. Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan
6. Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar dan memiliki sertifikat

4.1.2 Isu Dan Permasalahan Kawasan Kumuh

Isu dan permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Dharmasraya merupakan hasil identifikasi yang diperoleh melalui survei lapangan, yang dilakukan dengan metode observasi langsung, wawancara, serta pengisian kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan tujuh indikator penilaian kekumuhan. Adapun isu dan permasalahan kawasan kumuh yang diidentifikasi berdasarkan skala kawasan di Kabupaten Dharmasraya disajikan dalam tabel berikut:

4.1.2.1 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Silago

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Tanah Silago terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 **Isu Permasalahan Kawasan Salago**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 25 % b. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 25 %
2	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 75% a. Kualitas kontruksi drainase buruk 90 %
3	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 50 % b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 50 %
4	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
5	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.2 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Pulau Punjung

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Pulau Punjung terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase

lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 **Isu Permasalahan Kawasan Pulau Punjung**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 25% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 55& c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 10%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 50 % b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 50 %
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 40 % b. Kualitas kontruksi drainase buruk 35%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 20% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 20%
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 25% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 25%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.3 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 **Isu Permasalahan Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 35% b. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 12%
2	Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan PElayanan Jalan Lingkungan 27% b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan 45%

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	c. Ketersediaan akses air minum sebanyak 774% d. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 100%
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidak mampuan mengalirkan limpasan air 29% b. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 43%% c. Kualitas kontruksi drainase buruk 56%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 54% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 62%
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 79%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.4 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Sikabau

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Sikabau terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 **Isu Permasalahan Kawasan Sikabau**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	c. Ketidakteraturan Bangunan 35% d. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 12%
2	Kondisi Jalan Lingkungan	e. Cakupan PElayanan Jalan Lingkungan 27% f. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan 45%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	g. Ketersediaan akses air minum sebanyak 774% h. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 100%
4	Kondisi Drainase lingkungan	d. Ketidak mampuan mengalirkan limpasan air 29% e. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 43%% f. Kualitas kontruksi drainase buruk 56%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	c. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 54% d. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 62%

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	c. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% d. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 79%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	c. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% d. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.5 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Kubang Panjang

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Kubang Panjang terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 **Isu Permasalahan Kawasan Kubang Panjang**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 51 % b. Tingkat Kepadatan Bangunan 60%
2	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 30% e. Kualitas kontruksi drainase buruk 80%
3	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 10% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 10%
4	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 60% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 60%
5	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.6 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Tarandam Sungai Kambut

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Tarandam Sungai Kambut terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi

persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 **Isu Permasalahan Kawasan Tarandam Sungai Kambut**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 25% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 25% c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 25%
2	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 15% b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 15%
3	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 70% a. Kualitas kontruksi drainase buruk 30%
4	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 30% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 30%
5	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
6	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.7 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Lambau

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Kumuh Lambau terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7 **Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Lambau**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 25% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 25% c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 10%
2	Kondisi Drainase lingkungan	b. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 100% b. Kualitas kontruksi drainase buruk 100%
3	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 30% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
		Sesuai dengan Persyaratan Teknis 30%
4	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
5	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.8 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Sungai Kilangan

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Sungai Kilangan terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8 **Isu Permasalahan Kawasan Sungai Kilangan**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 27% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 30% c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 10%
2	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 15% b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 30%
3	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan % c. Kualitas kontruksi drainase buruk %
4	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 10% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 10%
5	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
6	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.9 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Sungai Dareh

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Sungai Dareh terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9 **Isu Permasalahan Kawasan Sungai Dareh**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 35% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 10%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak % b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum %
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan % d. Kualitas kontruksi drainase buruk %
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak % b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis %
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.10 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Siguntur 1

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Siguntur 1 terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.10 **Isu Permasalahan Kawasan Siguntur 1**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 20% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 20%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 25% b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 25%
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 70% e. Kualitas kontruksi drainase buruk 70%

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 50% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 50%
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.11 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Siguntur 2

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Siguntur 2terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11 **Isu Permasalahan Kawasan Siguntur 2**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 5% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 5% c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 35% b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 35%
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 60% b. Kualitas kontruksi drainase buruk 60%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 45% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 45%
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.12 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Koto Daulat

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Koto Daulat terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12 **Isu Permasalahan Kawasan Koto Daulat**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 15% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 15% c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 15%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 25% b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 25%
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 60% b. Kualitas kontruksi drainase buruk 60%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 30% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 30%
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.13 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Sungai Duo

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Sungai Duo terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.13 **Isu Permasalahan Kawasan Sungai Duo**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 30% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 30% c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 3%
3	Kondisi Penyediaan Air	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 40%

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
	Minum	b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 40%
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 40% b. Kualitas kontruksi drainase buruk 40%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	c. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 30% d. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 30%
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	c. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% d. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	c. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% d. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.14 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Marga Makmur

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Marga Makmur terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.14 **Isu Permasalahan Kawasan Marga Makmur**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 8% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 8% c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 8%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 45% b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 45%
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 35% b. Kualitas kontruksi drainase buruk 35%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 65% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 65%
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
7	Kondisi Proteksi	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
	Kebakaran	pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.15 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Sungai Bulian

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Sungai Bulian terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.15 **Isu Permasalahan Kawasan Sungai Bulian**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 5% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 5% c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 25% b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 25%
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 25% f. Kualitas kontruksi drainase buruk 25%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 25% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 25%
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.16 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Koto Padang

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Koto Padang terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.16 **Isu Permasalahan Kawasan Koto Padang**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 10% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 10% c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 2%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 45% b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 45%
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 65% g. Kualitas kontruksi drainase buruk 65%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 15% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 15%
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.17 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Koto Baru

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Koto Baru terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.17 **Isu Permasalahan Kawasan Koto Baru**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 10% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 10% c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 10%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 10% b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 30%
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 50% b. Kualitas kontruksi drainase buruk 50%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 40% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 40%

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.18 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Pasar Koto Baru

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Pasar Koto Baru terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.18 **Isu Permasalahan Kawasan Pasar Koto Baru**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 20% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 20% c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 4%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 40% b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 40%
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 45% b. Kualitas kontruksi drainase buruk 45%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 15% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 15%
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.19 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Lubuk Agam

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Lubuk Agam terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.19 **Isu Permasalahan Kawasan Lubuk Agam**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 15% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 15% c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 5% b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 5%
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 50% b. Kualitas kontruksi drainase buruk 50%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 10 % b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 10 %
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.20 Isu Permasalahan Kawasan Ampang Kuranji

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Ampang Kuranji terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.20 **Isu Permasalahan Kawasan Ampang Kuranji**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 15% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 15% c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 45% b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 45%
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 60% b. Kualitas kontruksi drainase buruk 60%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 25% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 25%
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.21 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Teluk Alai

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Kumuh Teluk Alai terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.21 **Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Teluk Alai**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 35% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 35%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 40% b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 40%
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 60% b. Kualitas kontruksi drainase buruk 60%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 35% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 45%
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.22 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Pandukuan

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Pandukuan terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.22 **Isu Permasalahan Kawasan Pandukuan**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 15% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 15% c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 35% b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 35%
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 50% h. Kualitas kontruksi drainase buruk 50%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 40% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 40%
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.23 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Sungai Langkok

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Sungai Langkok terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.23 **Isu Permasalahan Kawasan Sungai Langkok**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 22% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 22% c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 34% b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 34%
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 75% i. Kualitas kontruksi drainase buruk 75%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 25% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 25%
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.24 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Sipangkur

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Sipangkur terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.24 **Isu Permasalahan Kawasan Sipangkur**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 15% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 15% c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 25% b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 25%
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 55% j. Kualitas kontruksi drainase buruk 55%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 60% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 60%
6	Kondisi Penglolaan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
	Persampahan	dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.25 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Sopan Jaya

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Sopan Jaya terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.25 **Isu Permasalahan Kawasan Sopan Jaya**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 35% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 35% c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 45% b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 45%
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 35% b. Kualitas kontruksi drainase buruk 35%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 45% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 45%
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.26 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Balai Tangah

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Balai Tangah terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase

lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.26 **Isu Permasalahan Kawasan Balai Tangah**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	d. Ketidakteraturan Bangunan 33% e. Tingkat Kepadatan Bangunan 33% f. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 3%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	c. Ketersediaan akses air minum sebanyak 25% d. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 25%
4	Kondisi Drainase lingkungan	c. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 25% d. Kualitas kontruksi drainase buruk 25%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	c. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 25% d. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 25%
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	c. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% d. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	c. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% d. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.27 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Tuo

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Tuo terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.27 **Isu Permasalahan Kawasan Tuo**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	g. Ketidakteraturan Bangunan 55% h. Tingkat Kepadatan Bangunan 55% i. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	e. Ketersediaan akses air minum sebanyak 15% f. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 15 %
4	Kondisi Drainase	e. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 25%

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
	lingkungan	f. Kualitas kontruksi drainase buruk 25%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	e. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 23% f. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 23%
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	e. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% f. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	e. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% f. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.28 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Bonjol

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Kubang Panjang terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.28 **Isu Permasalahan Kawasan Bonjol**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	c. Ketidakteraturan Bangunan 51 % d. Tingkat Kepadatan Bangunan 60%
2	Kondisi Drainase lingkungan	b. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 30% f. Kualitas kontruksi drainase buruk 80%
3	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	c. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 10% d. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 10%
4	Kondisi Penglolaan Persampahan	c. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 60% d. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 60%
5	Kondisi Proteksi Kebakaran	c. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% d. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.29 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Ranah

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Ranah terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.29 **Isu Permasalahan Kawasan Ranah**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 23% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 23% c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 3%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 45% b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 45%
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 35% b. Kualitas kontruksi drainase buruk 35%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 55% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 55%
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.30 Isu Permasalahan Kawasan Koto Baru 3

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Kubang Panjang terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.30 **Isu Permasalahan Kawasan Koto Baru 3**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	e. Ketidakteraturan Bangunan 30 % f. Tingkat Kepadatan Bangunan 35 %
2	Kondisi Drainase	c. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 40%

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
	lingkungan	g. Kualitas kontruksi drainase buruk 40 %
3	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	e. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 30% f. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 20%
4	Kondisi Penglolaan Persampahan	e. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 45% f. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 65%
5	Kondisi Proteksi Kebakaran	e. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% f. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.31 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Padang Bungur

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Padang Bungur terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.31 **Isu Permasalahan Kawasan Padang Bungur**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 10% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 10% c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 22% b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum22 %
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 25% b. Kualitas kontruksi drainase buruk 25%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 24% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 24%
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 80% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 80%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.32 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Bukit Sembilan

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Bukit Sembilan terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.32 **Isu Permasalahan Kawasan Bukit Sembilan**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 45% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 15% c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan unit 5%
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 10% b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 22%
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 43% b. Kualitas kontruksi drainase buruk 43%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 45% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 45%
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.1.2.33 Isu Permasalahan Kawasan Kumuh Sungai Limau

Adapun isu permasalahan kekumuhan pada Kawasan Sungai Limau terdiri dari kondisi bangunan gedung, kondisi air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.33 **Isu Permasalahan Kawasan Sungai Limau**

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan 35% b. Tingkat Kepadatan Bangunan 35%

No	Aspek Yang Diamati	Isu dan Permasalahan
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan unit
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses air minum sebanyak 25% b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 25%
4	Kondisi Drainase lingkungan	a. Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 30% b. Kualitas kontruksi drainase buruk 30%
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 45% b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 45%
6	Kondisi Penglolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%

Sumber: Hasil Olah data, 2025

4.2 KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN PENENTUAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 30/SE/DC/2020 tentang panduan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pada tahap ini akan menjadi saringan awal penilaian lokasi permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan kompleksitas permasalahan yang ada di lokasi permukiman kumuh yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi terhadap aspek:

1. Kondisi Kekumuhan

   Penilaian lokasi berdasarkan aspek permasalahan kekumuhan terdiri atas klasifikasi:

   a. Kumuh kategori ringan;

   b. Kumuh kategori sedang; dan

   c. Kumuh kategori berat.

2. Legalitas Lahan

   Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan terdiri atas klasifikasi:

a. Status lahan legal; dan
b. Status lahan tidak legal.

3. Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain terdiri atas:
   a. Pertimbangan lain kategori rendah;
   b. Pertimbangan lain kategori sedang; dan
   c. Pertimbangan lain kategori tinggi.
   d. Pertimbangan Lain

Hasil identifikasi terhadap kompleksitas permasalahan pada tahap ini akan menjadi rujukan dalam menetapkan kolaborasi pola penanganan dan kontribusi program penanganan permukiman kumuh melalui kolaborasi multisektor dan multiaktor diseluruh tahapan pembangunan yang kemudian akan menghasilkan rekomendasi pembagian pola penanganan permukiman kumuh melalui program-program regular di tingkat pemerintah kota dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Tabel 4.34 **Kriteria dan Indikator Penentuan Urutan Kawasan Prioritas**

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau 2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki Keteraturan	1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; 2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau 3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: 4. untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha; 5. untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha.	• 76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
			• 51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3	
			• 25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: 1. pengendalian dampak lingkungan; 2. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum; 3. keselamatan bangunan gedung; 4. kesehatan bangunan gedung; 5. kenyamanan bangunan gedung; 6. kemudahan bangunan gedung.	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	• 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
			• 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	• 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			• 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	• 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yangaman	3	
			• 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yangaman	1	
	b. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapaiminimal sebanyak 60 liter/orang/hari	• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minumminimalnya	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
			• 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. drainase lingkungan tidaktersedia	Saluran tersier dan/atau saluran 29a ka tidaktersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga	• 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS,

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	hirarki di atasnya		Observasi
			• 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3	
			• 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	
	b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampumengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	• 76% - 100% area terjadi genangan>30cm, >2 jam dan >2 x setahun	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area terjadi genangan>30cm, >2 jam dan >2 x setahun	3	
			• 25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan >2 x setahun	1	
	c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	• 76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			• 25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	1	
5.KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/31a katas, komunal maupun terpusat.	• 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	
			• 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	
	b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	• 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	
			• 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala 32a katas atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; 3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	• 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			• 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
	b.sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan 32a katas; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan	• 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	
			• 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan;	• 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS,
			• 51% - 75% area tidak	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		3. sarana komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;	memiliki prasarana proteksi kebakaran		Observasi
			• 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	
	b. sarana proteksi kebakaran tidaktersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaranpada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau mobil tangga sesuai kebutuhan.	• 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Wawancar, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	
			• 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	
B. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN					
LEGALITAS LAHAN	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahanberupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumensertifikat 33a katas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang 33a katastanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara	• Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi
			• Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		pemegang 34a katas tanah atau pemilik tanah.			
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	• Keseluruhan lokasi berada padazona peruntukan perumahan/ permukiman sesuai RTR	(+)	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			• Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/ permukiman sesuai RTR	(-)	
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN					
PERTIMBANGAN LAIN	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	• Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			• Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/ kota	1	
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk dibawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha;	• Untuk Metropolitan& Kota Besar Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha • Untuk Kota Sedang & Kota Kecil Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200	5	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk diatas 400 jiwa/ha;	Jiwa/Ha		
			• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1	
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	• Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
			• Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1	

Sumber: Surat Edaran Nomor: 30 /SE/DC/2020 tentang panduan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian tersebut di atas, selanjutnya lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.35
Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
60 – 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38 – 59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16 – 37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			
11 – 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6 – 10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 – 5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
SKALA PRIORITAS PENANGANAN =		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
   a. kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
   b. kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
   c. kumuh ringan bila memiliki nilai 16-37;
2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
   a. pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
   b. pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
   c. pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
   a. status lahan legal bila memiliki nilai positif (+);
   b. status lahan tidak legal bila memiliki nilai negatf (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yaitu sebagai berikut:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;

10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal.

Berdasrakan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penangann, sebagai berikut:

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

Untuk melihat tingkat kekumuhan dan penangan kewenangan kawasan kumuh di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat sebagai berikut ini:

Tabel 4.36
Analisis Kriteria dan Urutan Kawasan Prioritas Kawasan Kumuh di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Desa/Nagari	Kawasan	Luas (Ha)	Nilai Kekumuhan			Klasifikasi	Penilaian	Topologi
					Identifikasi Kekumuhan Fisik	Identifikasi Pertimbangan Lainnya	Identifikasi Legelitas Lahan			
1	Sembilan Koto	Silago	1. Silago	1,68	36	7	+	C3	Rendah	Tepi air
2	Pulau Punjung	IV Koto Pulau Punjung	2. Pulau Punjung	17,75	31	11	+	C1	Rendah	Dataran
		IV Koto Pulau Punjung	3. Pasar Lama Pulau Punjung	15,40	42	11	+	B1	Sedang	Tepi air banjir
		IV Koto Pulau Punjung	4. Kubang Panjang	13,61	38	11	+	B1	Sedang	Dataran
		Sungai Kambut	5. Tarandam Sungai Kambut	3,59	34	7	+	C3	Rendah	Dataran
		Sungai Kambut	6. Lambau	3,7	47	7	+	B3	Sedang	Dataran
		Sungai Dareh	7. Sungai Kilangan	12,7	29	7	+	C1	Rendah	Tepi air banjir
		Sungai Dareh	8. Sungai Dareh	13,89	34	7	+	C3	Rendah	Dataran
3	Sitiung	Siguntur	9. Siguntur 1	10,55	42	7	+	B3	Sedang	Dat aran
		Siguntur	10. Siguntur 2	8,31	31	7	+	C3	Rendah	Tepi Air dan rawan bencana (banjir)
		Sungai Duo	11. Koto Daulat	15,43	29	3	+	C5	Rendah	Dataran
		Sungai Duo	12. Sungai Duo	7,32	39	3	+	B5	Sedang	Dataran
4	Timpeh	Taratak Tinggi	13. Marga Makmur	2,13	29	7	+	C1	Rendah	Dataran

No	Kecamatan	Desa/Nagari	Kawasan	Luas (Ha)	Nilai Kekumuhan			Klasifikasi	Penilaian	Topologi
					Identifikasi Kekumuhan Fisik	Identifikasi Pertimbangan Lainnya	Identifikasi Legelitas Lahan			
		Timpeh	14. Sungai Bulian	8,82	22	3	+	C5	Rendah	Dataran
5	Koto Baru	Koto Padang	15. Koto Padang	33,18	41	3	+	B5	Sedang	Dataran
		Koto Baru	16. Koto Baru	68,98	50	3	+	B5	Sedang	Dataran
		Koto Baru	17. Pasar Koto Baru	21,57	42	3	+	B5	Sedang	Dataran
		Ampang Kuranji	18. Lubuk Agam	3,37	35	3	+	C5	Rendah	Dataran
		Ampang Kuranji	19. Koto Gadang	5,24	34	3	+	C5	Rendah	Tepi Air
		Ampang Kuranji	20. Cangkir batu	3,63	29	3	+	C5	Rendah	Dataran
		Ampang Kuranji	21. Teluk Alai	9,53	41	3	+	B5	Sedang	Dataran
6	Koto Salak	pandukuan	22. Pandukuan	21,98	29	3	+	C5	Rendah	Dataran
7	Tiumang	Sungai Langkok	23. Sungai Langkok	3,4	27	3	+	C5	Rendah	Dataran
		Sipangkur	24. Sipangkur	5,81	48	3	+	B5	Sedang	Dataran
8	Padang laweh	Sopan Jaya	25. Sopan Jaya	2,04	34	3	+	C5	Rendah	Dataran
9	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	26. Balai Tangah	6,25	30	11	+	C1	Rendah	Dataran
10	Koto Besar	Bonjol	27. Tuo	4	60	3	+	A5	Berat	Tepi Air banjir
		Abai Siat	28. Ranah	3,13	29	3	+	C5	Rendah	Tepi Air banjir
			29. Padang Bungur	7,29	29	3	+	C5	Rendah	Dataran
11	Asam Jujuhan	Alahan Nan Tigo	30. Bukit Sembilan	9,75	34	3	+	C5	Rendah	Tepi Air
		Sungai Limau	31. Sungai Limau	8,99	46	3	+	B5	Sedang	Tepi Air banjir

Sumber: Dokumen RP3KP Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan hasil penilaian klasifikasi dan skala prioritas penanganan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.35, kawasan yang ditetapkan sebagai **prioritas penanganan adalah Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung**. Penilaian ini didasarkan pada beberapa aspek indikator, yaitu:

- Identifikasi Kekumuhan Fisik dengan nilai 42, yang menunjukkan tingkat kekumuhan sedang;
- Pertimbangan Lainnya memperoleh skor 11, yang mencerminkan urgensi dan relevansi penanganan dari sisi sosial, ekonomi, serta kebutuhan strategis lainnya. Karena Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung berada di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai bagian dari ibukota Kabupaten;
- Status Legalitas Lahan teridentifikasi sebagai legal, yang berarti lahan tersebut berada dalam status kepemilikan atau pemanfaatan yang sah secara hukum.

Berdasarkan keseluruhan indikator tersebut, Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung diklasifikasikan dalam kategori B1, yaitu kawasan **kumuh sedang** dengan pertimbangan lain tinggi dan status lahan legal. Kawasan ini memiliki luas 15,40 hektar dan ditetapkan sebagai kawasan prioritas untuk ditangani melalui dukungan pendanaan dan intervensi langsung dari pemerintah pusat, sebagai bagian dari upaya percepatan peningkatan kualitas permukiman kumuh secara terintegrasi dan berkelanjutan.

4.3 PERUMUSAN KEBUTUHAN PENANGANAN BERDASARKAN ISU DAN PERMASALAHAN PERMUKIMAN KUMUH

Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman kumuh merupakan proses identifikasi untuk memperkirakan kebutuhan penanganan dalam konteks pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, baik pada skala kabupaten/kota, skala kawasan, maupun skala lingkungan. Proses ini didasarkan pada hasil rumusan isu, potensi, permasalahan, serta hasil pemutakhiran profil permukiman kumuh.

Kebutuhan penanganan dirumuskan berdasarkan isu dan permasalahan spesifik yang dihadapi setiap lokasi permukiman kumuh, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan pengelompokan skala penanganannya yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Kebutuhan penanganan ini dikelompokkan ke dalam dua skala utama, yaitu skala kabupaten dan skala kawasan.

Di Kabupaten Dharmasraya, Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/160/KPTS-BUP/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor :100.3.3.2/110/KPTS-BUP/2025 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten

Dharmasraya, terdapat 34 lokasi kawasan kumuh yang tersebar di berbagai kecamatan.

Untuk lebih jelasnya, rumusan kebutuhan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya disajikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 4.37 **Rumusan Kebutuhan Penanganan Kawasn Kumuh Skala Kawasan**

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
Kawasan Salago	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 25 % • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 25 %	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Drainase lingkungan	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 75% • Kualitas kontruksi drainase buruk 90 %	-	• Pembangunan drainase baru
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 50 % • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 50 %	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Kawasan Pulau Punjung	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 25% • Tingkat Kepadatan Bangunan 55& • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 10%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan gedung sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 50 %	• Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	Minum	• Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 50 %	sumur	• Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase lingkungan	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 40 % • Kualitas kontruksi drainase buruk 35%	-	Pembangunan drainase baru
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 20% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 20%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 25% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 25%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Pasar Lama Pulau Punjung	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 35% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 12%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Jalan Lingkungan	• Cakupan PElayanan Jalan Lingkungan 27%		Peningkatan kualitas jaringan jalan

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
		• Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan 45%		
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 774% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 100%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase lingkungan	• Ketidak mampuan mengalirkan limpasan air 29% • Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 43%% • Kualitas kontruksi drainase buruk 56%	-	Pembangunan drainase baru
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 54% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 62%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 79%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Kubang Panjang	Kondisi Bangunan	• Ketidakteraturan Bangunan 51 %	• Sosialisasi dan edukasi aturan	• Perubahan fungsi dan massa

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	Gedung	• Tingkat Kepadatan Bangunan 60%	bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Drainase lingkungan	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 30% • Kualitas kontruksi drainase buruk 80%	-	Pembangunan drainase baru
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 10% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 10%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 60% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 60%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Tarandam Sungai Kambut	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 25% • Tingkat Kepadatan Bangunan 25% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 25%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 15% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 15%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
				pengembangan perpipaan baru Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase lingkungan	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 70% • Kualitas kontruksi drainase buruk 30%	-	Pembangunan drainase baru
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 30% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 30%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Kumuh Lambau	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 25% • Tingkat Kepadatan Bangunan 25% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 10%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Drainase lingkungan	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 100% • Kualitas kontruksi drainase buruk 100%		Pembangunan drainase baru

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 30% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 30%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Sungai Kilangan	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 27% • Tingkat Kepadatan Bangunan 30% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 10%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 15% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 30%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase lingkungan	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan % • Kualitas kontruksi drainase buruk %	-	Pembangunan drainase baru
	Kondisi	• System pengelolaan air limbah tidak	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	Pengelolaan Air Limbah	sesuai standar teknis sebanyak 10% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 10%		terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Sungai Dareh	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 35% • Tingkat Kepadatan Bangunan 10%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak % • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum %	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase lingkungan	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan % • Kualitas kontruksi drainase buruk %	-	Pembangunan drainase baru
	Kondisi Pengelolaan Air	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak %	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank)

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	Limbah	• Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis %		• Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Siguntur 1	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 20% • Tingkat Kepadatan Bangunan 20%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 25% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 25%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase lingkungan	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 70% • Kualitas kontruksi drainase buruk 70%	-	Pembangunan drainase baru
	Kondisi Pengelolaan Air	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 50%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank)

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	Limbah	• Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 50%		• Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Siguntur 2	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 5% • Tingkat Kepadatan Bangunan 5% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 35% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 35%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase lingkungan	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 60% • Kualitas kontruksi drainase buruk 60%	-	Pembangunan drainase baru
	Kondisi Pengelolaan Air	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 45%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank)

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	Limbah	• Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 45%		• Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Koto Daulat	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 15% • Tingkat Kepadatan Bangunan 15% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 15%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 25% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 25%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase lingkungan	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 60% • Kualitas kontruksi drainase buruk 60%	-	Pembangunan drainase baru
	Kondisi Pengelolaan Air	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 30%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank)

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	Limbah	• Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 30%		• Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Sungai Duo	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 30% • Tingkat Kepadatan Bangunan 30% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 3%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 40% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 40%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase lingkungan	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 40% • Kualitas kontruksi drainase buruk 40%	-	Pembangunan drainase baru
	Kondisi Pengelolaan Air	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 30%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank)

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	Limbah	• Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 30%		• Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Marga Makmur	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 8% • Tingkat Kepadatan Bangunan 8% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 8%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 45% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 45%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase lingkungan	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 35% • Kualitas kontruksi drainase buruk 35%	-	Pembangunan drainase baru
	Kondisi Pengelolaan Air	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 65%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank)

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	Limbah	• Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 65%		• Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
			• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Sungai Bulian	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 5% • Tingkat Kepadatan Bangunan 5% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 25% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 25%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase	• Ketidaktersediaan Drainase pada	-	Pembangunan drainase baru

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	lingkungan	kawasan 25% • Kualitas kontruksi drainase buruk 25%		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 25% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 25%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Koto Padang	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 10% • Tingkat Kepadatan Bangunan 10% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 2%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 45% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 45%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase	• Ketidaktersediaan Drainase pada	-	Pembangunan drainase baru

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	lingkungan	kawasan 65% • Kualitas kontruksi drainase buruk 65%		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 15% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 15%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Koto Baru	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 10% • Tingkat Kepadatan Bangunan 10% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 10%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 10% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 30%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase	• Ketidaktersediaan Drainase pada	-	Pembangunan drainase baru

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	lingkungan	kawasan 50% • Kualitas kontruksi drainase buruk 50%		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 40% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 40%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Pasar Koto Baru	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 20% • Tingkat Kepadatan Bangunan 20% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 4%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 40% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 40%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase	• Ketidaktersediaan Drainase pada	-	Pembangunan drainase baru

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	lingkungan	kawasan 45% • Kualitas kontruksi drainase buruk 45%		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 15% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 15%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Lubuk Agam	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 15% • Tingkat Kepadatan Bangunan 15% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 5% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 5%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase	• Ketidaktersediaan Drainase pada	-	Pembangunan drainase baru

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	lingkungan	kawasan 50% • Kualitas kontruksi drainase buruk 50%		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 10 % • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 10 %	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Koto Gadang	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 15% • Tingkat Kepadatan Bangunan 15% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 45% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 45%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase	• Ketidaktersediaan Drainase pada	-	Pembangunan drainase baru

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	lingkungan	kawasan 60% • Kualitas kontruksi drainase buruk 60%		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 25% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 25%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Cangkir batu	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 5% • Tingkat Kepadatan Bangunan 5% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 30% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 30%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase	• Ketidaktersediaan Drainase pada	-	Pembangunan drainase baru

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	lingkungan	kawasan 45% • Kualitas kontruksi drainase buruk 45%		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 20% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 20%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
*T*eluk Alai	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 35% • Tingkat Kepadatan Bangunan 35%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 40% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 40%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase	• Ketidaktersediaan Drainase pada	-	Pembangunan drainase baru

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	lingkungan	kawasan 60% • Kualitas kontruksi drainase buruk 60%		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 35% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 45%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Pandukuan	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 15% • Tingkat Kepadatan Bangunan 15% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 35% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 35%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase	• Ketidaktersediaan Drainase pada	-	Pembangunan drainase baru

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	lingkungan	kawasan 50% • Kualitas kontruksi drainase buruk 50%		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 40% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 40%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Sungai Langkok	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 22% • Tingkat Kepadatan Bangunan 22% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 34% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 34%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase	• Ketidaktersediaan Drainase pada	-	Pembangunan drainase baru

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	lingkungan	kawasan 75% • Kualitas kontruksi drainase buruk 75%		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 25% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 25%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Sipangkur	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 15% • Tingkat Kepadatan Bangunan 15% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 25% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 25%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase	• Ketidaktersediaan Drainase pada	-	Pembangunan drainase baru

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	lingkungan	kawasan 55% • Kualitas kontruksi drainase buruk 55%		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 60% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 60%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Sopan Jaya	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 35% • Tingkat Kepadatan Bangunan 35% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 45% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 45%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase	• Ketidaktersediaan Drainase pada	-	Pembangunan drainase baru

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	lingkungan	kawasan 35% • Kualitas kontruksi drainase buruk 35%		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 45% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 45%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Balai Tangah	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 33% • Tingkat Kepadatan Bangunan 33% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 3%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 25% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 25%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase	• Ketidaktersediaan Drainase pada	-	Pembangunan drainase baru

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	lingkungan	kawasan 25% • Kualitas kontruksi drainase buruk 25%		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 25% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 25%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Kumuh Tuo	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 55% • Tingkat Kepadatan Bangunan 55% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 15% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 15 %	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase	• Ketidaktersediaan Drainase pada	-	Pembangunan drainase baru

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	lingkungan	kawasan 25% • Kualitas kontruksi drainase buruk 25%		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 23% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 23%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Kumuh Ranah	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 23% • Tingkat Kepadatan Bangunan 23% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 3%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 45% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 45%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase	• Ketidaktersediaan Drainase pada	-	Pembangunan drainase baru

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	lingkungan	kawasan 35% • Kualitas kontruksi drainase buruk 35%		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 55% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 55%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Padang Bungur	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 10% • Tingkat Kepadatan Bangunan 10% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 22% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum22 %	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase	• Ketidaktersediaan Drainase pada	-	Pembangunan drainase baru

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	lingkungan	kawasan 25% • Kualitas kontruksi drainase buruk 25%		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 24% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 24%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 80% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 80%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Bukit Sembilan	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 45% • Tingkat Kepadatan Bangunan 15% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan unit 5%	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 10% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 22%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase	• Ketidaktersediaan Drainase pada	-	Pembangunan drainase baru

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	lingkungan	kawasan 43% • Kualitas kontruksi drainase buruk 43%		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 45% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 45%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi
Sungai Limau	Kondisi Bangunan Gedung	• Ketidakteraturan Bangunan 35% • Tingkat Kepadatan Bangunan 35% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan unit	• Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan • Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Rehabilitasi bangunan sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat
	Kondisi Penyediaan Air Minum	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 25% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 25%	Sosialisasi untuk pemeliharaan kualitas air sumur	• Peningkatan kualitas penyediaan air minum • Pengembangan cakupan pelayanan SPAM dengan pengembangan perpipaan baru • Pengembangan distribusi air minum
	Kondisi Drainase	• Ketidaktersediaan Drainase pada	-	Pembangunan drainase baru

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KABUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	lingkungan	kawasan 30% • Kualitas kontruksi drainase buruk 30%		
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 45% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 45%	Sosialisasai hidup sehat	• Bantuan jamban (yang terhubung dengan septik tank) • Pembangunan septik tank komunal
	Kondisi Penglolaan Persampahan	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat • Sosialisasi dan pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R	• Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3R • Peningkatan layanan rute persampahan • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan 3R • Penambahan armada sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran • Pelatihan penanganan dini kejadian kebakaran	• Penyediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan • Pengembangan sistem proteksi kebakaran terintegrasi

Sumber: Hasil Olah data, 2025

BAB 5
KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

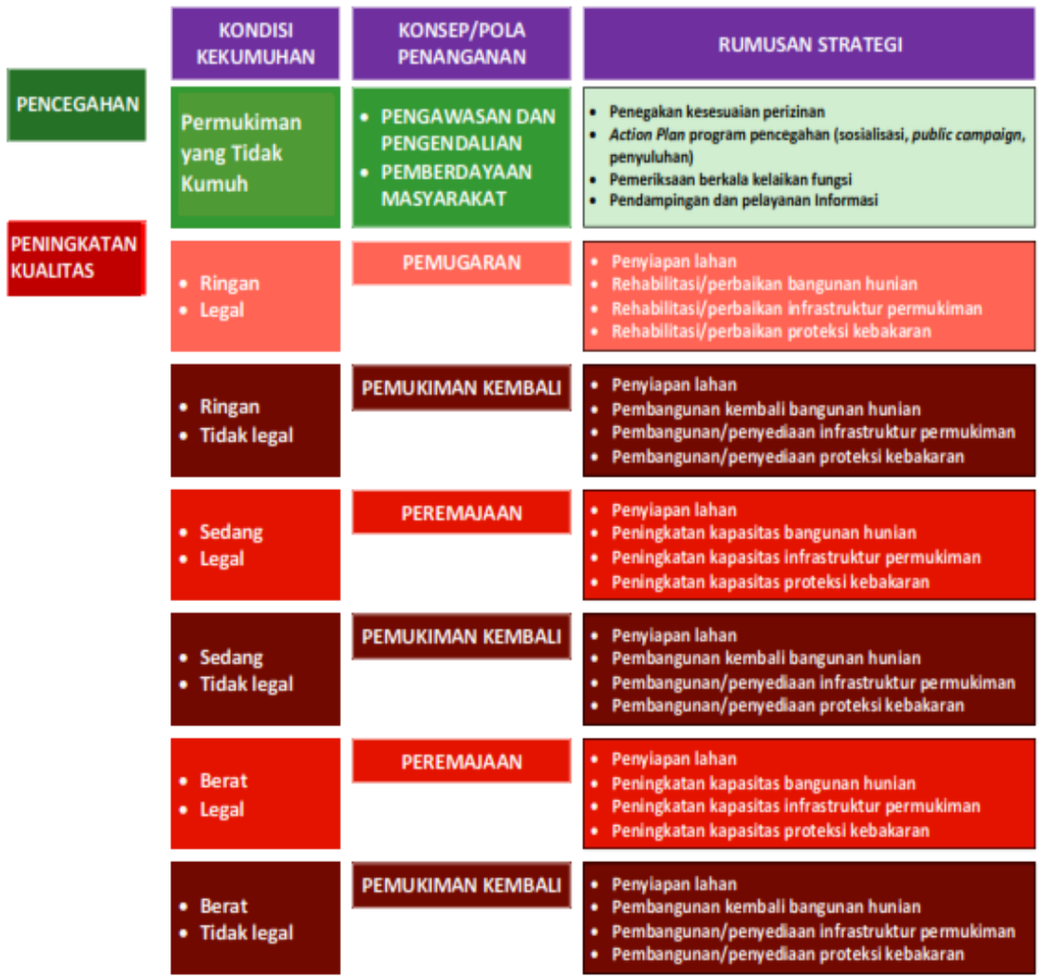
5.1 KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH SAMPAI DENGAN PENCAPAIAN KOTA BEBAS KUMUH DALAM SKALA KOTA

Tahap penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan tahapan perumusan konsep serta strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sesuai dengan kebutuhan penanganan pada lokasi permukiman kumuh. Secara skematis, perumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan, dapat dilihat pada bagan berikut ini.

Gambar 5.1
Konsep Dasar Penanganan kawasan Permukiman Kumuh



Gambar 5.2
Skema Umum Perumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018



Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011, pola-pola penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas. Pola pencegahan kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan:

1. Pengawasan dan Pengendalian
2. Pemberdayaan Masyarakat

Pola peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dilakukan melalui:

1. Pemugaran;
2. Peremajaan; atau
3. Pemukiman kembali.

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 pasal 97, pola-pola penanganan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Pemugaran

- **Pengertian**

  Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni, yang meliputi perbaikan dan/atau pembangunan bangunan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ada didalamnya, sehingga memenuhi norma dan standar teknis yang berlaku.

  Pemugaran perumahan dan permukiman kumuh merupakan kegiatan perbaikan tanpa perombakan mendasar, serta bersifat parsial dan dilakukan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berdiri di atas lahan yang dalam RTRW diperuntukkan bagi permukiman.

- **Penerapan**

  Pemugaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh diterapkan berdasarkan tingkat perbaikan dan/atau pembangunan kembali yang dibutuhkan. Kebutuhan perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama – sama masyarakat. Pemugaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau oleh masyarakat secara swadaya tergantung dari berat/ringannya perbaikan yang harus dilakukan serta berdasarkan pertimbangan lain.

  Kegiatan pemugaran yang dilakukan pemerintah daerah diselenggarakan oleh dinas/instansi yang berwenang serta yang membidanggi urusan perumahan dan kawasan permukiman, infrastruktur, dan kePUan, pemberdayaan masyarakat, dan dinas kebudayaan seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum atau sebutan lain dan atau dinas terkait lainnya. Serta dapat juga dilakukan oleh lembaga profit dan non profit lain melalui tanggungjawab sosail perusahaan atau *Corporate social responsibility* (CSR). Pelaksanaan kegiatan pemugaran dengan swadaya masyarakat, wajib difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

- **Karakteristik Penanganan**

  Pada bentuk penanganan ini umumnya yang tidak terlihat terlalu banyak perubahan mendasar, selain dari peningkatan bentuk pelayanan dan kondisi fisik prasarana, sarana dan bangunan tempat tinggal. Berikut dapat dilihat penjabaran dari jenis - jenis pemugaran sebagai berikut.

Tabel 5.1
Jenis –jenis Pemugaran

Revitalitasi Kawasan Permukiman	Merupakan jenis penanganan untuk meningkatkan vitalitas kawasan permukiman melalui peningkatan kualitas lingkungan, tanpa menimbulkan perubahan yang berarti dari struktur fisik kawasan permukiman tersebut. Kegiatan ini bertujuan memperbaiki dan mendorong ekonomi kawasan dengan cara memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana eksisting yang ada, meningkatkan kualitas serta kemampuan dari prasarana dan sarana melalui program perbaikan dan peningkatan tanpa melakukan pembongkaran berarti. Pada kegiatan ini dilakukan pula pengadaan prasarana dan sarana baru diperlukan tanpa merubah struktur yang ada dan memanfaatkan bangunan eksisiting secara maksimal.
Rehabilitasi (Perbaikan)	Merupakan jenis penanganan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi komponen fisik kawasan permukiman yang telah mengalami kemunduran kondisi atau degradasi, sehingga dapat berfungsi kembali secara semula, misalnya perbaikan prasarana jalan, saluran air bersih, drainase, dan lain-lain.
Renovasi	Merupakan jenis penanganan dengan melakukan perubahan sebagian atau beberapa bagian dari komponen permukiman (prasarana dan sarana) dengan tujuan komponen tersebut masih dapat beradaptasi dan menampung fungsi baru. Bentuk umumnya adalah peningkatan kemampuan dan kualitas dari komponen tersebut sesuai dengan persyaratan baru. Yang termasuk renovasi adalah: • Penyesuaian organisasi ruang (pemanfaatan ruang) dan peningkatan sistem prasarana/utilitas dan menyesuaikan arah bangunan • Ukuran bangunan (penyesuaian bangunan) agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan penanganan • Orientasi ruang.
Rekonstruksi	Merupakan jenis penanganan yang bertujuan mengembalikan kondisi (kualitas dan fungsi) dan peningkatan komponen permukiman ke dalam kondisi asal, baik persyaratan maupun penggunaannnya. Dalam hal ini tidak ada kekawatiran terhadap konsekuensi yang timbul karena perubahan ukuran dan bentuk komponen.
Preservasi (Pemeliharaan dan Pengendalian)	Merupakan jenis penanganan yang dilakukan dengan tujuan untuk memelihara komponen-komponen permukiman yang masih berfungsi dengan baik dan mencegah dari proses kerusakan. Sebagai fungsi pengendalian, maka preservasi dapat dilakukan dengan penegasan melalui aturan-aturan pemanfaatan ruang dan bangunan (KDB, KLB, GSB, GSJ, IMB, dan lain-lain). Sifat penanganan ini cenderung lebih ke arah pencegahan timbulnya permukiman kumuh, sehingga seringkali upaya ini dilakukan bersamaan dengan restorasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi

Sumber : UU No. 1 Tahun 2011 pasal 97

- **Peran Perilaku**

  Didasari pada sifat penanganannya yang tidak terlalu banyak membutuhkan perubahan infrastruktur secara mendasar, maka peran pelaku di luar masyarakat dalam hal ini pemerintah daerah dalam program relatif lebih besar dibandingkan dengan peran pelaku masyarakat.

2. Peremajaan

- Pengertian

  Peremajaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dengan cara pembangunan kembali perumahan dan permukiman melalui penataan secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman. Pelaksanaan peremajaan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak dengan memenuhi norma dan standar teknis yang berlaku.

  Peremajaan dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah maupun kolaborasi dengan pihak lain sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat dan diterapkan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berdiri di atas lahan yang dalam RTRW diperuntukkan bagi permukiman.

- Penerapan

  Peremajaan diterapkan pada permukiman kumuh yang secara struktur ruang, ekonomi dan perilaku tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak dapat ditangani hanya dengan perbaikan dan peningkatan fisik.

  Kondisi buruk secara struktur dapat mendorong terciptanya pemanfaatan ruang yang tidak efisien dan optimal sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. Permukiman kumuh yang mendapatkan penanganan ini umumnya ditandai dengan :

  - Tidak adanya kejelasan baik pola/struktur prasarana lingkungan
  - Tidak ada kejelasan kesesuaian pola pemanfaatan ruang
  - Struktur ekonomi memiliki kondisi yang sangat buruk karena tidak ditunjang dengan kemampuan pengembangan ekonomi kawasan permukiman

- Tidak dapat beradaptasi dengan kawasan sekitar

Secara keseluruhan kondisi kawasan tidak mencerminkan pemanfaatan fungsi yang maksimal sesuai dengan potensi lahannya.

- **Karakteristik Penanganan**

Bentuk penanganan ini umumnya dilakukan dengan perubahan yang mendasar. Untuk itu penanganan ini mempunyai konsekuensi merubah pola pemanfaatan ruang, baik secara komposisi, komponen, besaran maupun fungsinya.

Hal ini mengarahkan pada pola-pola pengadaan baru yang lebih menonjol dari pada peningkatan dan perbaikan kualitas. Seperti yang dapat dilihat pada penjabaran tabel jenis-jenis penanganan.

Tabel 5.2
Jenis-jenis Penanganan

Renewal (Peremajaan)	Merupakan jenis penanganan yang bersifat menyeluruh dengan melakukan pembongkaran sebagian atau seluruh komponen permukiman, kemudian merubah secara struktural dan membangun kembali di lahan yang sama. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai pemanfaatan lahan optimal sesuai dengan potensi lahan, dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi dan vitalitas baru. Konsekuensi bentuk teknis pada penanganan ini, adalah a. Konsolidasi tanah b. Land re-adjusment c. Land sharing, kombinasi pemanfaatan lahan permukiman dengan komersil Karakteristik permukiman kumuh yang ditangani, adalah: a. Tata letak secara keseluruhan tidak memungkinkan untuk dikembangkan dan tidak sesuai lagi untuk menampung jenis kegiatan baru b. Aksesibilitas yang buruk, ruang kurang dan tidak dapat diperluas lagi, organisasi ruang serta hubungan fungsional yang buruk c. Kondisi bangunan sangat buruk dan tidak layak pakai, karena ketidakmampuan lagi melayani fungsi dengan baik.
Redevelopment	Merupakan upaya penataan Kembali suatu permukiman kumuh dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana pada sebagian atau seluruh kawasan yang telah dinyatakan tidak dapat lagi dipertahankan kehadirannya. Perubahan secara struktural dan peruntukan lahan serta ketentuan-ketentuan pembangunan lainnya yang mengatur pembangunan baru (KLB, KDB, GSB, dan lain-lain) biasanya terjadi.
Restorasi	Merupakan jenis penanganan untuk mengembalikan kondisi suatu permukiman kumuh pada kondisi asal sesuai dengan persyaratan yang benar,menghilangkan tambahan atau komponen yang timbul kemudian mengadakan kembali unsur-unsur permukiman yang telah hilang tanpa menambah unsur-unsur baru.

Sumber : UU No. 1 Tahun 2011 pasal 97

- **Peran Pelaku**

Didasari pada sifat penanganannya, maka peran masyarakat sangat besar dalam mengambil keputusan, terutama dalam penentuan jenis komponen program; sedangkan peran Pemerintah, pemerintah daerah,

dan pelaku lain (swasta) akan lebih banyak dalam dalam mendukung program.

3. Permukiman Kembali

- **Pengertian**

  Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Pemukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terkena dampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang maupun mahluk hiduplainnya.

- **Penerapan**

  Penanganan ini diterapkan pada permukiman:

  - Secara lokasi berada pada lahan ilegal
  - Tidak memiliki potensi pemanfaatan yang lebih baik dari fungsi yang ditetapkan
  - Secara lingkungan memberikan dampak negatif yang lebih besar apabila tetap dipertahankan

  Termasuk dalam penanganan ini adalah permukiman yang secara teknologi tidak mampu mendukung penyelesaian masalah. Beberapa kondisi yang memenuhi persyaratan penanganan ini, antara lain:

  ✓ Lokasi yang berada diatas tanah negara dengan peruntukan non permukiman (bantaran sungai, lahan penghijauan, dan lain-lain)

  ✓ Permukiman kumuh yang berada pada lokasi dimana secara fisik lingkungan sangat berbahaya sebagai tempat bermukim dan tidak dapat ditanggulangi secara teknis (di atas lahan rawan bencana alam/geologi), Yakni perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di:

    - bantaran sungai;
    - sepanjang rel kereta api;
    - dibawah SUTET; dan
    - tidak sesuai peruntukannya dengan rencana tata ruang.

  Pemukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak ke lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang bagi peruntukan permukiman. Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat

untuk pemukiman kembali ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Kegiatan pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Pelaksanaan pemukiman kembali adalah memindahkan masyarakat yang tinggal di perumahan tidak layak huni, tidak mungkin dibangun kembali dan/atau rawan bencana, ke lokasi perumahan lain yang layak huni;

Pelaksanaan pemukiman Kembali wajib diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/ atau pemerintah Kabupaten/ Kota.

- **Karakteristik Penanganan**

  Bentuk penanganan ini umumnya dilakukan dengan cara:
  - Perubahan total dikaitkan dengan pengembalian fungsinya kepada fungsi awal;
  - Dilakukan dengan pemindahan permukiman pada areal yang baru (lokasi lain);
  - Tidak diarahkan pada pendukungan untuk pengadaan atau peningkatan fasilitas dan prasarana pendukungnya.

- **Peran Pelaku**

  Didasari pada sifat penanganannya, maka peran masyarakat sangat besar dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam proses penentuan kebijakan seperti pengalokasian baru, ganti rugi, dan lain-lain, walaupun pada posisi ilegal.

  Peran pelaku pemerintah adalah :
  - Menentukan alternatif penyelesaian masalah pemukiman kembali;
  - Pengadaan terhadap konsekuensi;
  - Kompensasi penanganan (lokasi tujuan pemindahan);

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus dilakukan sesuai dengan hasil penilaian berbagai aspek kekumuhan (tingkat kekumuhan, pertimbangan lain dan legalitas lahan). Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh untuk berbagai aspek kekumuhan akan berbeda-beda pendekatan penanganannya, dimana secara hirarki peningkatan kualitas kawasan

permukiman kumuh paling rendah adalah pemugaran dan paling tinggi adalah permukiman kembali.

Ketentuan penanganan fisik diatur sesuai dengan faktor permasalahan kekumuhan setiap lokasi yang teridentifikasi. Beberapa faktor permasalahan kekumuhan suatu lokasi yaitu :

1. Aspek bangunan dan lingkungan;
2. Aspek jalan lingkungan;
3. Aspek drainase lingkungan;
4. Sistem penyediaan air minum;
5. Sistem pengelolaan air limbah;
6. Sistem pengelolaan persampahan.

Pola-pola penanganan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh direncanakan dengan mempertimbangkan, salah satunya melihat klasifikasi Kekumuhan dan Status Legalitas Lahan. Pertimbangan pola penanganan berdasarkan klasifikasi kekumuhan dan status legalitas lahan diatur dengan ketentuan:

a. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
b. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
c. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
d. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
e. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;
f. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;

Merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043 terdapat kawasan perkotaan berada di :

1. Pulau Punjung dan Sungai Rumbai sebagai Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten;

2. Koto Baru, Sitiung dan Padang Laweh sebagai Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten Dharmasraya.

Maka pada kawasan perkotaan tersebut dilakukan Konsep dan Starategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Sampai Dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota.

Tabel 5.1
Konsep dan Starategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Sampai dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh dalam Skala Kota

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
		PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
Kawasan Pulau Punjung	• Ketidakteraturan Bangunan 25% • Tingkat Kepadatan Bangunan 55& • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 10%	• Pengawasan dan Pengendaliuan • Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	• Penetapan regulasi terkait bangunan dan lingkungan • Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan	• Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian Rehabilitasi bangunan hunian
	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 50 % • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 50 %	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran dan Peremajaan	• Pembinaan penyediaan air minum berbasis masyarakat • Pembinaan standar air minum yang sehat • Pembinaan menggunakan air minum terpusat	• Rehabilitasi jaringan air minum seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit pelayanan; • Meningkatkan sistem jaringan pipa transmisi dan dsitribusi air • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum • Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung • Pembangunan reservoir
	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 40 % • Kualitas kontruksi	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan • Pembinaan penyediaan	• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
		PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	drainase buruk 35%			resapan kavling • Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase lingkungan	Pembangunan jaringan drainase lingkungan
	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 20% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 20%	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal mapun terpusat • Pembinaan pola sanitasi sehat • Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPAL-S atau SPAL-T; • Pembangunan sistem perpipaan komunal
	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 25% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 25%	Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran dan Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait persampahan • Pembinaan program 3R • Peningkatan pola hidup bersih • Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong sampah • Penyediaan armada motor sampah • Pembangunan bank sampah
	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pecegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	• Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran;

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
		PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%				• Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR • Penyediaan moda pemadam kendaraan
Kec.Sungai Rumbai	• Ketidakteraturan Bangunan 33% • Tingkat Kepadatan Bangunan 33% Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 3%	• Pengawasan dan Pengendaliuan • Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	• Penetapan regulasi terkait bangunan dan lingkungan • Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan	• Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian Rehabilitasi bangunan hunian
	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 25% Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 25%	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran dan Peremajaan	• Pembinaan penyediaan air minum berbasis masyarakat • Pembinaan standar air minum yang sehat Pembinaan menggunakan air minum terpusat	• Rehabilitasi jaringan air minum seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit pelayanan; • Meningkatkan sistem jaringan pipa transmisi dan dsitribusi air • Peningkatan jangkauan

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
		PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
					pelayanan jaringan air minum • Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung Pembangunan reservoir
	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 25% Kualitas kontruksi drainase buruk 25%	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan • Pembinaan penyediaan resapan kavling Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase lingkungan	• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase Pembangunan jaringan drainase lingkungan
	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 25% Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 25%	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal mapun terpusat • Pembinaan pola sanitasi sehat Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPAL-S atau SPAL-T; • Pembangunan sistem perpipaan komunal
	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran dan Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait persampahan • Pembinaan program 3R • Peningkatan pola hidup bersih Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
		PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
					pengolahan; • Penyediaan tong sampah • Penyediaan armada motor sampah Pembangunan bank sampah
	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pecegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	• Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; • Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR Penyediaan moda pemadam kendaraan
Koto Baru	• Ketidakteraturan Bangunan 10% • Tingkat Kepadatan Bangunan 10% Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 10%	• Pengawasan dan Pengendaliuan Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	• Penetapan regulasi terkait bangunan dan lingkungan • Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan	• Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian Rehabilitasi bangunan hunian
	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 10%	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran dan Peremajaan	• Pembinaan penyediaan air minum berbasis	• Rehabilitasi jaringan air minum seperti

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
		PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 30%			masyarakat • Pembinaan standar air minum yang sehat Pembinaan menggunakan air minum terpusat	penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit pelayanan; • Meningkatkan sistem jaringan pipa transmisi dan dsitribusi air • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum • Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung Pembangunan reservoir
	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 50% Kualitas kontruksi drainase buruk 50%	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan • Pembinaan penyediaan resapan kavling Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase lingkungan	• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase Pembangunan jaringan drainase lingkungan
	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 40% Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 40%	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal mapun terpusat • Pembinaan pola sanitasi sehat	• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPAL-S atau SPAL-T;

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
		PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
				Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat	• Pembangunan sistem perpipaan komunal
	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran dan Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait persampahan • Pembinaan program 3R • Peningkatan pola hidup bersih Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong sampah • Penyediaan armada motor sampah Pembangunan bank sampah
	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pecegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	• Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; • Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR Penyediaan moda

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
		PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
					pemadam kendaraan
Siguntur 1	• Ketidakteraturan Bangunan 20% • Tingkat Kepadatan Bangunan 20%	• Pengawasan dan Pengendaliuan • Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	• Penetapan regulasi terkait bangunan dan lingkungan • Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan	• Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian • Rehabilitasi bangunan hunian
	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 25% Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 25%	Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran dan Peremajaan	• Pembinaan penyediaan air minum berbasis masyarakat • Pembinaan standar air minum yang sehat Pembinaan menggunakan air minum terpusat	• Rehabilitasi jaringan air minum seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit pelayanan; • Meningkatkan sistem jaringan pipa transmisi dan dsitribusi air • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum • Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung Pembangunan reservoir
	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 70% Kualitas kontruksi drainase buruk 70%	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan • Pembinaan penyediaan resapan kavling	• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase Pembangunan

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
		PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
				Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase lingkungan	jaringan drainase lingkungan
	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 50% Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 50%	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal mapun terpusat • Pembinaan pola sanitasi sehat Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPAL-S atau SPAL-T; • Pembangunan sistem perpipaan komunal
	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran dan Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait persampahan • Pembinaan program 3R • Peningkatan pola hidup bersih Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong sampah • Penyediaan armada motor sampah Pembangunan bank sampah
	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pecegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	• Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; • Pelebaran jalan

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
		PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	Kawasan 100%				lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR Penyediaan moda pemadam kendaraan

5.2 KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN

Strategi skala kawasan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya. Secara umum kawasan kumuh memiliki karakteristik permasalahan dan kebutuhan penanganan yang hampir sama yaitu aspek persampahan dan proteksi kebakaran, tidak hanya dua aspek permasalahan itu saja yang ada pada kawasan kumuh tetapi juga memliki permasalahan pada ketujuh aspek indikator permasalahan.

Tabel 5.2 Konsep dan Strategi Pecegahan Dan Peningkatan Kualitas Kumuh Skala Kawasan

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
		PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
Kawasan Pulau Punjung	• Ketidakteraturan Bangunan 25% • Tingkat Kepadatan Bangunan 55& • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 10%	• Pengawasan dan Pengendaliuan • Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran	• Penetapan regulasi terkait bangunan dan lingkungan • Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan •	• Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian • Rehabilitasi bangunan hunian
	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 50 % • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 50 %	• Pemberdayaan masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Pembinaan penyediaan air minum berbasis masyarakat • Pembinaan standar air minum yang sehat • Pembinaan menggunakan air minum terpusat	• Rehabilitasi jaringan air minum seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit pelayanan; 1. Meningkatkan sistem jaringan pipa transmisi dan dsitribusi air • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum 1. Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung • Pembangunan reservoir
	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 40 % • Kualitas kontruksi drainase buruk 35%	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan • Pembinaan penyediaan resapan kavling Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase lingkungan	• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase Pembangunan jaringan drainase lingkungan
	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 20% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah	Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal mapun terpusat	• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPAL-S atau SPAL-T; • Pembangunan sistem perpipaan komunal

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
	tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 20%			• Pembinaan pola sanitasi sehat • Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat	
	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 25% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 25%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait persampahan • Pembinaan program 3R • Peningkatan pola hidup bersih • Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 1. Penyediaan tong sampah 2. Penyediaan armada motor sampah • Pembangunan bank sampah
	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pecegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	• Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; 1. Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; 1. Penyediaan hidran 2. Penyediaan APAR • Penyediaan moda pemadam kendaraan
Kumuh Lambau	• Ketidakteraturan Bangunan 25% • Tingkat Kepadatan Bangunan 25% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 10%	• Pengawasan dan Pengendaliuan • Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran	• Penetapan regulasi terkait bangunan dan lingkungan • Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan •	• Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian • Rehabilitasi bangunan hunian
	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 100%	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan	• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase Pembangunan jaringan drainase

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
	• Kualitas kontruksi drainase buruk 100%			• Pembinaan penyediaan resapan kavling Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase lingkungan	lingkungan
	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 30% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 30%	Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal mapun terpusat • Pembinaan pola sanitasi sehat • Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPAL-S atau SPAL-T; • Pembangunan sistem perpipaan komunal
	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait persampahan • Pembinaan program 3R • Peningkatan pola hidup bersih • Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 3. Penyediaan tong sampah 4. Penyediaan armada motor sampah • Pembangunan bank sampah
	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pecegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	• Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; 2. Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; 3. Penyediaan hidran 4. Penyediaan APAR • Penyediaan moda pemadam kendaraan

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
Sungai Kilangan	• Ketidakteraturan Bangunan 27% • Tingkat Kepadatan Bangunan 30% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 10%	• Pengawasan dan Pengendaliuan • Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran	• Penetapan regulasi terkait bangunan dan lingkungan • Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan •	• Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian • Rehabilitasi bangunan hunian
	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 15% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 30%	Pemberdayaan masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Pembinaan penyediaan air minum berbasis masyarakat • Pembinaan standar air minum yang sehat • Pembinaan menggunakan air minum terpusat	• Rehabilitasi jaringan air minum seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit pelayanan; 2. Meningkatkan sistem jaringan pipa transmisi dan dsitribusi air • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum 2. Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung • Pembangunan reservoir
	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan % • Kualitas kontruksi drainase buruk %	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan • Pembinaan penyediaan resapan kavling Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase lingkungan	• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase Pembangunan jaringan drainase lingkungan
	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 10% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 10%	Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal mapun terpusat • Pembinaan pola sanitasi sehat	• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPAL-S atau SPAL-T; • Pembangunan sistem perpipaan komunal

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
				• Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat	
	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait persampahan • Pembinaan program 3R • Peningkatan pola hidup bersih • Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 5. Penyediaan tong sampah 6. Penyediaan armada motor sampah • Pembangunan bank sampah
	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pecegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	• Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; 3. Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; 5. Penyediaan hidran 6. Penyediaan APAR • Penyediaan moda pemadam kendaraan
Siguntur 1	• Ketidakteraturan Bangunan 20% • Tingkat Kepadatan Bangunan 20%	• Pengawasan dan Pengendaliuan • Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran	• Penetapan regulasi terkait bangunan dan lingkungan • Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan •	• Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian • Rehabilitasi bangunan hunian
	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 25% • Tidak terpenuhinya	Pemberdayaan masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Pembinaan penyediaan air minum berbasis masyarakat • Pembinaan standar air	• Rehabilitasi jaringan air minum seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
	kebutuhan air minum 25%			minum yang sehat • Pembinaan menggunakan air minum terpusat	pelayanan; 3. Meningkatkan sistem jaringan pipa transmisi dan dsitribusi air • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum 3. Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung • Pembangunan reservoir
	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 70% • Kualitas kontruksi drainase buruk 70%	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan • Pembinaan penyediaan resapan kavling Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase lingkungan	• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase Pembangunan jaringan drainase lingkungan
	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 50% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 50%	Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal mapun terpusat • Pembinaan pola sanitasi sehat • Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPAL-S atau SPAL-T; • Pembangunan sistem perpipaan komunal
	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait persampahan • Pembinaan program 3R • Peningkatan pola hidup bersih • Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong sampah • Penyediaan armada motor sampah • Pembangunan bank sampah

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pecegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	• Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; • Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR • Penyediaan moda pemadam kendaraan
	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 40% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 40%	Pemberdayaan masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Pembinaan penyediaan air minum berbasis masyarakat • Pembinaan standar air minum yang sehat • Pembinaan menggunakan air minum terpusat	• Rehabilitasi jaringan air minum seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit pelayanan; • Meningkatkan sistem jaringan pipa transmisi dan dsitribusi air • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum • Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung • Pembangunan reservoir
	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 40% • Kualitas kontruksi drainase buruk 40%	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan • Pembinaan penyediaan resapan kavling Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase lingkungan	• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase Pembangunan jaringan drainase lingkungan
	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar	Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi	• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
	teknis sebanyak 30% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 30%			• Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal mapun terpusat • Pembinaan pola sanitasi sehat • Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat	penambahan komponen pada SPAL-S atau SPAL-T; • Pembangunan sistem perpipaan komunal
	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait persampahan • Pembinaan program 3R • Peningkatan pola hidup bersih • Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong sampah • Penyediaan armada motor sampah • Pembangunan bank sampah
	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pecegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	• Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; • Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR • Penyediaan moda pemadam kendaraan
	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait persampahan • Pembinaan program 3R • Peningkatan pola hidup bersih • Pembinaan pengelolaan	• Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong sampah • Penyediaan armada motor

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
	Persyaratan Standar pada 100%			persampahan berbasis masyarakat	sampah • Pembangunan bank sampah
	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pecegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	• Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; • Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR • Penyediaan moda pemadam kendaraan
Koto Padang	• Ketidakteraturan Bangunan 10% • Tingkat Kepadatan Bangunan 10% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 2%	• Pengawasan dan Pengendaliuan • Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran	• Penetapan regulasi terkait bangunan dan lingkungan • Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan •	• Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian • Rehabilitasi bangunan hunian
	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 45% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 45%	Pemberdayaan masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Pembinaan penyediaan air minum berbasis masyarakat • Pembinaan standar air minum yang sehat • Pembinaan menggunakan air minum terpusat	• Rehabilitasi jaringan air minum seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit pelayanan; • Meningkatkan sistem jaringan pipa transmisi dan dsitribusi air • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum • Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung • Pembangunan reservoir

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 65% • Kualitas kontruksi drainase buruk 65%	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan • Pembinaan penyediaan resapan kavling Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase lingkungan	• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase Pembangunan jaringan drainase lingkungan
	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 15% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 15%	Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal mapun terpusat • Pembinaan pola sanitasi sehat • Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPAL-S atau SPAL-T; • Pembangunan sistem perpipaan komunal
	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait persampahan • Pembinaan program 3R • Peningkatan pola hidup bersih • Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong sampah • Penyediaan armada motor sampah • Pembangunan bank sampah
	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pecegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	• Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; • Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
					• Penyediaan moda pemadam kendaraan
Koto Baru	• Ketidakteraturan Bangunan 10% • Tingkat Kepadatan Bangunan 10% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 10%	• Pengawasan dan Pengendaliuan • Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran	• Penetapan regulasi terkait bangunan dan lingkungan • Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan •	• Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian • Rehabilitasi bangunan hunian
	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 10% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 30%	Pemberdayaan masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Pembinaan penyediaan air minum berbasis masyarakat • Pembinaan standar air minum yang sehat • Pembinaan menggunakan air minum terpusat	• Rehabilitasi jaringan air minum seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit pelayanan; • Meningkatkan sistem jaringan pipa transmisi dan dsitribusi air • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum • Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung • Pembangunan reservoir
	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 50% • Kualitas kontruksi drainase buruk 50%	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan • Pembinaan penyediaan resapan kavling Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase lingkungan	• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase Pembangunan jaringan drainase lingkungan
	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 40% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah	Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal mapun	• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPAL-S atau SPAL-T; • Pembangunan sistem

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
	tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 40%			terpusat • Pembinaan pola sanitasi sehat • Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat	perpipaan komunal
	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait persampahan • Pembinaan program 3R • Peningkatan pola hidup bersih • Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong sampah • Penyediaan armada motor sampah • Pembangunan bank sampah
	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pecegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	• Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; • Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR • Penyediaan moda pemadam kendaraan
Balai Tangah	• Ketidakteraturan Bangunan 33% • Tingkat Kepadatan Bangunan 33% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 3%	• Pengawasan dan Pengendaliuan • Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran	• Penetapan regulasi terkait bangunan dan lingkungan • Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan •	• Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian • Rehabilitasi bangunan hunian
	• Ketersediaan akses air	Pemberdayaan	• Pemugaran dan	• Pembinaan penyediaan	• Rehabilitasi jaringan air minum

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
	minum sebanyak 25% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 25%	masyarakat	Peremajaan	air minum berbasis masyarakat • Pembinaan standar air minum yang sehat • Pembinaan menggunakan air minum terpusat	seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit pelayanan; • Meningkatkan sistem jaringan pipa transmisi dan dsitribusi air • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum • Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung • Pembangunan reservoir
	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 25% • Kualitas kontruksi drainase buruk 25%	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan • Pembinaan penyediaan resapan kavling Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase lingkungan	• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase Pembangunan jaringan drainase lingkungan
	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 25% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 25%	Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal mapun terpusat • Pembinaan pola sanitasi sehat • Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPAL-S atau SPAL-T; • Pembangunan sistem perpipaan komunal
	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait persampahan • Pembinaan program 3R • Peningkatan pola hidup bersih • Pembinaan pengelolaan	• Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong sampah • Penyediaan armada motor

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
	Persyaratan Standar pada 100%			persampahan berbasis masyarakat	sampah • Pembangunan bank sampah
	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pecegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	• Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; • Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR • Penyediaan moda pemadam kendaraan
Kumuh Tuo	• Ketidakteraturan Bangunan 55% • Tingkat Kepadatan Bangunan 55% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%	• Pengawasan dan Pengendaliuan • Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran	• Penetapan regulasi terkait bangunan dan lingkungan • Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan •	• Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian • Rehabilitasi bangunan hunian
	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 15% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 15 %	Pemberdayaan masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Pembinaan penyediaan air minum berbasis masyarakat • Pembinaan standar air minum yang sehat • Pembinaan menggunakan air minum terpusat	• Rehabilitasi jaringan air minum seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit pelayanan; • Meningkatkan sistem jaringan pipa transmisi dan dsitribusi air • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum • Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung • Pembangunan reservoir

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 25% • Kualitas kontruksi drainase buruk 25%	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan • Pembinaan penyediaan resapan kavling Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase lingkungan	• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase • Pembangunan jaringan drainase lingkungan
	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 23% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 23%	Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal mapun terpusat • Pembinaan pola sanitasi sehat • Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPAL-S atau SPAL-T; • Pembangunan sistem perpipaan komunal
	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait persampahan • Pembinaan program 3R • Peningkatan pola hidup bersih • Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong sampah • Penyediaan armada motor sampah • Pembangunan bank sampah
	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pecegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	• Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; • Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
					• Penyediaan moda pemadam kendaraan
Kumuh Ranah	• Ketidakteraturan Bangunan 23% • Tingkat Kepadatan Bangunan 23% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 3%	• Pengawasan dan Pengendaliuan • Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran	• Penetapan regulasi terkait bangunan dan lingkungan • Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan •	• Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian • Rehabilitasi bangunan hunian
	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 45% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 45%	Pemberdayaan masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Pembinaan penyediaan air minum berbasis masyarakat • Pembinaan standar air minum yang sehat • Pembinaan menggunakan air minum terpusat	• Rehabilitasi jaringan air minum seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit pelayanan; • Meningkatkan sistem jaringan pipa transmisi dan dsitribusi air • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum • Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung • Pembangunan reservoir
	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 35% • Kualitas kontruksi drainase buruk 35%	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan • Pembinaan penyediaan resapan kavling Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase lingkungan	• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase • Pembangunan jaringan drainase lingkungan
	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 55% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah	Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal mapun	• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPAL-S atau SPAL-T; • Pembangunan sistem

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
	tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 55%			terpusat • Pembinaan pola sanitasi sehat • Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat	perpipaan komunal
	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait persampahan • Pembinaan program 3R • Peningkatan pola hidup bersih • Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong sampah • Penyediaan armada motor sampah • Pembangunan bank sampah
	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pecegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	• Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; • Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR • Penyediaan moda pemadam kendaraan
Padang Bungur	• Ketidakteraturan Bangunan 10% • Tingkat Kepadatan Bangunan 10% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 5%	• Pengawasan dan Pengendaliuan • Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran	• Penetapan regulasi terkait bangunan dan lingkungan • Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan •	• Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian • Rehabilitasi bangunan hunian
	• Ketersediaan akses air	Pemberdayaan	• Pemugaran dan	• Pembinaan penyediaan	• Rehabilitasi jaringan air minum

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
	minum sebanyak 22% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum22 %	masyarakat	Peremajaan	air minum berbasis masyarakat • Pembinaan standar air minum yang sehat • Pembinaan menggunakan air minum terpusat	seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit pelayanan; • Meningkatkan sistem jaringan pipa transmisi dan dsitribusi air • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum • Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung • Pembangunan reservoir
	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 25% • Kualitas kontruksi drainase buruk 25%	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan • Pembinaan penyediaan resapan kavling Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase lingkungan	• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase • Pembangunan jaringan drainase lingkungan
	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 24% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 24%	Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal mapun terpusat • Pembinaan pola sanitasi sehat • Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPAL-S atau SPAL-T; • Pembangunan sistem perpipaan komunal
	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 80% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait persampahan • Pembinaan program 3R • Peningkatan pola hidup bersih • Pembinaan pengelolaan	• Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong sampah • Penyediaan armada motor

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
	Persyaratan Standar pada 80%			persampahan berbasis masyarakat	sampah • Pembangunan bank sampah
	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pecegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	• Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; • Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR • Penyediaan moda pemadam kendaraan
Bukit Sembilan	• Ketidakteraturan Bangunan 45% • Tingkat Kepadatan Bangunan 15% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan unit 5%	• Pengawasan dan Pengendaliuan • Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran	• Penetapan regulasi terkait bangunan dan lingkungan • Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan •	• Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian • Rehabilitasi bangunan hunian
	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 10% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 22%	Pemberdayaan masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Pembinaan penyediaan air minum berbasis masyarakat • Pembinaan standar air minum yang sehat • Pembinaan menggunakan air minum terpusat	• Rehabilitasi jaringan air minum seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit pelayanan; • Meningkatkan sistem jaringan pipa transmisi dan dsitribusi air • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum • Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung • Pembangunan reservoir

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 43% • Kualitas kontruksi drainase buruk 43%	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan • Pembinaan penyediaan resapan kavling Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase lingkungan	• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase Pembangunan jaringan drainase lingkungan
	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 45% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 45%	Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal mapun terpusat • Pembinaan pola sanitasi sehat • Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPAL-S atau SPAL-T; • Pembangunan sistem perpipaan komunal
	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait persampahan • Pembinaan program 3R • Peningkatan pola hidup bersih • Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong sampah • Penyediaan armada motor sampah • Pembangunan bank sampah
	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pecegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	• Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; • Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
					• Penyediaan moda pemadam kendaraan
Sungai Limau	• Ketidakteraturan Bangunan 35% • Tingkat Kepadatan Bangunan 35% • Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan unit	• Pengawasan dan Pengendaliuan • Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran	• Penetapan regulasi terkait bangunan dan lingkungan • Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan •	• Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian • Rehabilitasi bangunan hunian
	• Ketersediaan akses air minum sebanyak 25% • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 25%	Pemberdayaan masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Pembinaan penyediaan air minum berbasis masyarakat • Pembinaan standar air minum yang sehat • Pembinaan menggunakan air minum terpusat	• Rehabilitasi jaringan air minum seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit pelayanan; • Meningkatkan sistem jaringan pipa transmisi dan dsitribusi air • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum • Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung • Pembangunan reservoir
	• Ketidaktersediaan Drainase pada kawasan 30% • Kualitas kontruksi drainase buruk 30%	Pemberdayaan Masyarakat	Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan • Pembinaan penyediaan resapan kavling Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase lingkungan	• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase • Pembangunan jaringan drainase lingkungan
	• System pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 45% • Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah	Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait sanitasi • Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal mapun	• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPAL-S atau SPAL-T; • Pembangunan sistem

KAWASAN KUMUH	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		KONSEP PENANGANAN	
	tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 45%			terpusat • Pembinaan pola sanitasi sehat • Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat	perpipaan komunal
	• Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 100% • Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Persyaratan Standar pada 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran dan Peremajaan	• Penetapan regulasi terkait persampahan • Pembinaan program 3R • Peningkatan pola hidup bersih • Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat	• Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong sampah 7. Penyediaan armada motor sampah • Pembangunan bank sampah
	• Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran pada kawasan 100% • Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran pada Kawasan 100%	• Pemberdayaan Masyarakat	• Peremajaan	• Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pecegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	• Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; • Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR • Penyediaan moda pemadam kendaraan

Sumber: Hasil Olah data, 2025

BAB 6
RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Kebutuhan program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar ternangananinya kawasan permukiman kumuh Kabupaten Dharmasraya didasarkan pada permasalahan yang terjadi dimana dari permasalahan dirumuskan konsep dan strategi, sebagai bagian awal dalam rangka penyelesaian permasalahan. Dari strategi yang ada di *breakdown* kedalam kebutuhan program penanganan yang meliputi aspek pencegahan dan peningatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Adapun program dan kegiatan serta tahun pelaksanaan penanganannya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 6.1
Program dan Kegiatan Peningklatan Kualitas Perumhan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelaksanaan					Instasi Pelaksanaan
		Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Masih adanya bangunan permukiman yang tidak layak huni	Pemugaran	Meningkatkan kualitas bangunan permukiman sesuai dengan SPM	• Pelayanan informasi masyarakat	• Sosialisasi, pembinaan dan pemeliharaan terkait bangunan dan lingkungan • Pemeriksaan Berkala						Dinas Perkimtan
				• Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)	• Penyusunan data base RTLH						
					• Bimtek rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni						
					• Penyediaan rumah layak huni						
2.	Masih banyaknya bangunan permukiman yang belum tertata	Pemugaran Peremajaan	Penataan Kawasan	Peningkatan layanan informasi masyarakat	• Sosialiasasi mengenai Penetapan regulasi terkait bangunan dan lingkungan serta penertiban IMB						DPUPR, Dinas Perkimtan, DPMPTSP
				Penataan dan peningkatan kawasan permukiman	• Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan permukiman						
					• Penataan Kawasan						
3	Keterbatasan infrastruktur permukiman, terutama berupa jalan lingkungan, drainase, air bersih, limbah, pengelolaan sampah dan	1. Peremajaan 2. Pemugaran	Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman sesuai dengan SPM	• Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan • Peningkatan layanan informasi masyarakat	• Bimtek sistem regulasi infrastrktur permukiman • Sosialisasi standar teknis infrastruktur permukiman						DPUPR, Dinas Perkimtan

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelaksanaan					Instasi Pelaksanaan
		Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
	proteksi kebakaran			• Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	• Meningkatkan pemenuhan prasarana, sarana utilitas umum permukiman						
				Peningkatan infrastruktur air minum permukiman	• Peningkatan Kualitas Pelayanan air Bersih Masyarakat • Optimalisasi, pengembangan dan non teknis sistem penyediaan air minum • Penambahan Air Baku • Pembangunan Reservoir • Penambahan Sambungan SR						DPUPR & UPTD. Air Minum
				Peningkatan infrastruktur air limbah permukiman	• Pembangunan, operasional pemeliharaan SPALD-S						Dinas Perkimtan, Dinas Lingkungan Hidup
					• Pembangunan operasional pemeliharaaan IPLT, serta pengadaaan mobil tinja						
				Peningkatan infrastruktur persampahan permukiman	• Sosialisasi pengelolaan sampah 3R • Penambahan Sarana dan prasarana persampahan • Pembangunan TPST						
					• Peningkatan Pelayanan pengelolaan persampahan						
					• Pengelolaan sampah sampai TPST (pembangunan TPA sampah skala kota)						
				Peningkatan infrastruktur drainase permukiman	• Pembangunan drainase kawasan kumuh						DPUPR
					• Pengembangan jaringan drainase kota						

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelaksanaan					Instasi Pelaksanaan
		Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
					• Pemeliharaan rutin dan periodik jaringan drainase						
					• PHBS dan pengembangan lingkungan sehat						
				Peningkatan infrastruktur jalan permukiman	• Pembangunan jalan						
					• Rehabilitasi /pemeliharaan jalan						
				Pengadaan dan Peningkatan Proteksi Kebakaran	• Sosialisasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran • Pengadaan Hidran Kebakaran/Tandaon Air • Penfgadaan APAR						BPBD
4	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Pemugaran	Meningkatkan sistem pengelolaan pemelihaaran lingkungan permukiman sesuai dengan SPM	• Peningkatan layanan informasi Masyarakat	• Sosialisasi tata ruang, mekanisme, perijinan dan standar teknis infrastruktur permukiman • Peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup						Dinas Perkimtan, Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan konsep penanganan untuk pencegahan difokuskan pada Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan konsep penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan difokuskan pada upaya peremajaan dan pemugaran. Strategi penanganan untuk pencegahan dilakukan melalui upaya meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun pelatihan kepada masyarakat. Sedangkan strategi penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan dilakukan melalui upaya

pembangunan, pengembangan, rehabilitasi/peningkatan, serta pengadaan kelengkapan sarana pendukung. Untuk program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6.2
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Ketidakteraturan bangunan • Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas bangunan permukiman sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian dengan : Rehabilitasi bangunan hunian	Pendampingan dan layanan informasi standar bangunan rumah sehat dan layak huni	• Sosialisasi standar teknis • Penyuluhan rehabilitasi rumah sehat dan layak huni						DPUPR & Dinas Perkim-LH
			Rehabilitasi RTLH sebagai upaya peningkatan dan pengurangan kawasan kumuh	• Pendataan rehabilitasi RTLH						
				• Rehabilitasi penyediaan rumah layak huni						
Kualitas permukaan jalan lingkungan yang belum memadai	Pemugaran Peremajaan	• Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis 1. Peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan dengan melakukan Rehabilitasi jalan lingkungan/ perbaikan perkerasan jalan lingkungan • Peningkatan kapasitas jalan lingkungan dengan pelebaran badan jalan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar jalan lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar jalan lingkungan						DPUPR & Dinas Perkim-LH
			Peningkatan infrastruktur jalan lingkungan	• Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan lingkungan serta kelengkapannya						
				• Pelebaran badan jalan lingkungan						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		lingkungan								
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase dengan Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan • Penyuluhan perawatan dan pemeliharaan drainase						DPUPR & Dinas Perkim-LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan • Penambahan jaringan drainase yang belum tersambung						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Prasarana dan Sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 1. Penyediaan tong sampah 2. Penyediaan TPS	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan prasarana dan sarana sistem persampahan	• Peninglatan Pelayanan Persampahan						
				• Pembangunan TPS						
				• Penyediaan tong sampah						
				• Operasional dan pemeliharaan TPS						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran seperti Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarpras proteksi kebakaran; 1. Penyediaan hidran 2. Penyediaan APAR 3. Penyediaan moda pemadam kendaraan	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye Konsep kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Peningkatan kualitas jalan lingkungan • Pelebaran jalan lingkungan						
				• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Sumber: Hasik Analisis, 2025

Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan konsep penanganan untuk pencegahan difokuskan pada Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan konsep penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan difokuskan pada upaya peremajaan dan pemugaran. Strategi penanganan untuk pencegahan dilakukan melalui upaya meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun pelatihan kepada masyarakat. Sedangkan strategi penanganan untuk peningkatan kualitas lingkungan dilakukan melalui upaya

pembangunan, pengembangan, rehabilitasi/peningkatan, serta pengadaan kelengkapan sarana pendukung. Untuk program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6.3
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Silago

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Ketidakteraturan bangunan • Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas bangunan permukiman sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian dengan : Rehabilitasi bangunan hunian	Pendampingan dan layanan informasi standar bangunan rumah sehat dan layak huni	• Sosialisasi standar teknis • Penyuluhan rehabilitasi rumah sehat dan layak huni						DPUPR & Dinas Perkim-LH
			Rehabilitasi RTLH sebagai upaya peningkatan dan pengurangan kawasan kumuh	• Pendataan rehabilitasi RTLH						
				• Rehabilitasi penyediaan rumah layak huni						
Kualitas permukaan jalan lingkungan yang belum memadai	Pemugaran Peremajaan	• Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis 2. Peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan dengan melakukan Rehabilitasi jalan lingkungan/ perbaikan perkerasan jalan lingkungan • Peningkatan kapasitas jalan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar jalan lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar jalan lingkungan						DPUPR & Dinas Perkim-LH
			Peningkatan infrastruktur jalan lingkungan	• Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan lingkungan serta kelengkapannya						
				• Pelebaran badan jalan lingkungan						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		lingkungan dengan pelebaran badan jalan lingkungan								
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase dengan Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan • Penyuluhan perawatan dan pemeliharaan drainase						DPUPR & Dinas Perkim-LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan • Penambahan jaringan drainase yang belum tersambung						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Prasarana dan Sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 3. Penyediaan tong sampah 4. Penyediaan TPS	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan prasarana dan sarana sistem persampahan	• Peninglatan Pelayanan Persampahan						
				• Pembangunan TPS						
				• Penyediaan tong sampah						
				• Operasional dan pemeliharaan TPS						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran seperti Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarpras proteksi kebakaran; 4. Penyediaan hidran 5. Penyediaan APAR 6. Penyediaan moda pemadam kendaraan	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye Konsep kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Peningkatan kualitas jalan lingkungan • Pelebaran jalan lingkungan						
				• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Sumber: Hasil Rencana, 2025

Tabel 6.4
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Pulau Punjung

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Ketidakteraturan bangunan • Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	Pemugaran dan Peremajaan	• Meningkatkan kualitas bangunan permukiman sesuai dengan standar teknis • Rehabilitasi bangunan gedung hunian	Pendampingan dan layanan informasi standar bangunan rumah sehat dan layak huni	• Sosialisasi standar teknis • Penyuluhan rehab rumah sehat dan layak huni						DPUPR & Dinas Perkim-LH
			Rehabilitasi RTLH sebagai upaya peningkatan dan pengurangan kawasan kumuh	• Pendataan rehabilitasi RTLH						
				• Rehabilitasi penyediaan rumah layak huni						
Kualitas permukaan jalan lingkungan yang belum memadai	Pemugaran Peremajaan	• Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan melalui Rehabilitasi jalan lingkungan/ perbaikan perkerasan jalan lingkungan • Peningkatan kapasitas jalan lingkungan melalui Penambahan lebar badan jalan lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar jalan lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar jalan lingkungan						DPUPR
			Pengembangan infrastruktur jalan lingkungan	• Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan lingkungan serta kelengkapannya						
				• Pelebaran badan jalan lingkungan						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 1. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						DPUPR & Dinas Perkim-LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan • Penambahan jaringan drainase yang belum tersambung						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Sarpras Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan air limbah lingkungan sesuai dengan SPM • Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPALD-S; Pembangunan tangki septik individual dan komunal	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan air limbah	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar pengelolaan air limbah						Dinas Perkim-LH & DINAS KESEHATAN
			Pengembangan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah	• Pembangunan SPALD-S (tangki septik individual dan komunal)						
				• Operasional dan pemeliharaan SPALD-S						
Prasarana dan Sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						DPUPR & Dinas Perkim-LH

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 1. Penyediaan tong sampah 2. Penyediaan TPS	Pengembangan prasarana dan sarana sistem persampahan	• Penyediaan tong sampah						
				• Peningkata pelayanan Persampahan						
				• Pembangunan TPS						
				• Operasional dan pemeliharaan TPS						
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran sesuai dengan standar teknis • Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; 1. Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; 1. Penyediaan hidran 2. Penyediaan APAR 3. Penyediaan moda pemadam kendaraan	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DPUPR & DAMKAR/ BPBD
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Peningkatan kualitas jalan lingkungan • Pelebaran jalan lingkungan						
				• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.5
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Kualitas permukaan jalan lingkungan yang belum memadai	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan melalui Rehabilitasi jalan lingkungan/ perbaikan perkerasan jalan lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar jalan lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar jalan lingkungan						DPUPR & Dinas Perkim-LH
			Pengembangan infrastruktur jalan lingkungan	• Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan lingkungan dan kelengkapannya						
Tidak terakses air minum	Pemugaran	• Meningkatkan sistem penyediaan air minum bagi permukiman sesuai dengan SPM • Rehabilitasi jaringan air minum seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit pelayanan; • Perbaikan sistem jaringan pipa transmisi dan dsitribusi air yang tidak tersambung/rusak	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH & UPTD. Air Minum
			Peningkatan kualitas pelayanan air minum	• Rehabilitasi jaringan perpipaan upaya penurunan kebocoran						
				• Pemeliharaan berkala jaringan perpipaan						
				• Peningkatan pelayanan air minum						
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						DPUPR& PERKIM LH

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		pelayanan jaringan drainase melalui pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan • Penambahan jaringan drainase yang belum tersambung						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Sarpras Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan air limbah lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPALD-S; Pembangunan tangki septik individual dan komunal	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan air limbah	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar pengelolaan air limbah						Dinas Perkim-LH & DINAS KESEHATAN
			Pengembangan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah	• Pembangunan SPALD-S (tangki septik individual dan komunal)						
				• Operasional dan pemeliharaan SPALD-S						
Prasarana dan Sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Pemugaran dan Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Rehabilitasi sistem pengelolaan persampahan; 1. Penambahan armada motor sampah 2. Meningkatkan pelayanan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan	• Penambahan armada pengangkutan sampah • Peningkatan pengelolaan pelayanan						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		pengangkutan sampah • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 1. Penyediaan tong sampah 2. Penyediaan TPS		persampahan						
			Pengembangan prasarana dan sarana sistem persampahan	• Peningkatan Pelayanan Persampahan						
				• Pembangunan TPS						
				• Penyediaan tong sampah						
				• Operasional dan pemeliharaan TPS						
Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; 1. Penyediaan hidran 2. Penyediaan APAR 3. Penyediaan moda pemadam kendaraan	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
				• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.6
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Kubang Panjang

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 1. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						DPUPR& Dinas Perkim-LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan • Penambahan jaringan drainase yang belum tersambung						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
• Prasarana dan Sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis • Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 1. Penyediaan tong sampah 2. Penyediaan armada motor sampah 3. Pembangunan bank sampah	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						DPKP& Dinas Perkim-LH
			Pengembangan sarpras dan sistem pengelolaan persampahan	• Penyediaan pewadahan 3R • Penyediaan armada pengangkutan sampah						
				• Pembangunan bank sampah						
				• Operasional dan pemeliharaan TPS dan sistem pengelolaan persampahan						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Pemugaran dan Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Rehabilitasi prasarana proteksi kebakaran • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarpras proteksi kebakaran; 1. Penyediaan hidran 2. Penyediaan APAR 3. Penyediaan moda pemadam kendaraan	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Peningkatan kualitas jalan lingkungan	• Perbaikan komponen prasarana proteksi kebakaran						
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.7
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Tarandam Sungai Kambut

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Tidak terakses air minum • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	Pemugaran dan Peremajaan	• Meningkatkan sistem penyediaan air minum bagi permukiman sesuai dengan SPM • Rehabilitasi jaringan air minum seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit pelayanan melalui Perbaikan sistem jaringan perpipaan tidak tersambung/rusak	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH & UPTD. Air Minum
			Peningkatan kualitas pelayanan air minum	• Rehabilitasi jaringan perpipaan upaya penurunan kebocoran						
			Pengembangan jaringan air minum	• Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum • Penambahan pipa distribusi						
		• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum 1. Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung 2. Penambahan pipa distribusi untuk penambahan pelanggan		• Pemeliharaan berkala jaringan perpipaan						
				• Pengembangan kelembagaan sistem pelayanan air minum						
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						Dinas Perkim-LH

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		pelayanan jaringan drainase 1. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan • Penambahan jaringan drainase yang belum tersambung						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Sarpras Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai standar teknis	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan air limbah lingkungan sesuai dengan SPM 4. Rehabilitas unit pengelolaan air limbah dengan cara melakukan penggantian komponen pada komponen pemipaan dan SPAL-S : tangki septik atau komponen sejenisnya; 1. Melakukan perbaikan tangki septik 2. Meningkatkan sistem sarpras pengelolaan air limbah	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan air limbah	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar pengelolaan air limbah						Dinas Perkim-LH & DINAS KESEHATAN
			Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah	• Rehabilitas tangki septik						
				• Operasional dan pemeliharaan SPALD-S						
• Prasarana dan Sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis • Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan,	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan	• Penyediaan pewadahan						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		pengumpulan dan pengolahan; 1. Penyediaan tong sampah 2. Penyediaan armada motor sampah 3. Pembangunan bank sampah	sarpras dan sistem pengelolaan persampahan	3R • Penyediaan armada pengangkutan sampah						
				• Pembahasan lahan/tanah						
				• Pembangunan bank sampah						
				• Operasional dan pemeliharaan TPS dan sistem pengelolaan persampahan						
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; 1. Penyediaan hidran 2. Penyediaan APAR 3. Penyediaan moda pemadam kendaraan	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DPUPR&P BPBD
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Peningkaran komponen prasarana proteksi kebakaran						
				• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.8
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Lambau

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Ketidakteraturan bangunan • Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas bangunan permukiman sesuai dengan standar teknis 1. Rehabilitasi bangunan gedung hunian	Pendampingan dan layanan informasi standar bangunan rumah sehat dan layak huni	• Sosialisasi standar teknis • Penyuluhan rehab rumah sehat dan layak huni						Dinas Perkim-LH
			Rehabilitasi RTLH sebagai upaya peningkatan dan pengurangan kawasan kumuh	• Pendataan rehabilitasi RTLH						
				• Rehabilitasi penyediaan rumah layak huni						
Kualitas permukaan jalan lingkungan yang belum memadai	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan 1. Rehabilitasi jalan lingkungan/ perbaikan perkerasan jalan lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar jalan lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar jalan lingkungan						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan infrastruktur jalan lingkungan	• Rehabilitasi dan pemeliharan jalan lingkungan dan kelengkapannya						
• Tidak terakses air minum	Peremajaan	• Meningkatkan sistem penyediaan air minum bagi permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan jangkauan	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk						DPUPR & UPTD. Air Minum

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		pelayanan jaringan air minum 1. Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung 2. Penambahan pipa distribusi untuk penambahan pelanggan		kehidupan						
			Pengembangan jaringan air minum	• Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum • Penambahan pipa distribusi						
				• Pengembangan kelembagaan sistem pelayanan air minum						
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 1. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						PERKIM LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Sarpras Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai standar teknis	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan air limbah lingkungan sesuai dengan SPM • Rehabilitas unit pengelolaan air limbah dengan cara melakukan penggantian komponen pada komponen pemipaan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan air limbah	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar pengelolaan air limbah						Dinas Perkim-LH & DINAS KESEHATAN
			Peningkatan sarana dan prasarana	• Rehabilitas tangki septik						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		dan SPAL-S : tangki septik atau komponen sejenisnya; 1. Melakukan perbaikan tangki septik 2. Meningkatkan sistem sarpras pengelolaan air limbah	pengelolaan air limbah	• Operasional dan pemeliharaan SPALD-S						
• Prasarana dan Sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis • Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Pemugaran dan Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Rehabilitasi sistem pengelolaan persampahan 1. Penambahan armada motor sampah 2. Meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 1. Penyediaan tong sampah 2. Penyediaan TPS	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan	• Penambahan armada pengangkutan sampah • Peningkatan pengelolaan pelayanan persampahan						
			Pengembangan sarpras dan sistem pengelolaan persampahan	• Penyediaan pewadahan 3R • Penyediaan armada pengangkutan sampah						
				• Pembangunan bank sampah						
				• Pembangunan atau pengadaan TPS						
				• Operasional, pemeliharaan TPS dan sistem pengelolaan persamapah						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Pemugaran dan Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Rehabilitasi prasarana proteksi kebakaran 1. Meningkatkan kualitas jalan lingkungan 3,5 meter dengan cara perbaikan • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarpras proteksi kebakaran; 1. Penyediaan hidran 2. Penyediaan APAR 3. Penyediaan moda pemadam kendaraan	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Peningkatan kualitas jalan lingkungan	• Rehabilitas jalan lingkungan upaya peningkatan prasarana proteksi kebakaran						
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.9
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Sungai Kilangan

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan`					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Kualitas permukaan jalan lingkungan yang belum memadai	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan 1. Rehabilitasi jalan lingkungan/ Pperbaikan perkerasan jalan lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar jalan lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar jalan lingkungan						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan infrastruktur jalan lingkungan	• Rehabilitasi dan pemeliharan jalan lingkungan dan kelengkapannya						
• Tidak terakses air minum	Peremajaan	• Meningkatkan sistem penyediaan air minum bagi permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum 1. Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung 2. Penambahan pipa distribusi untuk penambahan pelanggan	• Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH, & UPTD. Air Minum
			• Pengembangan jaringan air minum • Pengembangan kelembagaan sistem pelayanan air minum	• Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum • Penambahan jaringan pipa distribusi						
				• Peningkatan pelayanan air minum						
Ketidaktersediaan Drainase	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis	Pendampingan dan layanan informasi	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						Dinas Perkim-LH

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan`					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Lingkungan		• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 1. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	tentang standar drainase lingkungan							
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
• Prasarana dan Sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis • Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Pemugaran dan Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; 1. Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 1. Penyediaan tong sampah 2. Penyediaan TPS	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan	• Penambahan armada pengangkutan sampah • Peningkatan pengelolaan pelayanan persampahan						
			Pengembangan sarpras dan sistem pengelolaan persampahan	• Penyediaan pewadahan 3R • Penyediaan armada pengangkutan sampah						
				• Pembangunan bank sampah						
				• Pembangunan atau penyediaan TPS						
				• Operasional, pemeliharaan TPS dan sistem pengelolaan persampahan						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan`					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Pemugaran dan Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Rehabilitasi prasarana proteksi kebakaran 1. Meningkatkan kualitas jalan lingkungan 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarpras proteksi kebakaran; 1. Penyediaan hidran 2. Penyediaan APAR 3. Penyediaan moda pemadam kendaraan	• Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			• Peningkatan kualitas jalan lingkungan	• Rehabilitas jalan lingkungan upaya peningkatan prasarana proteksi kebakaran						
			• Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.10
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Sungai Dareh

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Ketidakteraturan bangunan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas bangunan permukiman sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian 1. Rehabilitasi bangunan hunian	Pendampingan dan layanan informasi standar bangunan rumah sehat dan layak huni	• Sosialisasi standar teknis • Penyuluhan rehab rumah sehat dan layak huni						Dinas Perkim-LH
			Rehabilitasi RTLH sebagai upaya peningkatan dan pengurangan kawasan kumuh	• Pendataan rehabilitasi RTLH						
				• Rehabilitasi upaya penyediaan rumah layak huni						
Tidak terakses air minum	Peremajaan	• Meningkatkan sistem penyediaan air minum bagi permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum 1. Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung 2. Penambahan pipa distribusi untuk penambahan pelanggan	• Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH, & UPTD. Air Minum
			• Pengembangan jaringan air minum • Pengembangan kelembagaan sistem pelayanan air minum	• Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum • Penambahan jaringan pipa distribusi						
				• Peningkatan Pelayanan Air Minum						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 1. Penyediaan tong sampah 2. Penyediaan armada motor sampah 3. Pembangunan bank sampah	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan prasarana dan sarana sistem persampahan	• Penyediaan pewadahan 3R • Penyediaan armada pengangkutan sampah						
				• Pembanguan bank sampah						
				• Operasional, pemeliharaan bank sampah dan sistem pengelolaan persampahan						
• Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan komponen prasarana proteksi kebakaran sepertti penambahan parsarana proteksi kebakaran • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Peningkatan komponen prasarana proteksi kebakaran						
				• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		proteksi kebakaran; 1. Penyediaan hidran 2. Penyediaan APAR 3. Penyediaan moda pemadam kendaraan		kebakaran						

Tabel 6.11
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Sikabau

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Ketidakteraturan bangunan	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas bangunan permukiman sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian 1. Rehabilitasi bangunan hunian	Pendampingan dan layanan informasi standar bangunan rumah sehat dan layak huni	• Sosialisasi standar teknis • Penyuluhan rehab rumah sehat dan layak huni						Dinas Perkim-LH
			Rehabilitasi RTLH sebagai upaya peningkatan dan pengurangan kawasan kumuh	• Pendataan rehabilitasi RTLH						
				• Rehabilitasi upaya penyediaan rumah layak huni						
Kualitas permukaan jalan lingkungan yang belum memadai	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan 1. Rehabilitasi jalan lingkungan/ perbaikan perkerasan jalan lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar jalan lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar jalan lingkungan						Dinas Perkim-LH
			• Pengembangan infrastruktur jalan lingkungan	• Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan lingkungan dan kelengkapannya						
Ketidaktersediaan Drainase	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai	• Pendampingan dan layanan informasi tentang standar	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar						Dinas Perkim-LH

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Lingkungan		dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 1. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	drainase lingkungan	drainase lingkungan						
			• Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
• Prasarana dan Sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis • Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 1. Penyediaan tong sampah 2. Penyediaan armada motor sampah 3. Pembangunan bank sampah	• Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			• Pengembangan sarpras dan sistem pengelolaan persampahan	• Penyediaan pewadahan 3R • Penyediaan armada pengangkutan sampah						
				• Pembangunan bank sampah						
				• Operasional, pemeliharaan bank sampah dan sistem pengelolaan persampahan						
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan standar teknis • Rehabilitasi prasarana	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		proteksi kebakaran; 1. Meningkatkan kualitas jalan lingkungan 3,5 meter seperti rehabilitasi • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; 1. Penyediaan hidran 2. Penyediaan APAR 3. Penyediaan moda pemadam kendaraan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	• Rehabilitas jalan lingkungan upaya peningkatan prasarana proteksi kebakaran						
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Peningkaran kualitas jalan lingkungan						
				• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran	`					

Tabel 6.12
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Siguntur 1

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Tidak terakses air minum	Peremajaan	• Meningkatkan sistem penyediaan air minum bagi permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum 1. Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung 2. Penambahan pipa distribusi untuk penambahan pelanggan	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH, & UPTD. Air Minum
			• Pengembangan jaringan air minum • Pengembangan kelembagaan sistem pelayanan air minum	• Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum • Penambahanjaringan pipa distribusi						
				• Peningkatan Pelayanan Air Minum						
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 1. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Prasarana dan Sarana persampahan yang	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan						Dinas Perkim-LH

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
tidak sesuai standar teknis		• unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 1. Penyediaan tong sampah 2. Penyediaan TPS	pengelolaan persampahan	3R						
				• Pembangunan TPS						
				• Penyediaan tong samnpah						
				• Operasional, pemeliharaan TPS dan sistem pengelolaan persampahan						
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Pemugaran dan Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Rehabilitasi prasarana proteksi kebakaran • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarpras proteksi kebakaran; 1. Penyediaan hidran 2. Penyediaan APAR 3. Penyediaan moda pemadam kendaraan	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR BPBD
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Peningkatan komponen proteksi kebakaran						
				• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.13
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Siguntur 2

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Tidak terakses air minum	Peremajaan	• Meningkatkan sistem penyediaan air minum bagi permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum 1. Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung 2. Penambahan pipa distribusi untuk penambahan pelanggan reservoir/instansi pengolahan air	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH, & UPTD. Air Minum
			• Pengembangan jaringan air minum • Pengembangan kelembagaan sistenm pelayanan air minum	• Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum • Penambahan jarigan pipa distribusi						
				• Peningkatan pelayanan air minum						
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 1. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
• Prasarana dan Sarana persampahan yang tidak sesuai	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank						Dinas Perkim-LH

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
standar teknis • Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis		dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 1. Penyediaan tong sampah 2. Penyediaan armada motor sampah 3. Pembangunan bank sampah	pengelolaan persampahan	sampah dan pengelolaan 3R						
			Pengembangan sarpras dan sistem pengelolaan persampahan	• Penyediaan pewadahan 3R • Penyediaan armada pengangkutan sampah						
				• Pembangunan bank sampah • Penambahan Tong Sampah						
				• Operasional, pemeliharaan bank sampah dan sistem pengelolaan persampahan						
Ketidaktersediaan sarpras proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; 1. Penyediaan hidran 2. Penyediaan APAR 3. Penyediaan moda pemadam kendaraan	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.14
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Koto Daulat

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas bangunan permukiman sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian 1. Rehabilitasi bangunan hunian	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH
			Rehabilitasi RTLH sebagai upaya peningkatan dan pengurangan kawasan kumuh	• Pendataan rehabilitasi RTLH						
				• Rehabilitasi upaya penyediaan rumah layak huni						
Kualitas permukaan jalan lingkungan yang belum memadai	Pemugaran Peremajaan	• Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan 1. Rehabilitasi jalan lingkungan/ perbaikan perkerasan jalan lingkungan • Peningkatan kapasitas jalan lingkungan 1. Penambahan lajur atau pelebaran badan jalan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar jalan lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar jalan lingkungan						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan infrastruktur jalan lingkungan	• Rehabilitasi, pemeliharaan jalan lingkungan dan kelengkapannya • Pelebaran badan jalan lingkungan						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		lingkungan								
• Tidak terakses air minum	Peremajaan	• Meningkatkan sistem penyediaan air minum bagi permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum 1. Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung 2. Penambahan pipa distribusi untuk penambahan pelanggan	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH, & UPTD. Air Minum
			• Pengembangan jaringan air minum • Pengembangan kelembagaan sistem pelayanan air minum	• Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum • Penambahan jaringan pipa distrbusi						
				• Peningkatan sistem pelayanan air minum						
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 1. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 1. Penyediaan tong sampah 2. Penyediaan armada motor sampah 3. Pembangunan bank sampah	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan sarpras dan sistem pengelolaan persampahan	• Penyediaan pewadahan 3R • Penyediaan armada pengangkutan sampah						
				• Pembangunan bank sampah • Penambahan Tong Sampah						
				• Operasional, pemeliharaan bank sampah dan sistem pengelolaan persampahan						
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan standar teknis • Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; 1. Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Peningkaran kualitas jalan lingkungan						
				• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; 1. Penyediaan hidran 2. Penyediaan APAR 3. Penyediaan moda pemadam kendaraan		dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.15

Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Koto

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Ketidakteraturan bangunan	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas bangunan permukiman sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian 1. Rehabilitasi bangunan hunian	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH
			Rehabilitasi RTLH sebagai upaya peningkatan dan pengurangan kawasan kumuh	• Pendataan rehabilitasi RTLH						
				• Rehabilitasi upaya penyediaan rumah layak huni						
Tidak terakses air minum	Peremajaan	• Meningkatkan sistem penyediaan air minum bagi permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum 1. Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH, & UPTD. Air Minum
			• Pengembangan jaringan air minum • Pengembangan kelembagaan sistem pelayanan air minum	• Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum • Pembangunan resevoir						
				• Peningkatan Pelayanan Air Minum						
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						Dinas Perkim-LH

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 1. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	drainase lingkungan							
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Sarpras Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan air limbah lingkungan sesuai dengan SPM • Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPALD-S; 1. Pembangunan tangki septik individual dan komunal	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan air limbah	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar pengelolaan air limbah						Dinas Perkim-LH & DINAS KESEHATAN
			Pengembangan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah	• Pembangunan SPALD-S (tangki septik individual dan komunal)						
				• Operasional dan pemeliharaan SPALD-S						
Prasarana dan Sarana Persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan,	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan	• Penyediaan tong sampah						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		pengumpulan dan pengolahan; 1. Penyediaan tong sampah 2. Penyediaan TPS	prasarana dan sarana sistem persampahan	• Pembangunan atau penyediaan TPS						
				• Operasional dan pemeliharaan TPS						
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Rehabilitasi komponen prasarana proteksi kebakaran • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarpras proteksi kebakaran; 1. Penyediaan hidran 2. Penyediaan APAR 3. Penyediaan moda kendaraan pemadam	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Penyediaan komponen prasarana proteksi kebakaran						
				• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.16
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Marga Makmur

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Ketidakteraturan bangunan	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas bangunan permukiman sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian 1. Rehabilitasi bangunan hunian	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH
			Rehabilitasi RTLH sebagai upaya peningkatan dan pengurangan kawasan kumuh	• Pendataan rehabilitasi RTLH						
				• Rehabilitasi upaya penyediaan rumah layak huni						
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 1. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan jaringan air minum	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Prasaran dan Sarana Persampahan tidak sesuai dengan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank						Dinas Perkim-LH

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
persyaratan teknis		dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 1. Penyediaan tong sampah 2. Penyediaan TPS	pengelolaan persampahan	sampah dan pengelolaan 3R						
			Pengembangan prasarana dan sarana sistem persampahan	• Penyediaan tong sampah						
				• Operasional, dan pemeliharaan TPS						
				• Pemeliharaan berkala sistem sarpras persampahan						
Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; 1. Penyediaan hidran 2. Penyediaan APAR 3. Penyediaan moda kendaraan pemadam kebakaran	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Penyediaan sarana proteksi kebakaran	• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.17
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Sungai Bulian

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Kualitas permukaan jalan lingkungan yang belum memadai	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan 1. Rehabilitasi jalan/ perbaikan perkerasan jalan lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH
			Rehabilitasi RTLH sebagai upaya peningkatan dan pengurangan kawasan kumuh	• Pendataan rehabilitasi RTLH						
				• Rehabilitasi upaya penyediaan rumah layak huni						
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 1. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Sarpras Persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 1. Penyediaan tong sampah 2. Penyediaan TPS	Pengembangan sarpras dan sistem pengelolaan persampahan	• Penyediaan tong sampah						
				• Pembangunna /Penyediaan TPS						
				• Operasional, dan pemeliharaan TPS						
Ketidaktersediaan sarpras proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; 1. Penyediaan hidran 2. Penyediaan APAR 3. Penyediaan moda kendaraan pemadam kebakaran	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Penyediaan sarana proteksi kebakaran	• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.18
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Koto Padang

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase; 1.Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai standar teknis	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan air limbah lingkungan sesuai dengan SPM • Rehabilitas unit pengelolaan air limbah dengan cara melakukan penggantian komponen pada komponen pemipaan dan SPALD-S : tangki septik atau komponen sejenisnya; 1. Melakukan perbaikan tangki septik 2. Meningkatkan sis-tem sarpras penge-lolaan air limbah	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan air limbah	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar pengelolaan air limbah						Dinas Perkim-LH & DINAS KESEHATAN
			Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah	• Rehabilitas tangki septik						
				• Operasional dan pemeliharaan SPALD-S						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Prasarana dan sarana Persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 1. Penyediaan tong sampah 2. Penyediaan TPS	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan prasarana dan sarana sistem persampahan	• Penyediaan tong sampah						
				• Pembangunan atau Penyediaan TPS						
				• Operasional, dan pemeliharaan TPS						
Ketidaksediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; 1. Penyediaan hidran 2. Penyediaan APAR 3. Penyediaan moda kendaraan pemadam kebakaran	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.19
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Koto Baru

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Ketidakteraturan bangunan • Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas bangunan permukiman sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian dengan : Rehabilitasi bangunan hunian	Pendampingan dan layanan informasi standar bangunan rumah sehat dan layak huni	• Sosialisasi standar teknis • Penyuluhan rehabilitasi rumah sehat dan layak huni						DPUPR & Dinas Perkim-LH
			Rehabilitasi RTLH sebagai upaya peningkatan dan pengurangan kawasan kumuh	• Pendataan rehabilitasi RTLH						
				• Rehabilitasi penyediaan rumah layak huni						
Kualitas permukaan jalan lingkungan yang belum memadai	Pemugaran Peremajaan	• Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis 3. Peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan dengan melakukan Rehabilitasi jalan lingkungan/ perbaikan perkerasan jalan lingkungan • Peningkatan kapasitas jalan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar jalan lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar jalan lingkungan						DPUPR & Dinas Perkim-LH
			Peningkatan infrastruktur jalan lingkungan	• Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan lingkungan serta kelengkapannya						
				• Pelebaran badan jalan lingkungan						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		lingkungan dengan pelebaran badan jalan lingkungan								
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase dengan Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan • Penyuluhan perawatan dan pemeliharaan drainase						DPUPR & Dinas Perkim-LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan • Penambahan jaringan drainase yang belum tersambung						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Prasarana dan Sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan;	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan prasarana dan sarana sistem persampahan	• Peninglatan Pelayanan Persampahan						
				• Pembangunan TPS						
				• Penyediaan tong sampah						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		5. Penyediaan tong sampah 6. Penyediaan TPS		• Operasional dan pemeliharaan TPS						
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran seperti Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarpras proteksi kebakaran; 7. Penyediaan hidran 8. Penyediaan APAR 9. Penyediaan moda pemadam kendaraan	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye Konsep kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Peningkatan kualitas jalan lingkungan • Pelebaran jalan lingkungan						
				• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.20
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Pasar Koto Baru

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Ketidakteraturan bangunan • Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	Pemugaran dan Peremajaan	• Meningkatkan kualitas bangunan permukiman sesuai dengan standar teknis • Rehabilitasi bangunan gedung hunian	Pendampingan dan layanan informasi standar bangunan rumah sehat dan layak huni	• Sosialisasi standar teknis • Penyuluhan rehab rumah sehat dan layak huni						DPUPR & Dinas Perkim-LH
			Rehabilitasi RTLH sebagai upaya peningkatan dan pengurangan kawasan kumuh	• Pendataan rehabilitasi RTLH						
				• Rehabilitasi penyediaan rumah layak huni						
Kualitas permukaan jalan lingkungan yang belum memadai	Pemugaran Peremajaan	• Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan melalui Rehabilitasi jalan lingkungan/ perbaikan perkerasan jalan lingkungan • Peningkatan kappa-sitas jalan lingkungan melalui Penambahan lebar badan jalan lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar jalan lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar jalan lingkungan						DPUPR
			Pengembangan infrastruktur jalan lingkungan	• Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan lingkungan serta kelengkapannya						
				• Pelebaran badan jalan lingkungan						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 1. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						DPUPR & Dinas Perkim-LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan • Penambahan jaringan drainase yang belum tersambung						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Sarpras Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan air limbah lingkungan sesuai dengan SPM • Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPALD-S; Pembangunan tangki septik individual dan komunal	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan air limbah	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar pengelolaan air limbah						Dinas Perkim-LH & DINAS KESEHATAN
			Pengembangan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah	• Pembangunan SPALD-S (tangki septik individual dan komunal)						
				• Operasional dan pemeliharaan SPALD-S						
Prasarana dan Sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						DPUPR & Dinas Perkim-LH

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 3. Penyediaan tong sampah 4. Penyediaan TPS	Pengembangan prasarana dan sarana sistem persampahan	• Penyediaan tong sampah						
				• Peningkata pelayanan Persampahan						
				• Pembangunan TPS						
				• Operasional dan pemeliharaan TPS						
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran sesuai dengan standar teknis • Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; 2. Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; 4. Penyediaan hidran 5. Penyediaan APAR 6. Penyediaan moda pemadam kendaraan	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DPUPR & DAMKAR/ BPBD
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Peningkatan kualitas jalan lingkungan • Pelebaran jalan lingkungan						
				• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.21
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Koto Baru 3

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Kualitas permukaan jalan lingkungan yang belum memadai	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan melalui Rehabilitasi jalan lingkungan/ perbaikan perkerasan jalan lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar jalan lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar jalan lingkungan						DPUPR & Dinas Perkim-LH
			Pengembangan infrastruktur jalan lingkungan	• Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan lingkungan dan kelengkapannya						
Tidak terakses air minum	Pemugaran	• Meningkatkan sistem penyediaan air minum bagi permukiman sesuai dengan SPM • Rehabilitasi jaringan air minum seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit pelayanan; • Perbaikan sistem jaringan pipa transmisi dan dsitribusi air yang tidak tersambung/rusak	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH & UPTD. Air Minum
			Peningkatan kualitas pelayanan air minum	• Rehabilitasi jaringan perpipaan upaya penurunan kebocoran						
				• Pemeliharaan berkala jaringan perpipaan						
				• Peningkatan pelayanan air minum						
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						DPUPR& PERKIM LH

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase melalui pembangunan jaringan drainase lingkungan	drainase lingkungan							
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan • Penambahan jaringan drainase yang belum tersambung						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Sarpras Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan air limbah lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPALD-S; Pembangunan tangki septik individual dan komunal	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan air limbah	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar pengelolaan air limbah						Dinas Perkim-LH & DINAS KESEHATAN
			Pengembangan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah	• Pembangunan SPALD-S (tangki septik individual dan komunal)						
				• Operasional dan pemeliharaan SPALD-S						
Prasarana dan Sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Pemugaran dan Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Rehabilitasi sistem pengelolaan persampahan;	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		3. Penambahan armada motor sampah 4. Meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 3. Penyediaan tong sampah 4. Penyediaan TPS	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan	• Penambahan armada pengangkutan sampah • Peningkatan pengelolaan pelayanan persampahan						
			Pengembangan prasarana dan sarana sistem persampahan	• Peningkatan Pelayanan Persampahan						
				• Pembangunan TPS						
				• Penyediaan tong sampah						
				• Operasional dan pemeliharaan TPS						
Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; 5. Penyediaan hidran 6. Penyediaan APAR 7. Penyediaan moda pemadam kendaraan	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
				• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.22
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Ampang Kuranji

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 1. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						DPUPR& Dinas Perkim-LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan • Penambahan jaringan drainase yang belum tersambung						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
• Prasarana dan Sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis • Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 4. Penyediaan tong sampah 5. Penyediaan armada motor sampah 6. Pembangunan bank sampah	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						DPKP& Dinas Perkim-LH
			Pengembangan sarpras dan sistem pengelolaan persampahan	• Penyediaan pewadahan 3R • Penyediaan armada pengangkutan sampah						
				• Pembangunan bank sampah						
				• Operasional dan pemeliharaan TPS dan sistem pengelolaan						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
				persampahan						
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Pemugaran dan Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Rehabilitasi prasarana proteksi kebakaran • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarpras proteksi kebakaran; 4. Penyediaan hidran 5. Penyediaan APAR 6. Penyediaan moda pemadam kendaraan	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Peningkatan kualitas jalan lingkungan	• Perbaikan komponen prasarana proteksi kebakaran						
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.23
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Lubuk Agam

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Tidak terakses air minum • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	Pemugaran dan Peremajaan	• Meningkatkan sistem penyediaan air minum bagi permukiman sesuai dengan SPM • Rehabilitasi jaringan air minum seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit pelayanan melalui Perbaikan sistem jaringan perpipaan tidak tersambung/rusak	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH & UPTD. Air Minum
			Peningkatan kualitas pelayanan air minum	• Rehabilitasi jaringan perpipaan upaya penurunan kebocoran						
			Pengembangan jaringan air minum	• Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum • Penambahan pipa distribusi						
		• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum 3. Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung 4. Penambahan pipa distribusi untuk penambahan pelanggan		• Pemeliharaan berkala jaringan perpipaan						
				• Pengembangan kelembagaan sistem pelayanan air minum						
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						Dinas Perkim-LH

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		pelayanan jaringan drainase 1. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan • Penambahan jaringan drainase yang belum tersambung						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Sarpras Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai standar teknis	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan air limbah lingkungan sesuai dengan SPM 8. Rehabilitas unit pengelolaan air limbah dengan cara melakukan penggantian komponen pada komponen pemipaan dan SPAL-S : tangki septik atau komponen sejenisnya; 3. Melakukan perbaikan tangki septik 4. Meningkatkan sistem sarpras pengelolaan air limbah	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan air limbah	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar pengelolaan air limbah						Dinas Perkim-LH & DINAS KESEHATAN
			Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah	• Rehabilitas tangki septik						
				• Operasional dan pemeliharaan SPALD-S						
• Prasarana dan Sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis • Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan,	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan	• Penyediaan pewadahan						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		pengumpulan dan pengolahan; 4. Penyediaan tong sampah 5. Penyediaan armada motor sampah 6. Pembangunan bank sampah	sarpras dan sistem pengelolaan persampahan	3R • Penyediaan armada pengangkutan sampah						
				• Pembahasan lahan/tanah						
				• Pembangunan bank sampah						
				• Operasional dan pemeliharaan TPS dan sistem pengelolaan persampahan						
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; 4. Penyediaan hidran 5. Penyediaan APAR 6. Penyediaan moda pemadam kendaraan	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DPUPR&P BPBD
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Peningkaran komponen prasarana proteksi kebakaran						
				• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.24
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Teluk Alai

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Ketidakteraturan bangunan • Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas bangunan permukiman sesuai dengan standar teknis 2. Rehabilitasi bangunan gedung hunian	Pendampingan dan layanan informasi standar bangunan rumah sehat dan layak huni	• Sosialisasi standar teknis • Penyuluhan rehab rumah sehat dan layak huni						Dinas Perkim-LH
			Rehabilitasi RTLH sebagai upaya peningkatan dan pengurangan kawasan kumuh	• Pendataan rehabilitasi RTLH						
				• Rehabilitasi penyediaan rumah layak huni						
Kualitas permukaan jalan lingkungan yang belum memadai	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan 2. Rehabilitasi jalan lingkungan/ perbaikan perkerasan jalan lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar jalan lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar jalan lingkungan						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan infrastruktur jalan lingkungan	• Rehabilitasi dan pemeliharan jalan lingkungan dan kelengkapannya						
• Tidak terakses air minum	Peremajaan	• Meningkatkan sistem penyediaan air minum bagi permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan jangkauan	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk						DPUPR & UPTD. Air Minum

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		pelayanan jaringan air minum 3. Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung 4. Penambahan pipa distribusi untuk penambahan pelanggan		kehidupan						
			Pengembangan jaringan air minum	• Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum • Penambahan pipa distribusi						
				• Pengembangan kelembagaan sistem pelayanan air minum						
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 2. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						PERKIM LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Sarpras Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai standar teknis	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan air limbah lingkungan sesuai dengan SPM • Rehabilitas unit pengelolaan air limbah dengan cara melakukan penggantian komponen pada komponen pemipaan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan air limbah	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar pengelolaan air limbah						Dinas Perkim-LH & DINAS KESEHATAN
			Peningkatan sarana dan prasarana	• Rehabilitas tangki septik						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		dan SPAL-S : tangki septik atau komponen sejenisnya; 3. Melakukan perbaikan tangki septik 4. Meningkatkan sistem sarpras pengelolaan air limbah	pengelolaan air limbah	• Operasional dan pemeliharaan SPALD-S						
• Prasarana dan Sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis • Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Pemugaran dan Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Rehabilitasi sistem pengelolaan persampahan 3. Penambahan armada motor sampah 4. Meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 3. Penyediaan tong sampah 4. Penyediaan TPS	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan	• Penambahan armada pengangkutan sampah • Peningkatan pengelolaan pelayanan persampahan						
			Pengembangan sarpras dan sistem pengelolaan persampahan	• Penyediaan pewadahan 3R • Penyediaan armada pengangkutan sampah						
				• Pembangunan bank sampah						
				• Pembangunan atau pengadaan TPS						
				• Operasional, pemeliharaan TPS dan sistem pengelolaan persamapah						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Pemugaran dan Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Rehabilitasi prasarana proteksi kebakaran 2. Meningkatkan kualitas jalan lingkungan 3,5 meter dengan cara perbaikan • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarpras proteksi kebakaran; 4. Penyediaan hidran 5. Penyediaan APAR 6. Penyediaan moda pemadam kendaraan	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Peningkatan kualitas jalan lingkungan	• Rehabilitas jalan lingkungan upaya peningkatan prasarana proteksi kebakaran						
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.25
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Padukuan

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan`					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Kualitas permukaan jalan lingkungan yang belum memadai	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan 2. Rehabilitasi jalan lingkungan/ Pperbaikan perkerasan jalan lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar jalan lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar jalan lingkungan						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan infrastruktur jalan lingkungan	• Rehabilitasi dan pemeliharan jalan lingkungan dan kelengkapannya						
• Tidak terakses air minum	Peremajaan	• Meningkatkan sistem penyediaan air minum bagi permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum 3. Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung 4. Penambahan pipa distribusi untuk penambahan pelanggan	• Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH, & UPTD. Air Minum
			• Pengembangan jaringan air minum • Pengembangan kelembagaan sistem pelayanan air minum	• Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum • Penambahan jaringan pipa distribusi						
				• Peningkatan pelayanan air minum						
Ketidaktersediaan Drainase	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis	Pendampingan dan layanan informasi	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						Dinas Perkim-LH

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan`					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Lingkungan		• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 2. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	tentang standar drainase lingkungan							
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
• Prasarana dan Sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis • Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Pemugaran dan Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; 2. Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 3. Penyediaan tong sampah 4. Penyediaan TPS	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan	• Penambahan armada pengangkutan sampah • Peningkatan pengelolaan pelayanan persampahan						
			Pengembangan sarpras dan sistem pengelolaan persampahan	• Penyediaan pewadahan 3R • Penyediaan armada pengangkutan sampah						
				• Pembangunan bank sampah						
				• Pembangunan atau penyediaan TPS						
				• Operasional, pemeliharaan TPS dan sistem pengelolaan persampahan						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan`					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Pemugaran dan Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Rehabilitasi prasarana proteksi kebakaran 2. Meningkatkan kualitas jalan lingkungan 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarpras proteksi kebakaran; 4. Penyediaan hidran 5. Penyediaan APAR 6. Penyediaan moda pemadam kendaraan	• Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			• Peningkatan kualitas jalan lingkungan	• Rehabilitas jalan lingkungan upaya peningkatan prasarana proteksi kebakaran						
			• Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.26
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Sungai Langkok

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Ketidakteraturan bangunan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas bangunan permukiman sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian 2. Rehabilitasi bangunan hunian	Pendampingan dan layanan informasi standar bangunan rumah sehat dan layak huni	• Sosialisasi standar teknis • Penyuluhan rehab rumah sehat dan layak huni						Dinas Perkim-LH
			Rehabilitasi RTLH sebagai upaya peningkatan dan pengurangan kawasan kumuh	• Pendataan rehabilitasi RTLH						
				• Rehabilitasi upaya penyediaan rumah layak huni						
Tidak terakses air minum	Peremajaan	• Meningkatkan sistem penyediaan air minum bagi permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum 3. Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung 4. Penambahan pipa distribusi untuk penambahan pelanggan	• Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH, & UPTD. Air Minum
			• Pengembangan jaringan air minum • Pengembangan kelembagaan sistem pelayanan air minum	• Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum • Penambahan jaringan pipa distribusi						
				• Peningkatan Pelayanan Air Minum						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 4. Penyediaan tong sampah 5. Penyediaan armada motor sampah 6. Pembangunan bank sampah	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan prasarana dan sarana sistem persampahan	• Penyediaan pewadahan 3R • Penyediaan armada pengangkutan sampah						
				• Pembanguan bank sampah						
				• Operasional, pemeliharaan bank sampah dan sistem pengelolaan persampahan						
• Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan komponen prasarana proteksi kebakaran sepertti penambahan parsarana proteksi kebakaran • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Peningkatan komponen prasarana proteksi kebakaran						
				• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		proteksi kebakaran; 4. Penyediaan hidran 5. Penyediaan APAR 6. Penyediaan moda pemadam kendaraan		kebakaran						

Tabel 6.27
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Sipangkur

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Ketidakteraturan bangunan	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas bangunan permukiman sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian 2. Rehabilitasi bangunan hunian	Pendampingan dan layanan informasi standar bangunan rumah sehat dan layak huni	• Sosialisasi standar teknis • Penyuluhan rehab rumah sehat dan layak huni						Dinas Perkim-LH
			Rehabilitasi RTLH sebagai upaya peningkatan dan pengurangan kawasan kumuh	• Pendataan rehabilitasi RTLH						
				• Rehabilitasi upaya penyediaan rumah layak huni						
Kualitas permukaan jalan lingkungan yang belum	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai dengan standar	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar jalan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar jalan lingkungan						Dinas Perkim-LH

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
memadai		teknis • Peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan 2. Rehabilitasi jalan lingkungan/ perbaikan perkerasan jalan lingkungan	lingkungan							
			• Pengembangan infrastruktur jalan lingkungan	• Rehabilitasi dan pemeliharan jalan lingkungan dan kelengkapannya						
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 2. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	• Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						Dinas Perkim-LH
			• Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
• Prasarana dan Sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis • Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong sampah • Penyediaan armada	• Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			• Pengembangan sarpras dan sistem pengelolaan persampahan	• Penyediaan pewadahan 3R • Penyediaan armada pengangkutan sampah						
				• Pembangunan bank sampah						
				• Operasional, pemeliharaan bank sampah dan sistem						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		• motor sampah • Pembangunan bank sampah		pengelolaan persampahan						
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan standar teknis • Rehabilitasi prasarana proteksi kebakaran; • Meningkatkan kualitas jalan lingkungan 3,5 meter seperti rehabilitasi • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR • Penyediaan moda pemadam kendaraan	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Peningkatan kualitas jalan lingkungan	• Rehabilitas jalan lingkungan upaya peningkatan prasarana proteksi kebakaran						
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Peningkaran kualitas jalan lingkungan						
				• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran	`					

Tabel 6.28
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Sopan Jaya

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Tidak terakses air minum	Peremajaan	• Meningkatkan sistem penyediaan air minum bagi permukiman	Pendampingan dan layanan informasi	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang						Dinas Perkim-LH, &

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		sesuai dengan SPM • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum • Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung;Penambahan pipa distribusi untuk penambahan pelanggan	tentang air minum	pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						UPTD. Air Minum
			• Pengembangan jaringan air minum • Pengembangan kelembagaan sistem pelayanan air minum	• Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum • Penambahanjaringan pipa distribusi						
				• Peningkatan Pelayanan Air Minum						
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 2. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Prasarana dan Sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewa-dahan, pengumpulan dan pengolahan;	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
				• Pembangunan TPS						
				• Penyediaan tong samnpah						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		• Penyediaan tong sampah • Penyediaan TPS		• Operasional, pemeliharaan TPS dan sistem pengelolaan persampahan						
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Pemugaran dan Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Rehabilitasi prasarana proteksi kebakaran • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarpras proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR • Penyediaan moda pemadam kendaraan	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR BPBD
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Peningkatan komponen proteksi kebakaran						
				• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.29
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Balai Tengah

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Tidak terakses air minum	Peremajaan	• Meningkatkan sistem penyediaan air minum bagi permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan jangkauan pelayanan	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH, & UPTD. Air Minum

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		jaringan air minum 3. Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung 4. Penambahan pipa distribusi untuk penambahan pelanggan reservoir/instansi pengolahan air	• Pengembangan jaringan air minum • Pengembangan kelembagaan sistenm pelayanan air minum	• Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum • Penambahan jarigan pipa distribusi						
				• Peningkatan pelayanan air minum						
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 2. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
• Prasarana dan Sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis • Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan;	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan sarpras dan sistem pengelolaan persampahan	• Penyediaan pewadahan 3R • Penyediaan armada pengangkutan sampah						
				• Pembangunan bank sampah • Penambahan Tong						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		4. Penyediaan tong sampah 5. Penyediaan armada motor sampah 6. Pembangunan bank sampah		Sampah						
				• Operasional, pemeliharaan bank sampah dan sistem pengelolaan persampahan						
Ketidaktersediaan sarpras proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; 4. Penyediaan hidran 5. Penyediaan APAR 6. Penyediaan moda pemadam kendaraan	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.30

Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Tuo

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
• Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas bangunan permukiman sesuai	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang						Dinas Perkim-LH

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		dengan standar teknis • Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian • Rehabilitasi bangunan hunian		pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						
			Rehabilitasi RTLH sebagai upaya peningkatan dan pengurangan kawasan kumuh	• Pendataan rehabilitasi RTLH						
				• Rehabilitasi upaya penyediaan rumah layak huni						
Kualitas permukaan jalan lingkungan yang belum memadai	Pemugaran Peremajaan	• Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan • Rehabilitasi jalan lingkungan/ perbaikan perkerasan jalan lingkungan • Peningkatan kappasitas jalan lingkungan • Penambahan lajur atau pelebaran badan jalan lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar jalan lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar jalan lingkungan						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan infrastruktur jalan lingkungan	• Rehabilitasi, pemeliharaan jalan lingkungan dan kelengkapannya • Pelebaran badan jalan lingkungan						
• Tidak terakses air minum	Peremajaan	• Meningkatkan sistem penyediaan air minum bagi permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan jangkauan pelayanan	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH, & UPTD. Air Minum

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		jaringan air minum 3. Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung 4. Penambahan pipa distribusi untuk penambahan pelanggan	• Pengembangan jaringan air minum • Pengembangan kelembagaan sistem pelayanan air minum	• Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum • Penambahan jaringan pipa distrbusi						
				• Peningkatan sistem pelayanan air minum						
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 2. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan sarpras dan sistem pengelolaan persampahan	• Penyediaan pewadahan 3R • Penyediaan armada pengangkutan sampah						
				• Pembangunan bank sampah						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		sampah • Penyediaan armada motor sampah • Pembangunan bank sampah		• Penambahan Tong Sampah						
				• Operasional, pemeliharaan bank sampah dan sistem pengelolaan persampahan						
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan standar teknis • Peningkatan penambahan komponen prasarana proteksi kebakaran; • Pelebaran jalan lingkungan < 3,5 meter • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; 4. Penyediaan hidran 5. Penyediaan APAR 6. Penyediaan moda pemadam kendaraan	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Peningkaran kualitas jalan lingkungan						
				• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.31
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Bonjol

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan	Program dan Kegiatan	Tahun Pelakasanaan	Instansi

	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksanaan
Ketidakteraturan bangunan	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas bangunan permukiman sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian 2. Rehabilitasi bangunan hunian	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH
			Rehabilitasi RTLH sebagai upaya peningkatan dan pengurangan kawasan kumuh	• Pendataan rehabilitasi RTLH						
				• Rehabilitasi upaya penyediaan rumah layak huni						
Tidak terakses air minum	Peremajaan	• Meningkatkan sistem penyediaan air minum bagi permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum 2. Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang belum tersambung	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH, & UPTD. Air Minum
			• Pengembangan jaringan air minum • Pengembangan kelembagaan sistem pelayanan air minum	• Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum • Pembangunan resevoir						
				• Peningkatan Pelayanan Air Minum						
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 2. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Sarpras Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan air limbah lingkungan sesuai dengan SPM • Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPALD-S; 2. Pembangunan tangki septik individual dan komunal	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan air limbah	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar pengelolaan air limbah						Dinas Perkim-LH & DINAS KESEHATAN
			Pengembangan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah	• Pembangunan SPALD-S (tangki septik individual dan komunal)						
				• Operasional dan pemeliharaan SPALD-S						
Prasarana dan Sarana Persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong sampah • Penyediaan TPS	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan prasarana dan sarana sistem persampahan	• Penyediaan tong sampah						
				• Pembangunan atau penyediaan TPS						
				• Operasional dan pemeliharaan TPS						
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Rehabilitasi komponen prasarana proteksi	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		kebakaran • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarpras proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR • Penyediaan moda kendaraan pemadam	Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Penyediaan komponen prasarana proteksi kebakaran						
				• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.32

Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Ranah

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Ketidakteraturan bangunan	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas bangunan permukiman sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian 2. Rehabilitasi bangunan hunian	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH
			Rehabilitasi RTLH sebagai upaya peningkatan dan pengurangan kawasan kumuh	• Pendataan rehabilitasi RTLH						
				• Rehabilitasi upaya penyediaan rumah layak huni						
Ketidaktersediaan Drainase	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan						Dinas Perkim-LH

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Lingkungan		• Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase • -Pembangunan jaringan drainase lingkungan		air minum untuk kehidupan						
			Pengembangan jaringan air minum	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Prasaran dan Sarana Persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kappasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong sampah • Penyediaan TPS	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan prasarana dan sarana sistem persampahan	• Penyediaan tong sampah						
				• Operasional, dan pemeliharaan TPS						
				• Pemeliharaan berkala sistem sarpras persampahan						
Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Penyediaan sarana proteksi kebakaran	• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR • Penyediaan moda kendaraan pemadam kebakaran		• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.33
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Ranah Baru

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Ketidakteraturan bangunan	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas bangunan permukiman sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian 3. Rehabilitasi bangunan hunian	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH
			Rehabilitasi RTLH sebagai upaya peningkatan dan pengurangan kawasan kumuh	• Pendataan rehabilitasi RTLH						
				• Rehabilitasi upaya penyediaan rumah layak huni						
Tidak terakses air minum	Peremajaan	• Meningkatkan sistem penyediaan air minum bagi permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan air minum 3. Pembangunan jaringan pipa transmisi air yang	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH, & UPTD. Air Minum
			• Pengembangan jaringan air minum • Pengembangan kelembagaan sistem	• Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum • Pembangunan resevoir						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		belum tersambung	pelayanan air minum	• Peningkatan Pelayanan Air Minum						
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 3. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Sarpras Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan air limbah lingkungan sesuai dengan SPM • Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah seperti penambahan komponen pada SPALD-S; • Pembangunan tangki septik individual dan komunal	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan air limbah	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar pengelolaan air limbah						Dinas Perkim-LH & DINAS KESEHATAN
			Pengembangan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah	• Pembangunan SPALD-S (tangki septik individual dan komunal)						
				• Operasional dan pemeliharaan SPALD-S						
Prasarana dan Sarana Persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan,	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan prasarana dan sarana	• Penyediaan tong sampah						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong sampah • Penyediaan TPS	sistem persampahan	• Pembangunan atau penyediaan TPS						
				• Operasional dan pemeliharaan TPS						
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Rehabilitasi komponen prasarana proteksi kebakaran • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarpras proteksi kebakaran; 4. Penyediaan hidran 5. Penyediaan APAR 6. Penyediaan moda kendaraan pemadam	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Penyediaan komponen prasarana proteksi kebakaran						
				• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.34
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Padang Bungur

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Ketidakteraturan bangunan	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas bangunan permukiman sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas bangunan gedung hunian 3. Rehabilitasi bangunan hunian	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH
			Rehabilitasi RTLH sebagai upaya peningkatan dan pengurangan kawasan kumuh	• Pendataan rehabilitasi RTLH						
				• Rehabilitasi upaya penyediaan rumah layak huni						
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jang-kauan pelayanan jaringan drainase • Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan jaringan air minum	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Prasaran dan Sarana Persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kappa-sitas unit penge-lolaan persampahan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sam-pah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan prasarana dan sarana sistem persampahan	• Penyediaan tong sampah						
				• Operasional, dan pemeliharaan TPS						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong sampah • Penyediaan TPS		• Pemeliharaan berkala sistem sarpras persampahan						
Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan kappasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR • Penyediaan moda kendaraan pemadam kebakaran	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Penyediaan sarana proteksi kebakaran	• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.35
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Bukit Sembilan

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Kualitas permukaan jalan lingkungan yang belum memadai	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan 2. Rehabilitasi jalan/ perbaikan perkerasan jalan lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang air minum	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan tentang pentingnya kebutuhan air minum untuk kehidupan						Dinas Perkim-LH
			Rehabilitasi RTLH sebagai upaya peningkatan dan pengurangan kawasan kumuh	• Pendataan rehabilitasi RTLH						
				• Rehabilitasi upaya penyediaan rumah layak huni						
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase • Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Sarpras Persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan sarpras dan sistem pengelolaan	• Penyediaan tong sampah						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		cara penambahan komponen pewadah-an, pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong sampah • Penyediaan TPS	persampahan	• Pembangunna /Penyediaan TPS						
				• Operasional, dan pemeliharaan TPS						
Ketidaktersediaan sarpras proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR • Penyediaan moda kendaraan pemadam kebakaran	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Penyediaan sarana proteksi kebakaran	• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Tabel 6.36
Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukimah Skala Kawasan Sungai Limau

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas drainase lingkungan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan jangkauan pelayanan jarringan drainase; • Pembangunan jarringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						Dinas Perkim-LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
Prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai standar teknis	Pemugaran	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan air limbah lingkungan sesuai dengan SPM • Rehabilitas unit pengelolaan air limbah dengan cara melakukan penggantian komponen pada komponen pemipaan dan SPALD-S : tangki septik atau komponen sejenisnya; • Melakukan perbai-kan tangki septik • Meningkatkan sistem sarpras pe-ngelolaan air limbah	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan air limbah	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar pengelolaan air limbah						Dinas Perkim-LH & DINAS KESEHATAN
			Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah	• Rehabilitas tangki septik						
				• Operasional dan pemeliharaan SPALD-S						
Prasarana dan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem	Pendampingan dan layanan informasi	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan						Dinas

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
sarana Persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis		pengelolaan persampahan sesuai dengan standar teknis • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; • Penyediaan tong sampah • Penyediaan TPS	tentang standar pengelolaan persampahan	bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						Perkim-LH
			Pengembangan prasarana dan sarana sistem persampahan	• Penyediaan tong sampah						
				• Pembangunan atau Penyediaan TPS						
				• Operasional, dan pemeliharaan TPS						
Ketidaksediaan sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarana	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan dini kebakaran						DAMKAR/ BPBD
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan						

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
		proteksi kebakaran; • Penyediaan hidran • Penyediaan APAR • Penyediaan moda kendaraan pemadam kebakaran		pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

Catatan : Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun bersangkutan
Program dan kegiatan tidak dilaksanakan pada tahun bersangkutan

6.2 RENCANA RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KOTA, SKALA KAWASAN DAN SKALA LINGKUNGAN [RENCANA AKSI MASYARAKAT/CAP]

Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota diperlukan dalam hal menangani kondisikondisi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang. Rumusan rencana aksi diarahkan untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya. Rencana aksi skala kota dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui penegakan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis lainnya yang terkait dengan bidang permukiman. Selain itu, rencana aksi skala kota dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana (relokasi/*resettlement*). Untuk lebih jelasnya, rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota dapat dilihat pada tabel 6.18 berikut.

Rencana aksi skala kawasan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya. Secara umum, dua kawasan yang ada tersebut memiliki karakteristik permasalahan dan kebutuhan penanganan yang hampir sama yaitu aspek persampahan dan proteksi kebakaran. Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan rencana aksi penanganan untuk pencegahan difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Rencana aksi penanganan untuk pencegahan dilakukan melalui upaya meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun pelatihan kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya, Rencana Aksi Program pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan dapat dilihat pada tabel 6.19 berikut.

Tabel 6.37
Rencana Aksi Pencegahan terhadap tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKASI PEMBIAYAAN				TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANAAN
		SAT	VOL	HARGA SATUA (JUTA RP)	TOTAL BIAYA	2025	2026	2027	2028	2029		
1	**Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah**											
	* Bimtek sistem regulasi bangunan	Kawasan	17	100	1700	500	500	500	100	100	APBD Kabupaten	Perkimtan
	* Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan	Kawasan	17	100	1700	500	500	500	100	100	APBD Kabupaten	Perkimtan
	* Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan	Kawasan	17	100	1700	500	500	500	100	100	APBD Kabupaten	Perkimtan
	* Bimtek sistem regulasi proteksi kebakaran	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500	-	APBD Kabupaten	Satpol PP dan Damkar
	* Bimtek sistem regulasi SPAM	Kawasan	17	100	1700	700	500	500	-	-	APBD Kabupaten	Perkimtan
2	**Peningkatan layanan informasi masyarakat**											
	* sosialisasi tat ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis bangunan	Kawasan	17	100	1700	500	500	500	100	100	APBD Kabupaten	DPMPTSP, Dinas Perkimtan, Dinas LH
	* Sosialisasi tat ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis jalan lingkungan	Kawasan	17	100	1700	500	500	500	100	100	APBD Kabupaten	DPMPTSP, Dinas Perkimtan, Dinas LH
	* sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase lingkungan	Kawasan	17	100	1700	500	500	500	100	100	APBD Kabupaten	DPMPTSP, Dinas Perkimtan, Dinas LH
	* sosialisasi pengelolaan sampah 3R	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500	-	APBD Kabupaten	Perkimtan
	* Kampanye lingkungan bersih dan sehat	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500	-	APBD Kabupaten	Perkimtan
	* Penyuluhan dan pelathan pengelolaan sampah 3R	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500	-	APBD Kabupaten	Perkimtan
	* Sosialisasi resiko kebakaran	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500	-	APBD Kabupaten	Satpol PP dan Damkar

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKASI PEMBIAYAAN				TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANAAN
		SAT	VOL	HARGA SATUA (JUTA RP)	TOTAL BIAYA	2025	2026	2027	2028	2029		
	* Kampanye pencegahan kebakaran	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500	-	APBD Kabupaten	Satpol PP dan Damkar
	* Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500	-	APBD Kabupaten	Satpol PP dan Damkar
	* Sosialisasi air bersih aman dan layak	Kawasan	17	100	1700	700	500	500	-	-	APBD Kabupaten	Perkimtan, DINKES
	* Kampanye PHBS	Kawasan	17	100	1700	700	500	500	-	-	APBD Kabupaten	Perkimtan, DINKES
	* Penyuluhan PAH dan air dangkal sehat	Kawasan	17	100	1700	700	500	500	-	-	APBD Kabupaten	Perkimtan, DINKES

Sumber: Hasil Rencan , 2025

Tabel 6.38
Rencana Aksi Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKASI PEMBIAYAAN					TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANAAN
		LOKASI	SAT	Vol	HATGA SATUAN	TOTAL PEMBIAYAAN	2025	2026	2027	2028	2029		
1	Peningkatan layanan informasi pengelolaan sampah												
	Sosialisasi sampah 3R	Silago Tarandam Sungai Kambut Lambau Siguntur 2 Koto Daulat Koto Marga Makmur Lubuk Agam Teluk Alai Sungai Langkok Sipangkur Sopan Jaya Balai Tengah Tuo Ranah Bukit Sembilan Sungai Limau	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500	-	APBD Kab	Perkimtan
	Kampanye lingkungan bersih dan sehat	Silago Tarandam Sungai Kambut Lambau Siguntur 2 Koto Daulat Koto Marga Makmur Lubuk Agam Teluk Alai Sungai Langkok Sipangkur Sopan Jaya	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500	-	APBD Kab	Perkimtan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKASI PEMBIAYAAN					TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANAAN
		LOKASI	SAT	Vol	HATGA SATUAN	TOTAL PEMBIAYAAN	2025	2026	2027	2028	2029		
		Balai Tengah Tuo Ranah Bukit Sembilan Sungai Limau											
	Penyuluhan pengelolaan sampah 3R	Silago Tarandam Sungai Kambut Lambau Siguntur 2 Koto Daulat Koto Marga Makmur Lubuk Agam Teluk Alai Sungai Langkok Sipangkur Sopan Jaya Balai Tengah Tuo Ranah Bukit Sembilan Sungai Limau	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500	-	APBD Kab	Perkimtan
2	Peningkatan layanan informasi proteksi kebakaran												
	Sosialisasi resiko kebakaran	Silago Tarandam Sungai Kambut Lambau Siguntur 2 Koto Daulat Koto Marga Makmur Lubuk Agam Teluk Alai	Kawasan	17	100	1700	700	500	500	-	-	APBD Kab	Satpol PP dan Damkar

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKASI PEMBIAYAAN					TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANAAN
		LOKASI	SAT	Vol	HATGA SATUAN	TOTAL PEMBIAYAAN	2025	2026	2027	2028	2029		
		Sungai Langkok Sipangkur Sopan Jaya Balai Tengah Tuo Ranah Bukit Sembilan Sungai Limau											
	kampanye pencegahan kebakaran	Silago Tarandam Sungai Kambut Lambau Siguntur 2 Koto Daulat Koto Marga Makmur Lubuk Agam Teluk Alai Sungai Langkok Sipangkur Sopan Jaya Balai Tengah Tuo Ranah Bukit Sembilan Sungai Limau	Kawasan	17	100	1700	700	500	500	-	-	APBD Kab	Satpol PP dan Damkar
	penyuluhan penanganan kebakaran	Silago Tarandam Sungai Kambut Lambau Siguntur 2 Koto Daulat Koto Marga Makmur Lubuk Agam	Kawasan	17	100	1700	700	500	500	-	-	APBD Kab	Satpol PP dan Damkar

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKASI PEMBIAYAAN					TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANAAN
		LOKASI	SAT	Vol	HATGA SATUAN	TOTAL PEMBIAYAAN	2025	2026	2027	2028	2029		
		Teluk Alai Sungai Langkok Sipangkur Sopan Jaya Balai Tengah Tuo Ranah Bukit Sembilan Sungai Limau											

Sumber: Hasil Rencan , 2025

Rencana aksi skala lingkungan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya. Secara umum, lokasi permukiman kumuh yang ada tersebut memiliki karakteristik permasalahan dan kebutuhan penanganan yang sama yaitu aspek persampahan dan proteksi kebakaran. Walaupun demikian, ada permasalahan dan kebutuhan penanganan lainnya yang berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya, yaitu aspek bangunan gedung, aspek air minum, aspek jalan lingkungan, aspek drainase lingkungan, dan aspek air limbah. Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan rencana aksi penanganan untuk pencegahan difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Rencana aksi penanganan untuk pencegahan dilakukan melalui upaya meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun pelatihan kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya, rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala lingkungan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6.39

Rencana Aksi Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Lingkungan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKASI PEMBIAYAAN					TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANAAN
		LOKASI	SAT	Vol	HATGA SATUAN	TOTAL PEMBIAYAAN	2025	2026	2027	2028	2029		
1	Pendampingan dan layanan informasi standar bangunan rumah sehat dan layak huni												
	• Sosialisasi standar teknis	Silago Tarandam Sungai Kambut Lambau Siguntur 2 Koto Daulat Koto Marga Makmur Lubuk Agam Teluk Alai Sungai Langkok Sipangkur Sopan Jaya Balai Tengah Tuo Ranah Bukit Sembilan Sungai Limau	Kawasan	17	100	1700	500	500	500	100	100	APBD Kabupaten	Perkimtan
	• Kampanye rumah sehat dan layak huni		Kawasan	17	100	1700	500	500	500	100	100	APBD Kabupaten	Perkimtan
	• Penyuluhan rehab rumah sehat dan layak huni		Kawasan	17	100	1700	500	500	500	100	100	APBD Kabupaten	Perkimtan
2	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar teknis pengelolaan persampahan												
	• Sosialisasi standar teknis	Silago Tarandam Sungai Kambut Lambau Siguntur 2 Koto Daulat Koto Marga Makmur Lubuk Agam	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500		APBD Kabupaten	Perkimtan
	• Kampanye lingkungan bersih dan sehat		Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500		APBD Kabupaten	Perkimtan
	• Penyuluhan pemilahan sampah		Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500		APBD Kabupaten	Perkimtan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKASI PEMBIAYAAN					TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANAAN
		LOKASI	SAT	Vol	HATGA SATUAN	TOTAL PEMBIAYAAN	2025	2026	2027	2028	2029		
		Teluk Alai Sungai Langkok Sipangkur Sopan Jaya Balai Tengah Tuo Ranah Bukit Sembilan Sungai Limau											
3	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem pengelolaan persampahan												
	• Sosialisasi pengelolaan sampah	Silago Tarandam Sungai Kambut Lambau Siguntur 2 Koto Daulat Koto Marga Makmur Lubuk Agam Teluk Alai Sungai Langkok Sipangkur Sopan Jaya Balai Tengah Tuo Ranah Bukit Sembilan Sungai Limau	Kawasan	17	100	1700	-	-	700	500	500	APBD Kabupaten	Perkimtan
	• Kampanye lingkungan bersih dan sehat		Kawasan	17	100	1700	-	-	700	500	500	APBD Kabupaten	Perkimtan
	• Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan sampah 3R		Kawasan	17	100	1700	-	-	700	500	500	APBD Kabupaten	Perkimtan
4	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran												
	• Sosialisasi resiko kebakaran	Silago Tarandam Sungai	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500	-	APBD Kabupaten	Satpol PP dan Damkar

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKASI PEMBIAYAAN					TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANAAN
		LOKASI	SAT	Vol	HATGA SATUAN	TOTAL PEMBIAYAAN	2025	2026	2027	2028	2029		
	• Kampanye pencegahan kebakaran	Kambut Lambau Siguntur 2 Koto Daulat Koto Marga Makmur Lubuk Agam Teluk Alai Sungai Langkok Sipangkur Sopan Jaya Balai Tengah Tuo Ranah Bukit Sembilan Sungai Limau	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500	-	APBD Kabupaten	Satpol PP dan Damkar
	• Penyuluhan penanganan dini kebakaran		Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500	-	APBD Kabupaten	Satpol PP dan Damkar
5	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem penyediaan air minum aman dan layak												
	• Sosialisasi air bersih dan sehat	Silago Tarandam Sungai Kambut Lambau Siguntur 2 Koto Daulat Koto Marga Makmur Lubuk Agam Teluk Alai Sungai Langkok Sipangkur Sopan Jaya Balai Tengah Tuo Ranah	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500		APBD Kabupaten	Perkimtan dan Lingkungan Hidup
	• Kampanye PHBS		Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500		APBD Kabupaten	Perkimtan dan Lingkungan Hidup
	• Penyuluhan PAH dan air dangkal		Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500		APBD Kabupaten	Perkimtan dan Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKASI PEMBIAYAAN					TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANAAN
		LOKASI	SAT	Vol	HATGA SATUAN	TOTAL PEMBIAYAAN	2025	2026	2027	2028	2029		
		Bukit Sembilan Sungai Limau											
6	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem pengelolaan air limbah aman dan layak												
	• Sosialisasi standar sarpras air limbah sehat	Silago Tarandam Sungai Kambut Lambau Siguntur 2 Koto Daulat Koto Marga Makmur Lubuk Agam Teluk Alai Sungai Langkok Sipangkur Sopan Jaya Balai Tengah Tuo Ranah Bukit Sembilan Sungai Limau	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500		APBD Kabupaten	Perkimtan dan Lingkungan Hidup
	• Kampanye lingkungan bersih dan sehat		Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500		APBD Kabupaten	Perkimtan dan Lingkungan Hidup
	• Penyuluhan jamban sehat		Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500		APBD Kabupaten	Perkimtan dan Lingkungan Hidup
7	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar jalan lingkungan												

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKASI PEMBIAYAAN					TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANAAN
		LOKASI	SAT	Vol	HATGA SATUAN	TOTAL PEMBIAYAAN	2025	2026	2027	2028	2029		
	• Sosialisasi lingkungan sehat	Silago Tarandam Sungai Kambut Lambau Siguntur 2 Koto Daulat Koto Marga Makmur Lubuk Agam Teluk Alai Sungai Langkok Sipangkur Sopan Jaya Balai Tengah Tuo Ranah Bukit Sembilan Sungai Limau	Kawasan	17	100	1700	-	-	700	700	500	APBD Kabupaten	Perkimtan
	• Penyuluhan standar jalan lingkungan		Kawasan	17	100	1700	-	-	700	700	500	APBD Kabupaten	Perkimtan
8	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan												
	• Sosialisasi lingkungan sehat	Silago Tarandam Sungai Kambut Lambau Siguntur 2 Koto Daulat Koto Marga Makmur Lubuk Agam Teluk Alai Sungai Langkok Sipangkur Sopan Jaya Balai Tengah	Kawasan	17	100	1700	-	-	700	700	500	APBD Kabupaten	Perkimtan dan Lingkungan Hidup
	• Penyuluhan standar drainase lingkungan		Kawasan	17	100	1700	-	-	700	700	500	APBD Kabupaten	Perkimtan dan Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKASI PEMBIAYAAN					TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANAAN
		LOKASI	SAT	Vol	HATGA SATUAN	TOTAL PEMBIAYAAN	2025	2026	2027	2028	2029		
		Tuo Ranah Bukit Sembilan Sungai Limau											

Sumber: Hasil Rencan , 2025

6.3 MEMORANDUM PROGRAM PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Memorandum program skala kabupaten diperlukan dalam hal menangani kondisi-kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang. Rumusan memorandum program diarahkan untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya. Strategi skala kabupaten dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui penegakan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis lainnya yang terkait dengan bidang permukiman. Selain itu, memorandum program skala kota dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana (relokasi/*resettlement*). Untuk lebih jelasnya, memorandum program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6.40
Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKASI PEMBIAYAAN				TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN			PELAKSANAAN
		SAT	VOL	HARGA SATUA (JUTA RP)	TOTAL BIAYA	2025	2026	2027	2028	2029	APBN	APBD PROV	APBD KAB.	
1	**Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah**												1700	
	* Bimtek sistem regulasi bangunan	Kawasan	17	100	1700	500	500	500	100	100			1700	Perkimtan
	* Bimtek sistem regulasi jalan lingkungan	Kawasan	17	100	1700	500	500	500	100	100			1700	Perkimtan
	* Bimtek sistem regulasi drainase lingkungan	Kawasan	17	100	1700	500	500	500	100	100			1700	Perkimtan
	* Bimtek sistem regulasi proteksi kebakaran	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500	-			1700	Satpol PP dan Damkar
	* Bimtek sistem regulasi SPAM	Kawasan	17	100	1700	700	500	500	-	-				Perkimtan
2	**Peningkatan layanan informasi masyarakat**												1700	
	* sosialisasi tat ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis bangunan	Kawasan	17	100	1700	500	500	500	100	100			1700	DPMPTSP, Dinas Perkimtan, Dinas LH
	* Sosialisasi tat ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis jalan lingkungan	Kawasan	17	100	1700	500	500	500	100	100			1700	DPMPTSP, Dinas Perkimtan, Dinas LH
	* sosialisasi tata ruang, mekanisme perijinan, & standar teknis drainase lingkungan	Kawasan	17	100	1700	500	500	500	100	100			1700	DPMPTSP, Dinas Perkimtan, Dinas LH
	* sosialisasi pengelolaan sampah 3R	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500	-			1700	Perkimtan
	* Kampanye lingkungan bersih dan sehat	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500	-			1700	Perkimtan
	* Penyuluhan dan pelathan pengelolaan sampah 3R	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500	-			1700	Perkimtan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKASI PEMBIAYAAN				TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN			PELAKSANAAN
		SAT	VOL	HARGA SATUA (JUTA RP)	TOTAL BIAYA	2025	2026	2027	2028	2029	APBN	APBD PROV	APBD KAB.	
	* Sosialisasi resiko kebakaran	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500	-			1700	Satpol PP dan Damkar
	* Kampanye pencegahan kebakaran	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500	-			1700	Satpol PP dan Damkar
	* Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran	Kawasan	17	100	1700	-	700	500	500	-			1700	Satpol PP dan Damkar
	* Sosialisasi air bersih aman dan layak	Kawasan	17	100	1700	700	500	500	-	-			1700	Perkimtan, DINKES
	* Kampanye PHBS	Kawasan	17	100	1700	700	500	500	-	-			1700	Perkimtan, DINKES
	* Penyuluhan PAH dan air dangkal sehat	Kawasan	17	100	1700	700	500	500	-	-				Perkimtan, DINKES

Sumber: Hasil Rencan , 2025

Memorandum program skala kawasan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya. Secara umum, dua kawasan yang ada tersebut memiliki karakteristik permasalahan dan kebutuhan penanganan yang hampir sama yaitu aspek persampahan dan proteksi kebakaran. Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan memorandum program penanganan untuk pencegahan difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Memorandum program penanganan untuk pencegahan dilakukan melalui upaya meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun pelatihan kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya, memorandum program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6.41

Memorandum Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKASI PEMBIAYAAN					TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN			PELAKSANAAN
		LOKASI	SAT	Vol	HATGA SATUAN	TOTAL PEMBIAYAAN	2025	2026	2027	2028	2029	APBN	APBD PROV	APBD Kab	
1	Peningkatan layanan informasi pengelolaan sampah														
	Sosialisasi sampah 3R	Silago Tarandam Sungai Kambut Lambau Siguntur 2 Koto Daulat Koto Marga Makmur Lubuk Agam Teluk Alai Sungai Langkok Sipangkur Sopan Jaya Balai Tengah Tuo Ranah Bukit Sembilan Sungai Limau	Kawasan	17	100	1700	-	600	600	500	-			1700	Dinas Perkimtan dan DLH
	Kampanye lingkungan bersih dan sehat	Silago Tarandam Sungai Kambut Lambau Siguntur 2 Koto Daulat Koto Marga Makmur Lubuk Agam Teluk Alai Sungai Langkok Sipangkur	Kawasan	17	100	1700	-	600	600	500	-			1700	Dinas Perkimtan dan DLH

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKASI PEMBIAYAAN					TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN			PELAKSANAAN
		LOKASI	SAT	Vol	HATGA SATUAN	TOTAL PEMBIAYAAN	2025	2026	2027	2028	2029	APBN	APBD PROV	APBD Kab	
		Sopan Jaya Balai Tengah Tuo Ranah Bukit Sembilan Sungai Limau													
	Penyuluhan pengelolaan sampah 3R	Silago Tarandam Sungai Kambut Lambau Siguntur 2 Koto Daulat Koto Marga Makmur Lubuk Agam Teluk Alai Sungai Langkok Sipangkur Sopan Jaya Balai Tengah Tuo Ranah Bukit Sembilan Sungai Limau	Kawasan	17	100	1700	-	600	600	500	-			1700	Dinas Perkimtan dan DLH
2	Peningkatan layanan informasi proteksi kebakaran														
	Sosialisasi resiko kebakaran	Silago Tarandam Sungai Kambut Lambau Siguntur 2 Koto Daulat Koto Marga Makmur Lubuk Agam	Kawasan	17	100	1700	600	600	500	-	-			1600	Dinas Satpol PP dan Damkar

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKASI PEMBIAYAAN					TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN			PELAKSANAAN
		LOKASI	SAT	Vol	HATGA SATUAN	TOTAL PEMBIAYAAN	2025	2026	2027	2028	2029	APBN	APBD PROV	APBD Kab	
		Teluk Alai Sungai Langkok Sipangkur Sopan Jaya Balai Tengah Tuo Ranah Bukit Sembilan Sungai Limau													
	kampanye pencegahan kebakaran	Silago Tarandam Sungai Kambut Lambau Siguntur 2 Koto Daulat Koto Marga Makmur Lubuk Agam Teluk Alai Sungai Langkok Sipangkur Sopan Jaya Balai Tengah Tuo Ranah Bukit Sembilan Sungai Limau	Kawasan	17	100	1700	600	600	500	-	-			1600	Dinas Satpol PP dan Damkar
	penyuluhan penanganan kebakaran	Silago Tarandam Sungai Kambut Lambau Siguntur 2 Koto Daulat Koto Marga Makmur	Kawasan	17	100	1700	600	600	500	-	-			1600	Dinas Satpol PP dan Damkar

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKASI PEMBIAYAAN					TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN			PELAKSANAAN
		LOKASI	SAT	Vol	HATGA SATUAN	TOTAL PEMBIAYAAN	2025	2026	2027	2028	2029	APBN	APBD PROV	APBD Kab	
		Lubuk Agam Teluk Alai Sungai Langkok Sipangkur Sopan Jaya Balai Tengah Tuo Ranah Bukit Sembilan Sungai Limau													













7 BAB 7
RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

7.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Program dan kegiatan skala kabupaten diperlukan dalam hal menangani kondisi-kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang. Rumusan program dan kegiatan diarahkan untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya. Program dan kegiatan skala kabupaten dalam konteks peningkatan kualitas permukiman diwujudkan melalui penegakan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis lainnya yang terkait dengan bidang permukiman. Selain itu, program dan kegiatan skala kabupaten dalam konteks peningkatan kualitas permukiman diwujudkan melalui pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana (relokasi/*resettlement*). Untuk lebih jelasnya, Program dan Kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 7.1
Kebutuhan Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kota	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelaksanaan				
		Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Masih adanya bangunan permukiman yang tidak layak huni	Pemugaran	Meningkatkan kualitas bangunan permukiman sesuai dengan SPM	• Pelayanan informasi masyarakat	• Sosialisasi, pembinaan dan pemeliharaan terkait bangunan dan lingkungan • Pemeriksaan Berkala					
				• Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)	• Penyusunan data base RTLH					
					• Bimtek rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni					
					• Penyediaan rumah layak huni					
2.	Masih banyaknya bangunan permukiman yang belum tertata	Pemugaran Peremajaan	Penataan Kawasan	Peningkatan layanan informasi masyarakat	• Sosialiasasi mengenai Penetapan regulasi terkait bangunan dan lingkungan serta penertiban IMB					
				Penataan dan peningkatan kawasan permukiman	• Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan permukiman					
					• Penataan Kawasan					
				Pengendalian dan pengawasan dalam peningkatan kesesuaian peruntukan kawasan	• Relokasi permukiman					
					• Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang • Mengembalikan fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya					
3	Keterbatasan infrastruktur permukiman, terutama berupa jalan lingkungan, drainase, air bersih, limbah,	1. Peremajaan 2. Pemugaran	Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman sesuai dengan SPM	• Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan • Peningkatan layanan informasi masyarakat	• Bimtek sistem regulasi infrastrktur permukiman • Sosialisasi standar teknis infrastruktur permukiman					

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kota	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelaksanaan				
		Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
	pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran			• Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	• Meningkatkan pemenuhan prasarana, sarana utilitas umum permukiman					
				Peningkatan infrastruktur air minum permukiman	• Peningkatan Kualitas Pelayanan air Bersih Masyarakat • Optimalisasi, pengembangan dan non teknis sistem penyediaan air minum • Penambahan Air Baku • Pembangunan Reservoir • Penambahan Sambungan SR					
				Peningkatan infrastruktur air limbah permukiman	• Pembangunan, operasional pemeliharaan SPALD-S					
					• Pembangunan operasional pemeliharaaan IPLT, serta pengadaaan mobil tinja					
				Peningkatan infrastruktur persampahan permukiman	• Sosialisasi pengelolaan sampah 3R • Penambahan Sarana dan prasarana persampahan • Pembangunan TPST					
					• Peningkatan Pelayanan pengelolaan persampahan					
					• Pengelolaan sampah sampai TPST					
				Peningkatan infrastruktur drainase permukiman	• Pembangunan drainase kawasan kumuh					
					• Pengembangan jaringan drainase kota					
					• Pemeliharaan rutin dan periodik jaringan drainase					

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kota	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelaksanaan				
		Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
					• PHBS dan pengembangan lingkungan sehat					
				Peningkatan infrastruktur jalan permukiman	• Pembangunan jalan					
					• Rehabilitasi /pemeliharaan jalan					
				Pengadaan dan Peningkatan Proteksi Kebakaran	• Sosialisasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan dan pelatihan penanganan dini kebakaran • Pengadaan Hidran Kebakaran/Tandaon Air • Penfgadaan APAR					
4	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Pemugaran	Meningkatkan sistem pengelolaan pemelihaaran lingkungan permukiman sesuai dengan SPM	• Peningkatan layanan informasi Masyarakat	• Sosialisasi tata ruang, mekanisme, perijinan dan standar teknis infrastruktur permukiman • Peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup					

7.2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PRIORITAS

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaukan pada pada bab 4 sebelumnya, kawasan yang menjadi prioritas penanganan dalam penyunan Rencanapencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Danpermukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya terdapat pada kawasan Pasar Lama Pulau Punjung.

Kawasan Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung merupakan salah satu dari 34 lokasi kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Dharmasraya nomor 100.3.3.2/160/KPTS-BUP/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/110/KPTS-BUP/2025 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya dimana luas kawasan kumuh Pasar Lama Pulau Punjung yaitu 15,40 hektar merupakan kewenangan pusat.

Secara administrasi kawasan kumuh Pasar Lama Pulau Panjang termasuk kedalam wilayah Jorong Tabek dan Jorong Pasar Pulau Punjung di Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung yang merupakan pusat ibukota Kabupaten Dharmasraya. Letak Titik koordinat kawasan kumuh Pasar Lama Pulau Punjung terletak pada 101°30’4.933” BT dan 0°57’40.276” LS. berikut tabel numerik kekumuhan kawasan Pasar Lama Pulau Punjung.

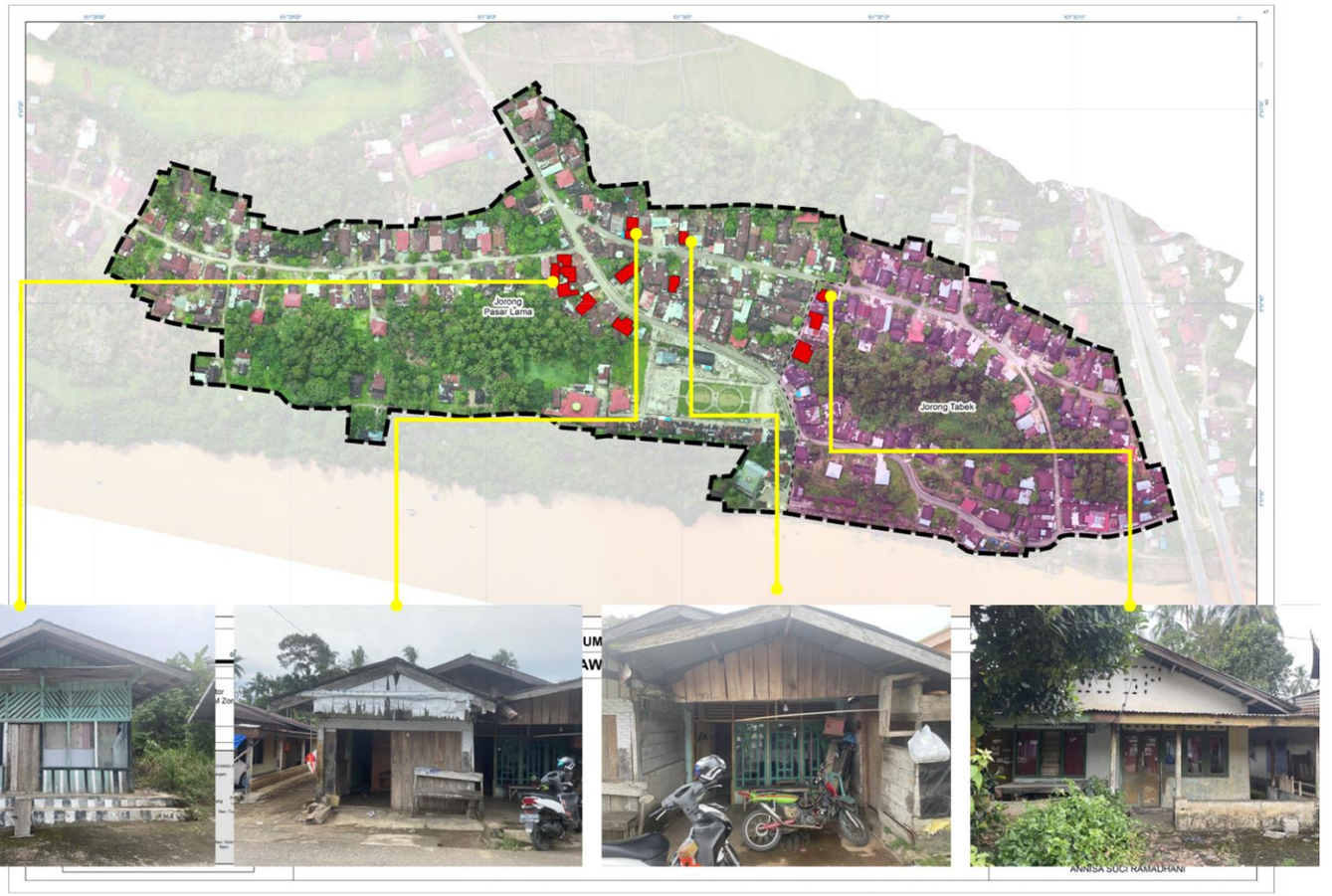
Tabel 7.2
Numerik Kekumuhan Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung

KUMUH

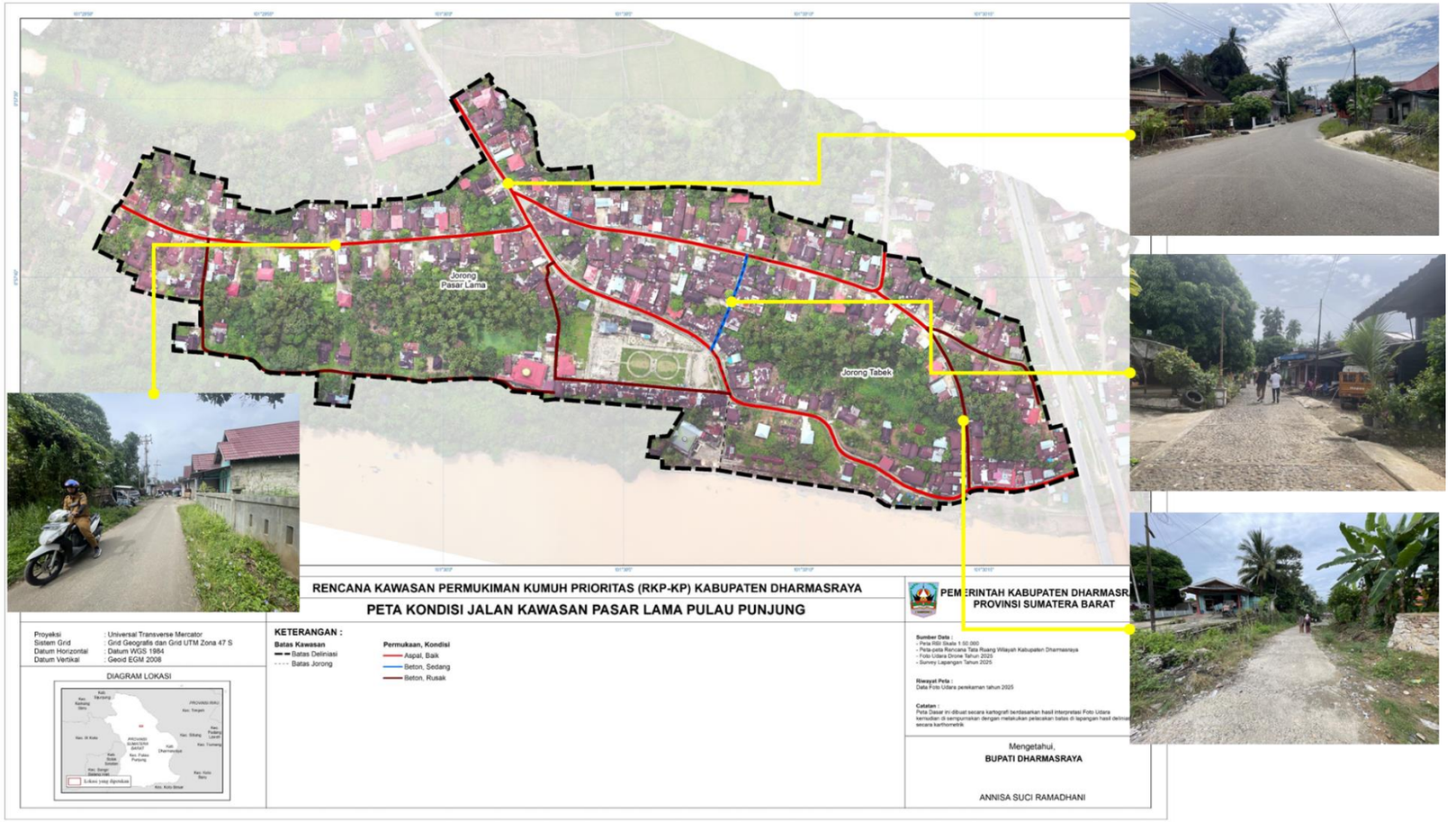
Provinsi	**: SUMATERA BARAT**	**Luas SK**	**15,40**	Ha
Kab/Kota	**: DHAMASRAYA**	**Luas Verifikasi**	**15,40**	Ha
Kecamatan	**: PULAU PUNJUNG**	**Jumlah Bangunan**	**321**	Unit
Kawasan	**: NAGARI IV KOTO PULAU PUNJUNG**	**Jumlah Penduduk**	**1.397**	Jiwa
		Jumlah Bangunan	**351**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	121,00	Unit	37,69%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	40,00	Unit	12,46%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				12,56%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	935,21	Meter	27,26%	1
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.559,71	Meter	45,47%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				36,37%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	261,00	KK	74,36%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	351,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				87,18%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	4,55	Ha	29,55%	1
	b. Ketidaktersediaan Drainase	2.044,00	Meter	43,55%	1
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	-	Meter	0,00%	0
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	2.648,93	Meter	56,45%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				43,18%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	193,00	KK	54,99%	3
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	220,00	KK	62,68%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				58,83%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	351,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	280,00	KK	79,77%	5
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				89,89%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	321,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	321,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN		
60 - 80 : KUMUH BERAT	TOTAL NILAI	42
38 - 59 : KUMUH SEDANG	TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG
16 - 37 KUMUH RINGAN		
< 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	61,14%
	KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%



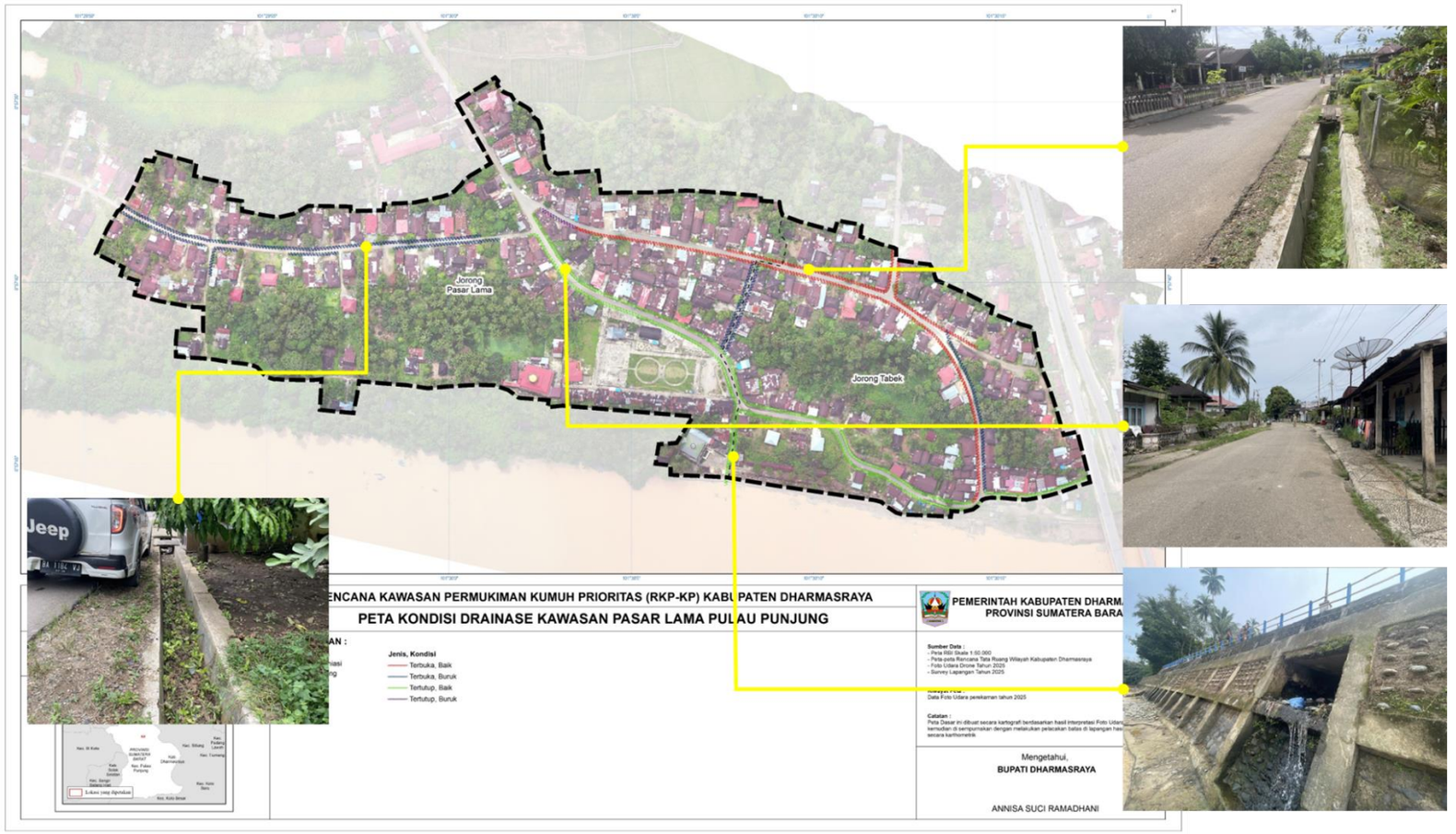
Gambar 7-1 Gambaran Kondisi Bangunan Gedung



Gambar 7-2 Gambaran Kondisi Jalan Lingkungan



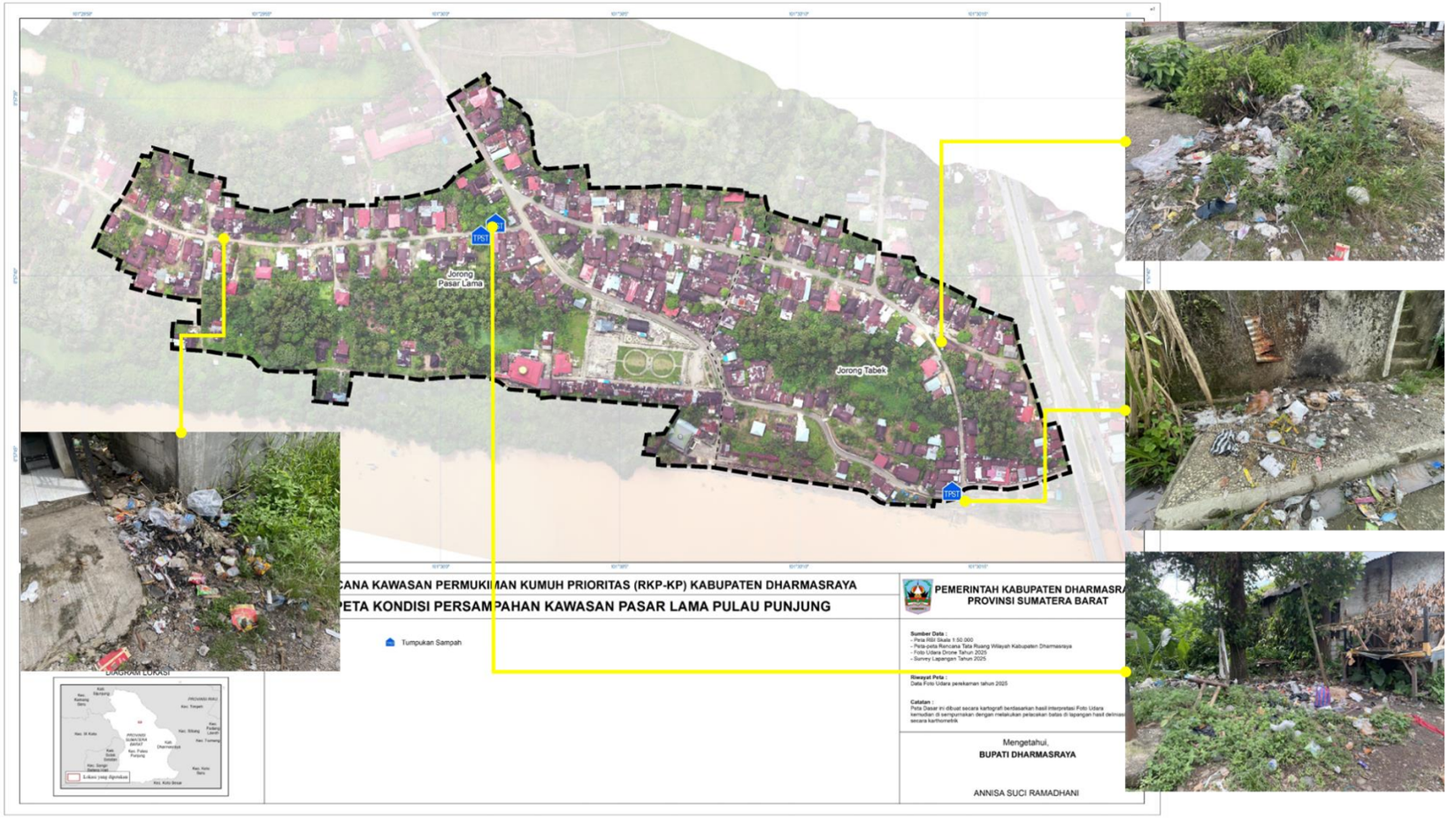
Gambar 7-3 Gambaran Kondisi Air Bersih



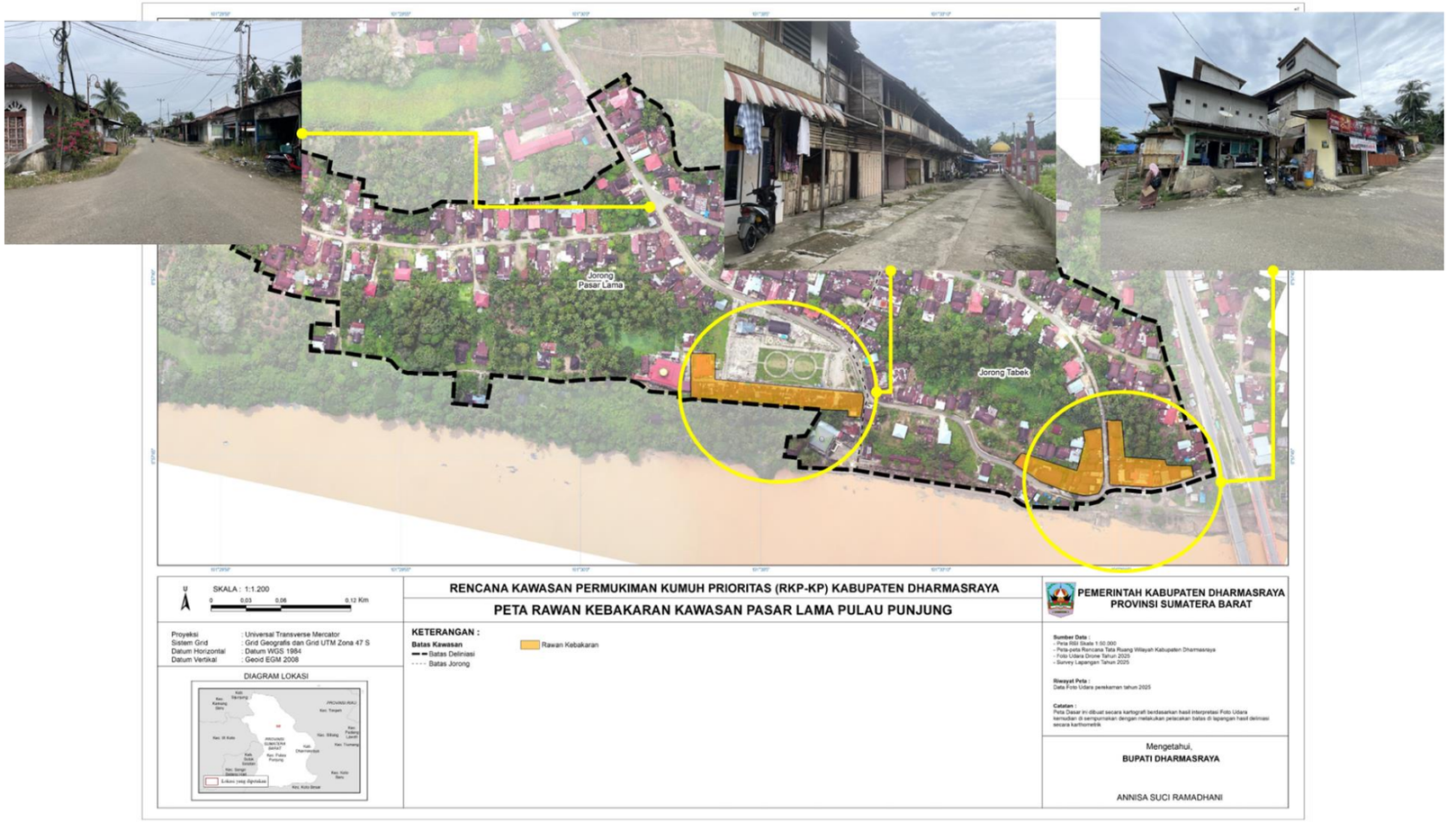
Gambar 7-4 Gambaran Kondisi Jaringan Drainase



Gambar 7-5 **Gambaran Kondisi Limbah**



Gambar 7-6 Gambaran Kondisi Persampahan



Gambar 7-7 Gambaran Kondisi Bangunan Bangunan Rawan Kebakaran

7.3 RENCANA AKSI PROGRAM PENINGKATAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KABUPATEN DAN SKALA KAWASAN

Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten diperlukan untuk menangani kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang wilayah. Rumusan rencana aksi ini diarahkan untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya, guna menciptakan lingkungan permukiman yang tertata, layak huni, dan berkelanjutan.

Pada skala kabupaten, rencana aksi pencegahan diwujudkan melalui penegakan ketentuan terkait kesesuaian perizinan, kesesuaian dengan rencana tata ruang, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pemenuhan aturan dan standar teknis lainnya yang berkaitan dengan bidang permukiman. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah munculnya permukiman baru yang tidak sesuai perencanaan, serta menjaga kualitas lingkungan hunian.

Selain itu, dalam konteks pencegahan terhadap penurunan kualitas permukiman, rencana aksi juga mencakup upaya relokasi atau pemindahan masyarakat dari lokasi-lokasi yang tidak memungkinkan untuk dibangun kembali, baik karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang maupun berada di kawasan rawan bencana. Relokasi ini dilakukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan permukiman yang aman, layak, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya, rincian rencana aksi program pencegahan pada skala kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.3
Program Dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas Pasar Lama Pulau Punjung

Permasalahan	Konsep dan Strategi Penanganan		Program dan Kegiatan		Tahun Pelakasanaan					Instansi Pelaksanaan
	Konsep	Strategi	Program	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai dengan SPM • Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan drainase 1. Pembangunan jaringan drainase lingkungan	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar drainase lingkungan	• Sosialiasi lingkungan sehat • Penyuluhan standar drainase lingkungan						DPUPR & Perkim-LH
			Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan	• Pembangunan jaringan drainase lingkungan • Penambahan jaringan drainase yang belum tersambung						
				• Pemeliharaan tahunan drainase lingkungan						
• Prasarana dan Sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis • Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan SPM • Peningkatan kapasitas unit pengelolaan persampahan dengan cara penambahan komponen pewadahan, pengumpulan dan pengolahan; 1. Penyediaan tong sampah 2. Penyediaan armada motor sampah 3. Pembangunan bank sampah	Pendampingan dan layanan informasi tentang standar pengelolaan persampahan	• Sosialiasi standar teknis • Kampanye lingkungan bersih • Penyuluhan bank sampah dan pengelolaan 3R						DPKP & Perkim-LH
			Pengembangan sarpras dan sistem pengelolaan persampahan	• Penyediaan pewadahan 3R • Penyediaan armada pengangkutan sampah						
				• Pembangunan bank sampah						
				• Operasional dan pemeliharaan TPS dan sistem pengelolaan persampahan						
• Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran • Ketidaktersediaan	Pemugaran dan Peremajaan	• Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai	Pendampingan dan layanan informasi tentang sistem proteksi kebakaran	• Sosialiasi resiko kebakaran • Kampanye pencegahan kebakaran • Penyuluhan penanganan						DAMKAR/ BPBD

sarana proteksi kebakaran		dengan SPM • Rehabilitasi prasarana proteksi kebakaran • Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran dengan cara penambahan komponen sarpras proteksi kebakaran; 1. Penyediaan hidran 2. Penyediaan APAR 3. Penyediaan moda pemadam kendaraan		dini kebakaran						
			Peningkatan kualitas jalan lingkungan	• Perbaikan komponen prasarana proteksi kebakaran						
			Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran	• Penyediaan sarana proteksi kebakaran seperti hidran, APAR dan moda kendaraan pemadam kebakaran						
				• Pemeliharaan berkala sarana proteksi kebakaran						

7.4 MEMORANDUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Dalam rangka mendukung upaya penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya secara terpadu dan berkelanjutan, disusunlah Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur sebagai panduan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman untuk periode tahun 2025 hingga 2029.

Memorandum ini merangkum program-program prioritas yang diarahkan untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh berdasarkan hasil identifikasi dan analisis di lapangan. Fokus intervensi mencakup aspek bangunan gedung, jalan lingkungan, air minum, drainase, air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran, yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kawasan kumuh.

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan program ini berasal dari berbagai tingkat pemerintahan, yaitu:

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui program-program strategis nasional,
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi Sumatera Barat),
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya (APBD Kabupaten).

Dukungan pendanaan yang bersinergi ini diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian target pengurangan luasan kawasan kumuh serta mempercepat terwujudnya lingkungan permukiman yang layak huni, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya.

Adapun rincian program, lokasi intervensi, tahun pelaksanaan, serta sumber pembiayaan masing-masing kegiatan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.4
Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

ASPEK KEKUKUHAN / JENIS KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TAHUN PENANGANAN					KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	
Banggunan Gedung									
- Pembangunan Rumah Swadaya	Kawasan	34	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Kementerian PUPR, APBD PROV, APBD Kab.
Jalan Lingkungan									
- Peningkatan kapasitas jalan lingkungan	Kawasan	34	3.000	600	600	600	600	600	Kementerian PUPR, APBD PROV, APBD Kab.
pembangunan Jalan Baru	Kawasan	34	3.000	600	600	600	600	600	Kementerian PUPR, APBD PROV, APBD Kab.
Air Minum									
- Penambahan jaringan air minum	Kawasan	34	500	100	100	100	100	100	Kementerian PUPR, APBD PROV, APBD Kab.
penambahan Sambungan Rumah	Kawasan	34	500	100	100	100	100	100	Kementerian PUPR, APBD PROV, APBD Kab.
Drainase Lingkungan									
- Pembangunan Jaringan Drainase	Kawasan	34	3.000	600	600	600	600	600	Kementerian PUPR, APBD PROV, APBD Kab.
- Peningkatan Jaringan Drainase	Kawasan	34	3.000	600	600	600	600	600	Kementerian PUPR, APBD PROV, APBD Kab.
Air Limbah									
- Pembangunan IPAL Komunal / Tangki septick individu	Kawasan	34	500	100	100	100	100	100	Kementerian PUPR, APBD PROV, APBD Kab.
-									Kementerian PUPR, APBD

ASPEK KEKUKUHAN / JENIS KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TAHUN PENANGANAN					KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	
									PROV, APBD Kab.
Persampahan									
- Pengadaan kontainer	Kawasan	34	500	100	100	100	100	100	Kementerian PUPR, APBD PROV, APBD Kab.
- Pengadaan Gerobak Motor	Kawasan	34	500	100	100	100	100	100	Kementerian PUPR, APBD PROV, APBD Kab.
- Pengadaan Gerobak	Kawasan	34	500	100	100	100	100	100	Kementerian PUPR, APBD PROV, APBD Kab.
- Pembentukan manajemen persampahan dan pengolahan sampah berbasis masyarakat	Kawasan	34	500	100	100	100	100	100	Kementerian PUPR, APBD PROV, APBD Kab.
Pengamanan Kebakaran									
- Penyediaan sarana proteksi kebakaran	Kawasan	34	500	100	100	100	100	100	Kementerian PUPR, APBD PROV, APBD Kab.
- Penyediaan prasarana proteksi kebakaran	Kawasan	34	500	100	100	100	100	100	Kementerian PUPR, APBD PROV, APBD Kab.

7.5 INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PRIORITAS DAN PENYUSUNAN DED KAWASAN PRIORITAS

Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas dan penyusunan ded kawasan prioritas sebagai berikut ini:

Tabel 7.5
Indikasi Program Dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas Dan Penyusunan DED Kawasan Prioritas

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun	Pembiayaan	Penanggung Jawab
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH
			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH
2	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun	Pembiayaan	Penanggung Jawab
			Persampahan			
			Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH
			Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainas Lingkungan	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH
			Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH
			Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH
			Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH
6	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH
8	Program Penyelenggaraan Proteksi Kebakaran	Penyediaan APAR	Penyediaan APAR	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun	Pembiayaan	Penanggung Jawab
9	Infrasturktur lainnnya	Penyediaan Infrastruktur	Penyediaan Penerangan Jalan	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH
			Pembangunan Lampu PJU	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH
			Pembangunan Gerbang Kawasan	2025	APBN/APBD	Kementerian PUPR / Perkim-LH

7.6 RENCANA AKSI MASYARAKAT *COMMUNITY ACTION PLAN* (CAP) DAN PRIORITAS KEBUTUHAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung ditetapkan sebagai kawasan prioritas 1 dalam upaya peningkatan kualitas permukiman, mengingat kondisi eksistingnya yang telah menunjukkan berbagai indikator kekumuhan. Intervensi program dan kegiatan difokuskan pada tujuh aspek utama yang saling terintegrasi, bertujuan untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan.

1. Bangunan Gedung

   Untuk meningkatkan ketertiban dan kualitas hunian, dilakukan kegiatan sosialisasi penataan kawasan serta pengaturan bangunan yang berada di zona tidak sesuai peruntukan (negative list). Selain itu, dilakukan juga rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan penghuni.

2. Jalan Lingkungan

   Kegiatan mencakup pemeliharaan struktur jalan lingkungan yang sudah ada, pembangunan jalan baru di area yang belum terlayani akses jalan, serta peningkatan jaringan jalan untuk mendukung mobilitas warga secara optimal.

3. Jaringan Air Minum

   Untuk menjamin ketersediaan air bersih, dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber air minum, serta penambahan sambungan rumah tangga agar seluruh warga memiliki akses air minum yang layak.

4. Drainase Lingkungan

   Guna mengurangi potensi genangan dan banjir lokal, dilakukan peningkatan dan pembangunan jaringan drainase lingkungan, yang dirancang sesuai dengan sistem aliran dan kondisi topografi kawasan.

5. Pengelolaan Air Limbah

   Kegiatan diarahkan pada peningkatan sarana pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual maupun komunal, dengan pendekatan berbasis masyarakat untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan.

6. Persampahan

   Dalam rangka mewujudkan kawasan yang bersih dan sehat, dilakukan peningkatan sistem pengelolaan persampahan sesuai standar teknis, termasuk penambahan sarana dan prasarana seperti tempat penampungan sementara, gerobak angkut, dan kontainer sampah.

7. Proteksi Kebakaran

   Untuk meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap risiko kebakaran, dilakukan penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran, seperti hidran umum, alat pemadam kebakaran ringan (APAR), dan pelatihan tanggap darurat bagi warga.

7.7 RENCANA DETAIL KONSEP DESAIN KAWASAN PRIORITAS (DED DAN RAB) KAWASAN PASAR LAMO PULAU PUNJUNG

Untuk menuntaskan permasalahan kekumuhan yang ada di Kawasan Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, telah direncanakan penyusunan Dokumen Detail Engineering Design (DED) sebagai acuan dalam pelaksanaan intervensi fisik di lapangan. Adapun pekerjaan yang akan direncanakan meliputi:

1. Pekerjaan Jalan Lingkungan
2. Pekerjaan Drainase Lingkungan
3. Pekerjaan Penerangan Jalan
4. Pekerjaan Lampu PJU
5. Pekerjaan Gerbang/Gapura
6. Pekerjaan Air Bersih
7. Pekerjaan Perbaikan Rumah
8. Pekerjaan Sanitasi/Pengolahan Air Limbah
9. Pengadaan Motor Pemadam Kebakaran
10. Pengadaan Motor Sampah

Rangkaian kegiatan ini merupakan langkah strategis dan terpadu untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta mewujudkan kawasan yang layak huni, sehat, dan berkelanjutan.

7.7.1 Rencana Jalan Lingkungan

Dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur dan mengatasi permasalahan aksesibilitas di kawasan kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, direncanakan pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan sepanjang 484 meter yang tersebar di dua lokasi prioritas dalam kawasan tersebut.
Pekerjaan ini bertujuan untuk:

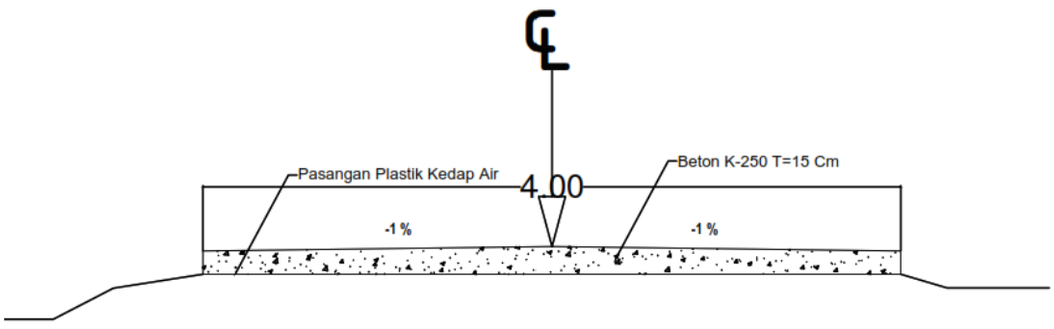
- Memperbaiki konektivitas antar permukiman;
- Meningkatkan sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki;
- Mendukung perbaikan sistem drainase lingkungan;
- Menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Perencanaan teknis meliputi:

- Peningkatan struktur perkerasan jalan sesuai standar teknis dan kebutuhan lokal
- Integrasi dengan jaringan utilitas dan drainase yang ada;
- Penyesuaian dengan kontur serta rencana tata ruang kawasan.

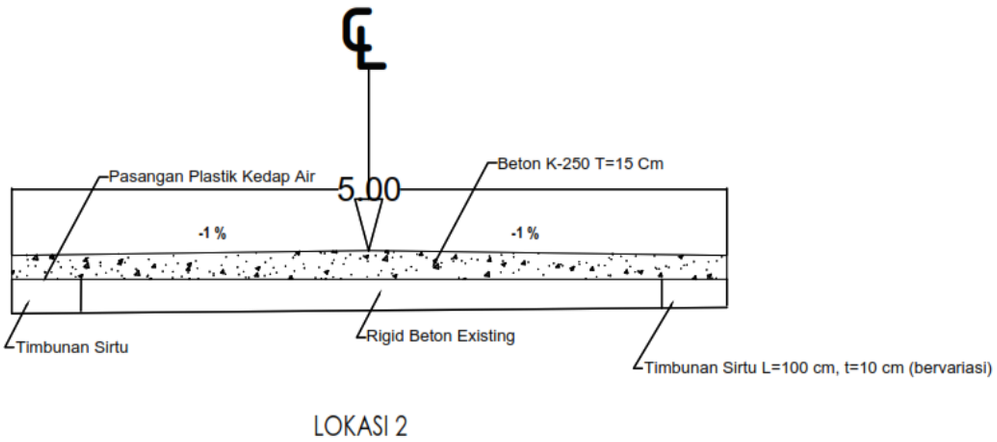
Dua lokasi tersebut ditetapkan berdasarkan hasil survei teknis dan pemetaan kondisi eksisting, di mana kondisi jalan saat ini belum layak dan cenderung memperparah kondisi kekumuhan. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan mampu mendorong percepatan penuntasan kekumuhan dan menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan layak huni. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar rencana penampang jalan lokasi 1 dan lokasi 2 dibawah ini.

Gambar 7-8 Rencana Penampang Jalan Lokasi 2



LOKASI 1

Gambar 7-9 Rencana Penampang Jalan Lokasi 1



LOKASI 2

Berikut ini rincian rencana angaran biaya (RAB) pengerjaan jalan lokasi 1 dan lokasi 2, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.6
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengerjaan Jalan

No.	Uraian Pekerjaan	Kode	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
				a	b	c
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan tenaga	1,2	Keg	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Keselamatan dan kesehatan kerja	1,19	Keg	1,000	9.050.000,00	9.050.000,00
3	Papan nama kegiatan	1.1.4.b.(a)	Bh	1,000	250.000,00	250.000,00
4	Stake out trase Jalan/Infrastruktur (Baru) dilapangan	1.7.4..a.(a)	M	569,00	5.125,11	2.916.187,73
5	Penyiapan badan jalan		M2	1.707,00	2.451,48	4.184.678,52
6	Pengurugan sirtu padat		M3	38,15	247.102,87	9.426.974,45
	Jumlah					**26.827.840,70**
II	PEKERJAAN PERKERASAN BETON					
1	Pemakaian plastik kedap air	-	M2	1.458,56	9.814,26	14.314.681,81
2	Perkerasan Jalan Beton Mutu K-250	5.3.(1a)	M3	731,70	2.142.122,10	1.567.390.740,94
3	Mengunakan media karung goni selama 4 hari	2.2.8.1.c.(a)	M2	1.376,00	17.790,89	24.480.266,02
4	Menyirami permukaan beton	2.2.8.1.a(a)	M2	1.376,00	2.378,36	3.272.618,41
5	Pekerjaan Galian Tanah (bahu jalan)	1.2.4.1.1	M3	91,28	226.885,72	20.710.128,90
6	Pekerjaan Bahu Jalan beton K-175		M3	91,28	1.862.063,84	169.969.187,54
	Jumlah					**1.800.137.623,61**
III	PEKERJAAN PASANGAN BATU					
1	Pekerjaan Galian Tanah		M3	25,80	226.885,72	5.853.651,68
2	Pekerjaan Pasangan Batu		M3	35,00	1.053.050,90	36.856.781,47
	Jumlah					**42.710.433,15**
	Jumlah					1.869.675.897,47
	PPN 11%					205.664.348,72
	Total Biaya					**2.075.340.246,19**

7.7.2 Rencana Drainase Lingkungan

Sebagai bagian dari upaya penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan, akan dilakukan pembangunan jaringan drainase sepanjang 600 meter di kawasan Pasar Lama Pulau Punjung. Pekerjaan ini dirancang untuk mengatasi permasalahan genangan air, sanitasi yang buruk, serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman secara menyeluruh.

Pembangunan jaringan drainase ini diarahkan untuk:

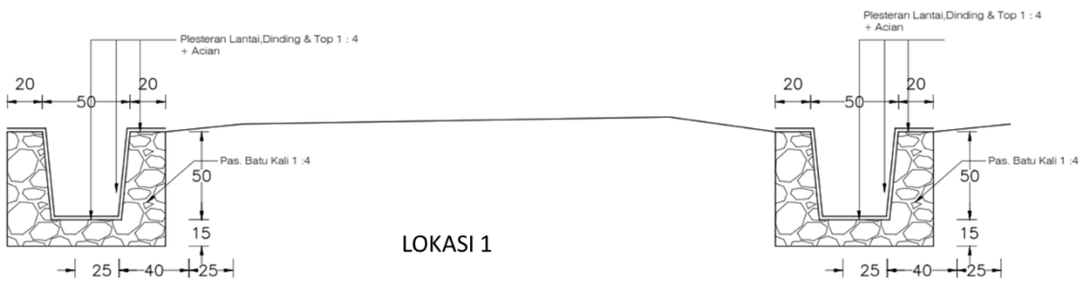
- Meningkatkan sistem pengelolaan air hujan dan limpasan permukaan;
- Mencegah terjadinya genangan dan banjir lokal di musim hujan;
- Mendukung sistem sanitasi lingkungan yang lebih baik;
- Menurunkan tingkat risiko terhadap kerusakan infrastruktur jalan dan bangunan.

Perencanaan teknis meliputi:

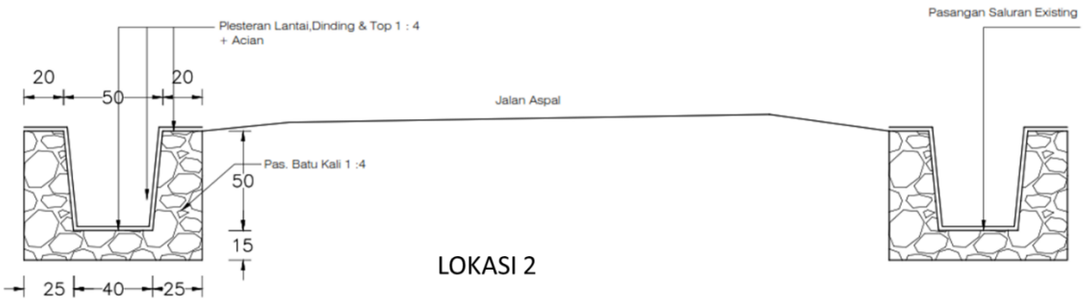
- Pembangunan saluran drainase terbuka dan/atau tertutup sesuai kebutuhan lapangan;
- Penyesuaian desain dengan kontur dan pola aliran air eksisting;
- Penggunaan material yang tahan lama dan ramah lingkungan;
- Integrasi dengan sistem jalan lingkungan dan jaringan utilitas lainnya.

Lokasi pembangunan drainase sepanjang 600 meter ini telah ditetapkan berdasarkan hasil pemetaan kawasan yang menunjukkan titik-titik rawan genangan dan saluran eksisting yang tidak berfungsi optimal. Kegiatan ini diharapkan mampu mendukung pencapaian kawasan yang bersih, sehat, dan bebas dari kekumuhan secara berkelanjutan. Untuk melihat rencana jaringan drianse pada lokasi 1 dan lokasi 2 dapat dilihat pada gambar penampang dibawah ini:

Gambar 7-10 Rencana Penampang Drainase Lokasi 1



Gambar 7-11 Rencana Penampang Drainase Lokasi 2



Berikut ini rincian rencana angaran biaya (RAB) pengerjaan drainse lokasi 1 dan lokasi 2, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.7
Rancangan Anggran Biaya (RAB) Pengerjaan Drainase Lingkungan

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**			**Sub Total A**	**3.789.800,00**
1	Pas. Plank Proyek	Unit	1,00	250.000,00	250.000,00
2	Dokumentasi, Penggambaran, Pencetakan dan Scanning Laporan/Administrasi	Ls	1,00	1.670.000,00	1.670.000,00
3	Fasilitasi Kegiatan K3	Ls	1,00	1.416.800,00	1.416.800,00
4	Pasang Bowplank	M'	6,00	75.500,00	453.000,00
			-		
B	**PEKERJAAN SALURAN**		**-**	**Sub Total B**	**407.339.400,00**
1	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual	M3	351,00	117.400,00	41.207.400,00
2	Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	M3	216,00	1.133.500,00	244.836.000,00
3	1 m2 Plesteran tebal 1,5 Cm, dengan mortar tipe S (12,5 Mpa)	M2	1.140,00	66.000,00	75.240.000,00
4	Pekerjaan Acian	M2	1.140,00	40.400,00	46.056.000,00
C	**PEMASANGAN PLAT DUIKER**		**216,00**	**Sub Total B**	**12.188.517,66**
1	Beton K - 250	M3	3,47	1.061.500,00	3.678.097,50
2	Bekisting	M2	4,95	146.400,00	724.680,00
3	Pembesian	Kg	393,22	19.800,00	7.785.740,16
	Jumlah				**423.317.717,66**
	PPN 11%				46.564.948,94
	Jumlah Total				469.882.666,60
	Pembulatan				**Rp 469.882.660,00**

7.7.3 Rencana Penerangan Jalan

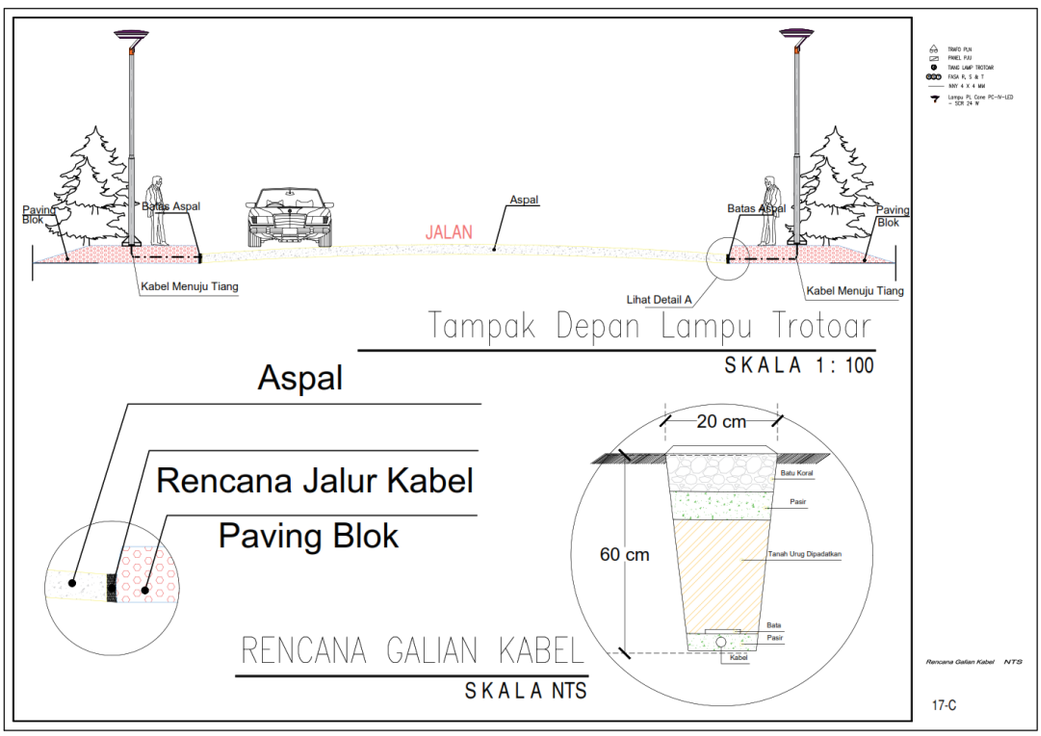
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan menciptakan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat, direncanakan pembangunan fasilitas penerangan jalan umum (PJU) di kawasan kumuh Pasar Lama Pulau Punjung. Penerangan jalan ini akan dipasang secara merata di sepanjang koridor jalan lingkungan dan titik-titik strategis pada dua lokasi prioritas kawasan dengan total panjang ruas jalan ±484 meter.

Spesifikasi rencana penerangan jalan meliputi:

- Pemasangan tiang dan lampu PJU berbasis energi listrik atau tenaga surya;
- Titik lampu direncanakan dengan jarak ideal antar unit (±25–30 meter per unit);
- Sistem instalasi memperhatikan jaringan kabel bawah tanah atau gantung sesuai kondisi lapangan;
- Penerapan desain ramah lingkungan dan hemat energi.

Penerangan jalan akan dibangun bersamaan dengan peningkatan jalan dan jaringan drainase, agar tercipta integrasi antar prasarana dan efisiensi pelaksanaan. Diharapkan, keberadaan PJU ini dapat menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang layak huni dan berkualitas. Berikut ini adalah gambar rencana lampu jalan di kawasan prioritas Pasar Lama Pulau Punjung, dapat dilihat sebagai berikut ini:

Gambar 7-12 Rencana Lampu Jalan



Berikut ini rincian rencana angaran biaya (RAB) pengerjaan penerangan jalan pada kawasan prioritas, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Gambar 7-13
Rencaan Anggaran Biaya (RAB) Pengerjaan Penerangan Jalan

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.
A.1	**PERENCANAAN LAMPU TROTOAR**				
	I. PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	1. Pekerjaan Mobilisasi / Demobilisasi Alat & Tenaga, Pengukuran Ulang dan Pelaporan	Keg.	1,00	4.950.000,00	4.950.000,00
	2. Pekerjaan SMK3	Keg.	1,00	7.565.250,00	7.565.250,00
				Sub Jumlah	**12.515.250,00**
	II. PEKERJAAN JALUR KABEL BESERTA KELENGKAPAN LAMPU DAN PANEL				
	1. Pekerjaan Dudukan Tiang Lampu Trotoal :				
	a. Pekerjaan Pondasi Tiang	Unit	40,00	596.226,63	23.849.065,08
	2. Pengadaan dan Pemasangan Tiang Lampu Trotoar Jalan	Unit	40,00	2.673.018,63	106.920.745,01
				Sub Jumlah	**130.769.810,09**
	III. PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU				
	1. Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Utama Sistem Lampu Penerangan				
	a. Sambungan Daya Listrik 3 Fasa 6.600 VA Dari Jaringan Trafo PLN Existing 1). Biaya Penyambungan (BP) Ke PLN Daya 6.600 VA 2). Uang Jaminan Langganan (UJL) Ke PLN Daya 6.600 VA 3). Biaya Nomor Induk Data Instalasi (NIDI) Dari Biro Instalatir 4). Biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO) Dari Lembaga Inspeksi Kelistrikan	VA	6.600,00	1.500,00	9.900.000,00
	b. Instalasi Kabel Feeder Menggunakan Kabel NYY 4 x 6 mm2, Dari kWh meter PLN ke Power Panel Lampu	M^1	5,00	115.000,00	575.000,00
	c. Pasang Power Panel Lampu Trotoal, meliputi : 1). 1 Unit Box Panel Listrik 3 Fasa, Uk. 600 x 400 x 300 mm, Panel Wall Mounting Tipe Outdoor - IP66 2). 1 Buah MCCB EasyPact EZC100F3020 3 Fasa 3 Kutub, 20 A (10 kA @415V AC) 3). 1 Buah MCB Domae 3 Fasa 3 Kutub, 16 A, 6 kA 4). 4 Buah MCB Domae 1 Fasa 1 Kutub, 10 A, 6 kA 5). 1 Buah Timer 200 Watt (TB 566 Uk. 110 x 54 mm / 220-240, 50/60 Hz) 6). 1 Buah Magnetik Kontaktor, 220 VAC, 25 A, 3 (N/O & N/C) LC1D128M7 7). 3 Buah Lampu Indikator Lengkap Accessories per Phasa (R, S, T) 8). 1 Btg Pipa Galvanis 1,5" + Klem Begol 9). 9 Buah Elbow 1,5" + Kelengkapannya 10). 7 M Kabel NYY 4 x 6 mm 11). 1 Set Kanal UNP Komplit 12). 4 Buah Balt Maching 5/8 x 12 13). 2,5 % Material & Alat Bantu serta Accessories Pelengkap (Hanger, Support, Fitting, Kabel Duct serta CU Bars, dll) 14). 7,5 % Settingan sistem instalasi dan wiring kabel kontrol panel	Set	2,00	9.350.000,00	18.700.000,00
	d. Pekerjaan Grounding Panel ; 1). Down Conductor Cable, NYA 6 mm2 2). Grounding Rod 5/8 x 3 meter, untuk elektroda tahanan tanah maks. 5 ohm 3). Material & Alat Bantu serta Accessories Pelengkap	Titik	1,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	2. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Trotoal :				
	a. Lampu PL Cone PC-IV-LED - SCR 24 W	Pcs	40,00	5.640.000,00	225.600.000,00
	b. Instalasi Kabel untuk power Lampu Trotoal ;				
	i. Pasang Kabel Power NYY 4 x 4 mm2 dari Power Panel melalui jalur kabel tanah, koneksi ke MCB yang ada di setiap tiang	M^1	1.000,00	111.000,00	111.000.000,00
	ii. Pasang Kabel Power NYY 3 x 2,5 mm2, dari MCB di setiap tiang ke lampu	M^1	70,50	31.300,00	2.206.650,00
	iii. Galian kabel tanah	M1	800,00	35.000,00	28.000.000,00
	c. Pasang MCB dan kelengkapannya di setiap tiang lampu ; i. MCB Domae 1 Fasa 1 Kutub, 4 A, 6 kA ii. Rel / Dudukan dan Line Up Terminal Block Kabel	Set	40,00	110.000,00	4.400.000,00
				Sub Jumlah	**402.581.650,00**
	JUMLAH				**545.866.710,09**
	PPN 11 %				**60.045.338,11**
	TOTAL BIAYA				**605.912.048,20**

7.7.4 Rencana Lampu PJU

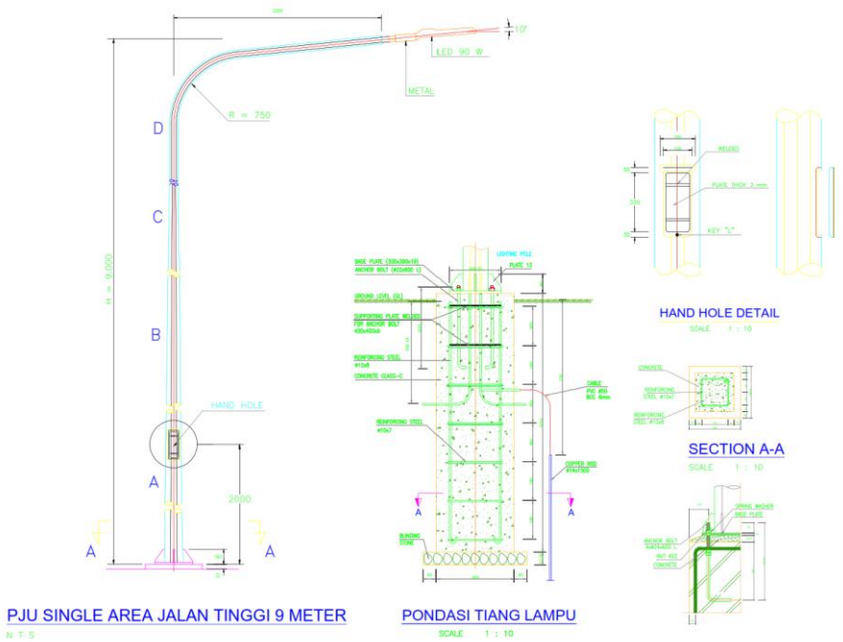
Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan mewujudkan kawasan yang aman, nyaman, serta layak huni, direncanakan pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang ruas jalan lingkungan kawasan Pasar Lama Pulau Punjung. Rencana ini merupakan bagian integral dari program penataan kawasan kumuh, yang bertujuan untuk menanggulangi kekurangan fasilitas dasar di lingkungan permukiman padat.

Adapun rencana teknis pemasangan PJU meliputi:

- Jarak antar lampu ±25 meter, disesuaikan dengan kontur jalan dan kebutuhan pencahayaan;
- Jenis lampu yang digunakan adalah lampu LED hemat energi, dengan pertimbangan efisiensi listrik dan ketahanan jangka panjang;
- Alternatif penggunaan lampu tenaga surya (solar cell) juga dipertimbangkan untuk efisiensi biaya operasional dan mendukung energi terbarukan;
- Pemasangan tiang PJU akan mengikuti standar teknis dan memperhatikan estetika kawasan.

Pemasangan lampu PJU ini akan dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan peningkatan jalan dan drainase, sehingga menghasilkan penataan kawasan yang utuh, fungsional, dan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 7-14 Rencana Gambar PJU Jalan



Berikut ini rincian rencana angaran biaya (RAB) pengerjaan lampu JPU pada kawasan prioritas, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.8
Rencaan Anggaran Biaya (RAB) Pengerjaan Lampu JPU

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga	(Rp.)
1	2	6	
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		12.515.250,00
II.	PEKERJAAN JALUR KABEL BESERTA KELENGKAPAN LAMPU DAN PANEL		59.000.000,00
III.	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU		161.725.000,00
	Jumlah		233.240.250,00
	PPN 11%		25.656.427,50
	Jumlah Total		258.896.677,50
	Pembulatan	Rp	258.896.600,00
terbilang : dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah			

7.7.5 Rencana Gerbang/Gapura

Dalam rangka memperkuat identitas kawasan serta mendukung program penataan lingkungan permukiman kumuh, direncanakan pembangunan gerbang kawasan di pintu masuk utama kawasan Pasar Lama Pulau Punjung. Gerbang ini akan menjadi elemen visual yang merepresentasikan transformasi kawasan menuju lingkungan yang lebih tertata, layak huni, dan berdaya saing.

Tujuan pembangunan gerbang kawasan ini meliputi:

- Memberikan identitas visual kawasan yang khas dan membedakan dari kawasan lain;
- Menunjukkan komitmen perubahan dan penataan kawasan kumuh;
- Meningkatkan kebanggaan dan rasa memiliki masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal;
- Menjadi titik orientasi (landmark) yang memperkuat tata ruang dan citra kawasan.

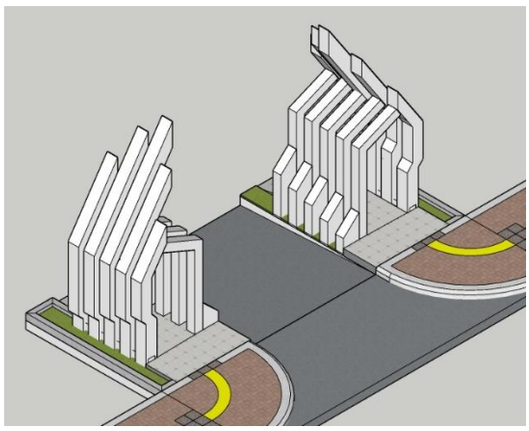
Adapun rencana teknis pembangunan gerbang kawasan mencakup:

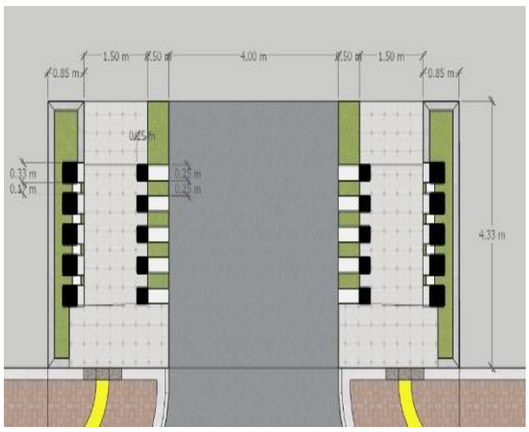
- Lokasi pembangunan berada di akses utama menuju kawasan permukiman Pasar Lama;
- Desain gerbang mengusung nilai lokal dan kearifan budaya daerah, menyesuaikan dengan karakter masyarakat Pulau Punjung;
- Struktur gerbang menggunakan material tahan cuaca seperti beton, baja ringan, dan elemen dekoratif artistik;
- Dilengkapi dengan pencahayaan arsitektural (lampu hias) untuk tampilan menarik di malam hari;

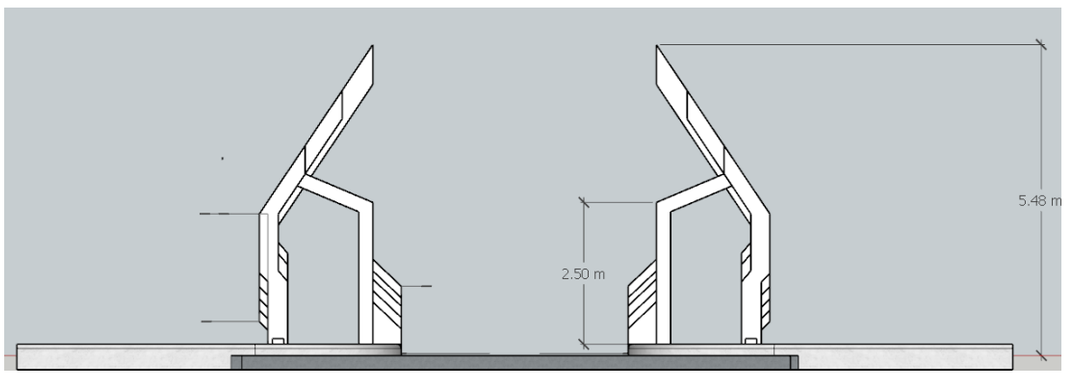
- Area sekitar gerbang ditata dengan elemen pendukung seperti taman kecil, papan nama kawasan, dan tempat duduk warga.

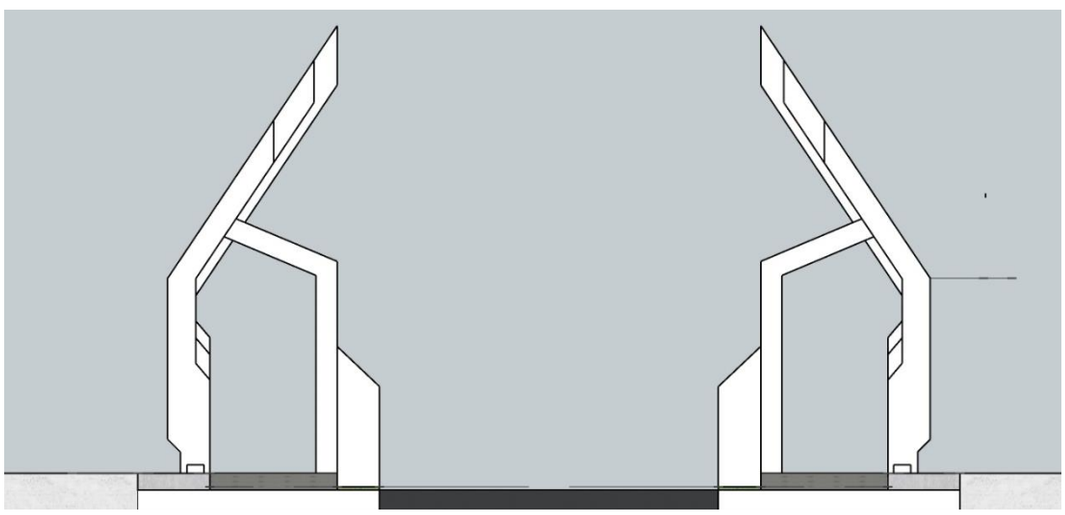
Dengan dibangunnya gerbang ini, diharapkan kawasan kumuh Pasar Lama Pulau Punjung tidak hanya mengalami peningkatan dari segi fisik, tetapi juga dari sisi citra, identitas kawasan, dan semangat kolektif masyarakat dalam menjaga hasil penataan yang telah dilaksanakan.

Gambar 7-15
Rencana Gerbang Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung









7.7.6 Rencana Air Bersih

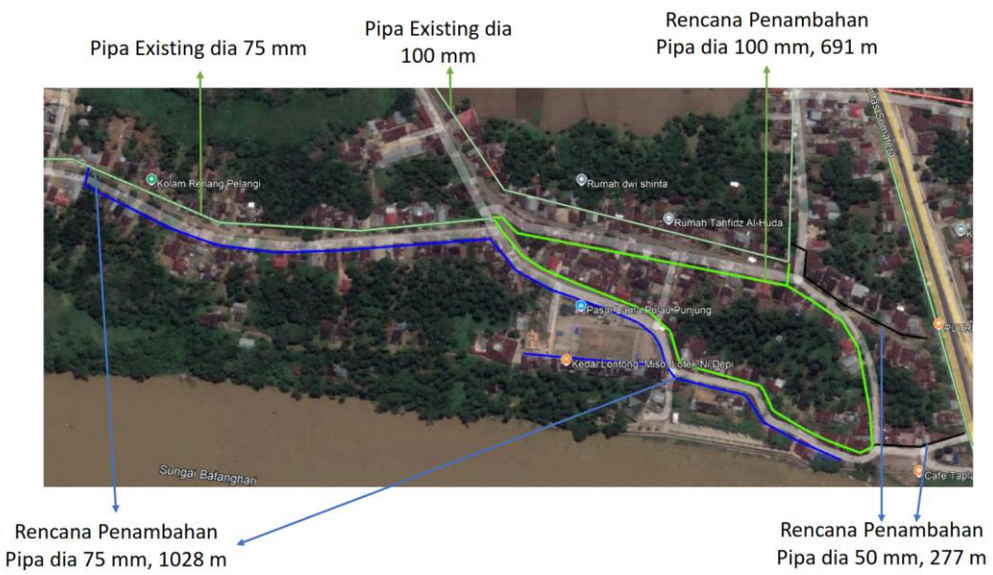
Penyediaan air bersih merupakan salah satu komponen penting dalam penataan kawasan kumuh. Di kawasan Pasar Lama Pulau Punjung, direncanakan pengembangan sistem penyediaan air bersih yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan meliputi:

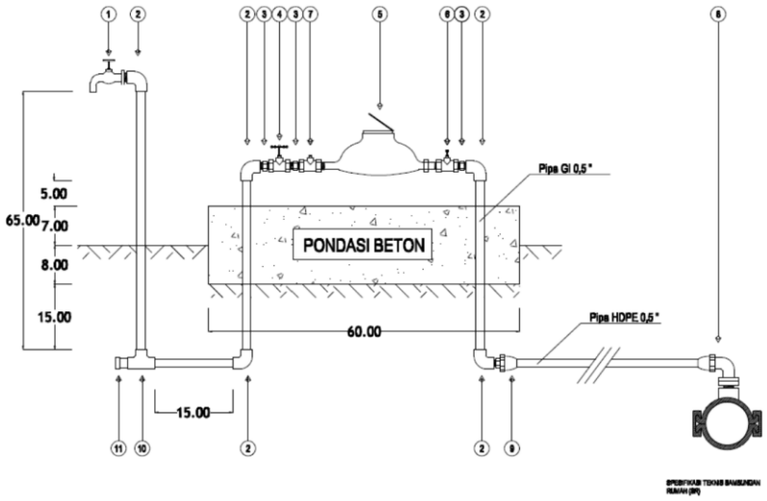
- Pemasangan jaringan distribusi air bersih di lingkungan permukiman;
- Pembangunan sambungan rumah tangga (SR) untuk warga yang belum memiliki akses air bersih;
- Pemanfaatan sumber air dari sumur bor dalam atau integrasi dengan jaringan PDAM setempat (jika tersedia);
- Pembangunan tandon air sebagai cadangan distribusi serta antisipasi kekeringan;
- Pelibatan masyarakat melalui kelembagaan lokal dalam pengelolaan dan pemeliharaan sistem air bersih.

Dengan adanya sistem air bersih yang baik, diharapkan masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif, serta mendukung terwujudnya kawasan permukiman yang tertata dan bebas dari kekumuhan.

Gambar 7-16 Rencana Jaringan Air Bersih



Rangkaian Sambungan Rumah



NO	KETERANGAN	NO	KETERANGAN
1	Kran GI 0,5 "	7	Katup Seersh / Check Valve 0,5 " (Kuningan)
2	Knee GI 0,5 "	8	Male Elbow HDPE 0,5 "
3	Double Neaple GI 0,5 "	9	Male Adaptor HDPE 0,5 "
4	Stop Kran GI 0,5 "	10	Tee GI 0,5 "
5	Watermeter + Copling SNI 0,5 "	11	End Cap GI 0,5 "
6	Plug Kran 0,5 " (Kuningan)		

Berikut ini rincian rencana angaran biaya (RAB) air bersih pada kawasan prioritas, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.9
Rencaan Anggaran Biaya (RAB) Pengerjaan Air Bersih

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE				
a	Rencana Pemasangan Pipa Dia 50 mm	m	277,00	56.606,00	15.679.862,00
b	Rencana Pemasangan Pipa Dia 75 mm	m	1.028,00	110.011,00	113.091.308,00
c	Rencana Pemasangan Pipa Dia 100 mm	m	691,00	160.149,00	110.662.959,00
d	Pipa HDPE Diameter Nominal 15 mm	m	2.850,00	10.000,00	28.500.000,00
II	Pekerjaan Galian Tanah Keras				
a	Rencana Pekerjaan Galian Tanah Keras	m3	500,9	211.200,00	105.785.856,00
b	Pipa HDPE Diameter Nominal 15 mm	m3	28,5	211.200,00	6.019.200,00
III	Pekerjaan Tanah Urugan				
a	Rencana Pekerjaan Urugan Kembali	m3	333,9	70.400,00	23.507.968,00
b	Pipa HDPE Diameter Nominal 15 mm	m3	19,0	70.400,00	1.337.600,00
III	Pekerjaan Sambungan Rumah				
a	Sambungan Rumah Diameter 50 mm	Unit	65	1.146.676,14	74.533.949,00
b	Sambungan Rumah Diameter 75 mm	Unit	95	1.168.126,14	110.971.983,15
c	Sambungan Rumah Diameter 100 mm	Unit	125	1.332.775,82	166.596.976,99
IV	PEKERJAAN LAINNYA				
a	Crossing Jalan Aspal	Titik	5	858.703,70	4.293.518,49
				JUMLAH	**760.981.180,62**

7.7.7 Rencana Perbaikan Rumah

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas permukiman, direncanakan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan kumuh Pasar Lama Pulau Punjung. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung terciptanya lingkungan hunian yang sehat, aman, dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tinggal di rumah dengan kondisi fisik yang tidak memenuhi standar kelayakan. Rencana perbaikan rumah ini akan difokuskan pada:

- Rumah-rumah dengan kondisi struktur bangunan rusak, atap bocor, lantai tanah, dan tidak memiliki fasilitas sanitasi dasar;
- Pemberian bantuan stimulan berupa material bangunan atau dana bantuan yang digunakan untuk rehabilitasi rumah;
- Pendampingan teknis kepada warga dalam proses perbaikan agar sesuai dengan standar teknis hunian layak;
- Pelibatan masyarakat secara swadaya dan gotong royong, guna mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan rumah.

Kriteria rumah yang akan diperbaiki ditentukan melalui:

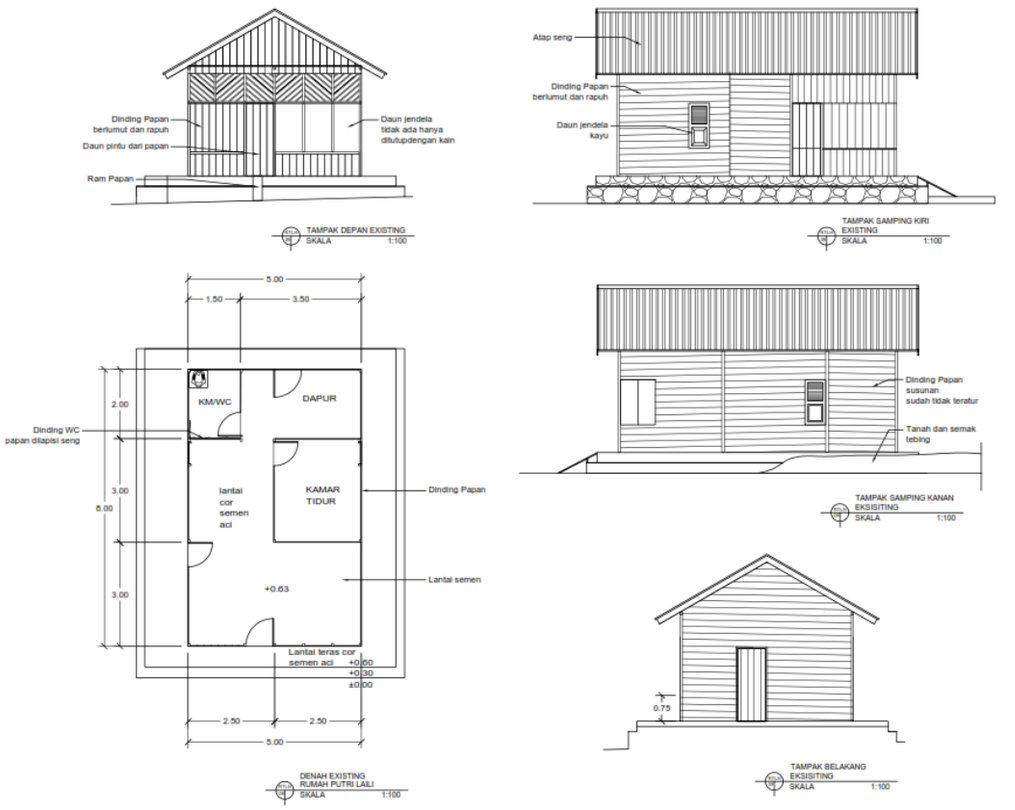
- Hasil verifikasi lapangan dan pendataan sosial ekonomi masyarakat;
- Tingkat kerusakan bangunan dan ketidaksesuaian dengan standar rumah sehat;
- Kesesuaian dengan data RTLH yang tercantum dalam Basis Data Terpadu (BDT)/DTKS.

Perbaikan rumah ini diharapkan dapat:

- Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh;
- Mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait permukiman layak;
- Menjadi bagian dari upaya terpadu pengentasan kawasan kumuh secara fisik dan sosial.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, kawasan Pasar Lama Pulau Punjung diharapkan dapat mengalami transformasi tidak hanya pada aspek infrastruktur lingkungan, tetapi juga pada kualitas hunian warga secara menyeluruh. Berikut ini gambar rencana rumah tidak layak huni yang akan direncanakan pada kawasan Pasar Pulau Punjung sebagai berikut ini:

Gambar 7-17 Rencana Rumah Tidak Layak Huni



Berikut ini rincian rencana angaran biaya (RAB) pengerjaan rumah tidak layak huni (RTLH) pada kawasan prioritas, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.10
Rencaan Anggaran Biaya (RAB) Pengerjaan Rumah RTLH

REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA (HARGA PERKIRAAN SENDIRI)

KEGIATAN : PENANGANAN KAWASAN KUMUH
LOKASI : PASAR LAMA PULAU PUNJUNG

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA Rp.
1	HARNITA	112,155,500.00
2	EDISON	113,537,600.00
3	YANTINIS	87,778,500.00
4	PUTRI LAILI	75,443,000.00
5	SISKA REFDILA	115,888,000.00
6	YUSNIMAR	190,095,800.00
7	YULITAS HENDRA	28,297,500.00
8	ONLIWARTI	79,105,950.00
JUMLAH TOTAL		802,301,850.00

7.7.8 Rencana Sanitasi/Pengolahan Air Limbah

Sebagai bagian dari penanganan kawasan kumuh secara terpadu, salah satu aspek krusial yang perlu ditangani adalah sistem sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik. Di kawasan kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, kondisi eksisting menunjukkan sebagian besar rumah tangga belum memiliki sistem pengolahan air limbah yang layak, dan masih terdapat pembuangan limbah ke saluran terbuka atau lingkungan sekitar, yang berisiko terhadap pencemaran air tanah dan menurunnya kualitas lingkungan.

Untuk itu, direncanakan beberapa strategi dan kegiatan dalam pengembangan sistem sanitasi lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, antara lain:

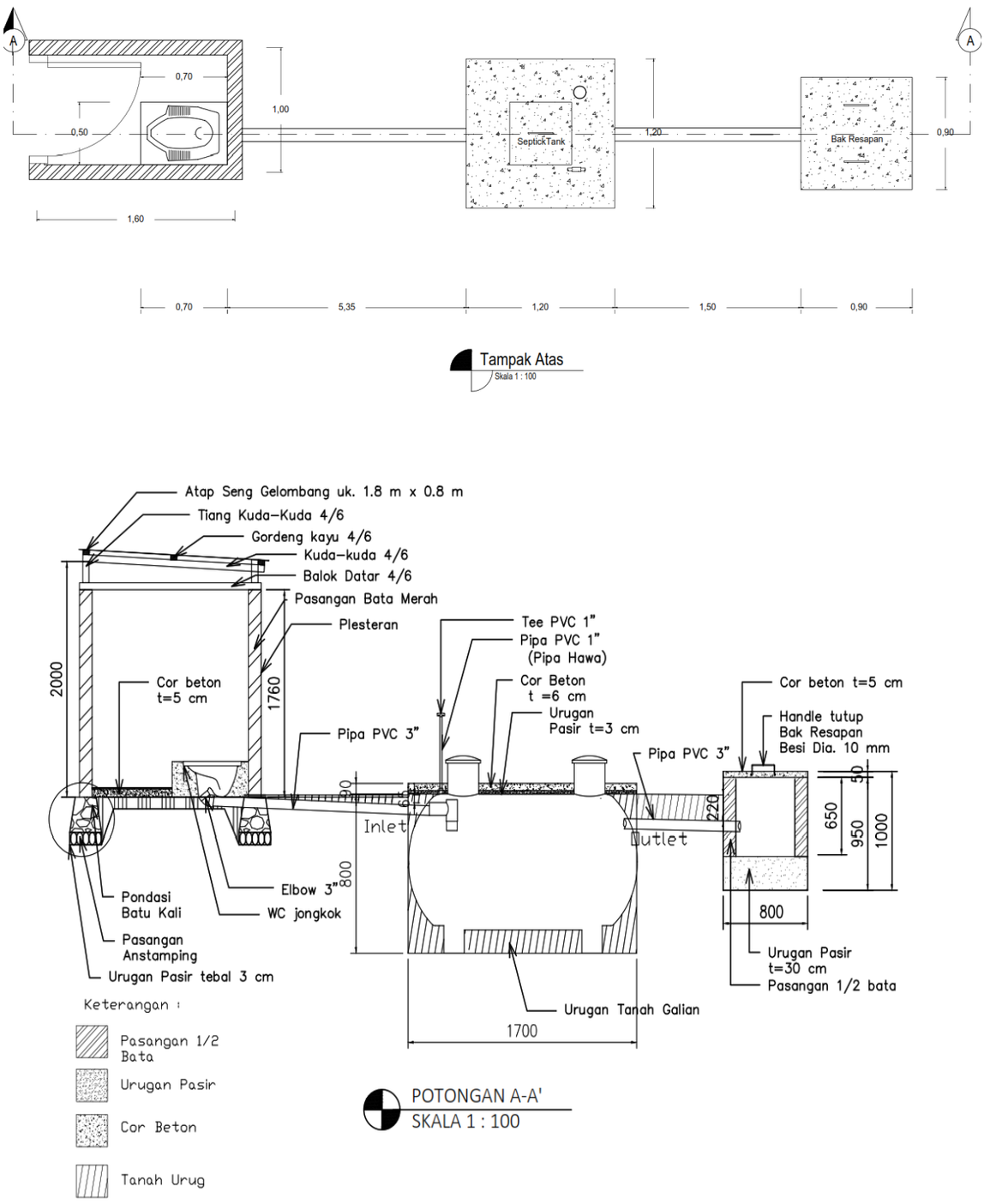
- Pembangunan tangki septik individual atau komunal bagi rumah tangga yang belum memiliki sistem pengolahan limbah domestik;
- Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, khususnya untuk lokasi dengan kepadatan tinggi dan keterbatasan lahan;
- Rehabilitasi saluran pembuangan air limbah yang saat ini masih menyatu dengan drainase, agar menjadi sistem terpisah (off-site);
- Pembangunan sumur resapan dan biofilter untuk mengurangi limbah cair langsung ke tanah atau saluran;
- Penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pemeliharaan fasilitas sanitasi.

Pelaksanaan kegiatan sanitasi ini akan dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat melalui skema:

- Bantuan stimulan sanitasi dari pemerintah (DAK Sanitasi, APBN, atau APBD);
- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan sistem;
- Koordinasi kelembagaan dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan fasilitator teknis.

Diharapkan, dengan perbaikan sistem sanitasi dan pengelolaan air limbah ini, kawasan Pasar Lama dapat mengalami peningkatan kualitas lingkungan yang signifikan, mengurangi risiko kesehatan masyarakat, serta mendukung pencapaian target bebas kumuh secara menyeluruh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Gambar 7-18 Rencana Sanitasi



Berikut ini rincian rencana angaran biaya (RAB) pengerjaan sanitasi pada kawasan prioritas, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.11
Rencaan Anggaran Biaya (RAB) Pengerjaan Sanitasi Limbah

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN IPAL**				
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
a.	Papan Informasi (Plat Besi) Beserta Pengecatan Ulang Papan Informasi Lama	1.00	Unit	1,900,000.00	1,900,000.00
b.	Plank Proyek	1.00	Unit	300,000.00	300,000.00
c.	Biaya SMKK	1.00	Ls	2,720,000.00	2,720,000.00
		JUMLAH I			**4,920,000.00**
II.	**PEKERJAAN JARINGAN PERPIPAAN**				
a.	Galian Tanah Biasa Untuk Pemasangan Pipa	116.20	M3	105,688.00	12,280,945.60
b.	Urugan Tanah Bekas Galian	103.44	M3	70,400.00	7,282,176.00
c.	Elbow 90 degree PVC SC 4"	350.00	Bh	38,400.00	13,440,000.00
d.	Pemasangan Pipa PVC Type D 4" untuk (Outlet & Inlet)	2,800.00	M1	85,833.00	240,332,400.00
		JUMLAH II			**273,335,521.60**
III.	**PENGADAAN TANGKI SEPTIK & ACCESSORIES**				
a.	Pengadaan Tangki Septik Pabrikasi Kapasitas 800 L	350.00	Unit	3,750,000.00	1,312,500,000.00
b.	Pengadaan Pipa Hawa PVC Type D (Panjang 0,5 m dia. 50 mm)	175.00	m	27,500.00	4,812,500.00
c.	Pengadaan Tee PVC tipe D dia. 50 mm	350.00	bh	8,600.00	3,010,000.00
d.	Pengadaan Pipa PVC Type D 4" Untuk Penyedotan (Panjang Minimal 0,2 m)	70.00	m	56,250.00	3,937,500.00
		JUMLAH III			**1,324,260,000.00**
IV.	**PEMASANGAN TANGKI SEPTIK DAN ASESORIES**				
a.	Galian Tanah Biasa	579.60	M3	105,688.00	61,256,764.80
b.	Urugan Tanah Bekas Galian	196.73	M3	70,400.00	13,849,651.20
c.	Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa untuk Lantai Penutup Tangki Septik	50.40	M3	1,243,141.11	62,654,311.87
d.	Besi D10 Untuk Pegangan Tutup Beton Tangki Septick	107.89	Unit	172.39	18,598.94
e.	Bekesting Untuk Beton Penutup Tangki Septik (2 kali pakai)	175.00	Unit	66,000.00	11,550,000.00
f.	Biaya Pengangkutan dan Pemasangan Tangki Septik	350.00	Unit	35,000.00	12,250,000.00
g.	Biaya Pengangkutan material Pasangan dan Lainnya	350.00	pkt	33,000.00	11,550,000.00
		JUMLAH IV			**173,129,326.81**
B.	**PEKERJAAN PENGADAAN PAS. KLOSET DAN RESAPAN**				
I.	**PEKERJAAN RESAPAN**				
a.	Galian Tanah Biasa Untuk Lubang Resapan	255.85	M3	105,688.00	27,040,274.80
b.	Pas. Bata 1 : 4	896.00	M2	137,902.05	123,560,236.80
c.	Pek. Plesteran 1 : 4	252.00	M2	62,970.16	15,868,480.32
d.	Pek. Acian	252.00	M2	50,251.30	12,663,327.60
e.	Pek. Isian Lubang Resapan				
	1. Kerikil Beton	42.88	M3	250,000.00	10,718,750.00
	2. Pasir Pasang	42.88	M3	265,000.00	11,361,875.00
f.	Penutup Lubang Resapan				
	1. Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa Untuk Penutup Lubang Resapan	17.01	M3	1,243,141.11	21,145,830.26
	2. Penulangan Beton Penutup Lubang Resapan (Besi d10)	2,416.68	kg	17,239.20	41,661,629.86
	3. Bekesting Untuk Beton Penutup Lubang Resapan	175.00	Unit	57,000.00	9,975,000.00
g.	Besi d10 Untuk Pegangan Tutup Beton Lubang Resapan	215.78	Unit	17,239.20	3,719,788.38
		JUMLAH I			**277,715,193.01**
II.	**PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KLOSET**				
a.	Pemasangan Closet Jongkok Corong Porselen	350.00	Unit	577,833.02	202,241,557.32
b.	Pas. Bata 1 : 4	252.00	M2	137,902.05	34,751,316.60
c.	Pek. Plesteran 1 : 4	252.00	M2	62,970.16	15,868,480.32
d.	Pek. Acian	310.14	M2	50,251.30	15,584,686.93
		JUMLAH II			**268,446,041.16**
C.	**PEKERJAAN KAMAR PENUTUP WC/CLOSET**				
a.	Galian Tanah untuk Pemasangan Pondasi	218.40	M3	105,688.00	23,082,259.20
b.	Pekerjaan Pasangan Aanstamping	54.60	M3	596,783.00	32,584,351.80
c.	Pekerjaan Pasangan Batu Kali 1PC : 4PS	163.80	M3	1,005,669.50	164,728,664.10
d.	Pasangan Batu Bata	2,587.20	M2	142,520.73	368,729,632.66
e.	Pekerjaan Kuda-kuda	9.44	M3	5,485,700.00	51,793,785.12
f.	Pekerjaan atap	756.00	M2	86,922.00	65,713,032.00
g.	Pekerjaan Plesteran	5,174.40	M2	79,346.52	410,570,633.09
h.	Pekerjaan Acian	5,174.40	M2	50,251.30	260,020,326.72
i.	Pekerjaan Pengecatan	5,174.40	M2	29,573.50	153,025,118.40
j.	Pekerjaan Lantai beton 5 cm	18.52	M2	1,243,141.11	23,016,757.62
k.	Pemasangan Pintu PVC	350.00	BH	466,972.00	163,440,200.00
D	**PEKERJAAN AIR BERSIH**				
a.	Kran Air	350.00	BH	131,051.25	45,867,937.50
b.	Floor Drain	350.00	BH	79,750.00	27,912,500.00
c.	Pipa Air Kotor PVC 3"	1,400.00	M	107,013.50	149,818,900.00
d.	Pipa Air Bersih PVC 3/4"	1,400.00	M	27,434.00	38,407,600.00
HARGA TOTAL					**4,300,517,780.79**
PPN 11 %					**473,056,955.89**
HARGA TOTAL + PPN					**4,773,574,736.68**
PEMBULATAN					**4,773,575,000.00**

Rekapitulasi RAB untuk kawasan Pasar Lama Pulau Punjung mencakup serangkaian intervensi prioritas yang dirancang secara terintegrasi guna menuntaskan permasalahan kekumuhan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan meliputi perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, sanitasi, air bersih, penerangan jalan umum, perbaikan rumah tidak layak huni, serta pembangunan elemen pendukung kawasan seperti gerbang dan ruang terbuka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7-1 Rekapitulasi Kegiatan Penanganan Kawasan Prioritas Pasar Lama Pulau Punjung

NO.	URAIAN PEKERJAAN	'OLUM	SATUAN	TOTAL BIAYA	TAHUN PENANGANAN DAN SUMBER ANGGARAN								RENCANA AKSI KOLABORASI
					2025				2026				
				Rp.	APBN	APBD	APBD P	CSR	APBN	APBD	APBD P	CSR	
1	Pekerjaan Jalan Lingkungan	484	M	1.071.659.489,20	1.071.659.489,20	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI DITAHUN 2025
2	Pekerjaan Drainase Lingkungan	600	M	469.882.666,60	469.882.666,60	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI DITAHUN 2025
3	Pekerjaan Penerangan Jalan	40	Unit	605.912.048,20	605.912.048,20	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI DITAHUN 2025
4	Pekerjaan Lampu PJU	10	Unit	258.896.600,00	258.896.600,00	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI DITAHUN 2025
5	Pekerjaan Gerbang Gapura	1	Paket	92.272.000,00	92.272.000,00	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI DITAHUN 2025
6	Pekerjaan Air Bersih	285	SR	765.981.180,62	765.981.180,62	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI DITAHUN 2025
7	Pekerjaan Perbaikan Rumah	40	Unit	1.310.000.000,00	1.285.000.000,00	-	25.000.000	30.000.000	-	-	-	-	PEKERJAAN PERBAIKAN SELESAI DITAHUN 2025 DENGAN KOLABORASI APBD DAN CSR
8	Pekerjaa Sanitasi/Pengolahan Air Limbah	4	Unit	54.184.000,00	54.184.000,00	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI DITAHUN 2025
9	Motor Pemadam Kebakaran	2	Unit	856.891.140,00	428.445.570,00								SELESAI DITAHUN 2025
10	Motor Sampah	2	Unit	180.000.000,00	90.000.000,00								SELESAI DITAHUN 2025
JUMLAH TOTAL				5.665.679.124,62									

Page 1

BAB 8
RENCANA PENYEDIAAN TANAH

8.1 RUMUSAN RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan dengan pola pemugaran (slum upgrasing), permukiman kembali (resettlement) atau peremajaan (regeneration/renewal). Berbagai pola tersebut diupayakan melalui berbagai program baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman disebutkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat. Rencana penyediaan tanah khusunya untuk pola penanganan peremajaan dan permukiman kembali.

Dalam Pengaturan penyelenggaraan perumahan, meliputi kegiatan penyediaan tanah, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pendanaan pembiayaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 pasal 105 tentang penyediaan tanah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk penetapannya di dalamnya rencan tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh. Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan melalui:

1. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
2. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
3. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
4. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
5. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.

Untuk Kabupaten Dharmasraya, pola penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuhnya lebih dominan dengan pola pemugaran, dimana tingkat kekumuhan di kawasan adalah kumuh ringan. Sedangkan untuk untuk beberapa rencana infrastrukturnya dialkukan dengan pola peremajaan karena adanya pengembangan dan pembangunan baru seperti pengembagan jalan lingkungan, drainase lingkungan, air minum, pengelolaan dan pengolahan persampahan serta prasarana proteksi kebakaran.

Penyediaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Rencana penyediaan tanah dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman di Kabupaten Dharmasraya adalah dalam konteks alokasi tempat untuk prasarana dan sarana :

1. Peningkatan kualitas jalan lingkungan sesuai standar teknis;
2. Sistem Penyediaan Air Minum sesuai standar teknis;
3. Sistem Jaringan Drainase khususnya kawasan yang tidak memiliki drainase;
4. Sistem Pengelolaan Air Limbah sesuai standar teknis;
5. Sistem Pengelolaan Persampahan 3R sesuai standar teknis;
6. Sistem Proteksi Kebakaran sesuai standar teknis khususnya penyediaan hidran kebakaran atau tandon air.

8.2 POLA PENANGANAN PEREMAJAAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI

Pola penyediaan tanah secara umum dibagi kepada tiga kelompok utama yang berperan sebagai sektor pembangunan perumahan yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Pemerintah berperan mengatur dalam penempatan lokasi-lokasi permukiman melalui rencana tata ruang, sedangkan pihak swasta berperan dalam menerjemahkan rencana tersebut dilapangan, karena konstribusi pengembang swasta dalam penyediaan perumahan tetap sangat penting untuk mengakomodasikan demand (kebutuhan) yang terus meningkat. Pola

penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan adalah sebagai berikut :

1. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang lansung dikuasai negara;
2. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
3. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
4. Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah;
5. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar;dan/atau
6. Pengadaan tanah untuk pemabngunan bagi kepentingan umum.

Hal ini penting karena, pengadaan atau peyediaan tanah dalam RP2KPKPK akan melaksanakan/disediakan minimal 1 tahun sebelum program kegiatan penanganan permukiman kumuh dilaksanakan. Berikut dapat dilihat uraian pola penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan yaitu :

1. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasi oleh Negara. Beberapa hal terkait dengan pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
   - Tanah yang langsung dikuasai oleh negara digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan dan/atau kawasan permukiman diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman;
   - Pemberian hak atas tanah didasarkan pada keputusan gubernur atau walikota tentang penetapan lokasi atau izin lokasi;
   - Dalam hal tanah yang langsung dikuasi Negara terdapat garapan masyarakat, hak atas atas diberikan setelah pelaku pembangunan perumahan dan permukiman selaku pemohon hak atas tanah menyelesaikan ganti rugi atas seluruh garapan masyarakat berdasarkan kesepakatan;
   - Salah satu pemberian hak atas tanah adalah pemberian Hak Guna Bangunan (HGB), dimana yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) adalah warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum indonesia dan berkedudukan di Indonesia . Pemegang HGB yang tidak lagi memenuhi syarat tersebut dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat, apabila dalam jangka waktu tersebut haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut hapus karena hukum.

2. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah

   Langkah dalam konsolidasi tanah oleh pemilik tanah sebagai berikut:

   - Konsolidasi tanah dapat dilakukan di atas tanah milik pemegang hak atas tanah dan/atau di atas tanah negara yang digarap oleh masyarakat.
   - Konsolidasi tanah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan
     - Antar pemegang hak atas tanah
     - Antar pemegang tanah negara;atau
     - Antara penggarap tanah Negara dan Pemegang hak atas tanah
   - Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila 60% dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi paling sedikit 60% dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi menyatakan persetujuan;
   - Konsolidasi taah dapat dilaksanakan apabila sedikit 60% tidak mengurangi hak masyarakat sebesar 40% untuk mendapatkan aksesibiltas;
   - Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah deret atau rumah susun.

   Adapun manfaat konsolidasi tanah antara lain:

   a. Memenuhi kebutuhan lingkungan yang teratur, tertib dan sehat;
   b. Keuntungan estetika/keindahan view yang lebih baik kepada pemilik tanah;
   c. Meningkatakan pemerataan pembangunan (membangun tanpa mengurus);
   d. Menghindari akses-kases yang mungkin timbul dalam proses penataan dan penyediaan tanah;
      - Mempercepat pertumbuhan wilayah;
      - Menertibkan adminstrasi pertanahan
      - Menghemat baiay pemerintah
      - Meningkatkan efesiensi dan produktifitas penggunaan tanah;
      - Meningkatkan harga properti peserta;
      - Susunan organisasi pelaksana konsolidasi tanah, termasuk keikutsertaan wakil peserta secara aktif dalam Tim Pelaksana.

3. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah

   Proses peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah antara lain:

   - Peralihan atau pelepasan hak atas tanah dilakukan setelah badan hukum memperoleh izin lokasi;
   - Peralihan hak atas dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah setelah ada kesepakatan bersama;

- Pelepasan hak atas tanah dilakukan dihadapan pejabat berwenag;
- Peralihan hak atau pelepasana hak atas tanah wajib didaftarkan pada kantor pertahanan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah

   Proses pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sebagai berikut:
   - Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah milik negara atau milik daearh bagi pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman diperuntukan pembangunan rumah umum dan/atau rumah khusus;
   - Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan.

5. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar seperti;
   - Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar bagi pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman diperuntukan pembangunan rumah umum, rumah khusus dan penataan permukiman kumuh;
   - Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum

   Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
   - Berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pengadaan tanah bagi pemabngunan untuk kepentingan umum;
   - Dalam pasal 10 huruf h, dicantumkan salah satunya untuk rumah MBR, untuk penataan wilayah kumuh;
   - Ditetapkan dahulu menjadi lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;
   - Prosesnya dilaksankan oleh panitia pengadaan tanah;
   - Anggaran pemerintah

   Pengadaan untuk kepentingan umum berfungsi:
   - Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum bagi pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman diperuntukan pembangunan rumah umum, rumah khusus dan permukiman kumuh.

- Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam hal pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, dapat dikerjasamakan dengan investor (badan usaha swasta) adalah :

a. Infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
b. Infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
c. Infrastruktur air limbah, meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama dan sarana persampahan yang meliputi pengangkutan dan tempat pembuangan.

BAB 9
RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pendanaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pendanaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. Sumber pendanaan dapat berasal dari:

9.1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

Sumber dana APBN dapat diperoleh untuk pembiayaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pemerintah pusat dalam penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya Selatan yaitu pada lokasi permukiman kumuh skala kawasan dengan luasan lebih dari 15 Ha (>15 Ha).

Sesuai dengan sebaran permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya, maka ada lima lokasi permukiman kumuh yang direncanakan penanganannya dalam skala kawasan dan luasannya > 15 Ha, yaitu :

1) Kawasan Pulau Punjung dengan luas 17,75 hektar
2) Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung dengan luas 15,40 hektar
3) Kawasan Koto Daulat dengan luas 15,43 Hektar
4) Kawasan Koto Padang dengan luas 33,18 hektar
5) Kawasan Koto Baru dengan luas 68,98 hektar
6) Kawasan Pasar Koto Baru dengan luas 21,57 hektar
7) Kawasan Padukuan dengan luas 21,98 hektar

Adapun kebutuhan investasi meliputi :

a. Pengembangan jaringan perpipaan air bersih berbasis Masyarakat
b. Rehabilitasi rumah tidak layak huni
c. Pengadaan prasarana dan sarana persampahan yang menunjang pengelolaan sampah 3R
d. Pengadaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran
e. Pembangunan RTH lingkungan dan RTH tepi jalan
f. Peningkatan jalan lingkungan dan saluran drainase lingkungan

9.2 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI

Sumber dana APBD untuk pembiayaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Kewenangan pemerintah provinsi dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Pariama yaitu pada lokasi permukiman kumuh dengan luasan antara 10 Ha - 15 Ha. Sesuai dengan sebaran permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya, maka ada lokasi permukiman kumuh yang direncanakan penanganannya dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1) Kawasan Kubang Panjang dengan luas 13,61 Hektar
2) Kawasan Sungai Kilangan dengan luas 13,70 hektar
3) Kawasan Sungai Dareh dengan luas 13,89 hektar.
4) Kawasan Siguntur I dengan luas 10,55 hektar.
5) Kawasan Sikabau dengan luas 14,3 hektar.
6) Kawasan Koto dengan luas 14,6 hektar.
7) Kawasan Sungai Bulian dengan luas 12,55 hektar.
8) Kawasan Koto Baru 3 dengan luas 10,5 hektar
9) Kawasan Ampang Kuranji dengan luas 10,82 hektar
10) Kawasan Bonjol dengan luas 12,96 hektar
11) Kawasan Ranah Baru dengan luas 14,86 hektar
12) Kawasan Padang Bungur dengan luas 12,56 hektar

Untuk penanganan kawasan ini meliputi:

a. Rehabilitas RTLH
b. Pembangunan TPS 3R
c. Pengadaan prasarana dan sarana persampahan yang menunjang pengelolaan sampah 3R
d. Pengadaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran
e. Pengembangan jaringan perpipaan air bersih berbasis masyarakat
f. Peningkatan kualitas jaringan drainase lingkungan

9.3 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN

Sedangkan lokasi permukiman kumuh lainnya (15 Kelurahan/Desa) yang memiliki luasan permukiman kumuh kurang dari 10 Ha. dapat ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui APBD Kabupaten Dharmasraya. Sesuai dengan identifikasi yang telah dilakukan dan ditetapkan melalui Surat keputusan Buapti Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/160/KPTS-

BUP/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/100/KPTS-BUP/2025 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan kewenangan yang ditentukan terdapat 15 lokasi sebagai berikut :

1. Kawasan Silago Nagari SIlago;
2. Kawasan Tarandam Sungai Kambut Nagari Sungai Kambut;
3. Kawasan Lambau Nagari Sungai Kambut;
4. Kawasan Siguntur 2 Nagari Siguntur;
5. Kawasan Marga Makmur Nagari Taratak Tinggi;
6. Kawasan Lubuk Agam Nagari Ampang Kuranji;
7. Kawasan Teluk Alai Nagari Ampang Kuranji;
8. Kawasan Sungai Langkok Nagari Sungai Langkok;
9. Kawasan Sipangkur Nagari Sipangkur;
10. Kawasan Sopan Jaya Nagari Sopan Jaya;
11. Kawasan Balai Tangah Nagari Sungai Rumbai;
12. Kawasan Tuo Nagari Bonjol;
13. Kawasan Ranah Nagari Koto Besar;
14. Kawasan Bukit Sembilan Nagari Alahan Nan Tigo;
15. Kawasan Sungai Limau Nagari Asam Jujuhan.

Sementara uuntuk penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada kawasan ini meliputi:

a. Rehabilitasi RTLH
b. Pemeliharaan TPS 3R
c. Perawatan prasarana dan sarana persampahan yang menunjang pengelolaan sampah 3R
d. Perawatan prasarana dan sarana proteksi kebakaran
e. Pemeliharaan jaringan perpipaan air bersih berbasis masyarakat
f. Perbaikan jaringan drainase lingkungan

9.4 SUMBER LAINNYA

Sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pembiayaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya antara lain melalui CSR swasta. Sumber dana dari CSR ini bisa berkolaborasi dengan sumber dana APBN dan APBD agar penanganan permukiman kumuh dapat tuntas. Beberapa kegiatan penanganan permukiman kumuh yang pembiayaannya bersumber dari CSR adalah :

a. Sosialisasi dan edukasi lingkungan sehat dan PHBS
b. Pelatihan pengelolaan sampah 3R
c. Rehabilitasi RTLH
d. Pengadaan prasarana dan sarana persampahan
e. Pengembangan sistem proteksi kebakaran
f. Peningkatan kualitas jamban keluarga
g. Pengembangan replikasi Pamsimas
h. Pengembangan RTH tepi jalan

BAB 10
RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

10.1 KALABORASI DAN TATA PERAN ORGANISASI

Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman bersifat multi sektoral dan melibatkan banyak pihak. Dalam upaya penuntasan kumuh dan mewujudkan kota untuk semua diperlukan keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas filantropi, komunitas, organisasi masyarakat, akademisi/perguruan tinggi, maupun lembaga internasional yang memiliki peran penting untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Indikasi pembagian peran antar aktor pembangunan untuk mewujudkan perumahan dan sarana-prasarana dasar perkotaan dalam hal penanganan kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan terhadap permukiman informal;
b. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; dan
c. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh.

Dalam penyelenggaraannya, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dilakukan secara terdesentralisasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pemerintah pusat akan lebih berperan sebagai pembina, pengarah, dan pengatur, agar terus dapat tercipta suasana yang semakin kondusif. Antara Pemerintah dengan pemerintah daerah, juga terdapat pembagian peran dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu (baik sektornya, pembiayaannya, maupun pelakunya) dan dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku.

Selain itu, peran pelaku pembangunan perkotaan juga didorong dengan adanya kemitraan secara vertikal dan horizontal (multi level dan multi aktor)

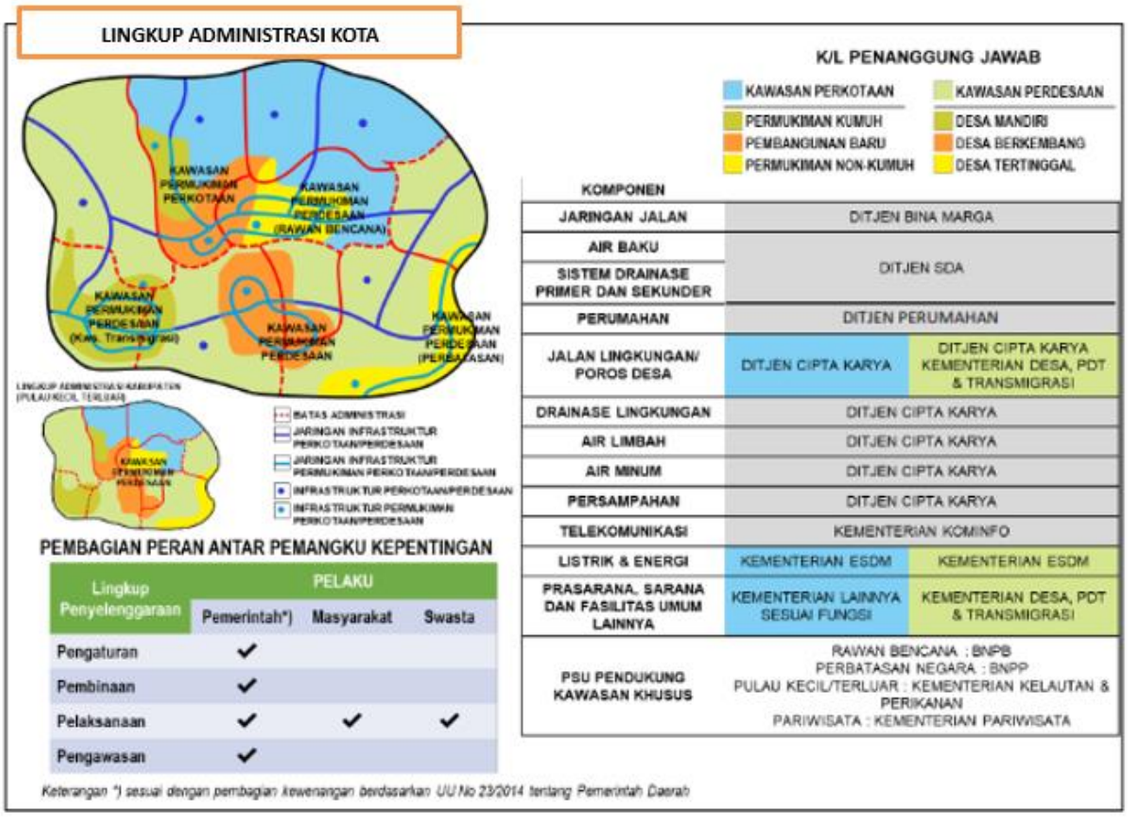
dalam merencanakan, membangun, dan mengelola perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun peran pemangku kepentingan lebih jelasnya dapat di lihat pada table di bawah ini.

Tabel 10.1
Peran Para Pelaku dalam Pembangunan yang Berkelanjutan

Pemangku Kepentingan		Peran
Pemerintah	Pemerintah Pusat	a. Menyusun kebijakan perkotaan nasional b. Mengkoordinasikan pemerintah daerah untuk menangani ermasalahan pembangunan lintas daerah c. Menorong terwujudnya kerja sama multi pihak dan multi level pemerintah
	Pemerintah Provinsi	a. Memperkuat mekanisme kerja sama antar kabuaten/kota b. Bersamam dengan pusat, mendorong terlaksananya kebijakan pekotaan nasional (jika sudah berlandaskan hukum) ditingkat daerah
	Pemerintah Kabupaten/Kota	a. Menjalankan pemerintahan wewenang sesuai dan dengan fungsi yang diamanatkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah b. Mendorong kerjasama dengan badan usaha
Non Pemerintah	Sektor swasta	a. Menggiatkan Cooperate Sosial Responsibility (CSR) dan Corporate Shared Value (CSV) b. Mendorong kerjsama pemerintah dengan badan usaha untu membantu pemenhan kebutuhan pembangunan perkotaan
	Komunitas dan Organisasi Masyarakat	a. Terlibat aktif dalam berbagai forum pembangunan perkotaan b. Mendorong aspirasi masyarakat terkait pembangunan perkotaan
	Media	a. Memantau perkembangan pembangunan kota secara objektif b. Mengadkovasi isu-isu pembangunan perkotaan yang tengah ramai di masyarakat.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 10.1
Peran Antar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman



Dalam pelaksanaan pembangunan, ketiga unsur tersebut memiliki peran tersendiri namun memiliki pula keterkaitan yang erat sehingga unsur-unsur tersebut dapat berjalan secara harmonis, bergerak secara dinamis dan saling mengisi satu sama lainnya. Dalam pelaksanaan pembangunan, ketiga unsur tersebut merupakan pelaku utama pembangunan dan memiliki fungsi/peran seperti diuraikan berikut.

a. Lembaga Pemerintah

Dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman, sesuai amanat UU nomor 1 Tahun 2011, tugas dan wewenang pemerintah daerah diantaranya adalah:

1. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman
2. Menyediakan dan Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.
3. Mengalokasikan dana dan atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan dan MBR.
4. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama MBR.
5. Mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR.

Semua tugas dan wewenang pemerintah diatas, sangat terkait dengan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari PAD, dalam bentuk belanja tak langsung dalam bentuk subsidi, maupun belanja langsung dalam bentuk belanja modal pengadaan lahan dan pembangunan rumah. Secara garis besar beberapa peran dan fungsi pemerintah dalam hal ini, meliputi :

1) Pemerintah Sebagai Stabilisator

   Stabilitas dalam berbagai hal merupakan syarat utama dalam melaksanakan pembangunan, di mana tanpa adanya kondisi yang stabil jangan berharap pembangunan akan berjalan dengan baik. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tanggung jawab pemerintah daerah dalam menciptakan kestabilan ini menjadi sangat besar diantaranya, meliputi:

   a. Stabilitas keamanan, dengan fungsi dan peranan selaku stabilisator pemerintah harus dapat menjamin keamanan bagi warganya.
   b. Stabilitas ekonomi, meskipun stabilitas ekonomi daerah sangat tergantung dari kondisi perekonomian negara pada umumnya, akan tetapi pemerintah daerah harus tetap berupaya menciptakan stabilitas ekonomi pada wilayah kewenangannya.

2) Pemerintah Sebagai Inovator

   Inovasi berarti penemuan baru dalam cara-cara kerja, metode baru, sistem baru dan yang terpenting berfikir baru. Pemerintah harus berupaya mengusahakan mencari sumber-sumber ide baru, terutama yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan diantaranya, meliputi :

   a. Struktur pemerintah, dalam arti bahwa produktivitas aparat pemerintah itu semakin meningkat dan pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik.
   b. Konsepsional, pemerintah dan seluruh aparaturnya harus merupakan sumber ide-ide baru, dimana pemerintah dituntut tidak hanya sebagai pelaksana keputusan yang telah diambil melainkan harus sekaligus merupakan sumber ide, saran, dan pendapat tentang keputusan-keputusan yang kiranya perlu diambil.

3) Pemerintah Sebagai Pelopor

   Kepeloporan pemerintah dalam pembangunan adalah sangat penting, di mana kepeloporan dalam satu bidang akan mempunyai

pengaruh yang positif terhadap bidang lainnya. Pemerintah mempelopori kegiatan-kegiatan di mana modal dan keterampilan swasta masih terbatas sehingga lambat laun pemerintah akan menyerahkan usaha lanjutan dari bidang tersebut kepada pihak swasta.

Kepeloporan yang demikian akan mempunyai pengaruh yang luas pada perluasan kesempatan kerja, perbaikan sistem pendidikan yang ada disesuaikan dengan permintaan terhadap tenaga kerja pada pasaran kerja. Kepeloporan lain yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah adalah kepeloporan objektifitas bertindak sehingga masyarakat akan sangat hati-hati sebelum melakukan tindakan-tindakan yaAng melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku.

4) Pemerintah Sebagai Public Service/Fasilitator
Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai pelayan masyarakat, di mana beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Dalam UU No 1 Tahun 2011, disebutkan bahwa pembinaan penyelenggaraan meliputi perencanaa, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, Kegiatan perencanaan diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemda mempunyai tugas di antaranya mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR. Sementara pemerintah Kabupaten/Kota secara tegas juga mempunyai tugas memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan perumahan.

Pemerintah dan Pemda dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewang diantaranya :

a. Menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman dan criteria rumah, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman;
b. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan Kawasan permukiman;
c. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
d. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;

e. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional;
f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perUUan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dalam bermukim;

Kewajiban lainnya dari Pemerintah adalah memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. Untuk itu Pemerintah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Adapun kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR dapat berupa:

a. Subsidi perolehan rumah;
b. Stimulan rumah swadaya;
c. Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan di bidang perpajakan dan perizinan;
d. Asuransi dan penjaminan;
e. Penyediaan tanah;
f. Sertifikat tanah;dan/atau
g. Prasarana, saran dan utilitas umum

Selain itu, Pemerintah memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rummah swadaya bagi MBR.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemda secara tegas juga disebutkan melibatkan masyarakat atau dengan memafasilitasi masyarakat yaitu :

- Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului program pendataan yang dilakukan oleh Pemda dengan melibatkan peran masyarakat;
- Peremajaan;
- Penetapan lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk permukiman kembali;
- Memfasilitasi pengelolaan yang dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan oleh masyarakat secara swadaya;
- Memberikan pendampingan bagi perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

b. Masyarakat

Community Base Development adalah sekelompok individu manusia yang secara sadar ataupun mengikuti norma-norma dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Masyarakat bukanlah hanya sebagai objek pembangunan saja tetapi lebih dari itu masyarakat mempunyai peran dalam setiap proses pembangunan.

Untuk menangkap keinginan, kebutuhan masyarakat dan keikut sertaannya dalam proses pembangunan tentunya harus dibuat suatu wadah yang mempertemukan antara berbagai keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda tersebut. Dalam wadah pertemuan ini diperlukan anggota masyarakat yang terlatih dan bisa bertindak sebagai fasilitator.

Fasilitator ini dituntut untuk memilah-milah, mana kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang harus didahulukan dan mana yang masih bisa ditangguhkan. Fasilitator ini juga harus dapat bertindak sebagai mediator dan komunikator antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan kebutuhan dan kepentingan pemerintah. Dengan terjadinya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat diharapkan akan tercipta hubungan yang harmonis, dinamis dan saling mengisi satu sama lainnya. Dengan ini tentunya beban pemerintah dalam mengemban tugas sebagai stabilisator, inovator, pelopor dan fasilitator akan menjadi lebih ringan karena dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat.

c. Lembaga Non Pemerintah

Lembaga non pemerintah dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok bagian yaitu lembaga non pemerintah yang profit oriented dan lembaga non pemerintah yang non profit. Lembaga non pemerintah yang profit oriented dalam masyarakat biasanya disebut swasta, sementara lembaga non profit dalam masyarakat biasanya disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kedua lembaga non pemerintah tersebut mempunyai bidang garapan masing-masing dan berguna dalam proses-proses pembangunan.

Dalam hal ini kedua lembaga dapat diberdayakan dengan menjadikannya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Hubungan yang terjalin seperti halnya hubungan pemerintah dan masyarakat harus bersifat harmonis, dinamis dan saling mengisi satu sama lainnya.

Dalam pengambilan sikap terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah, pihak swasta akan berpendirian selama kegiatan tersebut

dapat menguntungkan pihaknya maka mereka akan selalu mendukungnya. Sementara untuk LSM tidak sedikit dari mereka selalu menempatkan dirinya berseberangan dengan pemerintah, terutama jika ada konflik antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat.

Sikap-sikap seperti ini bukanlah merupakan kendala dalam kegiatan pembangunan, sikap seperti ini harus dapat dimanfaatkan pemerintah dalam upayanya melakukan pembangunan. Pada sikap swasta yang selalu mementingkan keuntungan, pemerintah dapat mengupayakan hubungan yang saling menguntungkan malah dapat membantu pemerintah dalam fungsinya sebagai inovator. Dalam sikap LSM yang kadangkala apriori terhadap kegiatan pemerintah juga bukanlah merupakan kendala. Sikap tersebut bisa dijadikan sebagai media kontrol yang dapat menilai kinerja pembangunan.

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat kelembagaan atau organisasi Masyarakat yang disebut juga dengan BKM/LKM, merupakan kepemimpinan kolektif dari organisasi masyarakat warga suatu kelurahan yang anggota - anggotanya dipilih berdasarkan kriteria kemanusiaan, sehingga berperan secara penuh sebagai pemimpin masyarakat warga. Kolektifitas kepemimpinan ini penting dalam rangka memperkuat kemampuan individu untk dapat menghasilkan dan mengambil keputusan yang lebih adil dan bijaksana oleh sebab terjadinya proses saling asuh, saling asah dan saling asih antar anggota kepemimpinan yang pada akhirnya akan menjamin terjadinya demokrasi, tanggung gugat, dan transparansi. Dengan demikian BKM/LKM merupakan alternative pilihan bagi warga masyarakat. sebagai lembaga yang menjadi motor penggerak dalam penanggulangan kemiskinan seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karenanya BEM/LKM sebagai dewan pimpinan kolektif adalah milik seluruh penduduk kelurahan/desa yang bersangkutan. Di Kabupaten Dharmasraya terdapat 22 BKM yang sudah terbentuk, dimana 1 BKM melayani 1 kelurahan/desa.

Secara khusus, bentuk kelembagaan terkait penanganan perumahan dan permukiman di Kabupaten Dharmasraya tergantung pada organisasi yang dikembangkan. Walaupun demikian, kelembagaan yang mengatur bidang perumahan dan permukiman ini setidaknya mengatur:

- Perencanaan: yaitu lembaga yang menyangkut perencanaan dan pengembangan perumahan dan permukiman. Lembaga yang terlibat adalah Bappeda, Dinas Perumahan, Dinas PU Ciptakarya.
- Perijinan: yaitu lembaga yang berwenang memberikan ijin dalam

pengembangan dan pembangunan perumahan dan permukiman. Lembaga yang terlibat dalam hal ini adalah Dinas Tata Kota, Dinas Tata Ruang.

- Pelaksanaan pembangunan: yaitu lembaga yang terlibat dalam pembangunan kawasan perumahan dan permukiman serta prasarana pendukungnya. Lembaga yang terlibat adalah Dinas PU.
- Pengawasan dan pengendalian: yaitu lembaga yang terlibat dalam mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan perumahan dan permukiman. Lembaga yang terlibat adalah Dinas Tata Kota, Dinas PU Ciptakarya, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.

Untuk mendukung kelancaran Peningkatan pengembangan dan pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Dharmasraya, diperlukan kerja sama di antara seluruh pihak yang berkepentingan dalam bidang ini. Setidaknya terdapat empat pihak yang saling terkait, yaitu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, bank, developer, dan masyarakat.

Pembagian urusan di antara keempat pihak ini adalah sebagai berikut:

a) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Mendukung pengembangan perumahan dan permukiman, contohnya menyediakan peraturan pembangunan perumahan dan permukiman yang dapat sebagai acuan oleh berbagai pihak (RP2KPKPK) dan peraturan terkait lainnya; menyediakan PSD & PSU perumahan dan permukiman, memudahkan perijinan, dan sebagainya.

b) Bank

Menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pengembangan perumahan dan permukiman berupa pemberian fasilitas kredit meliputi kredit konstruksi, pengadaan lahan, dan KPR.

c) Developer

Mengembangkan dan membangun kawasan perumahan, mencakup pembebasan lahan, mengurus perijinan, perencanaan tapak, pembangunan, pendanaan, dan marketing.

d) Masyarakat

Bisa berpartisipasi dalam dua hal, yaitu sebagai pengembang perumahan dan permukiman secara swadaya dan juga sebagai konsumen bagi penyediaan perumahan dan permukiman.

Secara diagramatis, hubungan kerja sama antar berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Dharmasraya dan tabel **Pembagian Urusan**

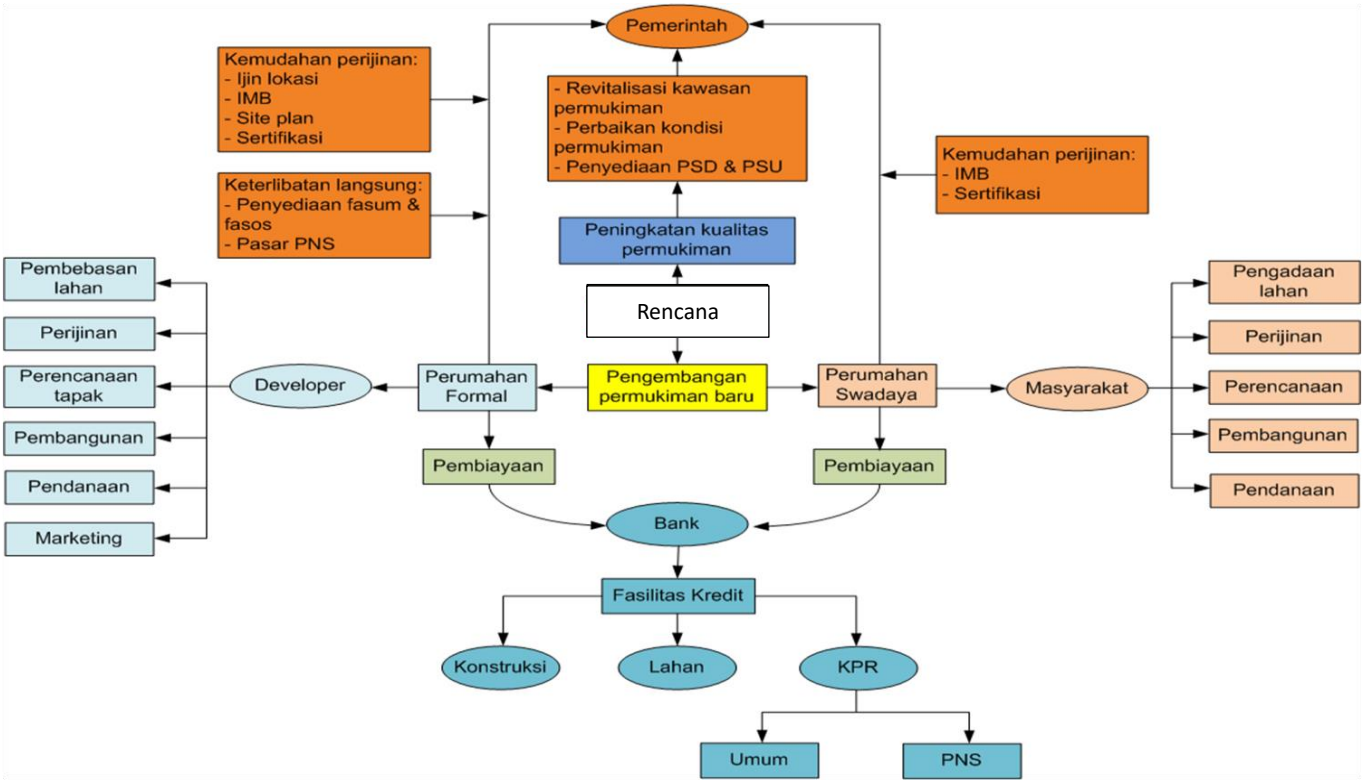
Pemerintah Terkait Penanganan Permukiman Kumuh berdasarkan lampiran UU No.23 /2014 adalah sebagai berikut

10.2 MENINGKATKAN PERAN DAN FUNGSI POKJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP)

Peran dan fungsi pokja dalam pengembangan kawasan permukiman sangat dibutuhkan sebagia bentuk kerjasama yang akan bersifat dinamis dalam pengentasan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Dharmasraya, seperti telah dijelaskan dalam UU no.23 Tahun 2014.

Dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah termasuk dalam urusan pemerintah wajib pelayanan dasar, memberikan konsekuensi adanya keharusan pada setiap tingkatan pemerintah untuk menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman (PKP), Pemerintah pusat maupun daerah perlu menyelenggarakan PKP karena dapat mendukung penataan dan pengembangan wilayah, menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau.

Gambar 10.2
Hubungan Kerja Sama Antar Berbagai Pihak Yang Terlibat Dalam Pengembangan Dan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman



Tabel 10. 2
Pembagian Urusan Pemerintah Terkait Penanganan Permukiman Kumuh

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota
1.	Kawasan Permukian	a. Penetapan sistem kawasan permukiman b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 Ha atau lebih.	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 Ha	a. Penerbitan pemabngunan dan pengembangan kawasan permukiman b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10Ha
2.	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	---	---	Pencegahan perumahan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota
3.	Pemerintah	a. Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis nasional	Peyelenggaraaan permukiman kawasan strategis daerah provinsi.	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah Kabupaten/kota

Sumber : Lampiran UU No.23/2014

Pemerintah dalam penyelenggaraan PKP berorientasi pada pemenuhan akses masyarakat terhadap layanan bidang PKP, yang tercermin pada aktivitas perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Pemerintah menetukan target capaian yang akan dipenuhi di wilayah kerjanya, dan dalam hal ini pemerintah menyususn strategi pemenuhan dengan melibatkan berbagai sektor atau para pemangku kepentingan yang ada. Pemerintah juga menyusun sejumlah kebijakan dan aturan untuk memayungi atau menjadi penduan dalam implementasi program/kegiatan yang telah disusun dan juga untuk mendorong optimalisasi peran dari para aktor atau para pelaku pemabngunan ikut terlibat dalam pembangunan bidang PKP (pemerintah sebagai *enabler).* Pemerintah juga menjadi provider dalam pemenuhan akses layanan bidang PKP tetapi melihat bahwa anggaran pemerintah terabatas, maka peran pemerintah sebagai fasilitator (*enable)* sangat penting agar pihak non-pemerintah dapat perperan aktif memberikan kontribusi nyata dalam penyediaan layanan bidang PKP bagi masyarakat. Pemerintah pun melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kuantitas dan kualitas layanan yang dihasilkan.

Urusan PKP yang bersifat kompleks dan multi sektoral, tidak dapat ditangani sendiri oelh pemerintah saja, namun senatiasa memerlukan peran serta/keterlibatan dari sektor non pemerintah, yati masyarakat dan swasta/badan usaha. Penyelnggaraan urusan PKP di tingkat pemerintah pusat dilaksanakan oleh Kementrian Pekejaan Umum.

Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan permukiman (Pokja PKP) adalah kelompok Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk oleh Pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi urusan perumahan dan kawasan permukiman. Perlunya POKJA PKP di daerah antara lain :

1. Perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan yang komples, multisektor dan multiaktor (pemangku kepentingan)
2. Terdapat gap atau perbedaan pemahan dan pengetahuan dari para pelaku serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PKP
3. Koordinasi dan snkronisasi antar sektor dalam penyelnggaraan PKP masih belum optimal
4. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelnggaraan PKP masih lemah.
5. Pengarusutamaan sektor PKP dalam dokumen pembangunan daerah masih belum sanngat minim.
6. Kualitas dokumen perencanaan terkait PKP kurang komprehensif dan kurang sinkron antara satu dengan yang lainnya (Masih sangat sektoral)
7. (terkadang) Terjadi tumpang tindih atau justru kekosongan (Idle) program/kegiatan dalam penanganan kebutuhan penyediaan layanan bidang PKP.

Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Pokja PKP berfungsi dalam mengawal proses penyelenggaraan PKP, mulai dari perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, hingga pengendalian. Pokja PKP sangat memegang peran penting pada setiap tahapan tersebut dan beberapa hal dapat dilakukan oleh Pokja PKP, antara lain :

1. Melaksanakan sinronisasi dan koordinasi pada setiap tahapan dan memastikan terjadinya sinergi program/kegiatan dan keterpaduan pembangunan antar sektor dalam penyelenggaraan PKP.
2. Mengutamakan sektor PKP dalam penyusunan atau perumusan agenda dan dokumen pembangunan, Pokja PKP harus dapat mengawal dan memastikan bahwa program /kegiatan sektor terakomodir dalam dokumen pembangunan, baik jaNgka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun jangka menengah berupa RPJM dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten. Hal ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan PKP mendapat dukungan atau alokasi pembiayaan yang sesuai.

3. Memberikan informasi untuk pengkinian data PKP, serta mengawal dan memastikan ketersediaan data PKP yang komprehensif, terkini dan berkelanjutan.
4. Mengawal dan memberikan masukan dalam kegiatan penyusunan/review kebijakan dan program bidang PKP.
5. Mengawal dan memberikan masukan dalam kegiatan penyusunan/review dokumen terkait bidang PKP.
6. Mengawal dan memastikan pelaksanaan upaya pencapaian SPM bidang Perumahan dan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Mengawal dan kegiatan pengawasan dan pemngendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan penyediaan layanan bidang PKP.

Anggota Pokja PKP adalah OPD di Kabupaten Dharmasraya yang membidangi PKP, serta yang berhubungan langsung dengan bidang PKP sebaiknya meliputi :

- Perencanaan;
- Pekerjaan umum dan penataan ruang
- Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- Pertanahan;
- Lingkungan hidup.

OPD lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan bidang PKP, atau OPD yang program dan kegiatannya ada yang bersinggungan dengan program/kegiatan PKP, atau OPD laian yang menunjang pnguatan karakteristik daerah dapat dilibatkan sebagai bagian dari anggota Pokja PKP dengan berdasarkan kesepakatan bersama anggota inti tersebut di atas dalam diskusi/rapat pembentukan Pokja PKP.

Penanganan kawasan kumuh merupakan bagian dari salah satu tugas Pokja PKP yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Dengan adanya Pokja PKP semua persoalan dan rencana penanganan dibahas di Pokja PKP. Manfaat adanya Pokja PKP yang terkoordinasi dan lebih terarah antara lain :

1. Daerah memiliki rencana PKP yang disepakati dan masing-masing dinas perangkat daerah memahami arah dan kebijakan pembangunan PKP.
2. Program dan kegiatan terkait dengan perumahan yang di masing masing dinas akan selara dengan rencana PKP yang disepakati.
3. Berkurangnya potensi tumpang tindihnya program perumahan dan Kawasan permukiman diantara dinas terkait.
4. Terjadinya efisiensi dan efektivitas kegiatan pembangunan bidang PKP.

Penyelenggaraan PKP dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran Masyarakat dilakukan dengan membentuk forum

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (UU 1/2011 pasal 131 ayat 1 & 3) Lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan kawasan permukiman merupakan kelompok kerja pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (PP No. 14/2016 Pasal 54 ayat (3). Adapun tugas dan fungsi Forum PKP antara lain :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
   - Pengumpulkan;
   - Pengelompokan;
   - Penyaringan;
   - Pengkajian;
   - Penyusunan; dan
   - Penyaluran
2. Membahas dan merumuskan arah pemikiran penyelenggaraan PKP
   - Memahami agenda pembangunan pada tingkat nasional, provinsi, Kabupaten Dharmasraya
   - Memahami rencana pengembangan PKP pada tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten Dharmasraya
   - Merumuskan agenda pembangunan dan rencana pembangunan PKP pada tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten Dharmasraya
   - Menyimpulkan arah penyelenggaraan PKP pada tingkat kabupaten oleh forum PKP Kabupaten Dharmasraya.
3. Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat
   Peningkatan peran dan pengawasan masyarakat dilakukan dengan sosialisasi terhadap masyarakat.
4. Memberikan masukan ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah

   Forum PKP memberikan masukan kepada pemerintah pusat ataua pemerintah daerah dengan menyerahkan masukan yang telah dikaji oleh forum PKP kepada Pokja PKP
5. Melakukan peran arbitrase dan mediasi
   Forum PKP melaksanakan peran arbitrase dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang PKP di luar pengadilan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota Forum PKP pada dasarnya terdiri dari anggota Pokja PKP ditambah dengan mitra Pokja PKP. Mitra PKP adalah unsur-unsur di luar K/L atau OPD yang diharapkan dapat bersinergi dengan eksistensi Pokja PKP. Mitra Pokja PKP berbeda-beda antar satu daerah dengan daearh yang lain karena sesuai

dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Institusi/lembaga yang dapat menjadi mitra forum PKP antara lain :

1. Lembaga legislatif
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (MUMD), antaranya:
    - PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)
    - PT. Telekomunikasi Indonesi (Telkom)
    - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
    - Dsb
3. Asosiasi Pengembangan, diantaranya:
    - Real estate Indonesia (REI)
    - Assosiasi Pengembangan Perumahan Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERA)
    - Dsb
4. Assosiasi Profesi, diantaranya:
    - Ikatan Ahli Perencanaan (IAP)
    - Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)
    - Dsb
5. Lembaga Keuangan Bank dan Non bank
6. Akademisi dan praktisi
7. Lembaga Swadaya Masyarakat
8. Badan Usaha/Swasta

BAB 11
PENUTUP

Dokumen ini menjadi pedoman bagi setiap pihak di Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh agar selaras dengan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dharmasraya. Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang disusun dengan jangka waktu 5 tahun (2025-2029). Rencana ini menjadi dasar dan arah Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman, terutama dalam penyelesaian Kawasan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama dalam penataan dan penanganan kawasan kumuh.

Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berdurasi 5 (lima) tahun ini dapat membawa manfaat secara berkelanjutan, jika menjadi bagian yang utuh dalam rencana pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman dalam jangka panjang untuk Kabupaten Dharmasraya. Adanya kesinambungan antar tahapan menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan kualitas lingkungan dan masyarakat, sehingga evaluasi periodik capaian setiap tahap sangat diperlukan.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI